



PUTUSAN
Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muddai Madang.
Tempat lahir : Baturaja.
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 14 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kemang Selatan XII No.1 RT.005
RW.001 Komp. Bangun Cipta Sarana
Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan
Cilandak Kota Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT.DKLN.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing dengan berdasarkan surat penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 09 Februari 2022.
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 24 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 25 April 2022.
9. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 25 Mei 2022.
10. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 24 Juni 2022.
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Kurnia Junaidi, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., M. Sakri Tawangsalaka, S.H., Arief Darussalam, S.H., Marsya Fitriani, S.H., Radya Ayu Hapsari, S.H., Para Advokat yang beralamat di Kantor Revenue Tower Lantai 26 unit 26-106 SCBD Jalan Jendral Sudirman No.52-53 Rt.5 Rw.3 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tersebut.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PID.TPK/2022/PT PLG tanggal 11 Juli 2022, tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.TPK/2022/PT PLG, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang.
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Juni 2022 dalam perkara tersebut diatas.

Halaman 2 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS – 20/L.6.14/Ft.1/12/2022 & No. Reg. Perk : PDS – 16/L.6.14/Ft.1/12/2022 tanggal 03 Februari 2022 (Penggabungan Perkara berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP), sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. Dika Karya Lintas Nusa (selanjutnya disebut PT DKLN) periode 15 Februari 2008 s/d 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No. 13 tanggal 15 Februari 2008. Komisaris Utama PT. DKLN periode 14 Oktober 2009 s/d 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No.13 tanggal 14 Oktober 2009. Direktur Utama PT. DKLN sejak tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No. 20 tanggal 20 Desember 2013. Komisaris Utama PT. PDPDE Gas sejak tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No.10 tanggal 21 Desember 2009. Direktur Utama PT. PDPDE Gas sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 12, tanggal 11 April 2016. telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Caca Ica Saleh Sadikin selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel Periode 2008 sampai dengan Periode 2014 dan Direktur Utama PT PDPDE Gas periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Ahmad Yaniarsyah Hasan Direktur PT PDPDE Gas periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bersama-sama Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan Periode 2008 sampai 2013 dan Periode 2013 sampai dengan 2018 (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dalam periode waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Jln. Kapt. A rivai No. 56, Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07, Jl. Natuna No. 05 Palembang, Hotel Swarna Dwipa LT. 2, Jl. Tasik No. 2) Kota Palembang Sumatera Selatan dan atau di Kantor PT PDPDE Gas (Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No.07-08, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan

Halaman 3 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat, di Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, secara melawan hukum bahwa ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan Periode Pertama tahun 2008 s/d tahun 2013 dan Periode Kedua tahun 2013 s/d 2018 bersepakat dengan CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body (JOB) PT. Pertamina Hulu Energi - Talisman Ltd - Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang (selanjutnya disebut JOB Jambi Merang) yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG yang pada akhirnya menggunakan perusahaan Join Venture antara PDPDE Sumsel dengan DKLN yaitu PDPDE Gas dengan tahapan sebagai berikut:

1. PT. DKLN merupakan perusahaan swasta milik TERDAKWA MUDDAI MADANG yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang, kemudian CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum ada izin prinsip dari Gubernur Sumsel.
2. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan izin prinsip kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 16 Desember 2009 untuk membentuk PT. PDPDE Gas, tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa

Halaman 4 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan menyetujui penentuan jumlah saham pada PT. PDPDE Gas sebesar 15% untuk PDPDE Sumsel dan sebesar 85% untuk PT. DKLN tanpa perhitungan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, persetujuan tersebut sesuai dengan arahan dari TERDAKWA MUDDAI MADANG kepada CACA ISA SALEH SADIKIN.
4. Setelah izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN menandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama Patungan antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) pada tanggal 17 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT PDPDE Gas, dengan isi perjanjian yang berbeda dengan Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan antara lain yaitu atas kesepakatan CACA ISA SALEH SADIKIN dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG maka pendanaan pembentukan perusahaan baru tersebut yang awalnya akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN menjadi akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kepemilikan saham.
5. TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal 85% kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010.
6. CACA ISA SALEH SADIKIN mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel untuk dialihkan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. PDPDE Gas secara tidak sah dengan memperoleh fee hanya sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) *per Million British Thermal Units (MMBTU)* tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
7. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai

Halaman 5 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.

8. TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan Hutang PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.
9. CACA ISA SALEH SADIKIN dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyepakati pembentukan PT. Permata Musi Kreasi sebagai perusahaan patungan PDPDE Sumsel dan PT. DKNL, sehingga PDPDE Sumsel telah menyeter saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada PT. DKLN yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Selain itu seolah-olah sebagai pembayaran hutang juga dilakukan melalui mekanisme pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*), sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar*



dua puluh lima juta rupiah) padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

10. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 tanggal 13 Desember 2017 telah memberikan persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, **padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan** karena berdasarkan surat permohonan izin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.
11. CACA ISA SALEH SADIKIN menandatangani perjanjian pemberian fee gas kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama dan kepada FIRDAUS NUR melalui CV. Energi Lestari, atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.
12. TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi dan IVO WONGKAREN melalui PT. Mulya Tara Mandiri
13. AHMAD YANIARSYAH HASAN menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah kepada CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama, kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil dan kepada INDRA (Pegawai PT. PHE Talisman Jambi Merang) melalui PT. Nutech Dinamika Semesta.
14. TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat



sebagai hutang oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, yaitu:

- CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan rincian:
 - melalui PT. Lintas Nusa Investama menerima sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).
 - melalui PT. Musi Prima Transportasi menerima sebesar Rp958.855.639,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
 - melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
 - melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hanya menyeter kas sebesar Rp2.640.006.186,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.

- AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*).

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 69 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 114.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 28 huruf a dan d.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 76 ayat (1) huruf a, d dan e. Pasal 331 ayat (4) huruf c.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, pada Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 11.
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor: KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a.

Halaman 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (1) huruf e dan Pasal 15 ayat (2).
7. *Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between* PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasicif Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel JOB Ref No: Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010, pada Angka 24 huruf b dan Angka 18 huruf d.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, diantaranya yaitu memperkaya TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN, AHMAD YANIARSYAH HASAN, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD30.258.202,79 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasicif Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di *onshore* dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki *Estimated Ultimate Recovery (EUR)* sebesar 190 MMBOE (*Million Barel*



of Oil Equivalent). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (*Liquified Natural Gas*) setiap harinya.

- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.
- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.
- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:



- (1) Tahun 2008 s.d. 2012:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Nono Suratno (Direktur Operasi).
 - Iwan Rosidi (Manajer Umum dan Keuangan).
 - (2) Tahun 2012 s.d. 2014:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Nasir Alamiah (Direktur Operasi).
 - (3) Tahun 2015 s.d. 2018:
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Utama).
 - Syamsu Rizal Usman (Direktur).
 - Iramsyah (Manager Umum dan Operasi).
 - Iwan Rosidi (Manajer Pengembangan).
 - (4) Tahun 2018 s.d. 2019:
 - Arief Kadarsyah (Direktur Utama).
 - Samsu Rizal Usman (Direktur Operasional).
 - Iramsyah (Manager Operasi dan Pengawasan).
 - Primayanti (Manager Keuangan dan Umum).
 - Iwan Rosidi (Manager Pengembangan Usaha).
- Pada tahun 2019, PDPDE Sumsel berganti nama menjadi PT. Sumber Energi Gemilang (PT. SEG) berdasarkan Akta Notaris Thamrin Nomor: 14 Tanggal 15 Juli 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0038386.AH.01.01.Tahun 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.
- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya. Dalam Akta Pendiriannya PT. DKLN memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.

Adapun susunan pengurus PT. DKLN adalah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007:
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris).
 - Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
 - Ratna Julita (Direktur).
 - M. Iwan Hermanto (Direktur).
- (2) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2008:
 - Ratna Julita (Komisaris).



- Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur).
 - M. Iwan Hermanto (Direktur).
- (3) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 14 Oktober 2009:
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
 - Ratika Sari (Komisaris).
 - Said August Putra (Direktur Utama).
 - Ratna Julita (Direktur).
 - A. Yaniarsyah Hasan (Direktur).
- (4) Berdasarkan Akta Nomor 20 Tanggal 20 Desember 2013:
- Ratna Julita (Komisaris).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
 - Ratika Sari (Direktur).
- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.

Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

- (1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012:
- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
 - Haji Nono Suratno (Komisaris).
- (2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni
Tanggal 18 Februari 2013.

(3) Maret 2014 s.d. Februari 2015 :

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Muhar Lakoni (Komisaris).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris).

(4) Februari 2015 s.d. September 2015:

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(5) September 2015 s.d. April 2016 :

- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
- Caca Isa Saleh (Direktur Pengembangan Usaha).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(6) April 2016 s.d. Juni 2017:

- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

Halaman 14 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah pada tanggal 23 Januari 2017.
 - Bawai Madang (Komisaris).
- (7) Juni 2017 s.d. Mei 2019 :
- Muddai Madafng (Direktur Utama).
 - Yasser Arafat (Direktur).
 - Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
 - IGB Surya Negara (Komisaris).
 - Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan pada tanggal 3 April 2018.
 - Bawai Madang (Komisaris).
- (8) Mei 2019 s.d. April 2021 :
- Yasser Arafat (Direktur Utama).
 - Windu Margono (Direktur).
 - Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
 - Syamsu Sugianto (Komisaris) digantikan oleh H.M Zulkarnain pada tanggal 5 Februari 2020.
- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN pada tahun 2009 memberitahukan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena TERDAKWA MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga TERDAKWA MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 CACA ISA SALEH SADIKIN bersama ROBERT HERI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin) menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada CACA ISA



SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa *"Gas Jambi Merang buat Pak Muddai"*, tetapi CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab *"saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais"* (Direktur PT. Odira Energy Persada). Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menemui ALEX NOERDIN. Setelah itu CACA ISA SALEH SADIKIN menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN *"Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?"*, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa *"Gas Jambi Merang buat Muddai"*.

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat *"Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas"* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.
- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat *"Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang"*, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor:



541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya menyampaikan:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan gas pada beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Oktober 2009 telah melakukan pertemuan dengan JOB Pertamina - Hess mengenai adanya suplay gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
 - 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pertemuan dengan BPMIGAS pada tanggal 9 Oktober 2009 yang menyepakati adanya alokasi gas dari lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
- Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.
 - Pada tanggal 2 Desember 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Direktur Utama PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Join Venture Aggrement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor: 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009, yang pada pokoknya menyepakati :
 - a. Para pihak setuju untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas.
 - b. PDPDE Sumsel akan bertanggungjawab terhadap perolehan gas dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pacific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd.
 - c. PT DKLN akan bertanggungjawab terhadap pemasaran dan pembiayaan terhadap perjanjian ini sampai gas dapat dijual.
 - d. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham PDPDE Sumsel ditentukan sebesar 15% dan PT. DKLN 85 %.
 - e. Fee tetap yang akan diberikan kepada PDPDE Sumsel sesuai dengan harga beli dan jual gas yang akan diatur dalam perjanjian pemegang saham.
 - f. Terkait pendanaan modal, akan diperoleh melalui setoran modal PDPDE Sumsel dan PT DKLN **dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan atau investor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut dibuat meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang. Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari TERDAKWA MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung TERDAKWA MUDDAI MADANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumatera Selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor: 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah

Halaman 18 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.

- Bahwa begitu juga dengan permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor: 360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut diantaranya menyebutkan bahwa *"Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)"*, selain itu juga menyebutkan bahwa *"fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen"*.
- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (**biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN**) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 yang telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka CACA ISA SALEH SADIKIN sepakat dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG untuk menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut tertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel yakni:

- (1) Para Pihak sepakat menanggung bersama seluruh beban biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai kegiatan kerja para pihak di dalam perjanjian ini sesuai dengan kepemilikan saham tersebut pada pasal 5 di atas.



- (2) Para Pihak sepakat bahwa pendanaan proyek oleh perusahaan patungan akan diperoleh melalui setoran modal Para Pihak dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan/investor.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan **tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh** sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya PT. DKLN **tidak pernah melakukan penyeteroran modal** dimaksud.
 - Bahwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.
 - Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.



- Bahwa atas permintaan ALEX NOERDIN tersebut, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa *"Penunjukan Langsung"* tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas antara lain :
 - 1) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Swarna Dipa membentuk PT. PDPDE Konsultan sesuai Akta (Pendirian) Notaris Henry Jeanne Pattinama, S.H, Palembang Nomor 06 Tanggal 23 November 2005 yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan



energy dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Swarna Dipa.

- 2) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Prodexim membentuk PT. PDPDE Hilir sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 34 pada tanggal 19 Januari 2007 yang bergerak dibidang niaga BBM dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Prodexim.
 - 3) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PT Radikatama Piranti membentuk PT Pirantinus Energi Persada (PT PEP) sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 218 pada tanggal 19 Mei 2009 yang bergerak dibidang pengisian LPG 3 Kg dengan kepemilikan saham 60% untuk PDPDE Sumsel dan 40% untuk PT. Radikatama Piranti.
- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKNL tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari PDPDE Sumsel beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKLN untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas, karena kenyataannya sebagai berikut:
 - Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan, sehingga TERDAKWA MUDDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.

- Selain itu, TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan hutang kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*) Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.
- Dana untuk pembangunan infrastruktur dan modal kerja bukan berasal dari PT. DKLN, tetapi diperoleh dari fasilitas pembiayaan kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri atas beban PT. PDPDE Gas dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur pipa sebesar USD12.640.000,00 (*dua belas juta enam ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat*), untuk modal kerja sebesar USD1.000.000 (*satu juta dollar amerika serikat*) dan sebagai jaminan SBLC sebesar USD4.000.000,00 (*empat juta dollar amerika serikat*).
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh *fee* hanya sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per *Million British Thermal Units* (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
- Berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010

Halaman 23 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh CACA ICA SALEH SADIKIN dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas, pada pokoknya berisikan:

- 1) PDPDE Sumsel akan menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas yang diterima dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas, dengan jumlah supply gas sebesar 15 MMSCFD.
- 2) PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas yang tidak dapat dicabut Kembali dan oleh karena itu tanpa bantuan PDPDE Sumsel lagi untuk menjalankan tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas milik PDPDE Sumsel dan tidak terbatas pada kegiatan menjual, mengelola, mendistribusikan gas kepada pihak lain, termasuk menandatangani dokumen dan perjanjian dengan pihak lain.
- 3) PDPDE Sumsel akan memperoleh imbalan dari penyerahan hak sebesar USD0,10 Per MMBTU ditambah dengan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan negosiasi dengan pihak JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang sebagai penjual gas kepada PDPDE Sumsel dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) sebagai transporter melalui koordinasi dan persetujuan PT. PDPDE Gas.
- 5) PT. PDPDE Gas akan melakukan pembayaran atas kewajiban PDPDE Sumsel kepada JOB Pertamina-Talisman.
- 6) PT. PDPDE Gas akan membayar Toll Fee kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk biaya penyaluran gas melalui pipa PT. TGI ke pihak konsumen.
- 7) Perhitungan fee kepada PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Harga (USD per MMBTU)
a.		
1.	Harga Jual	8,50
	Total (a)	8,50
b.		
1.	Harga Beli	5,40
2.	Pembayaran Toll Fee PT. MEB dan OM	1,15
3.	Toll Fee PT. TGI	1,00
4.	Operation Cost	0,30
	Total (b)	7,85
	Profit (Total a – Total b)	0,65

Halaman 24 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



	Fee PDPDE (15% x profit)	0,0975
		Dibulatkan menjadi 0,10

- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG dan tidak melalui pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran *toll fee* kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB, selain itu juga terdapat beban biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07- HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang antara lain menyepakati sebagai berikut:
 - Periode pemasokan gas akan dimulai pada 1 Maret 2011 (perkiraan fasilitas telah tersedia) sampai dengan tanggal 9 Februari 2019.
 - Harga gas yang disepakati adalah setara dengan USD5,40 (*lima koma empat puluh dollar amerika serikat*) per MMBTU dengan kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya.
 - Para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya kecuali dalam hal:
 - a) Penjual dapat, tanpa persetujuan pembeli, mengalihkan secara keseluruhan keseluruhan atau sebagian dari interestnya berdasarkan HoA ini kepada pihak penerima pengalihan yang mengambil alih seluruh atau sebagian dari interestnya dalam KKS Jambi Merang.
 - b) Para pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA tetap menjadi tanggungjawab para pihak.
 - Definisi “afiliasi” berdasarkan HoA tersebut yaitu “*terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk*



suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum suatu pihak. Untuk definisi ini, penguasaan berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut”.

- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel, Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11- PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010.
- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan:
 1. PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.
 2. PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual: 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli: 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref: Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref: 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.
- Pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai



Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.

- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 memberikan persetujuan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelumnya, CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 23 April 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel setelah menandatangani Perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Tanggal mulai perkiraan adalah 1 April 2011 dan berakhir tanggal 9 Februari 2019 atau tanggal dimana PT. PDPDE Gas telah menyerahkan ke PT. LPPPI sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
 - b) PT. PDPDE Gas berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang + 52 Km dengan seluruh biaya ditanggung oleh PT. PDPDE Gas.
 - c) Jumlah kontrak harian 8 BBTU per hari untuk tahun kontrak pertama, 11 BBTU per hari sejak tahun kedua, ketiga, sampai dengan berakhirnya periode pemasokan.
 - d) Harga gas adalah setara dengan USD7,80 per MMBTU ditambah toll fee sesuai dengan tagih PT. TGI. Harga kontrak akan naik sebesar 2,5% per tahun terhitung sejak kontrak tahun kedua.
- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.
 - Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 Juli 2011 dan berakhir 9 Februari 2019 atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan seluruh volume gas dalam kontrak.
 - b) Jumlah kontrak harian untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.

Halaman 28 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Jika sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan dua tahun terakhir sebelum masa kontrak berakhir, pembeli gagal mengambil jatah kontrak harian minimum untuk hari tersebut, pembeli harus membayar kepada penjual suatu jumlah yang setara 10% dari harga kontrak yang dikalikan dengan selisih antara jatah kontrak minimum dan jumlah gas yang diambil oleh pembeli pada hari tersebut.
- d) Harga kontrak adalah setara USD5,40 per MMBTU dan mengalami kenaikan/eskalasi 3% per tahun.

- Bahwa jumlah pembelian gas bumi dari JOB Jambi Merang oleh PDPDE Sumsel pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)	Undertake (USD)	Gas Escees (USD)	Total (USD)	Nilai Invoice Sesuai Novasi (USD)	Selisih (USD)	Dibayar PDPDE (USD)	Lebih Kurang (USD)
2011	530.100,50	5,40	2.862.542,70	-	-	-	-	-	-	-
2012	3.177.697,39	5,47	17.397.311,63	-	-	-	-	-	-	-
2013	3.613.697,08	5,64	20.398.995,92	9.717,88	-	20.408.713,77	-	-	-	-
2014	3.531.987,50	5,90	20.838.726,52	-	-	-	-	-	-	-
2015	3.004.573,30	6,12	18.386.505,75	-	-	-	-	-	-	-
2016	3.150.574,00	6,26	19.722.593,24	-	-	-	-	-	-	-
2017	2.811.008,70	6,50	18.259.383,16	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.312.885,39	6,64	8.717.558,99	56.218,09	-101.896,84	8.671.880,24	7.460.778,81	1.211.101,43	7.401.560,99	-59.217,82

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Perkiraan tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 April 2011 dan berakhir pada 9 Februari 2019 tanggal dimana PDPDE Sumsel telah menyerahkan ke PT. PDPDE Gas sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
- b) PDPDE Sumsel sepakat untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel dan akan selesai sebelum atau pada tanggal mulai gas.
- Bahwa yang melakukan jual beli gas bumi adalah PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI sesuai PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010, namun CACA ISA SALEH SADIKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN dan TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja membebani pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010.

- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli: 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN. Amandemen tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Jumlah kontrak harian pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk setiap hari pada dan sejak dimulainya tahun kontrak pertama dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
 - b) Harga seluruh gas USD5,5 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagihan PT. TGI dan akan naik dengan tingkat sebesar 3% per tahun terhitung dimulai sejak tahun kontrak kedua sampai periode pemasokan gas.
- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013, Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Paling lambat tanggal mulai gas adalah 1 November 2013.
 - b) Periode pemasokan gas sampai dengan tanggal berakhirnya KKS Blok Jambi Merang (9 Februari 2019) atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan ke pembeli sejumlah gas yang sama dengan total jumlah kontrak atau setara dengan 9.250 BBTU.
 - c) Jumlah Kotrak Harian (JKH) pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas adalah setara dengan 5 BBTU untuk setiap hari.
 - d) Terhitung sejak tanggal mulai gas, pembeli harus membayar kepada penjual untuk jumlah gas yang diserahkan adalah USD6,30 per MMBTU dengan eskalasi sebesar 3% di titik penyerahan untuk setiap tahun.
 - e) Salah satu pihak tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali pengalihan kepada afiliasinya yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tersebut.
- Selain Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. PLN (Persero) tersebut, PDPDE Sumsel juga melakukan perjanjian dengan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk pengangkutan gas menuju lokasi penerimaan gas PT. PLN (Persero) dengan harga USD0,74 per MMBTU. Sedangkan pada saat penghitungan fee dari PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak tanggal 23 April 2010, PDPDE Sumsel dikenakan biaya toll fee kepada PT. TGI sebesar USD1,00 meskipun kenyataannya biaya toll fee kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.
 - Bahwa terhadap penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk penyerahan gas kepada PT. LPPPI, telah dilakukan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai titik penyerahan sepanjang 52 KM, sesuai dengan komitmen penyerahan gas oleh PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan PT. LPPPI untuk kebutuhan industri di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS- LPPPI/JBG/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
 - 2) Untuk penyerahan gas kepada PT. PLN (Persero), adalah sesuai lampiran F Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PLN (Persero)



Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yakni di Simpang Bayat Bayung Lincir – Muba Sumatera Selatan.

- 3) PT. PDPDE Gas telah mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyaluran gas untuk pembangunan pipa gas sepanjang 54 Km dalam rangka menghubungkan pipa induk milik PT. TGI ke konsumen dan pembangunan 2 stasiun metering gas. Pemenuhan pembiayaan untuk investasi tersebut 70% dengan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri dan 30% melalui peningkatan modal dasar dan modal disetor perusahaan. Harga perolehan pipa secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah senilai USD20.980.546.000,00 (*dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu dollar amerika serikat*).
- 4) Skema pembayaran atas penjualan gas oleh PT. PDPDE Gas dari PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. LPPPI, maka PT. PDPDE Gas mengeluarkan tagihan kepada PT. LPPPI selanjutnya PT. LPPPI membayar langsung ke rekening PT. PDPDE Gas.
 - b) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. PLN (Persero) dikarenakan yang melakukan perjanjian jual beli adalah PDPDE Sumsel maka skema penagihan adalah PDPDE Sumsel menyampaikan tagihan atau invoice ke PT. PLN (Persero) selanjutnya PT. PLN (Persero) membayar dengan cara mentransfer ke rekening bersama milik PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas.
- 5) Skema pembayaran *toll fee* atas penggunaan pipa milik PT. TGI yakni PT. TGI mengeluarkan tagihan kepada PT. PDPDE Gas dan selanjutnya PT. PDPDE Gas langsung membayar melalui transfer bank kepada PT. TGI.
- 6) Bahwa berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas disebutkan bahwa harga beli gas dari PDPDE Sumsel senilai USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun, namun pembayaran gas yang diserahkan ke PT. PDPDE Gas tidak dibayarkan dengan berpedoman pada harga tersebut melainkan berpedoman pada perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan gas tanggal 23 April 2010 yaitu dibayarkan senilai USD0,10 per MMBTU.

- 7) PT. PDPDE Gas telah melakukan jual beli gas yaitu pembelian gas dari JOB Jambi Merang dan penjualan gas ke PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero).
- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)		Price (USD)	Amount (USD)
2011	542.023,00		7,86	4.260.961,38
2012	3.247.696,50		7,90	25.663.069,88
2013	3.679.485,80		8,09	29.763.930,53
2014	3.556.482,00		8,43	29.986.737,66
2015	3.292.170,70		8,74	28.784.435,69
2016	2.797.396,40		8,83	24.703.886,05
2017	2.533.546,90		9,10	23.045.612,12
2018	1.205.113,90		9,37	11.286.687,13

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. PLN (Persero) oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2015	272.482,40	7,96	2.168.959,82
2016	393.498,34	8,44	3.321.125,99
2017	382.296,86	8,63	3.299.221,90
2018	200.226,78	8,82	1.766.000,24

- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
 - Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).
- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN



dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (*empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (*tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah*) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (*enam milyar Sembilan ratus juta rupiah*). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) sehingga susan pemegang saham menjadi :

- PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*). dan
- PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa hutang kepada pemegang saham tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas merupakan hutang kepada pemegang saham untuk keperluan operasional proyek Jambi Merang yang belum diselesaikan. Sedangkan kewajiban penysetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar 15% x



Rp53.500.000.000,00 = Rp8.025.000.000,00 yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN.

- 2) Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar 7,5% senilai Rp4.012.500.000,00 dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyeteroran saham.
- 3) Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyeteror saham berupa uang sebanyak Rp2.131.250.000,00.
- 4) Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
- 5) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk:
 - a) Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp. 4.012.500.000,00 sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp.4.012.500.000,00 tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali.
 - b) Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 paling lambat bulan Mei 2018.
- Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, maka pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

- Pada tanggal 4 Juli 2018 ARIEF KARDASYAH selaku TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN dan ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (*lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah disetor oleh PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK).
- Selanjutnya pada tanggal yang sama, berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 5 Perihal Akta Kuasa dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel memberikan kuasa kepada PT. DKLN untuk menarik dana atau mengambil deviden yang berhak diterima oleh PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE Gas setiap tahunnya sampai dengan hutang pihak pertama kepada pihak kedua dianggap lunas.
- Pada tanggal 20 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat Nomor: 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Deviden kepada

Halaman 36 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktur PT. PDPDE Gas yang pada pokoknya meminta kepada PT. PDPDE Gas untuk memindahbukukan atas deviden (setelah dipotong pph 23) PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN sebesar USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*). Selain itu, juga telah dilakukan pembayaran kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang pada awalnya merupakan setoran saham berupa uang dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN terkait pembentukan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) yang tidak jadi beroperasi namun dijadikan sebagai pemotongan hutang PDPDE Sumsel. Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteroran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara dari PDPDE Sumsel oleh PT PDPE Sumsel TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian *fee* yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksud agar mereka dapat menerima uang dari PT.PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran *fee* gas, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama :

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. Lintas Nusa Investama menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Proyek Gas di Jambi sebesar USD0,40 per MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI.
- Pemegang saham dari PT. Lintas Nusa Investama adalah TERDAKWA MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASANA, MAJIDAH BAHAR, A YULIANTO NURMANSYAH dan BAWAI MADANG.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lintas Nusa Investama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).

2) TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan YASSER ARAFAT selaku Direktur PT. PDPDE Gas dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. Musi Prima Transportasi menandatangani Perjanjian Komisi Pemasaran sebesar USD0,025 per MMBTU gas yang diterima oleh PT. PDPDE Gas.
- Pemegang saham dari PT. Musi Prima Transportasi adalah BAWAI MADANG, EDI CHANDRA MULIA, BAMBANG SUPRIYANTO, TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Musi Prima Transportasi sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.

Halaman 38 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- 3) CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama:
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
 - Pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Dhyani Indira, Erwin Himawan dan Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari CACA ISA SALEH SADIKIN.
 - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
 - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
 - Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD336.248,50 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima puluh dollar amerika serikat*) yang kemudian atas perintah CACA ISA SALEH SADIKIN dipergunakan untuk kepentingan CACA ISA SALEH SADIKIN dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Diserahkan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD155.700,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) dengan cara:
 - Tunai sebesar USD130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) dan,

Halaman 39 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer sebesar USD25.700,00 (*dua puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.
- (2) Diserahkan kepada Endang Budiarsih (Isteri CACA ISA SALEH SADIKIN) sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) dengan cara transfer ke Bank Permata Nomor Rekening 1670000560366 atas nama Endang Budiarsih.
- (3) Diserahkan kepada Erwin Himawan sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) dengan cara transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 atas nama Erwin Himawan.
- (4) Dikeluarkan untuk PT. Petrogas Anugerah Adil sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) dengan cara transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 070 000 667 2369 atas nama PT. Petrogas Anugerah Adil.
- (5) Sisanya sebesar USD17.548,50 (*tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan koma lima puluh dollar amerika serikat*) masih disimpan di PT. Dinameka Mukti Mitratama.
 - CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.
 - Bahwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian fee tersebut adalah bentuk reward yang diberikan oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG kepada CACA ISA SALEH SADIKIN karena telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.
- 4) AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugerah Adil:
 - Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan IRAMSYAH selaku Perwakilan PT. Palsin Anugerah Adil menandatangani perjanjian komisi pemasaran gas sebesar USD0,05 untuk setiap MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI, padahal Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI sudah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2010.

Halaman 40 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Pemegang saham dari PT. Palsin Anugerah Adil adalah Majidah Bahar, IRAMSYAH, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Palsin Anugerah Adil sehingga tidak layak untuk diberikan fee gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran fee gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Palsin Anugerah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*) melalui rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7099512018 (rupiah) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil dan rekening Bank Danamon Nomor 003542542109 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil serta rekening Bank Mega Nomor 010202011001294 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 169/PDPDE/SS/III/2018 yang pada pokoknya Direktur Utama PDPDE Sumsel mengusulkan agar PT. PDPDE Gas menjadi pihak yang melakukan jual beli gas dengan JOB Jambi Merang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) mengirimkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor 2866/13/MEM.M/2018 Perihal Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas. Berdasarkan surat tersebut, Menteri ESDM menetapkan perubahan alokasi gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang semula diberikan kepada PDPDE Sumsel menjadi beralih untuk diberikan kepada PT. PDPDE Gas sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan surat Menteri ESDM tersebut, kemudian dibuat Perjanjian Nomor: MAN-J/19-0034 tanggal 7 Januari 2019 perihal



pemindahtanganan dan pengalihan terhadap perjanjian jual beli gas (PJBG) antara JOB Jambi Merang dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. PDPDE Gas menggantikan PDPDE Sumsel di dalam PJBG terhitung sejak tanggal efektif perjanjian berlaku yakni sejak tanggal 22 Juni 2018.

- Selama tercatat sebagai pemilik saham pada PT. PDPDE Gas, PDPDE Sumsel menerima dividen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah USD767.678 (nilai setelah pajak) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Total Dividen yang dibagikan (USD)	Kepemilikan Saham PDPDE Sumsel	Dividen yang dibagikan (USD)	PPh Psl 23 (USD)	Nominal (USD)	Tgl Transfer
2015	1.000.000	15 %	150.000	22.500	127.500	10-9-2015
2016	1.000.000	15 %	150.000	22.500	127.500	22-6-2016
2016	480.000	15 %	72.000	10.800	61.200	18-10-2017
2017	1.000.000	15 %	150.000	22.500	127.500	20-7-2018
2017	500.000	15 %	75.000	11.250	63.750	28-11-2018
2017	541.000	15 %	81.150	12.173	68.978	28-12-2018
2018	1.000.000	15 %	150.000	22.500	127.500	10-9-2019
2018	500.000	15 %	75.000	11.250	63.750	9-12-2019
Total	6.021.000	15 %	903.150	135.473	767.678	

- Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN telah memperkaya di antaranya TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN, yaitu telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan rincian :

- melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat) dan Rp6.781.224.232,41 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyeteroran modal awal 85 % dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), padahal tidak pernah ada penyeteroran modal awal tersebut.
- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat) padahal kenyataannya hanya menyetor kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar

Halaman 43 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.

2. CACA ISA SALEH SADIKIN, melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
 3. AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*).
- Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :
 - a. Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa *dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.*
 - b. Pasal 92 ayat (1), yang menyatakan bahwa *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
 - c. Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa *Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
 - d. Pasal 97 ayat (2), yang menyatakan bahwa *pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setaip anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.*
 - e. Pasal 114, yang menyatakan bahwa *setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 28 huruf a, yang menyatakan *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.*
 - b. Pasal 28 huruf d, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.*
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 76 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.*
 - b. Pasal 76 ayat (1) d, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan keuangan Daerah yang dipimpin.*
 - c. Pasal 76 ayat (1) e, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*
 - d. Pasal 331 ayat (4) huruf c, yang menyatakan bahwa *pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.*



4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga :
 - a. Pasal 2 huruf b, yang menyatakan bahwa *dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.*
 - b. Pasal 4, yang menyatakan *tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.*
 - c. Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa *Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.*
 - d. Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa *kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat menjamin kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.*
 - e. Pasal 11, yang menyatakan bahwa *kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.*
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor : KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang menyatakan bahwa *permintaan kebutuhan energi daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, khususnya untuk pembangkit listrik (**independent power producers/PP** kapasitas kecil) dapat dipenuhi dengan Penunjukan*



Langsung (Direct Appointment) dengan ketentuan sebagai berikut : “Penunjukan Langsung” (Direct Appointment) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda.

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi :
 - a. Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa *Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa *Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.*
 - c. Pasal 11 ayat (4), yang menyatakan bahwa *Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.*
 - d. Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa *Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal penyertaan modal dalam perusahaan lain.*
 - e. Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan *Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.*
7. *Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel JOB Ref No : Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 :*
 - a. Angka 24 huruf b, yang menyatakan bahwa *para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya, kecuali dalam hal pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya,*



dengan ketentuan bahwa tidak ada pengalihan yang dapat membebaskan pihak pemberi pengalihan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya.

- b. Angka 18 huruf d, yang menyatakan bahwa dalam HoA ini “afiliasi” berarti yang terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum dengan suatu pihak. Untuk maksud definisi ini, “penguasaan” berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut.
- Akibat perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD30.258.202,79 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar Amerika Serikat), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasicif Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN.



- b. Sebesar USD30.194.452,79 (*tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan dollar Amerika serikat*) yang merupakan selisih antara pendapatan penyaluran gas bumi bagian negara dengan biaya penyaluran gas bumi bagian negara ke konsumen.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA MUDDAI MADANG** selaku Direktur PT. Dika Karya Lintas Nusa (selanjutnya disebut PT DKLN) periode 15 Februari 2008 s/d 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No. 13 tanggal 15 Februari 2008. Komisaris Utama PT. DKLN periode 14 Oktober 2009 s/d 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No.13 tanggal 14 Oktober 2009. Direktur Utama PT. DKLN sejak tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No. 20 tanggal 20 Desember 2013. Komisaris Utama PT. PDPDE Gas sejak tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No.10 tanggal 21 Desember 2009. Direktur Utama PT. PDPDE Gas sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 12, tanggal 11 April 2016. telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Caca Ica Saleh Sadikin selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel Periode 2008 sampai dengan Periode 2014 dan Direktur Utama PT PDPDE Gas periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Ahmad Yaniarsyah Hasan Direktur PT PDPDE Gas periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bersama-sama Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan Periode 2008 sampai 2013 dan Periode 2013 sampai dengan 2018 (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam periode waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Jln. Kapt. A rivai No. 56, Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07, Jl. Natuna No. 05 Palembang, Hotel Swarna Dwipa LT. 2, Jl. Tasik No. 2) Kota Palembang Sumatera Selatan dan atau di Kantor PT PDPDE



Gas (Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No.07-08, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat, Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan Periode Pertama tahun 2008 s/d tahun 2013 dan Periode Kedua tahun 2013 s/d 2018 bersepakat bersepakat dengan CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body (JOB) PT. Pertamina Hulu Energi - Talisman Ltd - Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang (selanjutnya disebut JOB Jambi Merang) yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG yang pada akhirnya menggunakan perusahaan Join Venture antara PDPDE Sumsel dengan DKLN yaitu PDPDE Gas dengan tahapan sebagai berikut:

1. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memerintahkan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body (JOB) PT. Pertamina Hulu Energi - Talisman Ltd - Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang (selanjutnya disebut JOB Jambi Merang) yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG.



2. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan izin prinsip kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 16 Desember 2009 untuk membentuk PT. PDPDE Gas, tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan menyetujui penentuan jumlah saham pada PT. PDPDE Gas sebesar 15% untuk PDPDE Sumsel dan sebesar 85% untuk PT. DKLN tanpa perhitungan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, persetujuan tersebut sesuai dengan arahan dari MUDDAI MADANG kepada CACA ISA SALEH SADIKIN.
4. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.
5. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 tanggal 13 Desember 2017 telah memberikan persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak karena berdasarkan surat permohonan izin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, maka pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

Selain itu TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN, AHMAD YANIARSYAH HASAN, juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya, yaitu:

1. CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum ada izin prinsip dari Gubernur Sumsel. PT. DKLN merupakan perusahaan swasta milik TERDAKWA MUDDAI MADANG yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan



- pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
2. Setelah izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel telah menandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama Patungan antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) pada tanggal 17 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT PDPDE Gas, dengan isi perjanjian yang berbeda dengan Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan antara lain yaitu atas kesepakatan CACA ISA SALEH SADIKIN dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG maka pendanaan pembentukan perusahaan baru tersebut yang awalnya akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN menjadi akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kepemilikan saham.
 3. TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyeteroran modal awal 85% kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyeteroran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010.
 4. CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel untuk dialihkan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. PDPDE Gas secara tidak sah dengan memperoleh fee hanya sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
 5. TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hanya menyeter kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh*



enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

6. TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama dengan CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyepakati pembentukan PT. Permata Musi Kreasi sebagai perusahaan patungan PDPDE Sumsel dan PT. DKNL, sehingga PDPDE Sumsel telah menyeter saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada PT. DKLN yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Selain itu seolah-olah sebagai pembayaran hutang juga dilakukan melalui mekanisme pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*), sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.
7. CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menandatangani perjanjian pemberian fee gas kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama dan kepada FIRDAUS NUR melalui CV. Energi Lestari, atas pengalihan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.
8. TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Dirut PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi dan IVO WONGKAREN melalui PT. Mulya Tara Mandiri.
9. AHMAD YANIARSYAH HASAN menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah kepada CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama, kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil dan kepada INDRA (Pegawai PT. PHE Talisman Jambi Merang) melalui PT. Nutech Dinamika Semesta.
10. TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018.

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD30.258.202,79 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021

Halaman 54 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan Terdakwa MUDDAI MADANG dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa MUDDAI MADANG sebagai Direktur PT. DKLN periode 15 Februari 2008 s/d 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No. 13 tanggal 15 Februari 2008, sebagai Komisaris Utama PT. DKLN periode 14 Oktober 2009 s/d 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati, SH No.13 tanggal 14 Oktober 2009 dan sebagai Direktur Utama PT. DKLN sejak tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No. 20 tanggal 20 Desember 2013 serta sebagai Komisaris Utama PT. PDPDE Gas sejak tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No.10 tanggal 21 Desember 2009, sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 12, tanggal 11 April 2016.

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Hj. Trining Ariswati Nomor 13 tanggal 14 oktober 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dika Karya Lintas Nusa:

Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.
harus dengan persetujuan komisaris.
- a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.

Halaman 55 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 2) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT Dika Karya Lintas Nusa mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2) Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada dewan komisaris.
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan. Dalam hal demikian, dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan dewan Komisaris.
- 4) Dalam hal ini hanya ada seseorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin,SH Nomor 10 tanggal 24 Desember 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PDPDE Gas:

Direktur mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

Direksi (Direktur Utama) PT PDPDE Gas mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:



- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang mana jumlahnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin.
harus dengan persetujuan komisaris.
- 2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) umlah kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 3) a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seseorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat suara khusus. kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di *onshore* dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki *Estimated Ultimate Recovery* (EUR) sebesar 190 MMBOE (*Million Barrel of Oil Equivalent*). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut



akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (*Liquified Natural Gas*) setiap harinya.

- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.
- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.
- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:
(1) Tahun 2008 s.d. 2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Nono Suratno (Direktur Operasi).
- Iwan Rosidi (Manajer Umum dan Keuangan).
- (2) Tahun 2012 s.d. 2014:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Nasir Alamiah (Direktur Operasi).
- (3) Tahun 2015 s.d. 2018:
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Utama).
 - Syamsu Rizal Usman (Direktur).
 - Iramsyah (Manager Umum dan Operasi).
 - Iwan Rosidi (Manajer Pengembangan).
- (4) Tahun 2018 s.d. 2019:
 - Arief Kadarsyah (Direktur Utama).
 - Samsu Rizal Usman (Direktur Operasional).
 - Iramsyah (Manager Operasi dan Pengawasan).
 - Primayanti (Manager Keuangan dan Umum).
 - Iwan Rosidi (Manager Pengembangan Usaha).
- Pada tahun 2019, PDPDE Sumsel berganti nama menjadi PT. Sumber Energi Gemilang (PT. SEG) berdasarkan Akta Notaris Thamrin Nomor: 14 Tanggal 15 Juli 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0038386.AH.01.01.Tahun 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.
- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya. Dalam Akta Pendiannya PT. DKLN memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.

Adapun susunan pengurus PT. DKLN adalah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007:
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris).
 - Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
 - Ratna Julita (Direktur).
 - M. Iwan Hermanto (Direktur).
- (2) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2008:
 - Ratna Julita (Komisaris).
 - Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).

Halaman 59 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur).
- M. Iwan Hermanto (Direktur).
- (3) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 14 Oktober 2009:
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
 - Ratika Sari (Komisaris).
 - Said August Putra (Direktur Utama).
 - Ratna Julita (Direktur).
 - A. Yaniarsyah Hasan (Direktur).
- (4) Berdasarkan Akta Nomor 20 Tanggal 20 Desember 2013:
 - Ratna Julita (Komisaris).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
 - Ratika Sari (Direktur).
- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.

Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

- (1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
 - Haji Nono Suratno (Komisaris).
- (2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).

Halaman 60 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni
Tanggal 18 Februari 2013.

(3) Maret 2014 s.d. Februari 2015 :

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Muhar Lakoni (Komisaris).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris).

(4) Februari 2015 s.d. September 2015:

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(5) September 2015 s.d. April 2016 :

- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
- Caca Isa Saleh (Direktur Pengembangan Usaha).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(6) April 2016 s.d. Juni 2017 :

- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).
- Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah pada tanggal 23 Januari 2017.
- Bawai Madang (Komisaris).

Halaman 61 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Juni 2017 s.d. Mei 2019 :

- Muddai Madafng (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- IGB Surya Negara (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan pada tanggal 3 April 2018.
- Bawai Madang (Komisaris).

(8) Mei 2019 s.d. April 2021 :

- Yasser Arafat (Direktur Utama).
- Windu Margono (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Syamsu Sugianto (Komisaris) digantikan oleh H.M Zulkarnain pada tanggal 5 Februari 2020.

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSAH HASAN pada tahun 2009 memberitahukan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena TERDAKWA MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga TERDAKWA MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 CACA ISA SALEH SADIKIN bersama ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa “Gas



Jambi Merang buat Pak Muddai”, tetapi CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab “saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais” (Direktur PT. Odira Energy Persada). Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menemui ALEX NOERDIN. Setelah itu CACA ISA SALEH SADIKIN menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN “Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?”, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa “Gas Jambi Merang buat Muddai”.

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat “Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas” antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.
- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat “Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang”, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor: 541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya menyampaikan:
 - 1) Untuk memenuhi kebutuhan gas pada beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Oktober 2009 telah melakukan pertemuan



dengan JOB Pertamina - Hess mengenai adanya suplay gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.

- 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pertemuan dengan BPMIGAS pada tanggal 9 Oktober 2009 yang menyepakati adanya alokasi gas dari lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
 - Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.
 - Pada tanggal 2 Desember 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Direktur Utama PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor: 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor: 044/DKLN/XII/2009, yang pada pokoknya menyepakati:
 - a. Para pihak setuju untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas.
 - b. PDPDE Sumsel akan bertanggungjawab terhadap perolehan gas dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pacific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd
 - c. PT DKLN akan bertanggungjawab terhadap pemasaran dan pembiayaan terhadap perjanjian ini sampai gas dapat dijual.
 - d. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham PDPDE Sumsel ditentukan sebesar 15% dan PT. DKLN 85 %.
 - e. Fee tetap yang akan diberikan kepada PDPDE Sumsel sesuai dengan harga beli dan jual gas yang akan diatur dalam perjanjian pemegang saham.
 - f. Terkait pendanaan modal, akan diperoleh melalui setoran modal PDPDE Sumsel dan PT DKLN dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan atau investor.
 - Perjanjian tersebut dibuat meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian



tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang. Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari TERDAKWA MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung TERDAKWA MUDDAI MADANG tanpa menyebut nama perusahaannya.

- Bahwa pada tanggal 3 November 2009, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumatera selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor: 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.
- Bahwa begitu juga dengan permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor:



360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut diantaranya menyebutkan bahwa “Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)”, selain itu juga menyebutkan bahwa “fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen”.

- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka CACA ISA SALEH SADIKIN bersepakat dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG untuk menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut tertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel yakni :
 - (1) Para Pihak sepakat menanggung bersama seluruh beban biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai kegiatan kerja para pihak di dalam perjanjian ini sesuai dengan kepemilikan saham tersebut pada pasal 5 di atas.
 - (2) Para Pihak sepakat bahwa pendanaan proyek oleh perusahaan patungan akan diperoleh melalui setoran modal Para Pihak dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan/investor.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.



Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal dimaksud.

- Bahwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.
- Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.
- Bahwa atas permintaan ALEX NOERDIN tersebut, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses "*Penunjukan Langsung*" (*Direct Appointment*)



yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa “*Penunjukan Langsung*” (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa “*Penunjukan Langsung*” tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas antara lain :

- 1) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Swarna Dipa membentuk PT. PDPDE Konsultan sesuai Akta (Pendirian) Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H, Palembang Nomor 06 Tanggal 23 November 2005 yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan energy dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Swarna Dipa.
- 2) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Prodexim membentuk PT. PDPDE Hilir sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 34 pada tanggal 19 Januari 2007 yang bergerak dibidang niaga BBM dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Prodexim.



- 3) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PT Radikatama Piranti membentuk PT Pirantinusa Energi Persada (PT PEP) sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 218 pada tanggal 19 Mei 2009 yang bergerak dibidang pengisian LPG 3 Kg dengan kepemilikan saham 60% untuk PDPDE Sumsel dan 40% untuk PT. Radikatama Piranti.
- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKNL tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari PDPDE Sumsel beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas, karena kenyataannya sebagai berikut:
 - Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. DKNL tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan.
 - Selain itu, TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKNL di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hanya menyetor kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus*



empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

- Dana untuk pembangunan infrastruktur dan modal kerja bukan berasal dari PT. DKLN, tetapi diperoleh dari fasilitas pembiayaan kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri atas beban PT. PDPDE Gas dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur pipa sebesar USD12.640.000,00 (*dua belas juta enam ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat*), untuk modal kerja sebesar USD1.000.000 (*satu juta dollar amerika serikat*) dan sebagai jaminan SBLC sebesar USD4.000.000,00 (*empat juta dollar amerika serikat*).
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee hanya sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per *Million British Thermal Units* (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
- Berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh CACA ICA SALEH SADIKIN dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas, pada pokoknya berisikan:
 - 1) PDPDE Sumsel akan menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas yang diterima dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas, dengan jumlah supply gas sebesar 15 MMSCFD.
 - 2) PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas yang tidak dapat dicabut Kembali dan oleh karena itu tanpa bantuan PDPDE Sumsel lagi untuk menjalankan tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas milik PDPDE Sumsel dan tidak terbatas pada kegiatan menjual, mengelola, mendistribusikan gas kepada pihak



lain, termasuk menandatangani dokumen dan perjanjian dengan pihak lain.

- 3) PDPDE Sumsel akan memperoleh imbalan dari penyerahan hak sebesar USD0,10 Per MMBTU ditambah dengan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan negosiasi dengan pihak JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang sebagai penjual gas kepada PDPDE Sumsel dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) sebagai transporter melalui koordinasi dan persetujuan PT. PDPDE Gas.
- 5) PT. PDPDE Gas akan melakukan pembayaran atas kewajiban PDPDE Sumsel kepada JOB Pertamina-Talisman.
- 6) PT. PDPDE Gas akan membayar Toll Fee kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk biaya penyaluran gas melalui pipa PT. TGI ke pihak konsumen.
- 7) Perhitungan fee kepada PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Harga (USD per MMBTU)
a.		
1.	Harga Jual	8,50
	Total (a)	8,50
b.		
1.	Harga Beli	5,40
2.	Pembayaran Toll Fee PT. MEB dan OM	1,15
3.	Toll Fee PT. TGI	1,00
4.	Operation Cost	0,30
	Total (b)	7,85
	Profit (Total a – Total b)	0,65
	Fee PDPDE (15% x profit)	0,0975
		Dibulatkan menjadi 0,10

- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh T TERDAKWA MUDDAI MADANG dan tidak melalui pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran toll fee kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB, selain itu juga terdapat beban biaya toll fee kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya toll fee kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07- HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang antara lain menyepakati sebagai berikut:
 - Periode pemasokan gas akan dimulai pada 1 Maret 2011 (perkiraan fasilitas telah tersedia) sampai dengan tanggal 9 Februari 2019.
 - Harga gas yang disepakati adalah setara dengan USD5,40 (*lima koma empat puluh dollar amerika serikat*) per MMBTU dengan kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya.
 - Para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya kecuali dalam hal:
 - a) Penjual dapat, tanpa persetujuan pembeli, mengalihkan secara keseluruhan keseluruhan atau sebagian dari interestnya berdasarkan HoA ini kepada pihak penerima pengalihan yang mengambil alih seluruh atau sebagian dari interestnya dalam KKS Jambi Merang.
 - b) Para pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA tetap menjadi tanggungjawab para pihak.
 - Definisi "afiliasi" berdasarkan HoA tersebut yaitu "*terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang: 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum suatu pihak. Untuk definisi ini, penguasaan berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut*".
- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel, Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010.

Halaman 72 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan:
 1. PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.
 2. PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual:12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli: 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref: Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref: 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.
- Pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.
- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 memberikan persetujuan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelumnya, CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 23 April 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel setelah menandatangani Perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tanggal mulai perkiraan adalah 1 April 2011 dan berakhir tanggal 9 Februari 2019 atau tanggal dimana PT. PDPDE Gas telah menyerahkan ke PT. LPPPI sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.

Halaman 74 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- b) PT. PDPDE Gas berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang + 52 Km dengan seluruh biaya ditanggung oleh PT. PDPDE Gas.
- c) Jumlah kontrak harian 8 BBTU per hari untuk tahun kontrak pertama, 11 BBTU per hari sejak tahun kedua, ketiga, sampai dengan berakhirnya periode pemasokan.
- d) Harga gas adalah setara dengan USD7,80 per MMBTU ditambah toll fee sesuai dengan tagih PT. TGI. Harga kontrak akan naik sebesar 2,5% per tahun terhitung sejak kontrak tahun kedua.
- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 Juli 2011 dan berakhir 9 Februari 2019 atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan seluruh volume gas dalam kontrak.
 - b) Jumlah kontrak harian untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
 - c) Jika sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan dua tahun terakhir sebelum masa kontrak berakhir, pembeli gagal mengambil jatah kontrak harian minimum untuk hari tersebut, pembeli harus membayar kepada penjual suatu jumlah yang setara 10% dari harga kontrak yang dikalikan dengan selisih antara jatah kontrak minimum dan jumlah gas yang diambil oleh pembeli pada hari tersebut.
 - d) Harga kontrak adalah setara USD5,40 per MMBTU dan mengalami kenaikan/eskalasi 3% per tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembelian gas bumi dari JOB Jambi Merang oleh PDPDE Sumsel pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)	Undertake (USD)	Gas Escees (USD)	Total (USD)	Nilai Invoice Sesuai Novasi (USD)	Selisih (USD)	Dibayar PDPDE (USD)	Lebih Kurang (USD)
2011	530.100,50	5,40	2.862.542,70	-	-	-	-	-	-	-
2012	3.177.697,39	5,47	17.397.311,63	-	-	-	-	-	-	-
2013	3.613.697,08	5,64	20.398.995,92	9.717,88	-	20.408.713,77	-	-	-	-
2014	3.531.987,50	5,90	20.838.726,52	-	-	-	-	-	-	-
2015	3.004.573,30	6,12	18.386.505,75	-	-	-	-	-	-	-
2016	3.150.574,00	6,26	19.722.593,24	-	-	-	-	-	-	-
2017	2.811.008,70	6,50	18.259.383,16	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.312.885,39	6,64	8.717.558,99	56.218,09	-101.896,84	8.671.880,24	7.460.778,81	1.211.101,43	7.401.560,99	59.217,82

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Perkiraan tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 April 2011 dan berakhir pada 9 Februari 2019 tanggal dimana PDPDE Sumsel telah menyerahkan ke PT. PDPDE Gas sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
 - b) PDPDE Sumsel sepakat untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel dan akan selesai sebelum atau pada tanggal mulai gas.
- Bahwa yang melakukan jual beli gas bumi adalah PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI sesuai PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010, namun CACA ISA SALEH SADIKIN bersama dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN dan TERDAKWA MUDDAI MADANG dengan sengaja membebani pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli: 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN. Amandemen tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Jumlah kontrak harian pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk setiap hari pada dan sejak dimulainya tahun kontrak pertama dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
 - b) Harga seluruh gas USD5,5 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagihan PT. TGI dan akan naik dengan tingkat sebesar 3% per tahun terhitung dimulai sejak tahun kontrak kedua sampai periode pemasokan gas.
- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Paling lambat tanggal mulai gas adalah 1 November 2013.
 - b) Periode pemasokan gas sampai dengan tanggal berakhirnya KKS Blok Jambi Merang (9 Februari 2019) atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan ke pembeli sejumlah gas yang sama dengan total jumlah kontrak atau setara dengan 9.250 BBTU.

Halaman 77 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- c) Jumlah Kotrak Harian (JKH) pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas adalah setara dengan 5 BBTU untuk setiap hari.
- d) Terhitung sejak tanggal mulai gas, pembeli harus membayar kepada penjual untuk jumlah gas yang diserahkan adalah USD6,30 per MMBTU dengan eskalasi sebesar 3% di titik penyerahan untuk setiap tahun.
- e) Salah satu pihak tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali pengalihan kepada afiliasinya yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tersebut.
- Selain Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. PLN (Persero) tersebut, PDPDE Sumsel juga melakukan perjanjian dengan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk pengangkutan gas menuju lokasi penerimaan gas PT. PLN (Persero) dengan harga USD0,74 per MMBTU. Sedangkan pada saat penghitungan fee dari PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak tanggal 23 April 2010, PDPDE Sumsel dikenakan biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 meskipun kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.
- Bahwa terhadap penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk penyerahan gas kepada PT. LPPPI, telah dilakukan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai titik penyerahan sepanjang 52 KM, sesuai dengan komitmen penyerahan gas oleh PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan PT. LPPPI untuk kebutuhan industri di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS- LPPPI/JBG/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
 - 2) Untuk penyerahan gas kepada PT. PLN (Persero), adalah sesuai lampiran F Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PLN (Persero) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor : 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yakni di Simpang Bayat Bayung Lincir – Muba Sumatera Selatan.
 - 3) PT. PDPDE Gas telah mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyaluran gas untuk



pembangunan pipa gas sepanjang 54 Km dalam rangka menghubungkan pipa induk milik PT. TGI ke konsumen dan pembangunan 2 stasiun metering gas. Pemenuhan pembiayaan untuk investasi tersebut 70% dengan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri dan 30% melalui peningkatan modal dasar dan modal disetor perusahaan. Harga perolehan pipa secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah senilai USD20.980.546.000,00 (*dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu dollar amerika serikat*).

- 4) Skema pembayaran atas penjualan gas oleh PT. PDPDE Gas dari PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. LPPPI, maka PT. PDPDE Gas mengeluarkan tagihan kepada PT. LPPPI selanjutnya PT. LPPPI membayar langsung ke rekening PT. PDPDE Gas.
 - b) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. PLN (Persero) dikarenakan yang melakukan perjanjian jual beli adalah PDPDE Sumsel maka skema penagihan adalah PDPDE Sumsel menyampaikan tagihan atau invoice ke PT. PLN (Persero) selanjutnya PT. PLN (Persero) membayar dengan cara mentransfer ke rekening bersama milik PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas.
- 5) Skema pembayaran *toll fee* atas penggunaan pipa milik PT. TGI yakni PT. TGI mengeluarkan tagihan kepada PT. PDPDE Gas dan selanjutnya PT. PDPDE Gas langsung membayar melalui transfer bank kepada PT. TGI.
- 6) Bahwa berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas disebutkan bahwa harga beli gas dari PDPDE Sumsel senilai USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun, namun pembayaran gas yang diserahkan ke PT. PDPDE Gas tidak dibayarkan dengan berpedoman pada harga tersebut melainkan berpedoman pada perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas tanggal 23 April 2010 yaitu dibayarkan senilai USD0,10 per MMBTU.
- 7) PT. PDPDE Gas telah melakukan jual beli gas yaitu pembelian gas dari JOB Jambi Merang dan penjualan gas ke PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2011	542.023,00	7,86	4.260.961,38
2012	3.247.696,50	7,90	25.663.069,88
2013	3.679.485,80	8,09	29.763.930,53
2014	3.556.482,00	8,43	29.986.737,66
2015	3.292.170,70	8,74	28.784.435,69
2016	2.797.396,40	8,83	24.703.886,05
2017	2.533.546,90	9,10	23.045.612,12
2018	1.205.113,90	9,37	11.286.687,13

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. PLN (Persero) oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2015	272.482,40	7,96	2.168.959,82
2016	393.498,34	8,44	3.321.125,99
2017	382.296,86	8,63	3.299.221,90
2018	200.226,78	8,82	1.766.000,24

- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
 - Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).
- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (*empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (*tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah*) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (*enam milyar*



Sembilan ratus juta rupiah). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) sehingga susan pemegang saham menjadi:

- PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*). dan
- PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa hutang kepada pemegang saham tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas merupakan hutang kepada pemegang saham untuk keperluan operasional proyek Jambi Merang yang belum diselesaikan. Sedangkan kewajiban penysetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar 15% x Rp53.500.000.000,00 = Rp8.025.000.000,00 yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN
 - 2) Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,5% senilai Rp4.012.500.000,00 dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyeteroran saham

- 3) Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyeteror saham berupa uang sebanyak Rp2.131.250.000,00
- 4) Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018
- 5) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk:
 - a) Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp. 4.012.500.000,00 sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp.4.012.500.000,00 tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali
 - b) Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 paling lambat bulan Mei 2018.
- Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, maka pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

- Pada tanggal 4 Juli 2018 TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN dan ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (*lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah disetor oleh PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK).
- Selanjutnya pada tanggal yang sama, berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 5 Perihal Akta Kuasa dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel memberikan kuasa kepada PT. DKLN untuk menarik dana atau mengambil deviden yang berhak diterima oleh PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE Gas setiap tahunnya sampai dengan hutang pihak pertama kepada pihak kedua dianggap lunas.
- Pada tanggal 20 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat Nomor : 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Deviden kepada Direktur PT. PDPDE Gas yang pada pokoknya meminta kepada PT. PDPDE Gas untuk memindahbukukan atas deviden (setelah dipotong pph 23) PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN sebesar USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*). Selain itu, juga telah dilakukan pembayaran kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu*

Halaman 83 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada awalnya merupakan setoran saham berupa uang dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN terkait pembentukan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) yang tidak jadi beroperasi namun dijadikan sebagai pemotongan hutang PDPDE Sumsel. Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteroran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara tidak sah dari PDPDE Sumsel oleh PT. PDPDE Sumsel TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian fee gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian fee yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksud agar mereka dapat menerima uang dari PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran fee gas, antara lain sebagai berikut:

1) TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. Lintas Nusa Investama menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Proyek Gas di



Jambi sebesar USD0,40 per MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI.

- Pemegang saham dari PT. Lintas Nusa Investama adalah TERDAKWA MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASANA, MAJIDAH BAHAR, A YULIANTO NURMANSYAH dan BAWAI MADANG.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lintas Nusa Investama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).

2) TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan YASSER ARAFAT selaku Direktur PT. PDPDE Gas dengan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. Musi Prima Transportasi menandatangani Perjanjian Komisi Pemasaran sebesar USD0,025 per MMBTU gas yang diterima oleh PT. PDPDE Gas.
- Pemegang saham dari PT. Musi Prima Transportasi adalah BAWAI MADANG, EDI CHANDRA MULIA, BAMBANG SUPRIYANTO, TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Musi Prima Transportasi sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar



Rp958.855.639,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

3) CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
- Pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Dhyani Indira, Erwin Himawan dan Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari CACA ISA SALEH SADIKIN.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*) yang kemudian atas perintah CACA ISA SALEH SADIKIN dipergunakan untuk kepentingan CACA ISA SALEH SADIKIN dengan rincian sebagai berikut :

(1) Diserahkan kepada CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD155.700,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) dengan cara:

- Tunai sebesar USD130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) dan,
- Transfer sebesar USD25.700,00 (*dua puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

(2) Diserahkan kepada Endang Budiarsih (Isteri CACA ISA SALEH SADIKIN) sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh*



enam ribu enam ratus dollar amerika serikat) dengan cara transfer ke Bank Permata Nomor Rekening 1670000560366 atas nama Endang Budiarsih.

(3) Diserahkan kepada Erwin Himawan sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) dengan cara transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 atas nama Erwin Himawan.

(4) Dikeluarkan untuk PT. Petrogas Anugerah Adil sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) dengan cara transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 070 000 667 2369 atas nama PT. Petrogas Anugerah Adil.

(5) Sisanya sebesar USD17.548,50 (*tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan koma lima puluh dollar amerika serikat*) masih disimpan di PT. Dinameka Mukti Mitratama.

➤ CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.

➤ Bahwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian *fee* tersebut adalah bentuk reward yang diberikan oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG kepada CACA ISA SALEH SADIKIN karena telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.

4) AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugerah Adil :

➤ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan IRAMSYAH selaku Perwakilan PT. Palsin Anugerah Adil menandatangani perjanjian komisi pemasaran gas sebesar USD0,05 untuk setiap MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI, padahal Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI sudah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2010.

➤ Pemegang saham dari PT. Palsin Anugerah Adil adalah Majidah Bahar, IRAMSYAH, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN.

➤ Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Palsin Anugerah Adil sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.



- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran fee gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Palsin Anugerah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*) melalui rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7099512018 (rupiah) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil dan rekening Bank Danamon Nomor 003542542109 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil serta rekening Bank Mega Nomor 010202011001294 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 169/PDPDE/SS/III/2018 yang pada pokoknya Direktur Utama PDPDE Sumsel mengusulkan agar PT. PDPDE Gas menjadi pihak yang melakukan jual beli gas dengan JOB Jambi Merang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) mengirimkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor 2866/13/MEM.M/2018 Perihal Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas. Berdasarkan surat tersebut, Menteri ESDM menetapkan perubahan alokasi gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang semula diberikan kepada PDPDE Sumsel menjadi beralih untuk diberikan kepada PT. PDPDE Gas sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan surat Menteri ESDM tersebut, kemudian dibuat Perjanjian Nomor: MAN-J/19-0034 tanggal 7 Januari 2019 perihal pemindahtanganan dan pengalihan terhadap perjanjian jual beli gas (PJBG) antara JOB Jambi Merang dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. PDPDE



Gas menggantikan PDPDE Sumsel di dalam PJBG terhitung sejak tanggal efektif perjanjian berlaku yakni sejak tanggal 22 Juni 2018.

- Selama tercatat sebagai pemilik saham pada PT. PDPDE Gas, PDPDE Sumsel menerima dividen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah USD767.678 (nilai setelah pajak) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Total Dividen yang dibagikan (USD)	Kepemilikan Saham PDPDE Sumsel	Dividen yang dibagikan (USD)	PPH Psl 23 (USD)	Nominal (USD)	Tgl Transfer
2015	1.000.000	15 %	150,000	22.500	127.500	10-9-2015
2016	1.000.000	15 %	150,000	22.500	127.500	22-6-2016
2016	480.000	15 %	72,000	10.800	61.200	18-10-2017
2017	1.000.000	15 %	150,000	22.500	127.500	20-7-2018
2017	500.000	15 %	75,000	11.250	63.750	28-11-2018
2017	541.000	15 %	81,150	12.173	68.978	28-12-2018
2018	1.000.000	15 %	150,000	22.500	127.500	10-9-2019
2018	500.000	15 %	75,000	11.250	63.750	9-12-2019
Total	6.021.000	15 %	903,150	135,473	767,678	

- Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN telah menguntungkan diri sendiri TERDAKWA MUDDAI MADANG atau orang lain diantaranya yaitu: CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan rincian:

- melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat) dan Rp6.781.224.232,41 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah).



- melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyeteroran modal awal 85 % dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), padahal tidak pernah ada penyeteroran modal awal tersebut.
- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat) padahal kenyataannya hanya menyetor kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar



Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.

2. CACA ISA SALEH SADIKIN, melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan dollar amerika serikat).
 3. AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil sebesar USD808.041,96 (delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat) dan Rp2.911.690.666,97 (dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:
 - a. Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
 - b. Pasal 92 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - d. Pasal 97 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setaip anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.
 - e. Pasal 114, yang menyatakan bahwa setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 28 huruf a, yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.
 - b. Pasal 28 huruf d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 76 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pasal 76 ayat (1) d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan keuangan Daerah yang dipimpin.
 - c. Pasal 76 ayat (1) e, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
 - d. Pasal 331 ayat (4) huruf c, yang menyatakan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.



4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga :
 - a. Pasal 2 huruf b, yang menyatakan bahwa dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
 - b. Pasal 4, yang menyatakan tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
 - d. Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat menjamin kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
 - e. Pasal 11, yang menyatakan bahwa kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor : KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang menyatakan bahwa permintaan kebutuhan energi daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, khususnya untuk pembangkit listrik (independent power producers/PP kapasitas kecil) dapat dipenuhi dengan Penunjukan Langsung (Direct Appointment) dengan ketentuan sebagai berikut :
"Penunjukan Langsung" (Direct Appointment) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda.



6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi :
 - a. Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
 - c. Pasal 11 ayat (4), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
 - d. Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - e. Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
7. Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel JOB Ref No : Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 :
 - a. Angka 24 huruf b, yang menyatakan bahwa para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya, kecuali dalam hal pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada pengalihan yang dapat membebaskan pihak pemberi pengalihan dari kewajiban-



kewajibannya berdasarkan HoA ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya.

- b. Angka 18 huruf d, yang menyatakan bahwa dalam HoA ini “afiliasi” berarti yang terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum dengan suatu pihak. Untuk maksud definisi ini, “penguasaan” berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut.
- Akibat perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD30.258.202,79 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar Amerika Serikat), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN.
- b. Sebesar USD30.194.452,79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan



dollar Amerika Serikat) yang merupakan selisih antara pendapatan penyaluran gas bumi bagian negara dengan biaya penyaluran gas bumi bagian negara ke konsumen.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUDDAI MADANG** selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat berdasarkan Akte Notaris HARUN BAYUMI Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009, bersama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu ALEX NOERDIN, AHMAD NAJIB, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINIUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan IR LOKA SANGGANEGRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat Jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIAH di Jalan Danau Poso E.11 Nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan Pangeran Ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHAP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang menjadikan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di Jalan Danau Poso E.11 Nomor 85 Jakarta sebagai alamat dengan nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai rekening yang menerima hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 tahun 2017, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD diantaranya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan barang daerah berupa tanah terhadap kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf a,b jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b jo Pasal 8 ayat (1), (2) jo Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 18 jo Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

Halaman 97 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan atas kerugian Keuangan Daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako provinsi sulawesi tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (Almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an.
- Menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana-dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, Terdakwa selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk membangun Masjid Sriwijaya Palembang yang juga bersumber dari dana APBD akan tetapi domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu menggunakan alamat kantor Terdakwa yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan. Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang membuka (dua) rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk menerima uang salah satunya uang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu, pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2011 pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Ketuanya H. ZAMZAMI AHMAD dan Sekretaris umum MARWAH M DIAH mengajukan surat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan akan tetapi sebelumnya pada tahun 2010, ALEX NOERDIN sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi Jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di Jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi Jalan Soekarno Hatta sepi

Halaman 99 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN.

- Bahwa pada tahun 2012, ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas + 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas ± 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah Clear And Clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD.
- Bahwa surat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan baru dibahas di tahun 2014 untuk memulai merencanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Terdakwa dan MARWAH M DIAH. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan ALEX NOERDIN mengetahui jika pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat diberikan hibah dari APBD karena



berdomisili di luar Provinsi Sumatera Selatan dan 2 (dua) nomor rekening yang dibuat Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu ALEX NOERDIN mengetahui dana hibah tidak bersifat wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Akan tetapi arahan ALEX NOERDIN tersebut ditindaklanjuti oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dengan mengarahkan AGUSTINIUS ANTONI selaku Kabid Anggaran pada BPKAD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2015 untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal hibah sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Selain itu RKA untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Seketaris Daerah untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan dibawa ke Komisi 3 DPRD Sumsel tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014. Walaupun Progam Legislasi tambahan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak bersifat mendesak akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Pansus sehingga permintaan ini disetujui sehingga terbitlah Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa sebelum pembahasan usulan anggaran hibah 2015 dalam APBD induk sebelum disetujui dan ditetapkan bersama DPRD, MENDAGRI RI sudah memberikan rekomendasi terkait pemberian hibah diluar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efisien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Sumatera Selatan. Adapun beberapa SK perubahan untuk penerima hibah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang dibuat oleh ALEX NOERDIN tidak dibahas oleh tim TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah serta tidak dilakukan Verifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra untuk melihat syarat sah penerima hibah diantaranya domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan (alamat kantor Terdakwa) dan (dua) rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk menerima uang salah satunya uang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan berada di luar domisili Provinsi Sumatera Selatan yaitu, pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang

Halaman 102 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALEX NOERDIN melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b Jo. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan bawahan ALEX NOERDIN yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta Karya Sumatera Selatan SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI AHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH ke ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota Panitia Pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber



dari APBD serta dengan Metode Design and Build (Rancang Bangun) yang mana pihak jasa konstruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti DR. K.M. AMINUDDIN., ST.,MT, IR.H. K.M. ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil Verifikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal tandatangan kontrak tersebut anggaran juga belum tersedia dan selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruski dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,00 (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk IR LOKA SANGGANEGRA yang bukan sebagai Tim Ahli dari PT Indah Karya sebagai pihak Pengawas di lapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "dana talangan" sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari Kantor Pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.
- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditandatangani

Halaman 105 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh ACHMAD NAJIB jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor Terdakwa dengan alamat Jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera

Halaman 106 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING melalui AGUSTINIUS ANTONI kepada AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan dan alamat rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta bukan di Palembang. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan tersebut tetap diproses oleh permintaan pembayaran tersebut di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan diluar domisili pemberi hibah (Pemerintah Daerah).

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Yayasan kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi diatas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK MARI Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah 2015, Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Swijaya Palembang sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 tidak pernah membuat laporan penggunaan uang hibah yang diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. selain itu walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku kepala BPKAD tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang di Verifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra dan tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 tanpa adanya proposal pengajuan hibah dan tanpa ditanyakan oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra yang memiliki kewenangan untuk melakukan Verifikasi namun tidak dilakukannya sehingga pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seharusnya tidak dapat diberikan hibah dikarenakan domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih beralamat di luar Sumatera Selatan yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dan rekening yang digunakan sebagai penerima dana hibah beralamat di rumah LUMASIAH Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang Terdakwa buat selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang namun tetap diberikan hibah sebagaimana ALEX NOERDIN tetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 108 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALEX NOERDIN melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b Jo. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh ACHMAD NAJIB selaku asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang MARWAH M DIAH Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN meminta bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh AHMAD NASUHI dengan Surat Nomor : 145/A/III/2017 Perihal Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian



BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya ternyata di luar domisil kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dirincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipaya-Yodya Karya (KSO) yaitu:
 - ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk BAMBANG E SUMARSONO selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI diluar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih direkening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu sampai diantaranya pada tanggal 5 Februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar

Halaman 111 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang menerima masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak kontruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan

Halaman 112 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Agustus 2017 dibuatlah Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termin 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termin 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam Addendum Kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain yaitu ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, AKHMAD NAJIB, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA terjadi Kerugian Negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian Keuangan Daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **MUDDAI MADANG** selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat berdasarkan Akte Notaris HARUN BAYUMI Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009, bersama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu ALEX NOERDIN, AHMAD NAJIB, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINIUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO dan Ir LOKA SANGGANEGRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat Jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIAH di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan Pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/III/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian



Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain seperti ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah tujuh belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 bertugas dan berwenang mengelola keuangan Yayasan bersama-sama dengan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD diantaranya mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) yang bertentangan dengan asas pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal pemberian hibah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili atau alamat dan Rekening Penerima Hibah yaitu Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian Keuangan Daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (Almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an.
- Menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana-dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari masyarakat. susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAL selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku

Halaman 116 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris, Terdakwa selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang

- Bahwa tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk membangun Masjid Sriwijaya Palembang yang juga bersumber dari dana APBD akan tetapi domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu menggunakan alamat kantor Terdakwa yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan. Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang memiliki kewenangan mengelola keuangan yayasan selanjutnya membuka (dua) rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk menerima uang salah satunya uang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu, pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Ketuanya H. ZAMZAMI AHMAD dan Sekretaris Umum MARWAH M DIAH mengajukan surat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan akan tetapi sebelumnya pada tahun 2010, ALEX NOERDIN sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi Jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di Jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi Jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas + 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD.
- Bahwa surat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan baru dibahas di tahun 2014 untuk memulai merencanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Terdakwa dan MARWAH M DIAH. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan ALEX NOERDIN mengetahui jika pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat diberikan hibah dari APBD karena berdomisili di

Halaman 118 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Provinsi Sumatera Selatan dan 2 (dua) nomor rekening yang dibuat Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu ALEX NOERDIN mengetahui dana hibah tidak bersifat wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Akan tetapi arahan ALEX NOERDIN tersebut ditindaklanjuti oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dengan mengarahkan AGUSTINIUS ANTONI selaku Kabid Anggaran pada BPKAD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2015 untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal hibah sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Selain itu RKA untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Seketaris Daerah untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan dibawa ke Komisi 3 DPRD Sumatera Selatan tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara "gelondongan" dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui. sebelum pembahasan usulan anggaran hibah 2015 dalam APBD Induk sebelum disetujui dan ditetapkan bersama DPRD Sumsel, MENDAGRI RI sudah memberikan rekomendasi terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efesien dan efektif.

- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan

Halaman 119 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014. Walaupun Program Legislasi tambahan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak bersifat mendesak akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Pansus sehingga permintaan ini disetujui sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyalahgunakan kewenangan dengan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD diantaranya mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD. Adapun beberapa SK perubahan untuk penerima hibah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang dibuat oleh ALEX NOERDIN tidak dibahas oleh tim TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah serta tidak dilakukan Verifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra untuk melihat syarat sah penerima hibah diantaranya domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan (alamat kantor Terdakwa) dan (dua) rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk menerima uang salah satunya uang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan berada di luar domisili Provinsi Sumatera Selatan yaitu, pertama: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan Kedua: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang

Halaman 120 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan bawahan ALEX NOERDIN yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta Karya Sumsel SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI AHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Seketaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota Panitia Pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGAARIYANSYAH.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan Metode Design and Build (Rancang Bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak



diikutsertakan seperti DR. K.M. AMINUDDIN., ST.,MT, IR.H. K.M. ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil Verifikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Siriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal tandatangan kontrak



tersebut anggaran juga belum tersedia dan selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruski dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,00 (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk Ir LOKA SANGGANEGRA yang bukan sebagai Tim Ahli dari PT Indah Karya sebagai pihak Pengawas di lapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang Alokasi Proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "dana talangan" sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari Kantor Pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.
- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh ACHMAD NAJIB jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan



Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor Terdakwa dengan alamat Jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 yang diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui AGUSTINIUS ANTONI kepada AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya domisi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan dan alamat rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta bukan di Palembang. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan permintaan pembayaran tersebut tetap diproses di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (pemerintah daerah).

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.
- Bahwa pada tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 125 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK MARI Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Swijaya Palembang telah menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola keuangan Yayasan dikarenakan sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 tidak pernah membuat laporan penggunaan uang hibah yang diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015. Selain itu walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan namun ALEX NOERDIN selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah telah juga menyalahgunakan kewenangan dengan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) sedangkan penetapan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam proses penganggarannya tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra dan tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut. Sehingga seharusnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak bisa diberikan hibah lagi di tahun 2017 dikarenakan belum ada pertanggungjawaban hibah 2015 dan domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih beralamat di luar Sumatera Selatan yaitu di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dan rekening yang digunakan sebagai penerima dana hibah beralamat di rumah LUMASIAH Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang Terdakwa buat selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Halaman 126 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh ACHMAD NAJIB selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang MARWAH M DIAH Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN meminta bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh AHMAD NASUHI dengan Surat Nomor : 145/A/III/2017 Perihal Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya ternyata diluar domisil kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan

Halaman 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dirincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yaitu:
 - ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.
- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk BAMBANG E SUMARSONO selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya mentransfer semua ke



rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI diluar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih direkening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu sampai diantaranya pada tanggal 5 Februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,00



(dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang menerima masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak kontruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencana (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka dikarenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Adendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan



sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termin 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termin 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ALEX NOERDIN, Mukti Sulaiman, Ahmad Nasuhi, Akhmad Najib, Laonma Pasindak Lumban Tobing, Agustinus Antoni, Eddy Hermanto, Syarifudin MF, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, dan Loka Sangganegra, terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian Keuangan Daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN:

Halaman 131 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Komisaris PT Lintas Nusa Investama, Direktur Utama PT Musi Prima Transportasi, Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (selanjutnya disebut PT DKLN), Direktur Utama PT. DKLN, Komisaris Utama PT. PDPDE Gas sejak tanggal 21 Desember 2009, Direktur Utama PT. PDPDE Gas pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam periode waktu-waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Jln. Kapt. A Rivai No. 56, Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07, Jl. Natuna No. 05 Palembang, Hotel Swarna Dwipa LT. 2, Jl. Tasik No. 2) Kota Palembang Sumatera Selatan dan atau di Kantor PT PDPDE Gas (Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No.07-08, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Jalan Kemang Selatan XII No. 1 RT.005 RW.001 Komp. Bangun Cipta Sarana Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Halaman 132 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



yaitu berupa pembelian tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan polis asuransi, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta kekayaan yaitu menggunakan nama orang lain atau diri sendiri untuk pembelian-pembelian tersebut dengan cara sebagai berikut:

- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (Joint Venture Agreement) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:

(1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012:

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur).
- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).**
- Haji Nono Suratno (Komisaris)

(2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014:

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha).
- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).**
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni Tanggal 18 Februari 2013.



(3) Maret 2014 s.d. Februari 2015 :

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama)**
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Muhar Lakoni (Komisaris).
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris).

(4) Februari 2015 s.d. September 2015:

- Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur).
- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama)**
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(5) September 2015 s.d. April 2016 :

- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
- Caca Isa Saleh (Direktur Pengembangan Usaha).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama)**
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(6) April 2016 s.d. Juni 2017 :

- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama)**
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).
- Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah pada tanggal 23 Januari 2017.
- Bawai Madang (Komisaris).

(7) Juni 2017 s.d. Mei 2019 :

- **TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama)**
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- IGB Surya Negara (Komisaris).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan pada tanggal 3 April 2018.
- Bawai Madang (Komisaris).

(8) Mei 2019 s.d. April 2021 :

- Yasser Arafat (Direktur Utama).
 - Windu Margono (Direktur).
 - Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
 - Syamsu Sugianto (Komisaris) digantikan oleh H.M Zulkarnain pada tanggal 5 Februari 2020.
- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet Per Day). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN pada tahun 2009 memberitahukan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena TERDAKWA MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga TERDAKWA MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
 - Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 CACA ISA SALEH SADIKIN bersama ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG.
 - Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat “Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas” antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009.

Halaman 135 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat “Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang”, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.
- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan Joint Venture antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun kenyataannya PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee hanya sebesar USD0,10 (nol koma sepuluh dollar amerika serikat) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG dan tidak melalui pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran toll fee kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB, selain itu juga terdapat beban biaya toll fee kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya toll fee kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.
- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga susan pemegang saham menjadi:
 - PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan

Halaman 137 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar $15\% \times \text{Rp}53.500.000.000,00 = \text{Rp}8.025.000.000,00$ yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN.
 - 2) Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar 7,5% senilai Rp4.012.500.000,00 dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyeteroran saham.
 - 3) Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyeteror saham berupa uang sebanyak Rp2.131.250.000,00.
 - 4) Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
 - 5) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk:



- a) Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp.4.012.500.000,00 sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp.4.012.500.00,00 tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali
 - b) Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 paling lambat bulan Mei 2018.
- Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, maka pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.
 - Pada tanggal 4 Juli 2018 TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN dan ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetor oleh PDPDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK).

- Kemudian PT. PDPDE Gas antara lain melalui CACA ISA SALEH SADIKIN, TERDAKWA MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah kepada beberapa pihak atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.
- Selama tercatat sebagai pemilik saham pada PT. PDPDE Gas, PDPDE Sumsel menerima dividen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah USD767.678 (nilai setelah pajak).
- Akibat dari Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN, TERDAKWA MUDDAI MADANG telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan namun dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan rincian:

- melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat) dan Rp6.781.224.232,41 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah).
- melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain

Halaman 140 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.

- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyetoran modal awal 85 % dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), padahal tidak pernah ada penyetoran modal awal tersebut.
- melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat) padahal kenyataannya hanya menyeter kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.
- Dari dana yang telah diterima secara tidak sah oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya yaitu:
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG membelanjakan dengan membeli rumah dan bangunan, membayar anggunan rumah dan tanah serta kendaraan roda empat atas nama TERDAKWA MUDDAI MADANG maupun atas nama orang lain yaitu:
 1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramdhan (rekan dari anak Sdr. MM).



Tahun Perolehan 16 Juli 2020 pembelian dilakukan dengan mencicil.

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah (anak dari Sdr. MM). Tahun Perolehan 24 Juni 2020 pembelian dilakukan dengan kredit.
3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang. Tahun Perolehan 06 Agustus 2018 dan diagunkan di Astra Sedaya finance sebesar Rp916.200.000,00.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Perolehan tahun 2003, namun tedakwa telah merenovasi Tanah dan Bangunan tersebut pada tahun 2017.
5. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014, status diagunkan di Bank Mandiri.
6. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2003, status diagunkan di bank Panin .
7. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2003, Diagunkan di Bank Panin.
8. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2013.
9. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu,



Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2013.

10. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018.
11. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019.
12. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018.
13. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018.
14. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019
15. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019
16. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014.
17. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Rat na Yulita. T ahun perolehan 2014.
18. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota



Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2005, dijamin di Bank Panin.

19. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2015.
20. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014.

- TERDAKWA MUDDAI MADANG menempatkan, membayarkan dana yang diterima tersebut dalam Polis Asuransi atas nama TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan bertanggung atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain yaitu:

Di PT Prudential Life Assurance sebagai berikut:

1. Polis Nomor : 03550926

No. SPAJ:	83560015
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	30/04/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 535,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 127,500,000
Total Surrender:	Rp 58,441,170 (27/10/2020)
Tertanggung:	M. DARMAWAN KOMAS NUR
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

2. Polis Nomor: 04573529

No. SPAJ:	100283955
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	19/06/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 250,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 126,000,000
Total Surrender:	Rp 77,882,739 (27/10/2020)
Tertanggung:	AISYAH DAIRA FEBRIANA
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

3. Polis Nomor: 05623236

No. SPAJ:	100013549
Status Polis:	Lapsed/Tidak Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	26/07/2012
Premi Berkala:	Rp 32,500,000/Semester
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan:	Rp 250,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 130,000,000
Nilai Tunai:	-
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH M. DARMAWAN KOMAS NUR
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

4. Polis Nomor: 76860466

No. SPAJ:	81887862
Status Polis:	Lapsed/Tidak Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	15/06/2011
Premi Berkala:	Rp 75,000,000/Semester
Penambahan Dana (Top Up):	1. Rp 240,000,000 (14/10/2013) 2. Rp 240,000,000 (09/02/2018)
Penarikan Dana (Withdrawal):	1. Rp 240,000,000 (31/07/2013) 2. Rp 240,000,000 (23/07/2014) 3. Rp 180,000,000 (20/09/2018)
Nilai Pertanggungan:	Rp 3,500,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 2,400,000,000
Nilai Tunai Pertanggal 9 Nov	2,650,814
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMAWAN KOMASNUR MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

5. Polis Nomor: 77112001

No. SPAJ:	81887870
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	31/05/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-

Halaman 145 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 23,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 480,000,000
Total Surrender:	Rp 318,309,185 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

6. Polis Nomor: 77123592

No. SPAJ:	81887872
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	27/05/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 700,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 290,000,000
Total Surrender:	Rp 129,519,100 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMANSYAH
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

7. Polis Nomor: 78790783

No. SPAJ:	82129780
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	23/08/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	Rp 2,500,000 (23/08/2011)
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 1,697,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 222,500,000
Total Surrender:	Rp 84,626,416 (27/10/2020)
Tertanggung:	AISYAH DAIRA FEBRIANA
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit CIMB NIAGA A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5289 – 1900 – 0558 – 7373

8. Polis Nomor: 07613057

No. SPAJ:	101357595
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	21/11/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pertanggungan:	Rp 285,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 117,000,000
Total Surrender:	Rp 38,535,763 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMANSYAH MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR AISYAH DAIRA FEBRIANA
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

9. Polis Nomor: 12183752

No. SPAJ:	118296468
Status Polis:	In Force/Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	04/08/2017
Premi Berkala:	Rp 15,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	Rp 25,000,000 (24/02/2021)
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan:	Rp 78,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 489,999,999
Nilai Tunai Per Tanggal 9 Nov:	Rp 47,489,377
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

Di PT. AXA Mandiri Financial sebagai berikut :

1. Nomor Polis : 514- 5630199

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Sejahtera Mapan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 28 Desember 2013 dengan pembayaran premi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun. Polis ini memiliki manfaat asuransi tambahan, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan manfaat pembayaran premi. Adapun dana masuk dalam polis tersebut sebesar Rp. 1.001.061.000,00, terdiri dari pembayaran premi tahun 2013 dan tahun 2014. Setelah itu, pada Tahun 2015, nasabah mengajukan cuti premi s.d. penutupan polis.

Status polis tersebut sudah tidak aktif berdasarkan dokumen pengajuan penutupan polis pada Tanggal 18 Juni 2019 dan telah dilakukan pentransferan dana pada Tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp. 727.802.801,92- yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 104-001-4081959 An. Muddai Madang.

2. Nomor Polis : 514-8190936

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Sejahtera Mapan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 25 Mei 2015 dengan pembayaran premi sebesar Rp.250.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 147 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per tahun. Polis ini memiliki manfaat asuransi tambahan, yaitu asuransi kesehatan. Adapun dana masuk dalam polis tersebut sebesar Rp. 750.002.000,00, terdiri dari pembayaran premi tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. Setelah itu, mengajukan cuti premi pada bulan Mei 2017 sehingga pada Tahun 2018 s.d. penutupan polis tidak pernah lagi melakukan pembayaran premi.

Nasabah pernah melakukan penarikan dana pada Tanggal 9 Agustus 2019 dan disetujui pada Tanggal 30 Agustus 2019 serta dilakukan pentransferan dana pada Tanggal 2 September 2019 dengan jumlah sebesar Rp.499,716,494.95 yang masuk ke rekening Bank Mandiri

Status polis tersebut sudah tidak aktif berdasarkan dokumen pengajuan penutupan polis pada Tanggal 19 Juni 2020 dan telah dilakukan pentransferan dana pada Tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp. 15.984.883,82- yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 104-001-4081959 An. Muddai Madang.

3. Nomor Polis : 519-6381627

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Elite Plan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 28 Juni 2019 dengan pembayaran premi sebesar USD 11.000 (sebelas ribu dollar amerika) per tahun. Namun, untuk pembayaran premi tahun berikutnya, nasabah sudah tidak memiliki dana tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pendebitan secara otomatis, dan telah dilakukan klarifikasi kepada nasabah terkait rencana auto surrender (penonakifan polis secara otomatis) yang akan dilakukan PT. AXA , setelah itu dari pihak PT. AXA melakukan penutupan polis dan dilakukan pengembalian dana dari investasi pada Tanggal 2 September 2020 sebesar USD 6303,43 yang yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 113-007-8909-870 (USD) An. Muddai Madang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDIAIR:

Bahwa TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Komisaris PT Linta s Nusa Investama, Direktur Utama PT Musi Prima Transportasi, Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (selanjutnya disebut PT DKLN), Direktur Utama PT. DKLN, Komisaris Utama PT. PDPDE Gas sejak tanggal 21 Desember 2009, Direktur Utama PT. PDPDE Gas pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam periode waktu-waktu antara tahun 2009 sampai



dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Jln. Kapt. A Rivai No. 56, Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07, Jl. Natuna No. 05 Palembang, Hotel Swarna Dwipa LT. 2, Jl. Tasik No. 2) Kota Palembang Sumatera Selatan dan atau di Kantor PT PDPDE Gas (Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No.07-08, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Jalan Kemang Selatan XII No. 1 RT.005 RW.001 Komp. Bangun Cipta Sarana Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu berupa pembelian tanah, bangunan, kendaraan bermotor, polis asuransi atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta kekayaan yaitu menggunakan nama orang lain atau diri sendiri untuk pembelian-pembelian tersebut dengan cara sebagai berikut:

- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa



seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.

- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (Joint Venture Agreement) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:
 - (1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur)
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama)
 - Haji Nono Suratno (Komisaris)
 - (2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
 - Djauhar Maulidi (Komisaris).
 - Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni Tanggal 18 Februari 2013.
 - (3) Maret 2014 s.d. Februari 2015 :
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).
 - Adrian Utama Gani (Direktur).
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama)
 - Djauhar Maulidi (Komisaris).
 - Muhar Lakoni (Komisaris).
 - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris).
 - (4) Februari 2015 s.d. September 2015:
 - Caca Isa Saleh (Direktur Utama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adrian Utama Gani (Direktur).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(5) September 2015 s.d. April 2016 :

- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
- Caca Isa Saleh (Direktur Pengembangan Usaha).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Komisaris Utama).
- Djauhar Maulidi (Komisaris).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).

(6) April 2016 s.d. Juni 2017 :

- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Mukti Sulaiman (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris).
- Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah pada tanggal 23 Januari 2017.
- Bawai Madang (Komisaris).

(7) Juni 2017 s.d. Mei 2019 :

- TERDAKWA MUDDAI MADANG (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- IGB Surya Negara (Komisaris).
- Ahmad Yilianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan pada tanggal 3 April 2018.
- Bawai Madang (Komisaris).

(8) Mei 2019 s.d. April 2021 :

- Yasser Arafat (Direktur Utama).
- Windu Margono (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- Syamsu Sugianto (Komisaris) digantikan oleh H.M Zulkarnain pada tanggal 5 Februari 2020.

Halaman 151 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet Per Day). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN pada tahun 2009 memberitahukan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena TERDAKWA MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga TERDAKWA MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 CACA ISA SALEH SADIKIN bersama ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat “Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas” antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009.
- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat “Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang”, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan TERDAKWA MUDDAI MADANG.
- Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar

Halaman 152 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.

- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan Joint Venture antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun kenyataannya PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal dimaksud.
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee hanya sebesar USD0,10 (nol koma sepuluh dollar amerika serikat) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG dan tidak melalui

Halaman 153 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran toll fee kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB, selain itu juga terdapat beban biaya toll fee kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya toll fee kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.

- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga susunan pemegang saham menjadi :
 - PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan
 - PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar 15% x



Rp53.500.000.000,00 = Rp8.025.000.000,00 yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN.

- 2) Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar 7,5% senilai Rp4.012.500.000,00 dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyeteroran saham.
- 3) Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyeteror saham berupa uang sebanyak Rp2.131.250.000,00.
- 4) Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
- 5) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk:
 - a) Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp. 4.012.500.000,00 sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp.4.012.500.000,00 tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali.
 - b) Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 paling lambat bulan Mei 2018.
- Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui



surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, maka pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

- Pada tanggal 4 Juli 2018 TERDAKWA MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN dan ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetor oleh PDPDE Sumsel kepada TERDAKWA MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK).
- Dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara dari PDPDE Sumsel oleh PT PDPE Sumsel TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian fee gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian fee yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG, CACA ISA SALEH SADIKIN dan



AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksud agar menerima uang dari PT.PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran fee gas.

- Selama tercatat sebagai pemilik saham pada PT. PDPDE Gas, PDPDE Sumsel menerima dividen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah USD767.678 (nilai setelah pajak).
- Akibat dari Perbuatan TERDAKWA MUDDAI MADANG bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, CACA ISA SALEH SADIKIN dan AHMAD YANIARSYAH HASAN, TERDAKWA MUDDAI MADANG telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan namun dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan rincian:

- melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat) dan Rp6.781.224.232,41 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah).
- melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dollar amerika serikat) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.

- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyetoran modal awal 85 % dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), padahal tidak pernah ada penyetoran modal awal tersebut.
- Melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas sebesar USD4.921.010,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat) padahal kenyataannya hanya menyetor kas sebesar Rp2.640.006.186,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.
- Dari dana yang telah diterima secara tidak sah oleh TERDAKWA MUDDAI MADANG sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, peruntukan maupun kepemilikan yang sebenarnya yaitu:
 - TERDAKWA MUDDAI MADANG melakukan pembelian rumah dan bangunan, membayar anggunan rumah dan tanah serta kendaraan roda empat atas nama TERDAKWA MUDDAI MADANG maupun atas nama orang lain yaitu:
 1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik: Radzkani Ramdhan (rekan dari anak Sdr. MM). Tahun Perolehan 16 Juli 2020 pembelian dilakukan dengan mencicil.

Halaman 158 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik: Muhammad Darmansyah (anak dari Sdr. MM). Tahun Perolehan 24 Juni 2020 pembelian dilakukan dengan kredit.
3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang. Tahun Perolehan 06 Agustus 2018 dan diagunkan di Astra Sedaya finance sebesar Rp916.200.000,00.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Perolehan tahun 2003, namun Terdakwa telah merenovasi Tanah dan Bangunan tersebut pada tahun 2017.
5. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014, status diagunkan di Bank Mandiri.
6. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2003, status diagunkan di bank Panin .
7. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2003, Diagunkan di Bank Panin.
8. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2013.
9. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2013.



10. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018.
11. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019.
12. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018
13. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2018
14. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019
15. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang. Tahun perolehan 2019
16. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014.
17. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014.
18. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2005, dijamin di Bank Panin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2015.

20. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. Tahun perolehan 2014.

- TERDAKWA MUDDAI MADANG melakukan pembelian Polis Asuransi atas nama TERDAKWA MUDDAI MADANG, dengan bertanggung atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain yaitu:

Di PT Prudential Life Assurance sebagai berikut:

1. Polis Nomor : 03550926

No. SPAJ:	83560015
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	30/04/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan:	Rp 535,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 127,500,000
Total Surrender:	Rp 58,441,170 (27/10/2020)
Tertanggung:	M. DARMAWAN KOMAS NUR
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

2. Polis Nomor: 04573529

No. SPAJ:	100283955
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	19/06/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan:	Rp 250,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 126,000,000
Total Surrender:	Rp 77,882,739 (27/10/2020)
Tertanggung:	AISYAH DAIRA FEBRIANA
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008



3. Polis Nomor: 05623236

No. SPAJ:	100013549
Status Polis:	Lapsed/Tidak Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	26/07/2012
Premi Berkala:	Rp 32,500,000/Semester
Penambahan Dana (<i>Top Up</i>):	-
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 250,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 130,000,000
Nilai Tunai:	-
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH M. DARMAWAN KOMAS NUR
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

4. Polis Nomor: 76860466

No. SPAJ:	81887862
Status Polis:	Lapsed/Tidak Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	15/06/2011
Premi Berkala:	Rp 75,000,000/Semester
Penambahan Dana (<i>Top Up</i>):	1. Rp 240,000,000 (14/10/2013) 2. Rp 240,000,000 (09/02/2018)
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	1. Rp 240,000,000 (31/07/2013) 2. Rp 240,000,000 (23/07/2014) 3. Rp 180,000,000 (20/09/2018)
Nilai Pertanggungan :	Rp 3,500,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 2,400,000,000
Nilai Tunai Pertanggal 9 Nov :	2,650,814
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMAWAN KOMASNUR MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

5. Polis Nomor: 77112001

No. SPAJ:	81887870
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	31/05/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (<i>Top Up</i>):	-
Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 23,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan:	Rp 480,000,000
Total Surrender:	Rp 318,309,185 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

6. Polis Nomor: 77123592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPAJ:	81887872
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	27/05/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 700,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 290,000,000
Total Surrender:	Rp 129,519,100 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMANSYAH
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit BII A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5520 – 0870 – 0088 – 2008

7. Polisi Nomor: 12183752

No. SPAJ:	82129780
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	23/08/2011
Premi Berkala:	Rp 5,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	Rp 2,500,000 (23/08/2011)
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 1,697,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 222,500,000
Total Surrender:	Rp 84,626,416 (27/10/2020)
Tertanggung:	AISYAH DAIRA FEBRIANA
Penerima Manfaat:	MUDDAI MADANG
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Debit Kartu Kredit CIMB NIAGA A/N MUDDAI MADANG No.Kartu Kredit: 5289 – 1900 – 0558 – 7373

8. Polisi Nomor: 12183752

No. SPAJ:	101357595
Status Polis:	Surrender/Selesai
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account
Tanggal Berlaku:	21/11/2012
Premi Berkala:	Rp 1,500,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	-
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 285,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 117,000,000
Total Surrender:	Rp 38,535,763 (27/10/2020)
Tertanggung:	MUHAMMAD DARMANSYAH MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR AISYAH DAIRA FEBRIANA
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

9. Polisi Nomor: 12183752

No. SPAJ:	118296468
Status Polis:	In Force/Aktif
Pemegang Polis:	MUDDAI MADANG
Jenis Produk:	Prulink Assurance Account



Tanggal Berlaku:	04/08/2017
Premi Berkala:	Rp 15,000,000/Bulan
Penambahan Dana (Top Up):	Rp 25,000,000 (24/02/2021)
Penarikan Dana (Withdrawal):	-
Nilai Pertanggungan :	Rp 78,000,000
Jumlah Premi Yang Telah Dibayarkan :	Rp 489,999,999
Nilai Tunai Per Tanggal 9 Nov :	Rp 47,489,377
Tertanggung:	MUDDAI MADANG
Penerima Manfaat:	MUHAMMAD DARMAWAN KOMAS NUR AISYAH DAIRA FEBRIANA MUHAMMAD DARMANSYAH
Pembayar Premi:	MUDDAI MADANG
Sumber Pembayaran:	Bisnis Pribadi
Cara Pembayaran:	Tunai

Di PT. AXA Mandiri Financial sebagai berikut :

1. Nomor Polis : 514- 5630199

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Sejahtera Mapan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 28 Desember 2013 dengan pembayaran premi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun. Polis ini memiliki manfaat asuransi tambahan, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan manfaat pembayaran premi. Adapun dana masuk dalam polis tersebut sebesar Rp. 1.001.061.000,00, terdiri dari pembayara premi tahun 2013 dan tahun 2014. Setelah itu, pada Tahun 2015, nasabah mengajukan cuti premi s.d. penutupan polis.

Status polis tersebut sudah tidak aktif berdasarkan dokumen pengajuan penutupan polis pada Tanggal 18 Juni 2019 dan telah dilakukan pentransferan dana pada Tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp. 727.802.801,92- yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 104-001-4081959 An. Muddai Madang.

Nomor Polis : 514-8190936

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Sejahtera Mapan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 25 Mei 2015 dengan pembayaran premi sebesar Rp.250.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun. Polis ini memiliki manfaat asuransi tambahan, yaitu asuransi kesehatan. Adapun dana masuk dalam polis tersebut sebesar Rp. 750.002.000,00, terdiri dari pembayaran premi tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. Setelah itu, mengajukan cuti premi pada bulan Mei 2017 sehingga pada Tahun 2018 s.d. penutupan polis tidak pernah lagi melakukan pembayaran premi.

Nasabah pernah melakukan penarikan dana pada Tanggal 9 Agustus 2019 dan disetujui pada Tanggal 30 Agustus 2019 serta dilakukan pentransferan



dana pada Tanggal 2 September 2019 dengan jumlah sebesar Rp.499,716,494.95 yang masuk ke rekening Bank Mandiri.

Status polis tersebut sudah tidak aktif berdasarkan dokumen pengajuan penutupan polis pada Tanggal 19 Juni 2020 dan telah dilakukan pentransferan dana pada Tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp. 15.984.883,82- yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 104-001-4081959 An. Muddai Madang.

2. Nomor Polis : 519-6381627

Tercatat pemegang polis atas nama Muddai Madang, dengan produk Mandiri Elite Plan, yang mana polis tersebut aktif ditanggal 28 Juni 2019 dengan pembayaran premi sebesar USD 11.000 (sebelas ribu dollar amerika) per tahun. Namun, untuk pembayaran premi tahun berikutnya, nasabah sudah tidak memiliki dana tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pendebitan secara otomatis, dan telah dilakukan klarifikasi kepada nasabah terkait rencana auto surrender (penonakifan polis secara otomatis) yang akan dilakukan PT. AXA, setelah itu dari pihak PT. AXA melakukan penutupan polis dan dilakukan pengembalian dana dari investasi pada Tanggal 2 September 2020 sebesar USD 6303,43 yang yang masuk ke rekening Bank Mandiri dengan No. 113-007-8909-870 (USD) An. Muddai Madang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/atau keberatan dan telah diputus pada tanggal 24 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muddai Madang tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum: No. Reg. Perk: PDS – 20 /L.6.14/Ft.1/12/2022 dan No. Reg. Perk: PDS – 16 /N.6.14/Ft.1/12/2022 (Penggabungan Perkara berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP) tertanggal Januari 2022 sebagai Surat Dakwaan yang sah.
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muddai Madang dengan Surat Dakwaan: No. Reg. Perk: PDS – 20 /L.6.14/Ft.1/12/2022 dan No. Reg. Perk: PDS – 16



/N.6.14/Ft.1/12/2022 (Penggabungan Perkara berdasarkan Pasal 141 huruf a KUHP) tertanggal Januari 2022.

5. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidana tanggal 25 Mei 2022, telah menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUDDAI MADANG telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair (dalam perkara PDPDE Sumsel) DAN Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair (dalam perkara pembangunan Mesjid Sriwijaya) DAN Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDDAI MADANG berupa Pidana Penjara selama **20 (dua puluh)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
- 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun kurungan.
- 4) Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti total sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD17.912.334,41 (*tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu dollar amerika serikat*), dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramdhan.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Halaman 167 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00180 seluas 1.999 M² yang terletak di Kel. Triyoso Lama, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03200 seluas 9.975 M² yang terletak di Kel. Kota Baru Selatan, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu,



Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

5) Barang bukti :

Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa MUDDAI MADANG dengan diktum sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PDPDE SUMSEL ROMAWI I. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN.

Huruf A Nomor 1 berupa : Laporan Keuangan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. (legalisir sesuai dengan aslinya) sampai dengan Huruf BE.5 angka 6 berupa : 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM. DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA ALEX NOERDIN. ROMAWI II. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN.

Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Nomor: 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, Customer: Endang Budiansih, Unit: Apartemen Lantai 11 No. 12, Notaris Dr. Erny Kencanawati, SH.,MH. Notaris Kota Bandung.

Sampai dengan

Huruf T angka 2 berupa : Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA ALEX NOERDIN ROMAWI III. DISITA DALAM PERKARA AN. AHMAD YANIARSYAH HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota, type Voxy 2.0 A/T, tahun pembuatan: 2019, nomor rangka: JT7X2RB80K7015982, nomor mesin: 3ZR0D75369, warna: putih metalik, nomor polisi B-1750-WUN beserta kunci kontak

Sampai dengan

Huruf D Nomor 2 berupa : 1 (satu) unit Bangunan di Rusun Hunian dan Non Hunian Lippo Sudirman Condominium Jln. Garnisun Dalam Rt.10/01 No. 8 No. C6C (3), Lt. 6, Blok C, sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMRS) No. 603/IV/C luas bangunan 92 m2 (Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta dengan pemegang hak a.n. PT PALSIN ANUGERAH ADIL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 56/2013, tanggal 13/12/2013, yang dibuat oleh Ny. Suryati Moerwibowo, S.H., selaku PPAT.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA ALEX NOERDIN

Angka 1 .1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan X-Tra CIMB Niaga atas nama Dra. Majidah Bahar dengan nomor rekening : 302-01-00370-18-4 Cabang CIMB Jakarta Pamulang.

Sampai dengan

Angka 18.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reny Merawati NIK: 32710469056800007

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA ALEX NOERDIN ROMAWI IV. DISITA DALAM PERKARA AN. TERDAKWA MUDDAI MADANG

Barang bukti dokumen pada :

Huruf a.1 berupa : 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174061004121006 An. Nama Kepala Keluarga : Muddai Madang

Sampai dengan

Huruf r.2 berupa : 1(satu) set print out Formulir Pembukaan Rekening Nasabah An. Muddai Madang beserta Mutasi Rekening Bank BNI dengan No. Rek. 7914081959 atas nama Muddai Madang Periode Tanggal 31/07/2013 s.d. 05/11/2021

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA AN. TERDAKWA MUDDAI MADANG.

ASET KENDARAAN BERMOTOR

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-

Halaman 170 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramdhan
2. 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi dengan No. Pol. B 300 LPE
 3. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19372872.C Tanggal 14 September 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawi No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641.
 4. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 1569319, untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawi No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641
 5. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah
 6. 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Innova dengan No. Pol B 1881 SFC
 7. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19005683.C Tanggal 22 Juli 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin : 1TRA620685.
 8. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C0575067 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin :



1TRA620685

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Vellfire dengan No. Pol. B 818 SFC
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 08637267 Tanggal 02 Februari 2019 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 818 SFC, atas nama : Muddai Madang, alamat : Jl. Kemang Selatan XII /1BCS, Jakarta Selatan, Merk: Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT Model: Micro / Minibus , Tahun Pembuatan : 2018, dengan No. Rangka : AGH300178805, dan No. Mesin : 2ARJ075113.
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. A 0244197, untuk kendaraan bermotor dengan No. B 818 SFC, atas nama : Muddai Madang, alamat : Jl. Kemang Selatan XII /1BCS, Jakarta Selatan, Merk: Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT Model: Micro / Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, dengan No. Rangka : AGH300178805, dan No. Mesin : 2ARJ075113

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.



- | |
|---|
| <p>1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.</p> |
| <p>2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.</p> |
| <p>1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> |
| <p>1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.</p> |
| <p>1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>5. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M² yang terletak di Kel. Sungai</p> |



Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00180 seluas 1.999 M ² yang terletak di Kel. Triyoso Lama, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03200 seluas 9.975 M ² yang terletak di Kel. Kota Baru Selatan, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M ² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M ² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita
3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M ² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M ² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
5. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M ² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

ROMAWI IV. DISITA DALAM PERKARA AN. ALEX NOERDIN barang bukti dokumen pada nomor 1 s/d 2 DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. ALEX NOERDIN

Nomor 1 angka 1 berupa : 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang DPR dengan Nomor Rekening : 122-00-1023355-2 atas nama Alex Noerdin Periode 02 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 angka 7 berupa : 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1130090919501 atas nama Alex Noerdin Periode 15 Desember 2020 sampai dengan 30 April 2021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA ALEX NOERDIN

B. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PEMBANGUNAN MESJID SRIWIJAYA

Barang bukti No. 1 berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli).

Sampai dengan

Barang bukti No. 591 berupa :1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara.

Barang bukti Kendaraan Bermotor :

Barang bukti Nomor :

592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI.

593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI.

594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092.

645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN.

646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B

Halaman 175 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt./Rw 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang. No.
KTP : 1671045207620004.

647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I
dengan Nomor Registrasi BG-188-TA. Nama Pemilik : Tinati
Gunawan. Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel.
Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang. Merk : Toyota. Jenis :
Sedan. Tahun Pembuatan : 2008. Warna KB : Hitam Metalik. Isi
Silinder 3456cc. Nomor Rangka MR053KK4089001882. Nomor
Mesin : 2GR-0570469. Nomor BPKB : L-09019224. Tipe : Camry
3.5Q A/T.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa EDDY HERMANTO dan Terdakwa
SYARIFUDDIN MF

Barang bukti Nomor :

595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik.

596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik.

597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik.

598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi.

599 Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :

Halaman 176 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi.

600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi.

601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994
tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki
Novandi.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa EDDY HERMANTO dan terdakwa
SYARIFUDDIN MF

Barang bukti Nomor :

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor :
0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak
Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang
yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan
Cabang.

754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan
Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021
tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku
Plh. Kepala Kantor.

755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang
tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat
nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik
Jari.

756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco
Perdana.

757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor :
15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit
yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur.

758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang.

759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang.

760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang.

761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024.

762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa EDDY HERMANTO dan terdakwa SYARIFUDDIN MF

Barang bukti Nomor :

864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik

Halaman 178 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa EDDY HERMANTO dan terdakwa SYARIFUDDIN MF.

Barang bukti Nomor :

869 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa EDDY HERMANTO dan terdakwa SYARIFUDDIN MF

Halaman 179 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti No. 871 berupa : 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015

Sampai dengan

Barang bukti No. 1009 berupa : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, tanggal 15 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muddai Madang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena Terdakwa Muddai Madang dari Dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muddai Madang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum DAN melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan KETIGA Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muddai Madang dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa Muddai Madang dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
8. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti total sebesar Rp.36.030.590.263,45 (tiga puluh enam milyar tiga puluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah empat puluh lima Sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

9. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita;

- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 m² yang terletak di Kel.Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang atas nama Muddai Madang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mudday Madang;

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita;

Halaman 181 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Pemegang hak Muddai Madang;
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muddai Madang;

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita;

10. Barang Bukti berupa:

Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Muddai Madang dengan diktum sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PDPDE SUMSEL

- A.1. Laporan Keuangan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. (legalisir sesuai dengan aslinya);
2. Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rama Wendra PT. PDPDE GAS 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Tanggal 1 Januari 2011 per 31 Desember 2010 disajikan kembali dan Tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan kembali mata uang dolar Amerika Serikat. (legalisir sesuai dengan aslinya);
3. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
4. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
5. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
6. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);

Halaman 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



7. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
8. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
9. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7001433487-Giro BSM dari Tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
10. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7035932601-Rek. Escrow dari Tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
11. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek. 0090351103 dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya);
12. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek.7001433479-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
13. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek.0090351117-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya);
14. Perjanjian Jual Beli Gas PDPDE Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954 dan Nomor PDPDE Ref:11/PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 Nopember 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
15. Perubahan Pertama Pada Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0033 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
16. Perjanjian Pemindahtanganan Dan Pengalihan Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0034 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
17. Surat Keputusan BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
18. 1 (satu) bundel tagihan penjualan gas bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dari Tahun 2011 sampai dengan 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
19. Surat dari Kementerian SDM RI yang ditujukan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMIGAS Nomor: 7654/12/MEM.M/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Perihal Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara PT. Pertamina Hulu Energi 05Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan);

20. Surat dari BPMIGAS yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Nomor: 1179/BPB3000/2011/S2 Tanggal 28 Desember 2011 Perihal Surat Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), PT. Pembangunan Kota Batam (PKB) dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan);
21. Surat Direktorat Jenderal Migas kepada Direktur Badan Usaha Niaga Gas Bumi Nomor: 2798/10/DJM.0/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Implementasi Permen ESDM No 06 Tahun 2016 oleh Badan Usaha Eksisting. (Salinan yang disahkan perusahaan);
22. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel Nomor: 045/S/D/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
23. Surat PDPDE Sumsel kepada PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Perihal Surat PT PDPDE Gas No. 045/S/D/III/2018 terkait Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
24. Surat PDPDE Sumsel kepada Menteri ESDM nomor 169/PDPDE/SS/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Permen ESDM No 06 tahun 2016 tentang Ketentuan Tatacara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Salinan yang disahkan perusahaan);
25. Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 antara PDPDE SS dan PT PDPDE Gas, diketahui oleh Direktorat Jendral Migas, SKK Migas, BPH Migas, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang tanggal 3 April 2018 (Salinan yang disahkan perusahaan);
26. Surat Menteri ESDM kpd SKK Migas Nomor 2866/13/MEM.M/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);
27. Surat SKK Migas kepada JOB PTJM Nomor SRT-0039/SKKMG5300/2018/S2 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penyampaian Surat Menteri ESDM Terkait Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan);
28. Surat JOB PTJM kepada PT PDPDE Gas nomor MAN-J/18 – 1003 tanggal 19 Juli 2018 tentang Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Mengenai Realokasi Gas Bumi Dari Wilayah Kerja Jambi

Halaman 184 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Merang(Salinan yang disahkan perusahaan);
29. Notulen dan daftar hadir Rapat antara Direktorat Jenderal Migas, BPH Migas, JOB PTJM, PT PGN Tbk, PT Gagasan Energi Indonesia, PT PDPDE Gas, PT Inti Daya Latu Prima tanggal 13 September 2018 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Realokasi Gas Bumi Dari WK Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan);
 30. Surat Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel nomor 542/1978/IV/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Realokasi Gas dan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Wilayah Kerja Jambi Merang dari PDPDE ke PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);
 31. Surat JOB PTJM kpd SKK Migas nomor MAN-J/18 - 1498 tanggal 25 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Konsep Novasi Pada PJBG antara Penjual Jambi Merang dan PDPDE Sumsel kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);
- B.1. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
2. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 3. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 4. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2013. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 5. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2014. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 6. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2015. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 7. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 8. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2017. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 9. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 10. Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Dollar No.Rek. 7821822933 dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 11. Rekening Koran Bank Mandiri Dollar Tahun 2010 s/d 2019 No. Rek. 113-00-0401873-9. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 12. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2014, yang terdiri dari:
(Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref. SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-10.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015;
5. Debet Note Nomor: 04/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 075/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657173 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2014 Tanggal 6 Februari 2015;
13. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 143/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-11.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2015 Tanggal 06 Februari 2015;
 5. Debet Note Nomor: 05/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657174 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2015 Tanggal 6 Februari 2015;
14. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 142/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-12.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015;
 5. Debet Note Nomor: 06/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16

Halaman 186 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 077/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657175 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2015 Tanggal 1 Maret 2015;
15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 184/PDPDE/SS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-22.0415 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2015 Tanggal 1 April 2015;
 5. Debet Note Nomor: 09/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel dan Nomor: 11/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 092/S/D2/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998361 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2015 Tanggal 1 April 2015;
16. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 230/PDPDE/SS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-26.0515 Tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2015 Tanggal 1 Mei 2015;
 5. Debet Note Nomor: 12/DN-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 116/S/D2/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei

Halaman 187 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998364 Tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2015 Tanggal 4 Mei 2015;
 17. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 289/PDPDE/SS/VI/2015 Tanggal 3 Juni 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-32.0615 Tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 5. Debet Note Nomor: 14/DN-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 149/S/D2/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 025/INV-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998369 Tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 18. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 330/PDPDE/SS/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2015 Tanggal 1 Juli 2015;
 5. Debet Note Nomor: 15/DN-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 195/S/D2/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 029/INV-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998372 Tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2015 Tanggal 1 Juli 2015;
 19. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT.

Halaman 188 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 371/PDPDE/SS/VIII/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 perihal Invoice penjualan gas;
3. Invoice Nomor: G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2015 Tanggal 1 Agustus 2015;
5. Debet Note Nomor: 16/DN-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 208/S/D2/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998373 Tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2015 Tanggal 1 Agustus 2015;
20. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 422/PDPDE/SS/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2015 Tanggal 1 September 2015;
 5. Debet Note Nomor: 17/DN-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 227/S/D2/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998376 Tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2015 Tanggal 1 September 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 484/PDPDE/SS/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice penjualan gas;
3. Invoice Nomor: G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
 5. Debet Note Nomor: 18/DN-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 257/S/D2/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998379 Tanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 534/PDPDE/SS/XI/2015 Tanggal 4 November 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-52.1115 Tanggal 04 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2015 Tanggal 1 Nopember 2015;
 5. Debet Note Nomor: 19/DN-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 281/S/D2/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 046/INV-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.92889588 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2015 Tanggal 1 Nopember 2015
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-13/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 585/PDPDE/SS/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2015 Tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 190 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Debet Note Nomor: 20/DN-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 311/S/D3/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 050/INV-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.004-15.44651671 Tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2015 Tanggal 1 Desember 2015
24. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 12 Januari 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 06/PDPDE/SS/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2015;
 3. Invoice Nomor: G-02.0116 Tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2015 Tanggal 1 Januari 2016;
 5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 020/S/D3/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224083 Tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2015 Tanggal 1 Januari 2016;
25. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 11 Februari 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 46/PDPDE/SS/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/16 Tanggal 01 Februari 2016;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 050/S/D/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal

Halaman 191 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 008/INV-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224086 Tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2016 Tanggal 01 Februari 2016;
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 097/PDPDE/SS/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Februari 2016;
 3. Invoice Nomor: G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/16 Tanggal 01 Maret 2016;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 074/S/D/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224089 Tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2016 Tanggal 01 Maret 2016;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 April 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 153/PDPDE/SS/IV/2016 Tanggal 05 April 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2016;
 3. Invoice Nomor: G-15.0416 Tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/16;
 5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 108/S/D/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224096 Tanggal 01 April

Halaman 192 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2016 Tanggal 01 April 2016;
28. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan);
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 13 Mei 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 205/PDPDE/SS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2016;
 3. Invoice Nomor: G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/16 Tanggal 01 Mei 2016;
 5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 131/S/D/IV/2016 Tanggal 03 Mei 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 017/INV-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224093 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2016 Tanggal 01 Mei 2016;
29. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 258/PDPDE/SS/VI/2016 Tanggal 03 Juni 2016 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/16;
 5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 160/S/D/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224098 Tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Mei 2016 Tanggal 01 Juni 2016;
30. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2016, yang terdiri dari: (Salinan

Halaman 193 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 Juli 2016;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 307/PDPDE/SS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2016;
3. Invoice Nomor: G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/16 Tanggal 01 Juli 2016;
5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 185/S/D/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 028/INV-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224101 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Juni 2016 Tanggal 01 Juli 2016;
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 340/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2016;
 3. Invoice Nomor: G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/16 Tanggal 01 Agustus 2016;
 5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 032/INV-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224105 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2016 Tanggal 01 Agustus 2016;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 September 2016;

Halaman 194 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 398/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Agustus 2016;
3. Invoice Nomor: G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/16 Tanggal 01 September 2016;
5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 219/S/D/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224107 Tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2016 Tanggal 01 September 2016;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 18 Oktober 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 445/PDPDE/SS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan September 2016;
 3. Invoice Nomor: G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/16;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 231/S/D/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224110 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2016 Tanggal 01 Oktober 2016;
34. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 16 November 2016 ;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 497/PDPDE/SS/XI/2016 Tanggal 03 November 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2016;
 3. Invoice Nomor: G-46.1116 Tanggal 03 November 2016 yang

Halaman 195 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/16 Tanggal 01 November 2016;
 5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 255/S/D/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224113 Tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Oktober 2016 Tanggal 01 November 2016;
35. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 552/PDPDE/SS/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode November 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/16 Tanggal 01 Desember 2016;
 5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 279/S/D/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224116 Tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode November 2016 Tanggal 01 Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 19 Januari 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 05/PDPDE/SS/I/2017 Tanggal 04 Januari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Desember 2016;
 3. Invoice Nomor: G-01.0117 Tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/16 Tanggal 01 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 004/S/D/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653349 Tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2016 Tanggal 01 Januari 2017;
37. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: ;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 44/PDPDE/SS/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Januari 2017;
 3. Invoice Nomor: G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/17;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Februari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 6. Surat Dari PT. PDPDE GAS Nomor: 039/S/D/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017 Yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal invoice pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Februari 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653352 Tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2017 Tanggal 01 Februari 2017;
38. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 17 Maret 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 105/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 03 Maret 2017 perihal Tagihan penjualan gas bulan Februari 2017;
 3. Invoice Nomor: G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/17 Tanggal 01 Maret 2017;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 056/S/D/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal

Halaman 197 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653354 Tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2017 Tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 12 April 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 148/PDPDE/SS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2017;
 3. Invoice Nomor: G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/17 Tanggal 01 April 2017;
 5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 069/S/D/VI/2017 Tanggal 03 April 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 014/INV-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653357 Tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2017 Tanggal 01 April 2017;
40. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 16 Mei 2017
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 219/PDPDE/SS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2017
 3. Invoice Nomor: G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/17;
 5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 018/INV-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653360 Tanggal 02 Mei

Halaman 198 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2017 Tanggal 01 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 276/PDPDE/SS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2017;
 3. Invoice Nomor: G-23.00517 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juni 2017;
 5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 090/S/D/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 022/INV-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653363 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2017 Tanggal 01 Juni 2017;
42. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 321/PDPDE/SS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2017;
 3. Invoice Nomor: G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juli 2017;
 5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 109/S/D/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 026/INV-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653366 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2017 Tanggal 01 Juli 2017;
43. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 368/PDPDE/SS/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2017;
3. Invoice Nomor: G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 1136/S/D/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 030/INV-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653369 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
44. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 443/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 05 September 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2017;
 3. Invoice Nomor: G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2017 Tanggal 01 September 2017;
 5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 156/S/D/IX//2017 Tanggal 04 September 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 034/INV-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653372 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2017 Tanggal 01 September 2017;
45. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 529/PDPDE/SS/X/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2017;
 3. Invoice Nomor: G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 yang

Halaman 200 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2017 Tanggal 01 Oktober 2017;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 178/S/D/XI/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 038/INV-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653375 Tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2017 Tanggal 01 Oktober 2017;
46. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 591/PDPDE/SS/XI/2017 Tanggal 03 Nopember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2017;
 3. Invoice Nomor: G-44.1117 Tanggal 03 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2017 Tanggal 01 Nopember 2017;
 5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/XII/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 042/INV-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653378 Tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2017 Tanggal 01 Nopember 2017;
47. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 676/PDPDE/SS/XII/2017 Tanggal 05 Desember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2017;
 3. Invoice Nomor: G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2017 Tanggal 01 Desember 2017;
 5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 217/S/D/XII//2017 Tanggal 04 Desember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653381 Tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2017 Tanggal 01 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 11/PDPDE/SS//2018 Tanggal 04 Januari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2017;
 3. Invoice Nomor: G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2017 Tanggal 01 Januari 2018;
 5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS//2018 Tanggal 02 Januari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 017/S/D//2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS//2018 Tanggal 02 Januari 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930488 Tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2017 Tanggal 01 Januari 2018;
49. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 68/PDPDE/SS//2018 Tanggal 02 Februari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2018;
 3. Invoice Nomor: G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2018 Tanggal 01 Februari 2018;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS//2018 Tanggal 01 Februari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 028/S/D//2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS//2018 Tanggal 01 Februari 2018;

Halaman 202 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930491 Tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2018 Tanggal 01 Februari 2018;
50. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 134/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 02 Maret 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2018;
 3. Invoice Nomor: G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2018 Tanggal 01 Maret 2018;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 040/S/D/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930494 Tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2018 Tanggal 01 Maret 2018;
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 205/PDPDE/SS/IV/2018 Tanggal 03 April 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Maret 2018;
 3. Invoice Nomor: G-15.0418 Tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2018 Tanggal 01 April 2018;
 5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 057/S/D/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 015/INV-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930497 Tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2018 Tanggal 01 April 2018;
52. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2018, yang terdiri dari: (Salinan

Halaman 203 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 264/PDPDE/SS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan April 2018;
3. Invoice Nomor: G-19.0518 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2018 Tanggal 01 Mei 2018;
5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 080/S/D/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 019/INV-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930500 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2018 Tanggal 01 Mei 2018;
53. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 332/PDPDE/SS/VI/2018 Tanggal 05 Juni 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2018;
 3. Invoice Nomor: G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2018 Tanggal 01 Juni 2018;
 5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 101/S/D/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930503 Tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2018 Tanggal 01 Juni 2018;
54. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 367/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2018;



3. Invoice Nomor: G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2018 Tanggal 01 Juli 2018;
5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 138/S/D/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 027/INV-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572400 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2018 Tanggal 01 Juli 2018;
55. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 432/PDPDE/SS/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2018;
 3. Invoice Nomor: G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2018 Tanggal 01 Agustus 2018;
 5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 162/S/D/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572403 Tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2018 Tanggal 01 Agustus 2018;
56. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 480/PDPDE/SS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2018;
 3. Invoice Nomor: G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2018 Tanggal 01 September 2018;
 5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03



- September 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 193/S/D/IX/2018 Tanggal 01 September 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572406 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2018 Tanggal 01 September 2018;
57. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 547/PDPDE/SS/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2018;
 3. Invoice Nomor: G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
 5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 215/S/D/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572409 Tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
58. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 605/PDPDE/SS/XI/2018 Tanggal 06 Nopember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2018;
 3. Invoice Nomor: G-52.1118 Tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2018 Tanggal 01 Nopember 2018;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 243/S/D/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018;



8. Faktur Pajak Nomor: 011.003-18.13572412 Tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
59. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 664/PDPDE/SS/XII/2018 Tanggal 05 Desember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2018;
 3. Invoice Nomor: G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2018 Tanggal 01 Desember 2018;
 5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 264/S/D/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572415 Tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2018 Tanggal 01 Desember 2018;
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-1/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 10/PDPDE/SS/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2018;
 3. Invoice Nomor: G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 5. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 005/S/D/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 6. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019;
 7. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.8084822 Tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 8. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2018 Tanggal 01 Januari 2019;
61. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-2/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 61/PDPDE/SS/I/2019 Tanggal 04 Februari 2019



- perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2019;
3. Invoice Nomor: G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2019 Tanggal 01 Februari 2019;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 030/S/D/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848225 Tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2019 Tanggal 01 Februari 2019;
62. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-3/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 82/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2019;
 3. Invoice Nomor: G-11.0219 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2019 Tanggal 9 Februari 2019;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 38/S/D/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848228 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2019 Tanggal 10 Februari 2019;
63. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013;
64. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (Persero) tentang Penyaluran Gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Purwodadi, Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
65. 1 (satu) bundel Notulen rapat hari Jumat tanggal 09 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD;

66. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2015 beserta lampirannya;
67. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2016 beserta lampirannya;
68. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2017 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2018 beserta lampirannya;
69. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2019 beserta lampirannya;
70. 1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan PDPDE Purwodadi;
71. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Desember 2014 s/d Desember 2015);
72. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2016 s/d Desember 2016);
73. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2017 s/d Desember 2017);
74. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2018 s/d Desember 2018);
75. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2019 s/d Februari 2019)
76. Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara PD PDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS Nomor : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 tanggal 23 April 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
77. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. MUSI PRIMA TRANSPORTASI atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 071/S/D/IV/2017, Nomor Pihak Kedua: 148/D/MPT/2017 Tanggal 6 Maret 2017;
78. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. NUTECH DINAMIKA SEMESTA Tentang Pembelian Gas Jambi Merang;
79. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. DINAMEKA MUKTI MITRATAMA Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Tanggal 10 November 2010;
80. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Tanggal 8 Agustus 2011;
81. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT.MULYA TARA MANDIRI Atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama:

Halaman 209 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: MTM-001/V/2016 Tanggal 11 April 2016;
82. Amandemen Perjanjian Pemasaran Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. Nutech Dinamika Semesta Tentang Penurunan Jasa Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 042/K/D/I/2016, Nomor Pihak Kedua: 002/NDS-PDPDE/SP/II/2016 Tanggal 22 Januari 2016;
83. Amandemen Perjanjian Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Penurunan Komisi Pengembangan Usaha Nomor Pihak Pertama: 145/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: 031A/LNI-PDPDEG/IV/2016 Tanggal 11 April 2016;
84. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. DINAMIKA MUKTI MITRATAMA Atas Perjanjian Finding Fee Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013 Tanggal 6 September 2013;
85. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. PALSIN ANUGRAH ADIL Tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Jambi Tanggal 1 Agustus 2011;
86. Surat dari PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Nomor: 090/PDPDEGAS-IEB/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Permohonan Kredit Investasi, Modal Kerja dan Fasilitas SBLC;
87. Surat dari Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada PT. PDPDE Gas Nomor: 13/002-3/SP3/DKI Tanggal 5 Januari 2011 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3);
88. Pembagian Devidem PT PDPDE Gas yang berupa :
- a) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 10 September 2015 . (Salinan yang disahkan perusahaan);
 - b) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 20 Juli 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 - c) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 November 2018 . (Salinan yang disahkan perusahaan);
 - d) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Desember 2018 . (Salinan yang disahkan perusahaan);
89. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-9 Februari 2019, No Invoice 009/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 623.933,40 (Salinan yang disahkan perusahaan);
90. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2019, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 2,015,947.31. (Salinan yang disahkan perusahaan);
91. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Desember 2018, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 1,734,452.52 (Salinan yang disahkan perusahaan);
92. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 November 2018, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2018 sebesar USD 2,040,991.66 (Salinan yang disahkan perusahaan);
93. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Oktober 2018, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2018 sebesar USD 1,998,550.21 (Salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 210 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 September 2018, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2018 sebesar USD 2,045,413.72 (Salinan yang disahkan perusahaan);
95. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Agustus 2018, No. Invoice 033/INV.PDPDEGAS/IX/2018 sebesar USD 2,083,099.70 (Salinan yang disahkan perusahaan);
96. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2018, No. Invoice 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2018 sebesar USD 2,113,351 (Salinan yang disahkan perusahaan);
97. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2018, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2018 sebesar USD 2,036,711 (Salinan yang disahkan perusahaan);
98. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2018, No. Invoice 017/INV.PDPDEGAS/IV/2018 sebesar USD 2,014,351.05 (Salinan yang disahkan perusahaan);
99. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2018, Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2018 sebesar USD 2,108,238.52 (Salinan yang disahkan perusahaan);
100. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2018, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2018 sebesar USD 1,885,282.54 (Salinan yang disahkan perusahaan);
101. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2018, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2018 sebesar USD 2,105,873.2 (Salinan yang disahkan perusahaan);
102. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2017, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/I/2018 sebesar USD 2,051,942.89 (Salinan yang disahkan perusahaan);
103. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2017, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2017 sebesar USD 1,942,800.96 (Salinan yang disahkan perusahaan);
104. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2017, No. Invoice 040/INV.PDPDEGAS/XI/2017 sebesar USD 2,036,881.69 (Salinan yang disahkan perusahaan);
105. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2017, No. Invoice 036/INV.PDPDEGAS/X/2017 sebesar USD 1,963,051.06 (Salinan yang disahkan perusahaan);
106. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2017, No. Invoice 032/INV.PDPDEGAS/IX/2017 sebesar USD 2,025,395.61 (Salinan yang disahkan perusahaan);
107. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2017, No. Invoice 028/INV.PDPDEGAS/VIII/2017 sebesar USD 2,038,904 (Salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 211 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- yang disahkan perusahaan);
108. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2017, No. Invoice 024/INV.PDPDEGAS/VII/2017 sebesar USD 1,959,593.42 (Salinan yang disahkan perusahaan);
109. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2017, No. Invoice 020/INV.PDPDEGAS/VI/2017 sebesar USD 2,029,285,38 (Salinan yang disahkan perusahaan);
110. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2017, No. Invoice 016/INV.PDPDEGAS/V/2017 sebesar USD 1,956,174.51 (Salinan yang disahkan perusahaan);
111. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2017, No. Invoice 012/INV.PDPDEGAS/IV/2017 sebesar USD 2,019,960 (Salinan yang disahkan perusahaan);
112. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2017, No. Invoice 008/INV.PDPDEGAS/III/2017 sebesar USD 1,824,480 (Salinan yang disahkan perusahaan); Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2017, No. Invoice 004/INV.PDPDEGAS/II/2017 sebesar USD 1,197,242.60 (Salinan yang disahkan perusahaan);
113. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2016, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/I/2017 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
114. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2016, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2016 sebesar USD 1,906,800.45 (Salinan yang disahkan perusahaan);
115. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2016, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
116. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2016, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2016 sebesar USD 1,905,143.23 (Salinan yang disahkan perusahaan);
117. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2016, No. Invoice 033/INV.PDPDEGAS/IX/2016 sebesar USD 1,969,655.71 (Salinan yang disahkan perusahaan);
118. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2016, No. Invoice 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2016, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2016 sebesar USD 1,907,285.68 (Salinan yang disahkan perusahaan);
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2016, No. Invoice 021/INV.PDPDEGAS/VI/2016 sebesar USD 1,940,964.48 (Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disahkan perusahaan);
120. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2016, No. Invoice 018/INV.PDPDEGAS/V/2016 sebesar USD 1,906,195.18 (Salinan yang disahkan perusahaan);
121. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2016, No. Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2016 sebesar USD 541/3055/Dispertamben/2009 tgl. 13 Oktober 2009 2,468,723.94 (Salinan yang disahkan perusahaan);
122. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2016, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2016 sebesar USD 2,331,064.23 (Salinan yang disahkan perusahaan);
123. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2016, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2016 sebesar USD 2,462,181.15 (Salinan yang disahkan perusahaan);
- C.1. Transfer pembayaran PT.PLN atas INVOICE No: G-10.0315 Tanggal 09 Maret 2015 (Pengiriman gas Tanggal 18 Desember - 31 Desember 2014). (Salinan yang disahkan perusahaan);
2. Surat dari PDPDE SUMSEL Kepada PT.PLN Nomor:144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Perihal Invoice Penjualan Gas. (Salinan yang disahkan perusahaan);
3. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-22.0415 Tanggal 01 April 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret 2015 - 31 Maret 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
4. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-32.0615 Tanggal 03 Juni 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
5. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 31 Juni 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
6. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
7. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus -31 Agustus 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
8. Transfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 September -30 September 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
9. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1115 Tanggal 04 November 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
10. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
11. Tranfer Penjualan PT. PLN atas Invoice No:G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
12. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
13. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0416 Tanggal 04

Halaman 213 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
14. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 15. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 16. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 17. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 18. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 19. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 20. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-46.1116 Tanggal 03 Nopember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 30 Oktober 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 21. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 22. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-02.0116 Tanggal 05 Januari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 23. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-01.17 Tanggal 04 Januari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 24. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 25. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 26. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 27. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 28. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0617 Tanggal 02 Juni 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 29. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 30. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 31. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31

Halaman 214 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
32. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 33. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.1117 Tanggal 03 November 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 34. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 35. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 36. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 37. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 38. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0418 Tanggal 03 April 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 39. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 40. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 41. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 42. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 43. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 44. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1118 Tanggal 06 November 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 45. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 46. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 47. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 48. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0219 Tanggal 05 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 09 Februari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 49. Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS-LPPPI/PJBG/X/2010

Halaman 215 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Tanggal 22 Oktober 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
50. Addendum Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 51. Addendum II Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 026/PDPDEGAS-LPPPI/K/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 52. Addendum III Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 095/PDPDEGAS-LPPPI/K/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 53. Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018; Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang Periode 2018 - 2022;
 54. Foto copy Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018.
 55. Foto copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE GAS antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN;
 56. Foto copy dokumen Perjanjian Kerja sama Patungan antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang);
 57. Foto copy Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Aggrement) Antara PD PDE Sumsel Dengan PT. DKLN Nomor: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, Nomor: 057/DKLN/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
 58. Foto copy dokumen Surat dari PT. Musi Kreasi yang ditujukan kepada PD PDE Sumsel Cq Caca Ica Saleh, Nomor : 001/PMK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Setoran Modal PT. Permata Musi Kreasi;
 59. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi tanggal 29 Maret 2017 perihal Pemindahan saham PDPDE kepada PT. DKLN;
 60. Foto copy dokumen Surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN (yang telah ada disposisi gubernur Sumsel Tanggal 19 Oktober 2017);
 61. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi tanggal 27 Desember 2017 perihal Pengalihan saham PDPDE kepada PT. DKLN;
 62. Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000 Tanggal 11 Mei 2000 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas



- Bumi;
63. Perda Sumsel Nomor 37 Tahun 2001 Tanggal 12 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi;
 64. Foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi;
 65. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga Tanggal 03 Nopember 2000;
 66. Asli Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009;
 67. Foto copy Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kepala BP Migas Nomor : 541/3055/Dispertamben/2009 Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD. (Telah di stempel perusahaan);
 68. Foto copy surat dari Direktur Utama PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 perihal Ijin Prinsip Join Venture antara PDPDE dengan PT. DKLN " PT. PDPDE GAS" (Salinan yang disahkan perusahaan);
 69. Asli surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel Nomor : 503/3760/IV/2009 Tanggal 16 Desember 2009 perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT. DKLN " PT. PDPDE GAS";
 70. Asli Perjanjian Kerja sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang);
 71. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Pimpinan Cabang bank Mandiri Cab. Arief Jl. Kap. A. Rivai Palembang Nomor: 208/PDPDE/SS/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pencairan & Transfer dengan jumlah Rp. 2.132.000.000,00 ke rekening PT. Permata Musi Kreasi di Bank Mega KCP BEJ Jakarta No. 01.015.00.11.00196 an. PT. Permata Musi Kreasi, sebagai setoran modal PDPDE Sumsel untuk hotel Heritage/butik kepada PT. Permata Musi Kreasi (Salinan yang disahkan perusahaan) dan foto Bilyet Giro Nomor BI 383094 Bank Mandiri sebesar Rp. 2.132.000.000,00 (Telah di stempel perusahaan);
 72. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 73. Asli surat dari Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel Nomor: 573/3052/IV/2017 Tanggal 13 Desember 2017 Perihal Persetujuan Melepas Saham Saham PDPDE Di PT. PDPDE Gas Dan PT. Permata Musi Kreasi;
 74. Asli Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Caca Ica Saleh sebagai Direksi PDPDE Sumsel Periode 2012 s/d 23 Januari 2015;
 75. Asli Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDPE Sumsel dan



- PT. PDPDE GAS untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor:12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor: 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dan foto copy Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE GAS untuk penjualan gas dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor : 087/S/D2/III/2014 Tanggal 4 Maret 2014 (Salinan yang disahkan perusahaan);
76. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 06 Tahun 2016 Tanggal 3 April 2018. (Telah di stempel perusahaan);
77. Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 761/KPTS/IV/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama PD PDE Sumsel dan diganti oleh Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM;
78. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 182/KPTS/IV/2018 Tanggal 14 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan diganti oleh Arief Kadarsyah. (Telah di stempel perusahaan);
79. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT. PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 perihal Surat PT. PDPDE Gas Nomor: 045/S/D/III/2018 Terkait Tindak Lanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
80. Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 535/KPTS/IV/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Sjamsul Rizal Usman Sebagai Direktur Operasi Pada PDPDE. (Telah di stempel perusahaan);
81. Foto copy Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Kuasa yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
82. Foto copy Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Perjanjian yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
83. Foto copy Surat dari SKK Migas kepada JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor : SRT-1173/SKKE2000/2014/S2 Tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat Keputusan Tentang Perubahan Atas Surat Penunjukkan Penjual Gas Bumi Bagian Negara untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
84. Foto copy Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0236/SKK00000/2014/S2 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Telah di stempel oleh perusahaan);
85. Foto copy Risalah Rapat Pembahasan Rencana Pengaliran Gas



- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumsel (PDPDE) ke PT. PLN (Persero) Tanggal 26 November 2014. (Telah di stempel oleh perusahaan);
86. Foto copy Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Kuasa PDPDE kepada PT.PDPDE Gas Tentang Penyerahan Pengelolaan Gas yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
 87. Foto copy Surat Gubernur Sumsel yang ditujukan kepada Kepala BP Migas Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari JOB Pertamina-Hess Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
 88. Foto copy dokumen head of agreement of gas sales Agreement antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman Limited, Pacific Oil & Gas Limited dan PDPDE Sumatera Selatan, JOB Ref : MAN-J/10-0446, PDPDE Ref : 07-HOA/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 20 Mei 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 89. Asli Surat dari Gubernur Sumsel kepada Direktur PDPDE Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 perihal Persetujuan Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas;
 90. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada Direktur PT. PDPDE GAS Nomor: 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Dividen. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 91. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang berakhir Tahun 31 Desember 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang. (Salinan yang disahkan perusahaan);
- D.1. 1 (satu) rangkap Kronologi Kerjasama PDPDE
2. 1 (satu) rangkap rekening Giro Bank Panin An. Ratna Yulita, Dra
 3. 1 (satu) berkas Kronologis PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN)
 4. 1 (satu) bundel Legal Opini Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pendirian PT. PDPDE Gas oleh Eddy Os Hiarief
 5. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum tentang Kerjasama pendirian perusahaan Joint Venture antara Pemerintah daerah dan Perusahaan Swasta dalam pengelolaan dan pemamfaatan gas dalam perspektif hukum administrasi negara dan keuangan publik oleh Dr. Dian Puji N Simatupang S.H., M.H
 6. Surat Pelepasan Hak Mobil Toyota Veltire 2.5 ZG Minibus yang ditanda tangani oleh Yasser Arafat Direktur Utama PT. PDPDE GAS
 7. Perjanjian pengikatan Jual Beli Condominium tanggal 08 Juni 2020 antara Ratna Yulita dan Anto Wijaya
 8. 1 (satu) Bundel MAP PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
 9. 1 (satu) bundel copian Sertifikat Rumah Bukit Cinere Indah
 10. 1 (satu) bundel copian Sertifikat tanda bukti hak AG 434094 Kantor Pertanahan Bogor
 11. 1 (satu) bundel Map Hijau Ming Miryani, SH Notaris yang berisi copian sertifikat AI 808897
 12. 1 (satu) bundel Map Axa Mandiri yang berisi copian Sertifikat AD 791214 dan AD 791215
 13. Aplikasi transfer PANIN BANK tanggal 02 – 03 -2020
 14. Surat perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 November 2019 an. Dra Ratna Yulita
 15. 1 (satu) bundel Map Hijau yang berisi copian sertifikat, foto-foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat persetujuan rapat umum saham PT. Musi Lintas Permata
17. Surat konfirmasi (jumlah saham) No. 004/Modal/MLP/XII/2012 tanggal 09 April 2013
18. 1 (satu) bundel perjanjian jasa pengakutan batu bara PT Gorby Putra Utama dan A. Yaniarsyah Hasan.
19. 1 (satu) bundel Map Asuransi MAG An. Ratna Yulita
20. Sertifikat Hak Tanggungan DF 175316 An. Ratna Yulita
21. Sertifikat Tanda Bukti Hak AD. 791214
22. Form Permintaan Dana PT DKLN 09 Oktober 2020
23. Form Permintaan Dana PT DKLN 15 September 2020
24. Perjanjian Kerjasama pengelolaan hotel tanggal 03 Oktober 2017
25. Satu Bundel Supply Agreement tanggal 18 Maret 2020 Toyo Adhi Wakachiku dan PT Octa Citra Rajawali
26. Nota Kesepahaman Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan PT DKLN tanggal 21 September 2020
27. Copian sertifikat AI 190921
28. Copian Sertifikat AJ 126316
29. Copian sertifikat Hak Tanggungan DH 434800
30. Surat persetujuan Fasilitas Kredit KPR Rp 2.258.000.000,- An. Ratna Yulita
31. Copian Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Musi Lintas Permata
32. 1 (satu) bundel Map Akte-Akte Pendirian PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
33. 1 (satu) bundel copian Akta kelahiran An. Mudda'i Madang
34. 1 (satu) bundel surat permasalahan hutang piutang antara PT DKLN dan PT (SEG) Ex PDPDE
35. 1(satu) rangkap penjelasan/keterangan penerimaan dari rekening bank An. Muddai Maddang Direktorat Pajak Kanwil DJB Jawa Timur I
36. 1 (satu) bundel PDPDE Crude Trading
37. 1 (satu) bundel Surat IMB Pemko Kota Bekasi An. Ratna Yulita
38. 1 (satu) bundel IMB Pemko Surabaya An. Muddai Madang
39. Copian Sertifikat AA. 353687
40. 1 (satu) Map Dokumen Rumah Pakuwon berisierah terima dokumen jaminan An. Ratna Yulita
41. 1 (satu) MAP Coklat Air bertulisan Blue Print Asli Pinus Asri F7 Surabaya An. Ratna Yulita
42. Map Coklat Merk Panin Bank berisi Akta Tukar Menukar, copian IMB, Surat Setoran (SSB)
43. 1 Bundel yang terdiri dari :
 - ✓ AKTA Pendirian PT. GRAHA PERMATA SELARAS
 - ✓ AKTA Pendirian PT. OGAN LEMATANG PERMANA ENERGI.
44. 1 Bundel Dokumen- Dokumen dalam Map Merah ISWAN BANGSAWAN
45. 1 Bundel Dokumen Dalam Map Bening berisi Permintaan Dana
46. 1 Bundel Foto copy Pajak dan Sertifikat Kantor Jalan Limau II Nomor 03 dan 01
47. 1 Bundel Dokumen-dokumen dalam Map Biru Bank Mandiri berisi Akta Keputusan Rapat PT. Mitra Energi Buana
48. 1 Bundel Dokumen Transfer KeRatna Sari Dan Notaris Zulkifli Sitompul dalam Map Biru
49. 1 Bundel Dokumen Dokumen dalam Amplop Putih (ATLAS RESOURCES)
50. 1 Bundel Dokumen Map Putih berisi Fotocopy rincian peningkatan

Halaman 220 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



jual beli.

51. 1 (satu) Bundel Sertifikat Rumah yang terdiri dari:
- ✓ Jalan Kemang Selatan XII Nomor 01 (YDPP) No.01 Jakarta Selatan
 - ✓ Jalan Limau II no. 03 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jaksel
 - ✓ Jalan Limau III No.01 Kramat Pela Kebayoran Baru

52. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari:
- ✓ Pembagian Deviden
 - ✓ Invoice PT. PDPDE GAS – PT. LPPPI 2019
 - ✓ Invoice Ship Or Pay PT. TGI
 - ✓ Invoice PT. TGI 2011-2019
 - ✓ Invoice PDPDE SS 2011-2019
 - ✓ Invoice JOB PT. JM 2011-2019.

- E. 1. 2 (dua) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Palsin Anugerah Adil tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pemasaran gas Bumi Kepada PT. Lontar Papyrus Pulp & paper Industry, Jambi;
2. 3 (tiga) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lintas Nusa Investama tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi;
3. 1 (satu) lembar Copy Surat Kepada Bapak Muddai Madang – Komisaris Utama PT. PDPDE tanggal 5 Oktober 2012 perihal: Komisi Penjualan gas 5 BBTU;
4. 6 (enam) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Gas dan Kelengkapannya dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri;
5. 1 (satu) bundel Copy Addendum Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 5 April 2013 tentang Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas sepanjang 51,6 KM di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
6. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 01 September 2014;
7. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan C V. Energi Lestari atas Jasa Komisi Pemasaran tanggal 02 September 2014;
8. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Finding Fee Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Dinameka Mukti Mitratama tanggal 10 November 2010 tentang Pembelian Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang;
9. 4 (empat) Lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE dengan PT. Dinameka Mukti Mitratama atas Perjanjian Finding Gas tentang Pembelian Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013;
10. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pemasaran Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Nutech Dinamika Semesta tanggal 17 Oktober 2010 tentang Pemasaran Gas dari PT. PDPDE;
11. 1 (satu) bundel Copy Deviden 2015 – 2019;
12. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Mulya Tara Mandiri 2016;
13. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017 – 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012 – 2013;
15. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019;
16. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012 – 2019;
17. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019;
18. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Palsin Anugerah Adil 2012 – 2019;
19. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Nutech Dinamika Semester 2012 – 2019;
20. 1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351103 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
21. 1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351117 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
22. 1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-00-11-01050-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
23. 1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-20-11-00115-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
24. 1 (satu) bundel Copy Laporan Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 143-01-00078-00-4 periode 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
25. 1 (satu) bundel Copy Laporan Bulanan Gabungan PT. PDPDE Gas pada Bank Danamon nomor Nasabah 00009183091 periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
26. 1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PD PDE Gas No. 10 tanggal 21 Desember 2009;
 - b. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 5 tanggal 14 November 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PDPDE Gas (Salinan);
 - c. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 12 tanggal 11 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas;
 - d. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor: AHU-AH.01.10-19995 tanggal 05 Juni 2012 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Raya Alamindo kepada: Notaris Rini Yulianti, SH.;
 - e. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 9 tanggal 16 Oktober 2017;
 - f. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rukun Raharja, Tbk (salinan) Nomor 2 tanggal 02 Mei 2019;
 - g. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 10

Halaman 222 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2012;

- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 66/NOT/VI.2012 tanggal 12 April 2012;
- i. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rukun Raharja, Tbk. (salinan) tanggal 17 Mei 2017 nomor: 14;
- j. 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012;
- k. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen;
- l. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen;
- m. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen;
- n. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor Independen;
- o. 1 (satu) bundel Copy Addendum atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 14 Maret 2011;
- 27. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PDPDE Gas tentang Penyaluran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring, Sumatera Selatan tanggal 8 Februari 2013;
- 28. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 22 Oktober 2010;
- 29. 1 (satu) bundel Copy Addendum II atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 10 Februari 2012;
- 30. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Eneergi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan Wilayah Sumatera tanggal 3 September 2014;
- 31. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. Multi Konsultindo Jaya tentang Pekerjaan Jasa Survei Topografi dan Pengukuran Kedalaman Sungai Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api -Muntok;
- 32. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan CV. Nezio tentang Pekerjaan Soil Test Investigation (Sondir) Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok;

Halaman 223 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



33. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. 3S Engineering tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Front End Engineering And Design (Feed) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok;
34. 1 (satu) bundle Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas tanggal 11 April 2016 nomor 11;
35. 1 (satu) bundle Copy Aset Inventaris dan Kendaraan terletak di DKI Jakarta dan Aset Jaringan Pipa Gas Terletak di Simpang Abadi, Tebing Tinggi, Purwodadi Daratan Kempas, Sungai Keruh dan Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
36. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen;
37. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen;
38. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 serta periode Enam Bulan terakhir 30 Juni 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen;
39. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen;
40. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen;
41. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 disertai Laporan Auditor Independen;
42. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen;
43. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Laporan Keuangan In House Per 31 Desember 2012;
44. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai laporan Auditor Independen;
45. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011;
46. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Interim beserta Laporan Keuangan Independen PT. PDPDE Gas Per 30 September 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011;
47. 1 (satu) bundle Copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011;
48. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011;
50. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
51. 1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 Achma, Rasyid, Hisbullah & Jerry;
52. 1 (satu) bundle Copy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Per 31 Desember 2009;
53. 1 (satu) bundle Copy Jejak Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Penjualan gas Bumi Jambi – Merang Sumatera Selatan;
54. 1 (satu) bundle Copy Dugaan Kejahatan Korporasi Penjualan Gas Bagian Negara pada Blok Gas PHE – Talisman Jambi – Merang dan Pemampatan Sumur Minyak Tua di Musi Banyuasin;
55. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 12 tanggal 24 Januari 2011;
56. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 11 tanggal 24 Januari 2011;
57. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 10 tanggal 24 Januari 2011;
58. 1 (satu) lembar Copy berita acara serah terima dokumen legal tanggal 13 Desember 2017;
59. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian dan Pernyataan Jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 37 tanggal 25 Oktober 2017;
60. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 36 tanggal 25 Oktober 2017;
61. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan IV (empat) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 35 tanggal 25 Oktober 2017;
62. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan II (dua) Pemberian Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) nomor 34 tanggal 25 Oktober 2017;
63. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia nomor 33 tanggal 25 Oktober 2017;
64. 1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default nomor 32 tanggal 25 Oktober 2017;
65. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan V (lima) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 31 tanggal 25 Oktober 2017;
66. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan VI (enam) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 30 tanggal 25 Oktober 2017;
67. 1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Murabahah nomor 29 tanggal 25 Oktober 2017;
68. 1 (satu) lembar Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo: AHU-22708.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 03 Mei 2010;
69. 1 (satu) bundle Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas tanggal 21 Desember 2009 nomor 10;

Halaman 225 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



70. 1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
 1. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2019;
 2. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2018;
 3. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2017;
 4. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2016;
 5. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2019;
 6. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2018;
 7. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2016;
 8. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Disertai Laporan Auditor Independen;
 9. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Disertai Laporan Auditor Independen;
 10. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor Independen;
71. 1 (satu) Buah odner berwarna biru, yang berisi dokumen:
 - a. 1 (satu) bundel surat dari PDPDE kepada Direktur teknik dan Lingkungan minyak dan gas bumi Nomor : 475/PDPDE/SS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal undangan resertifikasi tahunan system meter gas orifis perusahaan daerah pertambangan dan energi prov. sumatera selatan di jakabaring, Palembang;
 - b. 1 (satu) bundle surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 10311/18.06/DMT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas orifis milik PT. PDPDE Gas;
 - c. 1 (satu) bundel Surat dari dirjen minyak dan gas kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 9863/18.06/DMT/2014 tanggal 03 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas ultrasonic;
 - d. 1 (Satu) bundel Surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor: 4221/18.03/DMT/2016 tanggal 01 Juli 2016 hal sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP);
 - e. 1 (satu) bundel Mechanical completion certificate attention EFFENDI NATALIE subject : mechanical completion certificate in respect of contract fir utility and water system, date : October 28, 2011 Ref: contract No : 10.09/IKL.ADI/207;
 - f. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyaluran Gas kepada PDPDE SS melalui jalur pipa TGI (28" GS LINE) dalam rangka kegiatan static commissioning PDPDE tanggal 23 Oktober 2011;
 - g. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 004/PV/PDPDE/IND/2012 tanggal 19 Januari 2012;
 - h. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengujian Hydrostatic dari PT. Mitrindo Dutaprakarsa tanggal 19 Agustus 2011;
 - i. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Punch List dari PT



SARI SURYA PERWIRA terkait pekerjaan pemasangan Pipa Gas Diameter 6 inch lokasi simpang abadi menuju PT. LPPPI Kp 29 sampai Kp 51 tanggal 20 Juli 2011;

- j. 1 (satu) bundel surat dari PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA Ref. No : /EXT/TGI/PD/09.11 tanggal 10 Oktober 2011 kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, subject : commissioning and meter running series perusahaan daerah pertambangan dan energi sumatera selatan ("PDPDE") metering facilities at simpang abadi;
- k. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka permohonan izin usaha niaga gas bumi melalui pipa dedicated hilir PT. PDPDE GAS tanggal 11 Mei 2012;
- l. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Gas Chromatograph di Orifice Metering Station LPPPI, Jambi tanggal 23 Juni 2012 antara Pihak Teknisi GC (Sdr. Doddy Nugroho) dengan pihak PT. PDPDE Gas (Sdr. Mustakim);
72. 1 (satu) Odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen CNG – Jakabaring Project Palembang PT. PDPDE Gas tahun 2012;
73. 1 (satu) odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen dari PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 895/PL/DW/IV/2016, equitment : Pipeline, User : PT. PDPDE Sumsel, Location : Jakabaring, Palembang Sumsel, service : Gas, Line : from tapping km 10,5 pipeline simpang Y pusri to gas metering PT. PDPDE Sumse, year built : 2012 beserta 1 (satu) buah CD yang bertulis "PT. PDPDE Sum-Sel 1 unit PL 2016;
74. 1 (satu) odner warna putih terkait dokumen teknis meter gas orifis 4" ANSI 300 dari PT. ANSI MEGA INSTRUMENINDO;
75. 1 (satu) odner warna putih berisi dokumen PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 2479/PL/DW/XII/2012, equitment : pipeline, user : PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energy Sumatera Selatan, location sumatera selatan, line : OD 6" reduce OD 4" from tapping km 10,5 pipeline simpang U Pusri to gas metering PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energy (PDPDE) Sumsel, year build : 2012;
76. 1 (satu) odner warna putih berisikan dokumen manufacturing data record for system meter gas orifis 4" ansi 300 perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) Gas PLTG Jakabaring Sumatera selatan PO. NO : 107/PDPDE-HANDIYAN/K/VI/2012;
77. 1 (satu) amplop berisi dokumen persetujuan melepas saham PDPDE di PT. PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi (asli);
78. 1 (satu) lembar asli surat dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS Nomor : 01/EL/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 perihal penurunan jasa komisi pemasaran yang ditanda tangani oleh Sdr. FIRDAUS NUR selaku Direktur CV. ENERGI LESTARI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy company profile PT. PDPDE Gas a subsidiary of PT. Rukun Raharja Tbk;
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dirut PT. PDPDE Gas kepada BRI Cabang Gatot Subroto Nomor : 183/S/D/X/2016 tanggal 17 Oktober 2017 perihal pembagian deviden;
81. 1 (satu) lembar asli surat Dirut PT. PDPDE kepada PT. Rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja, PT. Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT. Palsin Anugerah Adil, PT. Musi Prima Transportasi Nomor : 182/S/D/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal undangan rapat;

82. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2016 perihal pernyataan keputusan rapat PT. PDPDE Gas Notaris Syarifudin, SH
83. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 17 Mei 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham PT. PDPDE Gas (Salinan) Notaris Rini Yulianti, SH;
84. 1 (satu) bundel hasil scan akta notaris Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT. PDPDE Gas notaris Syarifudin, SH;
85. 1 (satu) buah buku harian tertulis Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun warna hitam;
86. 1 (satu) bundel berisi dokumen :
 - a. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 020/S/D3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal invoice pengangkutan gas.
 - b. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 281/S/D2/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - c. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 311/S/D3/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - d. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 149/S/D2/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - e. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 195/S/D2/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - f. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 208/S/D2/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - g. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 227/S/D2/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - h. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 257/S/D2/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - i. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/15 tanggal 1 Agustus 2015.
 - j. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/15 tanggal 1 Juni 2015.
 - k. Berita Acara penyelesaian pemasangan Gas milik PT. PDPDE-GAS yang berlokasi di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan tanggal 30 Mei 2014.
 - l. Keterangan hasil pengujian Nomor: 401/SPK.5.8.7/KHP/DL/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
 - m. Dokumen invoice No. 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 tanggal 4

Halaman 228 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015.

- n. Dokumen Nomor : 2395/18.06/DMT/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas orifice.
- o. Dokumen Nomor : 26881/18.06/DMT/2013 tanggal 26 November 2013 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas.
- p. Dokumen Nomor : 23707/18.06/DMT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Izin penggunaan pelat orifis milik PDPDE Sumatera Selatan.
- q. Berita Acara pemeriksaan teknis dan kalibrasi sistem alat ukur meter gas ofiris milik PDPDE Sumsel tanggal 22 Oktober 2013.
- r. Dokumen nomor : 172/S/D2/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal rencana perubahan crossing pipa perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel.
- 87. 1 (satu) bundel berisi dokumen perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas JOB Pertamina antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dengan PT. PDPDE GAS.
- 88. 1 (satu) bundel berisi dokumen CV. Energi Lestari
- 89. 1 (satu) bundel berisi :
 - a. Amandemen perjanjian pengembangan proyek gas di Jambi antara PT PDPDE GAS dan PT. Lintas Nusa Investama.
 - b. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Musi Prima Transportasi.
 - c. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Mulya Tara Mandiri.
 - d. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Palsin Anuggerah Adil.
 - e. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Nutech Dinamika Semesta.
 - f. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Dinamika Mukti Mitratama.
 - g. Perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dan PT. Gas.
 - h. Dokumen Kronologi alokasi gas PDPDE Sumsel.
- 90. 1 (satu) buah map berwarna biru, yang berisi :
 - a. dokumen perjanjian antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS tentang penyaluran gas PDPDE Sumsel untuk kebutuhan kelistrikan di Jakabaring Sumsel.
 - b. Dokumen risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. PDPDE GAS.
 - c. Dokumen penjelasan terkait draf invoice bulan januari 2018.
 - d. Dokumen pembayaran angsuran tahap-3 atas tagihan take or Pay.
 - e. Dokumen penyelesaian tagihan take or pay dan pengambilan gas PDPDE Sumsel.
 - f. Berita Acara pembahasan skema pengambilan gas PDPDE
 - g. Dokumen Berita Acara pembahasan amandemen pertama pada PJBG PDPDE dan penyelesaian permasalahan tagihan.
 - h. Dokumen tanggapan dari surat PDPDE perihal pembayaran

Halaman 229 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran tahap 3.

- i. Dokumen pembayaran invoice bulan Januari 2018.
- j. Dokumen angsuran TOP Juni 2017.
- k. Permohonan penyelesaian jumlah kontrak harian.
91. 1 (satu) lembar Copy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tanggal 27 November 2014;
92. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 13 Februari 2017;
93. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 Jan 17 sampai dengan 31 Jan 17;
94. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 Juli 17 sampai dengan 30 Juli 17;
95. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Perubahan Pertama pada Perjanjian Jual beli Gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited;
96. 1 (satu) bundle Nota Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri tanggal 14 Juli 2017;
97. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor 2537/122/DIVGBM/2014 tanggal 24 September 2014 perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi dari PJBG PLN & PDPDE kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
98. 2 (dua) lembar Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 541/2042/IV/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Penyerapan Gas PT. PLN (Persero) atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PLN (Persero) dan PD. Pertambangan dan Energi;
99. 2 (dua) lembar Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi nomor: 240/PDPDE/SS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada Kepala Satuan Gas dan BBM PT. PLN (Persero) perihal Penyerapan Gas PD Pertambangan dan Energi (PDPDE);
100. 2 (dua) lembar Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 2 Februari 2015 perihal pembahasan penurunan JKH dalam OJBG PDPDE;
101. 3 (tiga) lembar Copy Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang tanggal 8 Oktober 2015;
102. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 18 Oktober 2016 perihal Kelanjutan Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Take or Pay (ToP) perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE);
103. 1 (satu) bundle Copy Surat Ref. No. MAN-J/17-0303 tanggal 24 Februari 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal Surat JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM) kepada SKK Migas terkait hasil kesepakatan atas penurunan jumlah kontrak harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) dalam perjanjian jual beli (PJBG) dengan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
104. 2 (dua) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : rekonsiliasi invoice, pengambilan gas make up dan underrtake dan take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pertambangan dan energi ("PDPDE") tanggal 27 Februari 2017 waktu 10.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman



- jambi merang PHE Tower lantai 12;
105. 3 (tiga) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : kelanjutan pembahasan penyelesaian kewajiban take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pertambangan dan energi ("PDPDE") tanggal 18 Oktober 2016 waktu 14.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman jambi merang PHE Tower lantai 12;
 106. 1 (satu) lembar print out berwarna harga gas "harga jual gas" sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 107. 1 (satu) rangkap print out berwarna monthly business review meeting PT. PDPDE Gas Oct 2018;
 108. 1 (satu) bundel asli perjanjian pengangkutan gas PDPDE Sumatera Selatan perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Transportasi Gas Indonesia;
 109. 1 (satu) rangkap kronologi pengajuan claim PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero);
 110. 1 (satu) rangkap print out perjanjian antara PT. PDPDE dan PT. Trimitra Cipta Mandiri tentang jasa pengoperasian & pemeliharaan fasilitas PDPDE gas di Kab. tanjung jabung barat, Prov. Jambi dengan Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014, Nomor Pihak Kedua: 162/BOO/PG/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
 111. Perjanjian jual beli gas antara perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatra selatan PDPDE dan PT. PLN Persero) untuk kelistrikan di Wilayah Sumatra;
 112. Kronologis Alokasi Gas PT. PDPDE dan PT. PLN Persero;
 113. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07 Tahun 2015 tentang tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dari Tie In Di KP 21 Simpang Abadi-Stasiun meter pembangkit listrik tenaga gas purwadadi;
 114. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
 115. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas dan gas bumi;
 116. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI nomor 34 Tahun 2019 tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
 117. 1 (satu) rangkap surat dukungan dari Gubernur Sumatra Selatan tentang dukungan atas permohonan PD. Pertambangan dan Energi kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merak;
 118. Surat dari PT. PDPDE kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Permohonan Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi JOB Jambi marang;
 119. 1 (satu) Bundel Pembayaran Take Or Pay Bulan Agustus 2015, Oktober 2015, Maret 2016;
 120. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Penyerapan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
 121. 1 (satu) lembar Copy Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) Besar Nomor: 456/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 107/27.1BU.1/ 31.71.07.1005/-071.562/e/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
123. 3 (tiga) lembar Copy Surat Ref. No. MAN-J/17 tanggal 19 Juli 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal: Amandemen ke Dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) untuk Penurunan Jumlah Kontrak Harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP);
124. 1 (satu) bundle Copy Berita Acara Hasil Rapat Tanggal 28 Januari 2019 perihal Rekonsiliasi Gas Pengaliran Gas, payment dan GMU balance tahun 2018;
125. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi PT. PDPDE Gas periode Oktober 2018;
126. 2 (dua) lembar Struktur Organisasi PR. PDPDE periode Maret 2016;
127. 1 (satu) lembar Copy NPWP PT. PDPDE;
128. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama Yasser Arafat;
129. 1 (satu) bundle Copy perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Job Ref: MAN-J/10-0954 tanggal 02 November 2010;
130. 1 (satu) buah Map Berwarna Biru, yang berisi:
- 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Daftar Aktiva Tetap Per Tipe Aktiva Tetap pertanggal 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundle Copy Surat Nomor 033/CPO-PTM/JKT/IX/09 tanggal 29 September 2009 kepada PT. Pertamina (Persero) perihal: SOP Inerting dan Penerimaan LPG Pertama Kali Terminal LPG Semarang;
 - 1 (satu) bundle Copy Standard Operating Procedure "Penerimaan LPG Pertama Kali"
 - 1 (satu) bundle Copy Laporan Penilaian Aset PT. Optima Sinergy Comvestama untuk kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri;
 - 1 (satu) bundle Copy KJPP Yanuar dan Rekan Penilaian Aset – PT. Optima Sinergy Comvestama (OPSICO);
 - 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergy Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen;
 - 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergy Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen;
 - 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergy Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
 - 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergy Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta untuk tahun

Halaman 232 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



un-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen;

- j. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen.
131. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar Tahun 2017 berisikan dokumen-dokumen;
132. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 1/4 berisikan dokumen-dokumen;
133. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 3/4 berisikan dokumen-dokumen;
134. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 4/4 berisikan dokumen-dokumen;
135. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar berisikan dokumen-dokumen;
136. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian Tahun 2015 II berisikan dokumen-dokumen;
137. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Gas Surat Keluar Tahun 2015-2016 berisikan dokumen-dokumen;
138. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jan - Juni berisikan dokumen-dokumen;
139. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jul - Des berisikan dokumen-dokumen;
140. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax II berisikan dokumen-dokumen;
141. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax Issue 1 berisikan dokumen-dokumen;
142. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPN Keluaran Masukan 2019 berisikan dokumen-dokumen;
143. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian berisikan dokumen-dokumen;
144. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Jan 2019 berisikan dokumen-dokumen;
145. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Feb 2019 berisikan dokumen-dokumen;
146. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Maret 2019 berisikan dokumen-dokumen;
147. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2018 Jan - Jun berisikan dokumen-dokumen;
148. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan Buku Bank BSM USD Januari - Desember 2011 berisikan dokumen-dokumen;
149. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan R/K Bank BSM berisikan dokumen-dokumen;
150. 1 (satu) odner warna putih depan warna warni berisikan dokumen-dokumen;
151. 1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Keuangan berisikan dokumen-dokumen;
152. 1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Surat Masuk Tahun 2015 berisikan dokumen-dokumen;
153. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Akta PT. Mulya Tera Mandiri dan Akta PT. Palsin Anugrah Adil beserta lampiran.
154. 1 (satu) rangkap dokumen Operational Ekspenses PT. PDPDE GAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) rangkap dokumen Penilaian Aset PT. PDPDE Gas untuk kepentingan Jaminan/Agunan PT. Bank Syariah Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan
 156. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai laporan Auditor Independen
 157. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan Interim PT. PDPDE Gas Periode 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak di Audit)
 158. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai laporan Auditor Independen
 159. 1 (satu) rangkap Invoice Job PTJM 2011-2019
 160. 1 (satu) rangkap Side Letter atas Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN), PT. Palsin Anugerah Adil (Palsin) dan PT. Rukun Raharja TBK (RAJA)
 161. 1 (satu) rangkap Invoice PDPDE SS (\$0, 10) 2011-2019
 162. 1 (satu) rangkap Invoice PT TGI 2011-2019
 163. 1 (satu) rangkap Invoice Gas PT PDPDE Gas – PT. LPPPI 2019
 164. 1 (satu) rangkap Invoice Take Or Pay JOB PTJM
 165. 1 (satu) rangkap Invoice Ship Or Pay PT. TGI
 166. 1 (satu) rangkap Pembagian Deviden o0-
 167. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
 168. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Palsin Anugrah Adil 2012-2019
 169. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Nutech Dinamika 2012-2019
 170. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
 171. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012-2016
 172. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
 173. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017-2018
 174. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Mulya Tara mandiri 2016
 175. 1 (satu) rangkap Deviden 2015 s/d 2019
 176. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012-2013.
- F. 1. 1 (satu) fotocopy Akta Pendirian Nomor : 73, 29 Agustus 20014 CV. ENERGI LESTARI dari Kantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : C-295. HT. 03 01- Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005.
 2. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 05 Maret 2012.
 3. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juni 2012.
 4. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 04 April 2012.
 5. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 14 November 2011.
 6. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-

Halaman 234 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 11 November 2012.
7. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Januari 2013.
 8. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 September 2012.
 9. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 07 Mei 2012.
 10. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juli 2012.
 11. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 39.600.000,- tanggal 07 Agustus 2012.
 12. 1 (satu) buah fotocopy Kontrak Engineering Procurement Dan Contruction antara PT. PDPD GAS dengan PT. ADIPROTEK ENVIRODUNIA.
 13. 1 (satu) Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI atas Jasa Komisi Pemasaran, Nomor 233/K/D/IX/2014 Nomor Pihak Kedua 01/EL/IX/2014 Tanggal 02 September 2014.
 14. 1 (satu) buah fotocopy Amandemen Perjanjian Pemasaran Gas Bumi JAMBI MERANG antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 029/K/D/IX/2016 Nomor Pihak Kedua 01/EL/II/2016 Tanggal 06 Januari 2016.
 15. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 176/K/D/VI/2016 Nomor Pihak Kedua : 01/EL/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016.
 16. 1 (satu) buah fotocopy Addendum Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan PT. ENERGI JAMBI LESTARI tentang Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas Sepanjang 51,6 KM, Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor : 082/K/D2/IV/2013 Nomor Pihak Kedua : 02/EJL/M/MOU/IV2013 Tanggal 05 April 2013
 17. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Antara PT. PDPDPE GAS dengan PT. ENERGI JAMBI LESTARI Tentang Pengoprasian Dan Pemeliharaan Pipa Gas Dan Kelengkapannya Dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat Ke PT. Lontar Papyrus Pulp Dan Paper Industry, Nomor PT.PDPDE GAS : 158/PDPDEGAS/K/VIII/2011, Nomor Pihak Kedua : 01/ELJ/DM/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011.
 18. 1 (satu) Persetujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas Nomor 542/1568/AEk, tanggal 20 Juli 2010 dari Bupati Tanjung Jabung Barat.
 19. 1 (satu) Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pemasangan Jalur Pipa Gas Dan Fasilitas Produksi dari Simpang Abadi – PT. Lontar Papyrus and Paper Industri Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas + 6,64 Ha. A.n. PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tanggal 07 Maret 2011.
 20. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 22 Desember 2015 dari

Halaman 235 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



PT. PDPDE GAS kepada CV. Energi Lestari tentang penurunan jasa komisi pemasaran.

21. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 16 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
22. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 26 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
23. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 02 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
- G.1. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang PENGEMBANGAN PROYEK GAS DI JAMBI
2. Print out mutase rekening ASLI dari PT LINTAS NUSA INVESTAMA dari Oktober 2012 sampai dengan Maret 2019
3. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang PEMASARAN GAS BUMI KEPADA PT LONTAR PYPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, JAMBI
4. Dokumen AKTA tgl. 28 Juni 2019 No. 19 perihal Keputusan pemegang saham PT. PALSIN ANUGERAH ADIL
5. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode laporan 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012
6. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012
7. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 03 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012
8. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012
9. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 May 2012 sampai dengan 31 May 2012
10. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012
11. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012
12. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
13. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012
14. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober



2012

15. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Desember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012
16. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013
17. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013
18. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
19. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/08/13 sampai dengan 2/09/13 pada tgl. 31 Agustus 2013
20. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/09/13 sampai dengan 10/10/13 pada tgl. 30 September 2013
21. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013
22. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
23. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
24. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
25. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 30/04/14 pada tgl. 07 Juli 2014
26. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/14 sampai dengan 30/05/14 pada tgl. 07 Juli 2014
27. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/06/14 sampai dengan 30/06/2014 pada tgl. 07 Juli 2014
28. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/07/14 sampai dengan 31/07/14 pada tgl. 28 Agustus 2014
29. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/08/14 sampai dengan 31/08/14 pada tgl. 27 Oktober 2014
30. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/09/14 sampai dengan 30/09/14 pada tgl. 27 Oktober 2014
31. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/14 sampai dengan 31/10/14 pada tgl. 28 November 2014
32. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10200011010740 periode 01/12/14 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/15 pada tgl. 5 Januari 2015

33. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/15 sampai dengan 31/01/15 pada tgl. 2 Maret 2015
34. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015
35. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015
36. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/04/2015 sampai dengan 30/04/15 pada tgl. 18 Mei 2015
37. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/15 sampai dengan 31/05/15 pada tgl. 1 Juni 2015
38. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/06/15 sampai dengan 30/06/15 pada tgl. 3 Juli 2015
39. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015
40. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015
41. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015
42. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/15 sampai dengan 31/10/15 pada tgl. 30 Desember 2015
43. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 November 2015 sampai dengan 30 November 2015
44. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
45. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 April 2016 sampai dengan 30 April 2016
46. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016
47. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016
48. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016
49. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016
50. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 31 September 2016

Halaman 238 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2016
52. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2016
53. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2016
54. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2017
55. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2017
56. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2017
57. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2017
58. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2017
59. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2017
60. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2017
61. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017
62. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2017
63. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2017
64. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2017
65. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2017
66. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2018
67. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018
68. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2018
69. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH

Halaman 239 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2018

70. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018
71. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2018
72. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2018
73. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018
74. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2018
75. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018
76. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2018
77. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2018
78. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2019
79. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2019
80. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2019.

H.1 (satu) Rangkap rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dinameka Multi Mitratama Nomor Rekening 167-0000107-002 Priode Januari 2011 s/d Maret 2019.

- I. 1. 1 (satu) bundle dokumen Fotocopy dilegalisir Akta Pendirian PT. Mulya Citra Mandiri Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2020, yang dibuat Notaris /PPAT Rina Diani Moliza, S.H.
2. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Mulya Citra Mandiri Nomor: 8, tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat Notaris Rina Diani Moliza, S.H.
3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 4 tanggal 05 Juni 2013 tentang pengalihan saham, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 11 tanggal 17 November 2020 tentang perubahan Anggaran dasar dengan menyesuaikan dengan KBLI yang ditetapkan pemerintah, serta mengangkat kembali jajaran pengurus perusahaan, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Pihak I. PT. DKLN dengan Pihak II. Tuan Mulja Djaja Said, Nomor 7 tanggal 24 September 2020, tentang pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang dipergunakan untuk modal kerja PT DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
6. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir turunan Akta Berita Acara RUPS dan perubahan seluruh AD PT Dika Karya Lintas Nusa, Nomor 13, tanggal 14 Oktober 2009, tentang penjamin pengembalian hutang, sehingga terjadi Jual-Beli Saham di dalam PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN);
7. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta perjanjian kesepakatan antar Pemegang Saham PT DKLN, Nomor 02, tanggal 10 April 2013, tentang kesepakatan terjadinya pertukaran saham milik Bapak Said August Putra menunjuk PT MTM sebagai pihak yang berhak atas pencatatan kepemilikan saham yang dilakukan pertukaran oleh PT. DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
8. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Mitra Energi Persada Tbk, Nomor: 22, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
9. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 02 tanggal 10 April 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
10. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 14 tanggal 8 Mei 2014, tentang PT MTM kembali melakukan pembelian saham PT DKLN yang ada pada PT MEP yang dibuat Notaris Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn;
11. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 05 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
12. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 06 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
13. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 07 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
- J. 1. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 20 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
2. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 21 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
3. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limnomor 6it Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 25 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
4. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 26 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
5. Foto copy Salinan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 37 tanggal 18 Juli 2013 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
- K.1. 1 (satu) rangka fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Perseo), tanggal 3 Juni 2010;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Halaman 241 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 291.K/DIR/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pasokan Gas dari PDPDE Dengan Titik Serah Simpang Bayatr Sumatera Selatan Untuk Kelistrikan Di Sumatera dan atau Jawa.
5. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat, Tanggal 09 Nopember 2012, jam 10.00 WIB dengan agenda pembahasan pemamfaatan gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 356/PDPDE/SS/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, perihal Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan sebesar 5 MMSCFD;
7. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat, Tanggal 26 Pebruari 2013, jam 09.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 112/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Tindak lanjut Penawaran Harga Gas PDPDE;
9. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2013, jam 13.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 167/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 17 April 2013, perihal Harga Gas PDPDE ke PLN;
11. 2 Lembar fotokopi surat Petikan Keputusan rapat Direksi tanggal 27 Agustus 2013 tentang Revisi Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Mei 2013 tentang Harga Gas PDPDE (KDIVGBM)
12. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 00580/33/SHK/2012, tanggal 30 Agustus 2013 perihal Review Draft dan Inisialisasi PJBG PDPDE;
13. 1 (satu) Bundle fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PLN (Persero) Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013.
- L. 177.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 13 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deka Karya Lintas Nusa, Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, SH.;
- 178.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Februari 2014 Nomor 22 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 179.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 27 September 2017 Nomor 07 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 180.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 09 April 2019 Nomor 02 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 181.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 21 Desember 2009 Nomor 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 182.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 28 Juni 2012

Halaman 242 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 183.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Maret 2014 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 184.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 19 November 2014 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 185.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 10 Februari 2015 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 186.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 September 2015 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 187.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 11 April 2016 Nomor 12 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 188.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 Januari 2017 Nomor 04 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 189.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 12 Mei 2017 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 190.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 April 2018 Nomor 01 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 191.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 30 November 2020 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham.
- M.53. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pendapatan dari PT. LPPI;
54. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Gas JOB Jambi Merang;
55. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Toll Fee ke PT. TGI;
56. 1 (satu) lembar Print Out Bisnis Model Jambi Operations.
- N.1. 2 (dua) lembar copy Alokasi Gas 15 MMSCFD tanggal 3 Oktober 2009;
2. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 November 2009, Kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
4. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : "PT PDPDE GAS", No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
6. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
8. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No: 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 1 (satu) lembar chat WA;
9. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy;
10. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No: 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 2 (dua) lembar chat WA dan 4 (empat) lembar copy buku catatan;
11. 2 (dua) lembar copy SPPBE – LPG Distribution and Filling Bulk Station Business, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy chat WA;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan Bermotor;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
14. 4 (empat) lembar copy Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007;
15. 3 (tiga) lembar copy Nota Kesepakatan No: 551.21/471/DISHUB/2009, 01 – NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC – PLG/III/2009;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011, Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel;
17. 1 (satu) lembar copy Surat Tentative Agenda Peresmian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Umum Di Palembang, Tanggal 21 Desember 2011;
18. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 16 Desember 2009 Agenda Tindak Lanjut Proyek Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan;
19. 1 (satu) lembar copy Surat Usaha Dari Pihak Tertentu yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014;
20. 2 (dua) lembar copy Surat Tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, tanggal 2 Juli 2015, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. 1 (satu) lembar copy Surat Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, No: 005/5232/IV/2014, tanggal 31 Desember 2014, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
22. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman

Halaman 244 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Indonesia No: C-10465 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2002.

23. 2 (dua) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Perusahaan Pertambangan Energi Nasional ARPENA, Nomor Anggota: 011719 – 01729, tanggal 23 Juni 2006;
24. 4 (empat) lembar copy Surat Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan, No: 10;
25. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE GAS 14 November 2012;
26. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Kantor Bersama, No: 007/S/D2/I/2013, tanggal 08 Januari 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
27. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Kantor Bersama, No: 2/PDPDE/SS/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, Kepada PT PDPDE GAS;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memorandum, Perihal Pencairan Dana Hasil Restitusi, tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran 8 (delapan) lembar copy;
29. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Palsin Anugerah Adil tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Jambi, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
30. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
31. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
32. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Penurunan Jasa Komisi Pemasaran, No: 334/S/D3/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil;
33. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 2 Februari 2015;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
36. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Permintaan Legalitas PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 11 Februari 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil;
37. 2 (dua) bundel copy Akta, tanggal 15 Oktober 2009, No: 8;
38. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS;
39. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDe) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010;

Halaman 245 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, tanggal 30 Desember 2011, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi;
41. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2012, tanggal 6 Desember 2011, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
42. 1 (satu) bundel copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2012, beserta lampiran (10) lembar copy;
43. 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan;
44. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT PDPDE GAS, Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010;
45. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2011, tanggal 20 Desember 2010, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
46. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel Tahun 2012, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
47. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Tanggal Mulai Gas, No: 177/PDPDEGAS-LPPPI/IX/2011, tanggal 12 September 2011, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
48. 1 (satu) bundel copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 06 March 2014, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE;
49. 1 (satu) bundel copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, No: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
50. 1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013;
51. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS, No: KEP-0034/BP00000/2010/S2;
52. 2 (dua) lembar copy Surat Pememrintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ramp up gas PDPDE sebesar 15 BBTUD, No:

Halaman 246 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 26 April 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
53. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD, No: 221/PDPDE/SS/VI/2013, tanggal 27 Mei 2013, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
54. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
55. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
56. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/ 2010, tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
57. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 171/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
58. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
59. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
60. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, tanggal 31 May 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
61. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Persiapan Penerimaan Gas 15.00 BBTUD, No: MAN-J/12-0306, tanggal 21 Mei 2012, Kepada Bapak Caca Ica Saleh;
62. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, No: 0518/122/DIV/GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel;
63. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Draft PJBG antara PLN dengan PDPDE, tanggal 1 Agustus 2013;
64. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Perihal Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, No: 542/2202/Aek/2013, tanggal 27 Juli 2013, Kepada Kepala SKK MIGAS Pusat;
65. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan Di Wilayah Sumatera,

Halaman 247 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013, Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013;

66. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, No: 391/PDPDE/SS/IX/2013, tanggal 10 September 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
67. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, No: 3184/041/WS2JB/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Kepada Konsorsium PT Bugak Brawang Cemerlang, PT Indonesia Power Suksestama, PT Siantar Tara Sejati;
68. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
69. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
70. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, 540/3076/IV/2014/, Komisaris Mewakili Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan di PDPDE GAS, tanggal 5 Desember 2014, Direksi PT PDPDE GAS;
71. 4 (empat) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, 9 Maret 2015, Berserta Lampiran;
72. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, No. 160/KOM/BSM/VII/2013, Jakarta Juli 2013;
73. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012;
74. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan;
75. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
76. 4 (empat) lembar copy Surat Pengangkatan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah;
77. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah Provinsi, No.539/391/IV/2009, Palembang 11 Maret 2009, Perihal Pemberitahuan, Beserta Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 206/KPTS/IV/2009, Palembang 6 Maret 2009;
78. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No.439/KPTS/IV/2010 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Miliki

Halaman 248 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 18 Juni 2010;

79. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 890/KPTS/IV/2013, Tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 Tentang Susunan Pengurusan Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 31 Desember 2013;
80. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, No. 7 Tahun 2000, Palembang 19 Mei 2000;
81. 4 (empat) set copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000;
82. 1 (satu) set lembar copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi 2 (dua) lembar copy
83. 4 (empat) set copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 761/KPTS/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Palembang 16 Desember 2014;
84. 2 (dua) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pengangkatan Pelaksanaan Harian Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 629/KPRS/IV/2008, Palembang 26 September 2008;
85. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 238/KPTS/IV/2014 Tentang Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 - 2017, Palembang 14 Maret 2014;
86. 2 (dua) lembar copy Usaha Pihak Tertentu Yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014;
87. 2 (dua) lembar copy Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah, No. 005/3232/iv/2014, Palembang 31 Desember 2014, Perihal Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, beserta 3 lembar lampiran;
88. 2 (dua) lembar copy Perihal Tuduhan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, Palembang 2 Juli 2015, kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
89. 1 (satu) lembar Copy Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, No. SP2HP/1990/IV/2015/Dit Reskrimum, Palembang 20 April 2015, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Kepada Sdr. ROY LIFRIANDI, S.H.;
90. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik daerah, Jakarta 8 Juni 1999;
91. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3077/XI/2014/Dit Reskrimum,

Halaman 249 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang 20 November 2014;

92. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3286/XII/2014/Dit Reskrim, Palembang 9 Desember 2014;
93. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Syarifudin, S.H., SK Menkeh dan HAM RI No. 8, C-252.ht.03.01-Th.2002, 18 Maret 2002;
94. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No. Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/ PPHP/IV/2010;
95. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli antara PT GRESIK MIGAS dan PT ALAS ENERGY INDONESIA
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), No. 247/Dir.SDK/Eks/PPI/ XII/2015, Kepada Penghuni Rumah/ Gedung/Tanah, Perihal Surat Pemberitahuan
97. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
98. 1 (satu) bundel copy Surat (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemnafaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009;
99. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA: 007/ PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010;
100. 4 (empat) lembar copy Surat PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa Nota kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas, Jakarta 8 Oktober 2009;
101. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
102. 1 (satu) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (Rev.1 tgl 19 Mei 2010);
103. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;

Halaman 250 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
105. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010;
106. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel
107. 4 (empat) lembar copy Surat Alokasi GAS MMSCFD;
108. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/ 2009, Palembang 13 Oktober 2009, Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD, kepada kepala BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy peta;
109. 2 (dua) set copy Pemerintah Proinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 360/PDPDE/SS/XII/2009, Palembang 11 Desember 2009, Perihal Ijin prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa: “PT.PDPDE GAS”, Kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Badan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
110. 1 (satu) bundel copy (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemnafaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009;
111. 1 (satu) bundel copy Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;
112. 2 (dua) bundel copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
113. 2 (dua) set copy Memorandum Kerjasama Perusda;
114. 2 (dua) lembar copy Peraturan Kerjasama Perusda;
115. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000;
116. 2 (dua) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, 19 Mei 2000;
117. 1 (satu) set copy Memorandum Kerjasama Perusda;
118. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. Dika

Halaman 251 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Karya Lintas Nusa, Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas;
119. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan daerah Pertambangan dan Energi, No. 332/PDPDE/SS/XI/2009, Palembang 3 November 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan Untuk pengelolaan dan pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan, kepada Bapak Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawasan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
 120. 1 (satu) lembar copy Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi, 23 Januari 2015;
 121. 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Sebagai Direksi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Periode 2012 s/d 23 Januari 2015, Palembang Januari 2015;
 122. 1 (satu) bundel copy Masalah Saham PDPDE 15% Dengan Nilai Rp. 8.025.000.000,- di PT. PDPDE GAS;
 123. 3 (tiga) bundel copy Surat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 124. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Menteri Dalam Negeri;
 125. 3 (tiga) lembar copy Surat Untuk Mendapatkan Data-Data Pendukung;
 126. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan Bermotor;
 127. 1 (satu) lembar copy Surat PT Bayu Buana Gemilang, Perihal Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
 128. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Persahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007;
 129. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Kesepakatan Nomor: 555-21/471/DISHUB/2009, 01-NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC-PLG/III/2009 tentang Kerjasama Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Kendaraan Bermotor Antara Pemerintahan Kota Palembang dengan PD. Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan DPC Organda Kota Palembang, tanggal 17 – 03 – 2009;
 130. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Tindak Lanjut proyek kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan, tanggal 16 Desember 2009, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir;
 131. 2 (dua) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011, Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel;
 132. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan dengan Bapak Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadarsyah Tahun 2018, beserta lampiran 4 (empat) copy chat WA;
133. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 134. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penyampaian Bahan LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2014, No: 038/PDPDE/SS/II/2015, tanggal 23 Januari 2015, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 135. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 136. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 137. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 PD Pertambangan dan Energi;
 138. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/ PDPDE/SS/II/2013, tanggal Januari 2013, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 139. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2012 PD Pertambangan dan Energi;
 140. 2 (dua) lembar copy Pertanyaan dan Jawaban Soal PT PDPDE GAS;
 141. 2 (dua) lembar copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS;
 142. 1 (satu) lembar FaceSimile (BPMIGAS), No. 0221/BPB3300/2009/S2, Jakarta 17 November, Kepada JOB P-HESS Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up.Direktur Utama, Dari kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar, Perihal Revisi Undangan Presntasi;
 143. 2 lembar Notulen Rapat, Kamis 19 November 2009;
 144. 1 (satu) bundel lembar copy Proposal Joint Venture Company Analisa Keekonomian;
 145. 1 (satu) bundel lembar copy Laporan Keuangan PT. DKLN (Audit);
 146. 1 (satu) bundel Akte Pendirian PT. DKLN;
 147. 1 (satu) bundel copy Domisili TDP NPWP Dan PKP SIUP Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 148. 1 (satu) Bundel Sertifikasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstuksi (LPJKN GAPENSI) Pengadaan Barang dan Jasa (kadin)
 149. 1 (satu) buntel copy berita, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy chat WA;
 150. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Penerimaan;
 151. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Pembayaran Pajak Revisi;

Halaman 253 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 4 (empat) lembar copy Surat Krono Caca isa Saleh ("CIS") Case;
153. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Invoice Periode September 2013, No: 225/S/D2/IX/2013, tanggal 04 Oktober 2013, Kepada PDPDE Sumsel, beserta lampiran 5 (lima) lembar;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Keuangan In House untuk tahun tahun yang berakhir 30 September 2013 dan 30 September 2012 (Dalam Mata Uang United State Dollar);
155. 1 (satu) lembar copy Surat Cek PT PDPDE GAS, Sejumlah Rp. 1.576.987.983,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
156. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri Syariah, PT PDPDE GAS, Jakarta 2016, Kepada Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Perihal Permohonan Pembayaran Final Payment;
157. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7006426, tanggal 24 Juni 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 2.500 (dua ribu lima ratus dollar amerika);
158. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 9421147, atas nama Indarinawan Eko Yulianto;
159. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002629, tanggal 29 – 03 – 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 12.256,63 (dua belas ribu dua ratus lima puluh enam koma enam puluh tiga dollar amerika) ;
160. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002627, atas nama Adrian Utama Gani, Sejumlah USD 29.287 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh dollar amerika).
161. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 288/PDPDE/SS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD;
162. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 152/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD;
163. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
164. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
165. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : "PT PDPDE GAS", No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
166. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar

Halaman 254 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 138/PDPDE/SS/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB), beserta 5 (lima) lembar copy;
167. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
168. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi;
170. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Bisnis Indonesia, Rabu 19 Mei 2020, 8 Kesepakatan bisnis penjualan gas pipa dalam komvensi IPA ke-34;
171. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPPI/V/2010, Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
172. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-003/BP00000/2010/S2, tanggal 09 April 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
173. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 001/PDPDEGAS/LPPPI/III/2010, Perihal Indikatif Kev Terms HoA, tanggal 23 Maret 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI);
174. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 134/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Permohonan tindak lanjut GTA untuk Penyaluran gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT LPPPI), tanggal 21 Mei 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
175. 7 (tujuh) lembar copy Surat Kartu Nama PT Gresik Migas, PT Pembangunan Kota Batam, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Talisman Energy, Pertamina Hulu Energi, PT Intertek Utama Services;
176. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi;
177. 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Kesepakatan Bisnis Penjualan Gas Pipa Yang Akan di tanda tangani pada Forum IPA tanggal 18 Mei 2010;
178. 2 (dua) lembar copy Surat Participant atas nama Caca Isa Saleh Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;

Halaman 255 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



179. 3 (tiga) set copy surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 129/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Penandatanganan HoA Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE), tanggal 12 Mei 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
180. 1 (satu) lembar copy Surat 34th IPA Convention and Exhibition Jakarta Convention Center, 18-20 May 2010;
181. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0418, tanggal 11 Mei 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Pokok-Pokok Perjanjian Penjualan Gas dari JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang;
182. 2 (dua) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
183. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 115/PDPDE/SS/IV/2010, Perihal Penyampaian Laporan Tahunan PDPDE Sumatera Selatan, tanggal 30 April 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
184. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes Of Meeting (MOM) Pembahasan HOA PJBG antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pasific Oil % gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 2 (dua) lembar attendance list;
185. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi;
186. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera;
187. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA;
188. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
189. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian Untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang;

190. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 20 Mei 2010, No: 8, Notaris Syarifudin, SH. SK Menkeh & HAM RI No. C-252-HT.03.01-th.2002, tanggal 18 Maret 2002;
191. 2 (dua) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA; 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010;
192. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 4 (empat) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA;
193. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA, beserta lampiran 5 (lima) lembar copy, dan 1 (satu) bundel Heads of Agreement For The Sale Of Gas From The Jambi Merang PSC ;
194. 5 (lima) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar Masukan Dari PDPDE, dan Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Belajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrastruktur Transportasi dan Energi Repat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Balajasumba tanggal 20 April 2009 di Bandar Lampung;
195. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
196. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
197. 2 (dua) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
198. 2 (dua) lembar copy Surat Head of Agreement (HoA) antara PT Alamigas Mega Energi (AME) dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI) tentang Jual Beli Gas, No. AME: 2270/HoA/AME-LPPI/V/08, No LPPPI: 269/LPPPI/IND/VI/2008;

Halaman 257 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) set copy Surat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu, beserta lampiran 1 (satu) copy Surat Tanda Terima;
201. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Jambi Merang Gas Sales to PD Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 9 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang - PDPDE;
202. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang – PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera;
203. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 072/PDPDE/SS/III/2010, Perihal Undangan Rapat, tanggal 17 Maret 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
205. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima PT Transportasi Gas Indonesia, Sudah Diterima dari Bapak Irwan Tascha Kepada Bapak Caca Isa Saleh, tanggal 10 Maret 2010;
206. 2 (dua) lembar asli Surat No: 032/EXT/TGI/PD/03.10, Subject: Respond to Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Letter regarding Service Request for Gas Transportation, tanggal 9 March 2010;
207. 2 (dua) lembar copy Surat GTA Key Terms for PDPDE for Gas Supply to LPPP, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
208. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0177, tanggal 3 March 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE);
209. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Cover Fax Sheet, Subject Copy Surat Permohonan Penjual Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) ke BPMIGAS tanggal 05 March 2010;
210. 8 (delapan) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal

Halaman 258 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
211. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Penjualan Gas dan Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel, tanggal 24 Februari 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir;
 212. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0082/BPB3300/2010/S2, tanggal 22 Feb 2010, Kepada JOB P-Talisman Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;
 213. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010;
 214. 3 (tiga) lembar copy Surat Karta Tanda Pengenal Robby Ansyah PT Transportasi Gas Indonesia;
 215. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Products, tanggal 9 Februari 2010, No: 122/LPPPI/II/2010, Perihal Kebutuhan Bahan Bakar Gas, Kepada PDPDE Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
 216. 2 (dua) lembar copy Surat Material Stream: Sales Gas, tanggal 10 Nov 2009, Case Name Jambi Merang Composisitons – SK Production.hsc;
 217. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0074, tanggal 28 January 2010, Perihal Due Diligence terhadap Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, beserta lampiran 1 (satu) set;
 218. Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0051, tanggal 20 January 2010, Subject Change of Company Name and Key Personel, Kepada Distribution List (attached) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
 219. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 15/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas, tanggal 22 Januari 2010, Kepada BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar;
 220. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 08/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Profil Perusahaan, tanggal 13 Januari 2010, Kepada JOB Pertamina-Hess Jambi Merang;
 221. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
 222. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Januari 2009, agenda Due Diligence atas kbutuhan Gas PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy

Halaman 259 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Surat Daftar Hadir;

223. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 001/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 002/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar;
225. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;
226. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0814/BPB3000/2009/S2, tanggal 28 Dec 2009, Kepada Petrochina Internasional Jabung Ltd., UP President, JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PT Jambi Indoguna International (BUMD Prop. Jambi) Up. Direktur Utama, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama, Lontar Papyrus Pulp & Paper Up. Direktur Utama;
227. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
228. 1 (satu) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;
229. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : “PT PDPDE GAS”, No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS;
230. 3 (tiga) lembar copy Surat Laporan Kegiatan Progress Rencana Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari Job Pertamina-Hess Jambi Merang;
231. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Patungan Antara PT Dika Karya Lintas Nusa Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 16 November 2009;
232. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa tentang Pemanfaatan Gas 15 MM SCFD di Sumatera Selatan (Job Pertamina – Hess Jambi Merang);
233. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Rencana Pemanfaatan Gas Lapangan Pulau Gading dan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenawang JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 19 November 2009, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0221/BPB3000/2009/S2, tanggal 17 Nov 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;
234. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan;
235. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD;
236. 1 (satu) bundel copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, S.H. tanggal 14 Oktober 2009, No: 13, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, S.H. Surat Keterangan, No: 115/XI/TA.Not.Soy/2009;
237. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita;
238. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 5 Januari 2010, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampira 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama ;
239. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama PT Mitra Energi Buana, A Yaniarsyah hasan;
240. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas, PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 8 Oktober 2009, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar hadir;
241. 2 (dua) lembar copy Surat, Perihal Eprmohonan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Sumatera Selatan, Kepala BPMIGAS;
242. 1 (satu) bundel copy Surat Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Balajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrastrurktu Transportasi dan Energi, Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Baklajasumba, tanggal 20 aprill 2009 di Bandar Lampung.
243. 1 (satu) lembar copy Surat Memo, Perihal Sharing Season, tanggal 6 februari 2012, Kepada Bapak Muddai Madang Dirut PT MEP, Bapak Bambang Hermiyanto KOMUT PT MEP;
244. 4 (empat) lembar copy Surat PT Mitra Energi Buana, Perihal Undangan Rapat, tanggal 1 Februari 2012, Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur utama PT PDPDE GAS;
245. 1 (satu) set asli Surat PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 002/DKLN/III/2012, tanggal 14 Februari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
246. 1 (satu) lembar asli Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 575/0712IV/2012, tanggal 13 Maret 2012, Perihal Penawaran

Halaman 261 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Saham, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, berserta copy 7 lembar;

247. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Gas Delivery Procedure, Standar Operation Procedure & Joint Meter, No: MAN-J/12-0018, tanggal 12 Januari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Up. Direktur Utama, PT Pembangunan Kota Batam Up. Direktur Utama, PT Transportasi Gas Indonesia Up. Direktur Operasional;
248. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pipanisasi Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung;
249. 2 (dua) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur Pipanisasi Gas, tanggal 06 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas;
250. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung;
251. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 2 Januari 2012, Subject Gas Sales Agreement Among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for December 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar;
252. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 351/PDPDE/SS/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012, Kepada Direktur PT PDPDE GAS;
253. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 12 October 2011, No: Man-J/11-0782, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012;
254. 1 (satu) bundel copy Surat Perseroan Terbatas Berkedudukan Di Jakarta, Resipis No: 001 sampai dengan 6.375, tanggal 23 Desember 2011;
255. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 27 Desember 2011;
256. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;
257. 1 (satu) set copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Statement of Gas Delivery to PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-11/11;
258. 2 (dua) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, Invoice no G-13.1211, tanggal 13 Desember 2011;
259. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 23/PTJM/10-PDPDE/2011, tanggal 5 Desember 2011, Perihal Gas Sales Agreement among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang)

Halaman 262 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for October 2011 and November 2011, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 5 (lima) lembar;

260. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama Tately N.V, Heri Suryanto, PT Bayu Buana Gemilang Zaqi Ismail, Novotel Lombok Zainuddin Rosidy, Brian Townsend, PT Kemitraan Energi Industri Yusuf Estantio, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung Apik Chakib Rasjidi Wakil Ketua Umum 1;
261. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 17 November 2011;
262. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industry di Provinsi Jambi, beserta lampiran C Volume Penyerahan Gas di Titik Penyerahan dan Lampiran E Eskalasi Harga Pas;
263. 1 (satu) set copy Surat Scanned Job Letter – PDPDE re: Gas Start Date – Dated 11 Nov 2011, tanggal 17 November 2011;
264. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0850, tanggal 10 November 2011, Perihal Tanggal Mulai Gas;
265. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 31 Oktober 2011;
266. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 005/573/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 8 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE);
267. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi;
268. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 257/PDPDE/SS/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, Perihal Pertemuan PDPDE Sumsel dengan Dispaertamben Prov. Jambi, Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
269. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 0057/541/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 12 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE);
270. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0782, tanggal 12 Oktober 2011, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012;
271. 2 (dua) lembar copy Surat Yahoo Mail, Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 23 September 2011;
272. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0730, tanggal 21 September 2011, Perihal Perkiraan Tanggal Mulai Gas dan Komisioning;
273. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0731, tanggal 21 September 2011, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian pada

Halaman 263 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Condition Precedent;

274. 2 (dua) lembar copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI tanggal 19 September 2011, beserta 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;
275. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 242/PDPDE/SS/IX/2011, tanggal 16 September 2011. Perihal Alokasi Gas 5 MMSCFD, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
276. 4 (empat) lembar copy Surat Temuan Sementara TIMK2PGP;
277. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 225/PDPDE/SS/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011. Perihal Tanggal Mulai Gas; Komisioning, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang) Up General Manager;
278. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE, No: 010/EXT/TGI/OD/08.11, tanggal 25 August 2011;
279. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri FOPI;
280. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, acara Kesepakatan Atas Penggunaan Meter Bersama, di Simpang Bayat, antara JOB PTJM, PDPDE, PKB/IDLP, tanggal 16 Agustus 2011;
281. 3 (tiga) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0611, tanggal 12 Agustus 2011, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Peninjauan Lapangan dan Verifikasi Sistem Meter Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang di Simpang Bayat, Sumatera Selatan;
282. 1 (satu) bundel copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Juli 2011;
283. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Berita Acara Pembahasan Draf Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat-Sumatera Selatan, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
284. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0515, tanggal 8 Juli 2011, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam;
285. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat, Sumatera Selatan;
286. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Sistem Meter atas PJBG antara PT Medco E&P Indonesia (“Medco”) dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (“SP2J”) untuk Pasokan Gas Rumah Tangga di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, tanggal 21 Oktober 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat;
287. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Perlintasan Pipa antara PT PDPDE GAS dengan Petrochina International Jabung Limited, No: 153/PDPDEGAS-PCJL/CP/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011;
288. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Hal Permintaan Klarifikasi;
289. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS Melintasi Instalasi Pipa Existing Petrochina International Jabung Limited Tebing Tinggi – Tanjung Jabung Barat, Jambi, No: 152/PDPDEGAS-PCJL/SOP/VII/2011;
290. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 180A/PDPDE/SS/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011, Perihal Pipeline Crossing PDPDE dengan PCJL, Kepada BPMIGAS;
291. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, Agenda Rapat Pembahasan Prosedur Pemasangan Pipa Gas untuk Perlintasan Pipa PT PDPDE GAS di Area PetroChina, tanggal 22 Juli 2011;
292. 2 (dua) lembar copy Surat Garansi Bank Mandiri Syariah, No.063/PERFORMANCE BOND/VII/2011;
293. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
294. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Jambi, No: 522/2100/Dishut/2010, tanggal 12 Agustus 2010, Perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan pemasangan jalur pipa gas melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT PDPDE GAS, Kepada Menteri Kehutanan RI;
295. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juli 2011;
296. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Juli 2011, Agenda Rapat Presentasi Standar Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
297. 2 (dua) lembar copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDESS) Kepada Konsumen;
298. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tanggal 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
299. 2 (dua) lembar asli Surat BPMIGAS Minutes of Meeting Rencana Pemasangan Crossing Pipa Gas PDPDE di Area PetroChina Jabung Ltd., tanggal 1 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar FACSIMILE Kantor Pusat, No: 0101/BPB2300/2011, tanggal 27 Mei 2011, Kepada PetroChina International Jabung Ltd. Up. General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi (PDPDE) Up. General Manager, Perihal Pemasangan Pipa PDPDE di Area PetroChina Internasional Jabung;

Halaman 265 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 3 (tiga) lembar copy Surat Yahoo Mail, tanggal 30 May 2011;
301. 1 (satu) lembar copy Surat OPSI 1 (Ajuan PDPDE Gas)
302. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 071/PDPDEGAS-WKS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal Rencana Crossing pipeline dengan jalur pipa Petrochina, Kepada PT Wirakarya Sakti, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
303. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 050/1271/ADP, Perihal Dukungan Terhadap Crossing Pipa Gas, tanggal 25 Mei 2011, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Peta;
304. 1 (satu) lembar copy Surat MOM Rapat tanggal 6 Mei 2011;
305. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, tanggal 6 Mei 2011, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0083/BPB1100/2011/S6, tanggal 3 Mei 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur;
306. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) Jual Beli Gas Bumi Antara PT PDPDE Gas dengan PT Adiprotek Envirodunia, Nomor Penjual: 120/PDPDEGAS-APED/HOAVI/2011, Nomor Pembeli: 159/APED-Dir/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011;
307. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat Pembahasan Pasokan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Jambi Tanggal 7 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar asli Surat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 13039/05/SDM/2011, tanggal 9 Mei 2011, Hal Undangan Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Undangan;
308. 1 (satu) lembar copy Surat CNG Storage-PLTG Peaking Jakabaring, PT Daruma Mitra Alam, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
309. 1 (satu) lembar copy Surat PT Sumber Energy Utama, No: 024/QUO/SEU/III/2011, tanggal 29 Maret 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Penawaran Standard Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyaluran Kondensat Dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke Pertamina UBPB Jambi Di Gas Plant Facility Sungai Kenawang Dan Tank Farm Tempino Jambi;
310. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 19 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting;
311. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body

Halaman 266 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 20 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting;

312. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0378, tanggal 04 Mei 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan – BPMIGAS, Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, Kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar – BPMIGAS, Kepala Dinas Operasi Produksi – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengangkutan dan Penyimpanan – BPMIGAS, Kepala Dinas Akuntansi Penerimaan – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengembangan Lapangan – BPMIGAS, ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. Up VP Business Development, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PT Transportasi Gas Indonesia Up President Direktur, PetroChina Internasional Jabung Ltd. Up. Vice President and General Manager, PT Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Pertamina EP Up Vice President Commercial, PT Chevron Pacific Indonesia Up General Manager, PT PLN (Persero) Up Direktur Energi Primer, PT Energasindo Heksa Karya Up Direktur, PT Pembangunan Kota Batam Up Direktur, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel Up Direktur;
313. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0364, tanggal 29 April 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) untuk mengundang Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Konsep Prosedur Serah Terima Gas dari Job Pertamina – talisman Jambi Merang ke PT Chevron Pacific Indonesia di Titik Penyerahan Duri, riau dan ke PD, Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan di Titik Penyerahan Simpang Bayat;
314. 2 (dua) lembar copy Surat email dari Anggono Mahendrawan, tanggal 28 April 2011;
315. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, tanggal 28 April 2011, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0078/BPB1100/2011/S6, tanggal 25 April 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur;
316. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 27 April 2011, Perihal Wakil dari PDPDE Sumsel, Kepada BPMIGAS;
317. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 092/PDPDEGAS-PIJ/IV/2011, tanggal 19 April 2011, Perihal Pipe Crossing, Kepada PetcoChina International Jabung Ltd;

Halaman 267 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) lembar asli Surat PT PLN (Persero), No: 0518/122/DIV GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel;
319. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Penggantian Komisaris yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS;
320. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 18 Pebruari 2012, No 04, Notaris Syarifudin S.H SK Menkeh & Ham RI No.C-252.HT.03.01-Th-2002, tanggal 18 Maret 2002;
321. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/S/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
322. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“Job PTJM”), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PJTM, tanggal 24 Desember 2013, Kepada SKK Migas, JOB PJTM, PDPDE, PLN, PT Petro Muba;
323. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 02/PDPDE/SS/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, Perihal Permohonan Perubahan applicant dan Nilai SBLC reg No. 139990003, Kepada PT PDPDE GAS;
324. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 500/3742/Aek/2013, Perihal Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, tanggal 24 Desember 2013, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS;
325. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekretariat Daerah, No: 500/22/Aek/2014, tanggal 6 Januari 2014, Perihal Undangan, Kepada PT PDPDE;
326. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, No: 503.6/339/KPPT/2013 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan Tempat Usaha PT PDPDE Gas;
327. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, No: 503.4/16/KPPT/2013, Perihal Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, tanggal 18 Desember 2013, Kepada Adrian Utama Gani;
328. 1 (satu) lembar copy Surat email dari Syehani Assegaf, tanggal 27 December 2013, beserta lampiran;
329. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita Media Indonesia Sabtu 23 November 2013, 21 November 2013;
330. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 583/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, Perihal Rapat Monitoring Jual Beli Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Dinas Analisis & Evaluasi Komersialisasi Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
331. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman

Halaman 268 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;

332. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
333. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Perihal Pembuatan Legal Opinion Terkait Pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM, Kepada Ajie Setiadi & Partner;
334. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
335. 2 (dua) lembar copy Surat Susunan Acara RKAP 2014 PT PDPDE Gas "CHANGE" We Can Believe In Padma Hotel, Bandung 16 – 18 Desember 2013;
336. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-1097, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Peningkat Penggantian Stand By Letter of Credit (SBLC);
337. 2 (dua) lembar asli Surat Mandiri Syariah, Kepada PT PDPDE GAS, No: 15/293-3/PM14, tanggal 2 Desember 2013, Perihal Undangan Menghadiri Acara BSM Business Gathering;
338. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 1739/WM/UND/04/2013, tanggal 5 Desember 2013, Perihal undangan Rapat;
339. 2 (dua) lembar copy Surat Undangan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat "Membangun Bersama Benahi Negeri" Tahun 2013;
340. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, No: 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokaso Distrik 1 dan RDD Sei Tapah PT Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS;
341. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0930, tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah ke – 15;
342. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 435/PDPDE/Ss/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), Kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
343. 2 (dua) lembar copy Surat Draft, tanggal Oktober 2013, Perihal Sisa Alokasi gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus

Halaman 269 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);

344. 1 (satu) bundel copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan, NO: KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;
345. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile PT PLN (Persero) No: 317/FAC/WS2JB/REN/2010, tanggal 28 Juni 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penundaan Waktu Pembahasan Rencana Pasokan Gas;
346. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 3471.FACS/052/DIV GBM/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Up Direktur Utama, PT PGI Up President Director, PT PLN (Persero) KIT SBS Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Up General Manager, PT PJB Up Muara Tawar Up General Manager;
347. 1 (satu) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, tanggal 13 September 2013, No: 144.Ext/Op-Ro1/09.13, Perihal Penyelesaian HSE Inspection, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
348. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 14 Agustus 2013, No: 869/Und/Ka BPH/2013, Hal Acara Silaturahmi dan Halal bi Halal di Lingkungan BPH Migas;
349. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjng Jabung Barat, tanggal 13 Juli 2013, No: 500/2183/Aek/2013, Perihal Pe,amfaatan Listrik, Kepada Dirut PLN (Persero);
350. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2282.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK;
351. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2213.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 25 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK;
352. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 170/D2/S/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, Perihal Undangan rapat, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
353. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 167/D1/S/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dikas Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
354. 3 (tiga) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 4 Juli 2013, No. 15/87-3/SP3/CRD, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Addendum Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan;
355. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, 3 Juli 2013, No: PRA/DU/3.004/VII/2013, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa;
356. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-0617, tanggal 8 Juli 2013,

Halaman 270 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Perihal Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE;

357. 1 (satu) lembar copy Surat PGM, No: 034600.S/PP.00.01/PG/2013, Perihal Konfirmasi penyaluran gas dari PDPDE Gas, tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Risalah Rapat;
358. 1 (satu) lembar copy Surat email, dari Adrian Utama Gani, tanggal 12 Juni 2013;
359. 2 (dua) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 10 Juni 2013, Kepada Managing Director, Subjek Kronologis Stock Gas PDPDE Gas;
360. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 112/S/D2/V/2013, Perihal Perubahan Jadwal Pemeliharaan JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
361. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0508, tanggal 21 May 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update;
362. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0348, tanggal 4 April 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update;
363. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13/0194, tanggal 6 March 2013, Perihal Indikasi jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update, beserta lampiran 2 (dua) halaman;
364. 1 (satu) lembar copy Surat Foto Report PT PDPDE GAS, KP. 12 Section 2, tanggal 29 Mei 2013;
365. 2 (dua) lembar copy Surat Email, Subject report Inspeksi Jalur Pipa, dari Adrian Utama Gani, tanggal 30 May 2013;
366. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 205/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan;
367. 1 (satu) set copy Surat Aplikasi Permohonan Kredit Maybank, Nama Nasabah PT PDPDE GAS;
368. 1 (satu) bundel copy Surat Bank International Indonesia Maybank, tanggal 11 June 2013, Offer Letter, Kepada PT PDPDE GAS;
369. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 20 Juni 2013, Agenda Rapat Pembahasan pemanfaatan Gas oleh PDPDE dan Take or Pay (“TOP”) atas PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“JOB PTJM”) dengan PDPDE, dengan lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
370. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Indra Sukandar, tanggal 7 Juni 2013, beserta lampiran 3 (tiga) halaman;
371. 1 (satu) lembar copy Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Faksimile Kantor Pusat, No: 0169/SKKE2200/2013/S2, Perihal Undangan Rapat, tanggal 19 Jun 2013, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Up Direktur Utama;
372. 2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 28 Mei 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: RR/DU/28.460/V/2013, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan"), Kepada Anak Perusahaan Perseroan, PT Panji Raya Alamindo, PT Triguna Internusa Pratama, PT Cahya Saguna Niketama, PT PDPDE Gas, PT Energasindo Heksa Karya, PT Suryaandra Nusa Bhakti;

373. 1 (satu) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 10 Juni 2013, Kepada PT PDPDE Gas ("PDPDE Gas"), Perihal Rencana Kepindahan Kantor PT PDPDE Gas Jakarta;
374. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 121/S/D2/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, Kepada Direktur PT Panji Raya Alamindo, Perihal Rencana Kepindahan kantor PT PDPDE GAS Jakarta;
375. 1 (satu) lembar asli PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 011/DKLN/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, Komisaris PT PDPDE GAS, PT Panji Raya Alamindo, PDPDE Sumsel, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa;
376. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0650/122/DIV GBM/2013, tanggal 31 Mei 2013, Perihal Pemberlakuan Harga Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
377. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 223/PDPDE/SS/B/2013, tanggal 28 Mei 2013,, Perihal Take or Pay PDPDE, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
378. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, 31 Mei 2012;
379. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 10676/18.06/DMT/2013, tanggal 28 Mei 2013, Hal Pembahasan Prosedur Penyerahan Gas Bumi;
380. 3 (tiga) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, No: 766/Und/Ka BPh/2013, tanggal 22 Mei 2013, Hal Undangan Rapat Dengar Pendapat;
381. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Notulen Rapat, tanggal 20 Mei 2013, Agenda Pembahasan draft PJBG antara PDPDE dan PLN, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
382. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 199/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
383. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Rencana Penyaluran Gas PGN dari PDPDE Gas Melalui Pipa TGI, tanggal 17 Mei 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
384. 1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 028100.S/OT.02.02/PG/2013, Perihal Undangan Rapat, tanggal 14 Mei 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, Director of Business Development PT Transportasi Gas Indonesia;

Halaman 272 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 197/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
386. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 205/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
387. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 206/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
388. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 158/Und/07.09/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 10 April 2013, Hal Undangan Rapat, Kepada Direktur Utama PT Indogas Kriya Wiguna, Direktur Utama PT PDPDE;
389. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0449, tanggal 3 May 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah;
390. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Facsimile, tanggal 17 April 2013, No: 0307.Facs/052/DIV GBM/2013, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Up general Manager, KDIV KIT –SUM, Dirut PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
391. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 23 April 2013, Agenda Pembahasan gas PDPDE 5 mmscf, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Daftar Pelanggan Besar;
392. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 10 April 2013;
393. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 19 April 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Minutes of Meeting, tanggal 18 April 2013;
394. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 086/S/D2/IV/2013, tanggal 3 April 2013, Perihal Permohonan Persetujuan Harga Gas, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
- 395.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0006/122/DIV GBM/20136 tanggal 2 April 2013, Perihal Konfirmasi Mengenai Harga Gas yang dapata diterima PLN, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
- 396.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 25 Maret 2013, Agenda Pembahasan Tindak Lanjut Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
397. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), tanggal 20 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada PDPDE;
398. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat,

Halaman 273 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2013, Agenda Pembahasan Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

399.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 104/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 13 Maret 2013, Hal Undangan Rapat;

400.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Hal Undangan Rapat;

401.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 088/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, Perihal Penyampaian Keekonomian Harga Gas PDPDE, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM, beserta lampiran;

402. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 26 Februari 2013, Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

403.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 031/S/D1/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas;

404.1 (satu) set copy Surat Financial Performance 2012;

405.1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/325/Aek, tanggal 7 Februari 2013, Perihal Realisasi penyediaan gas, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS;

406.1 (satu) lembar copy Surat Caterpillar, tanggal 6 February 2013, Embassy of the United States of America, Subject Issuance of Visit Visa;

407.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 056/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 8 Februari 2013, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE Sumatra Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

408.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 341/PDPDE/SS/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada KOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;

409.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan rencana ramp-up PDPDE;

410.1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0161/BP02200/2012/SO, tanggal 18 Oct 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, PDPDE Direktur Utama, Perihal Undangan Rapat;

411.1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

412.1 (set) lembar copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;

413.4 (empat) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual: 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012,

Halaman 274 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pembeli: 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober 2012;

414.1 (satu) lembar copy Surat No: 072100.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012;

415.1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero) untuk Pusat Listrik Talang Duku, Sumatera Selatan, Nomor PGN: 003400.PK/HK.02/UT/2009, Nomor PLN: 515.PJ/122DIRUT/2009;

416.3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK, Nomor Penjual: 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli: 01500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013;

417.3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 042/S/D2/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, Perihal Cash Flow Minus PDPDE Gas, Dewan Komisaris PT PDPDE Gas;

418.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 003/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;

419.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS;

420.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No: 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;

421.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 033/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;

422.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 238/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE 5 MMBTU, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);

423.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 233/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE, Kepada BPMIGAS;

424.1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 26 Juli 2012, Agenda Pembahasan Lokasi dan Skema Pemanfaatan Gas dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

425. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;

426.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012,

Halaman 275 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS;

- 427.1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 077900.ND/OT.03.03/PG/2012, Hal Rapat Koordinasi Penyaluran Gas, tanggal 7 Desember 2012, Kepada Direktur PT PDPDE, Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia;
428. 1 (satu) lembar copy Surat PT Trakindo Utama, tanggal 13 November 2012, No: 056/PET/XI/2012, Subject Factory Visit USA;
- 429.1 (satu) lembar copy Surat No: 290/PDPDEGAS-TGI/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012, Kepada Direktur Teknik Gas Indonesia, Perihal: Undangan Factory Visit Gas Engine ke USA;
- 430.2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 9 November 2012, Agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 431.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 853.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 7 November 2012, Kepada PDPDE Sumsel;
- 432.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Perihal Pembahasan Rencana Penyerapan Gas oleh PT PLN Persero ("PLN") dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM), tanggal 31 Oktober 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 433.1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 434.1 (satu) lembar copy Surat PT Palsin Anugerah Adil, Invoice No: 0026/PALSIN/INV/XI/2012, tanggal 7 November 2012,
- 435.1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Lampiran 1 B Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor: PER-13/PJ./2010, tanggal 24 Maret 2010;
436. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Statement of Gas Delivery To PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-1/13, tanggal Januari 2013;
- 437.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 438.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa;
439. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 272/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo;
- 440.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 273/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Dewan Komisari PT PDPDE GAS;
- 441.2 (dua) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 25

Halaman 276 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2012, No: PRA/DIR/25.001/X/2012, Perihal Surat Permintaan Selaku Pemegang Saham, Kepada PT PDPDE Gas;
442. 4 (empat) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 9 Oktober 2012, No: 14/084-3/SP/CRD, Kepada PT PDPDE Gas, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Perubahan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan;
- 443.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0596, tanggal 2 Oktober 2012, Perihal Jadwal Pemeliharaan Tahun 2013;
- 444.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Berita Acara Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 445.2 (dua) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Site Acceptance Test (SAT) dan Commissioning Modifikasi Report HMI Sistem Meter Bersama Line Grissik – Singapore JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 04 Agustus 2012;
- 446.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0528, tanggal 13 September 2012, Perihal Pembahasan Gas Delivery Procedure (Sistem Meter Bersama);
- 447.1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, Struktur Biaya Pokok “Penyaluran Gas Ke Pembangkit Talang Duku Melalui PGN”, Jakarta, Oktober 2012;
448. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Ramp-Up Gas PDPDE, tanggal 4 Oktober 2012;
- 449.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 291/PDPDE/SS/IX/2012, tanggal 21 September 2012; Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);
- 450.2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE;
- 451.2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan PJBG PDPDE Gas – PGN, tanggal 11 September 2012;
- 452.1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi Mekanisme SWAP Internal Penyaluran Gas PDPDE Ke PLN Talang Duku, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;
- 453.1 (satu) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, No: 059/EXT/TGI/PD/08.12, tanggal 14 Agustus 2012, Subject Commissioning and Meter Running Series (“MRS”) PDPDE Completion Notice;
- 454.3 (tiga) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 13 Agustus 2012, Agenda Rapat Koordinasi Pemenuhan Side Letter Agreement dan GTA PDPDE;
- 455.1 (satu) lembar copy Surat Aplikasi Transfer Mandiri Syariah, No: 4582534, cabang Thamrin, PT PDPDE GAS, Sebesar Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Enam Dollar Amerika;

Halaman 277 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 456.1 (satu) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, No: G-31.0912, tanggal 3 September 2012;
- 457.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 248/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal Rakorgas Sumbagteng dan sumbagsel, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
- 458.2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Klarifikasi Rencana Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 10 Agustus 2012;
- 459.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 1712/Und/12/DMO/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Hal Undangan Rapat;
- 460.2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Klarifikas Rencana Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam, tanggal 27 Juni 2012;
- 461.2 (dua) lembar copy Surat PT Daruma Mitra Alam, No: 038/DMA-Migas/VII/2012, Perihal Konfirmasi Permohonan Izin Usaha Niaga CNG, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM RI;
- 462.2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012;
- 463.5 (lima) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 50/PJTM-g-PDPDE-7/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Subject Gas Sales Agreement among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi MERang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for July 2012;
- 464.1 (satu) lembar asli Surat PT Adiprotek Envirodunia, tanggal 2 Agustus 2012, No: 124/ADIP-Dir/SM/VIII/2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas sebesar 2.5 MMSCFD;
- 465.1 (satu) lembar asli Surat PT Enviromate Technology International, No: 001/ETI-ADIP/SM/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas Sebesar 5 MMSCFD;
- 466.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 189/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, Perihal Pemanfaatan Gas dari PDPDE untuk Energi, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);
- 467.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 10 Juli 2012, Agenda Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE Prov. Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 468.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 224.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 6 Juni 2012, Kepada PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Panitia GAS, KDIV SIS, Perihal Undangan Rapat;
- 469.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 203/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
- 470.3 (tiga) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan

Halaman 278 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi dari PT PDPDE GAS kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;

- 471.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 163/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal Penawaran Gas Bumi di Sumatera Selatan, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM;
- 472.1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, No. /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012;
- 473.2 (dua) lembar copy Surat Memo tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan;
- 474.1 (satu) lembar copy Surat Proyek Peaker CNG Jakabaring Jadwal Pengeluaran Dana;
- 475.2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, tanggal 27 June 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir;
- 476.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0376, tanggal 22 Juni 2012, Perihal Undangan Rapat Persiapan Gas 15.00 BBTUD;
- 477.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juni 2012, Agenda Rapat Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) halaman Daftar Isi;
- 478.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 162/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, Perihal Rapat Monitoring PJBG antara JOB PJTM dengan PDPDE;
- 479.1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0033/BPO2200/2012/S0, tanggal 13 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
- 480.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Dec 2010, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- 481.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- 482.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 154/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE GAS;
- 483.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 484.3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, No: 041/EXT/TGI/PD/05.12, tanggal 25 May 2012, Re: Overrum Charges – Invoice Natural Gas Transportation Service on March 2012;

Halaman 279 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 485.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22-23 Mei 2012, Agenda Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS ("PDPDE GAS") dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN") ("PJBG") beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 486.2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 April 2012, Agenda Pembahasan Lanjutan Harga Gas antara PGN – PT PDPDE;
- 487.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 16 Maret 2012, Perihal Pembahasan Pokok-Pokok Perjanjian tentang Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) TBK ("HoA");
- 488.1 (satu) lembar copy Surat Minutes og Meeting, tanggal 8 Maret 2012, Subject Kick of Meeting Jual Beli Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 489.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 7254/12/DMO/2012, tanggal 7 Mei 2012, Hal: Kunjungan Lapangan;
- 490.1 (satu) lembar copy Surat Tindak Lanjut surat – Masuk PDPDE, tanggal 8 Maret 2012, No Surat 100/07.04/Ka BPH/2012, tanggal 05 Maret 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE, Perihal Surat Teguran 1;
- 491.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 05 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1;
- 492.1 (satu) bundel copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, No: 19/P/BPH Migas/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
493. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, NO: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir;
- 494.1 (satu) lembar copy Surat Amandemen perjanjian jual beli gas, Rabu 9 Mei 2012, Tahun XXVII No 9072;
- 495.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 April 2012, No: 103/PDPDE/SS/IV/2012, Perihal Overrun Changes – Invoice Natural Gas Transportation Services Periode Maret 2012, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 496.2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Kerja PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012;
- 497.3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE GAS, tanggal 28 Maret 2012;
- 498.3 (tiga) lembar copy Surat PT Istana Karang Laut, tanggal 21 Februari 2012, No: 0029-2012, Kepada Bapak Judha Sumarianto, General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ("PTJM"), Perihal Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services ("Letter

Halaman 280 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agreement”);
- 499.3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, tanggal 13 Desember 2011, Ref: 241/LOG-TGI/JKT/12.11, Subject Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services (“Letter Agreement”);
- 500.1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 21 May 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera – 9th Gas Coordination Meeting;
- 501.1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 29 March 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera – 8th Gas Coordination Meeting;
- 502.2 (dua) lembar copy Surat Bahan Presentasi Perkembangan Kegiatan PDPDE SS;
- 503.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 069/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE Gas, Kepada Direktur Utama PT Dika Karya Lintas Nusa;
- 504.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 067/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Izin menetap sementara, Kepada Bapak Ketua RT 001;
- 505.4 (empat) lembar copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;
- 506.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Maret 2012, No: 068/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Klarifikasi Surat dari Tim 11, Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- 507.1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/1668/AEk, tanggal 10 Juli 2010, Perihal Persestujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah;
- 508.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan, Para Pihak M.Helius MST, S.Fi, dan Zulhadi tanggal 26 Juni 2011;
- 509.1 (satu) lembar copy Surat LSM Komunitas Bukit 30 Pro Desa, Akta Notaris : No/02/BH/LSMKOM.B.30.PD/X/2002, Kepada Bapak Alex Noerdin;
- 510.1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 29 April 2011;
- 511.1 (satu) lembar copy Surat Advokat / Pengacara “Ismail Makruf., S.H. & Partner”, Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2011;
- 512.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi, tanggal 5 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1;
- 513.3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, No: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir;
- 514.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dewan Komisari PT PDPDE GAS, tanggal 13 Pebruari 2012;
- 515.2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS;
- 516.1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Subdit Pengangkutan Migas, tanggal 18 Agustus 2014, Perihal Presentasi Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa a.n. PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 517.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 12 Agustus 2014, No: 1645/Und/12/DMO/2014, Hal Undangan Presentasi;
- 518.1 (set) lembar copy Surat Kronologis Alokasi Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi;
- 519.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 520.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 4482.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Kepada PDPDE, PT PLN WS2JB, KDIV KITSUM;
- 521.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 11 April 2014, No: 4399/15/DMO/2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
- 522.3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 330/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 523.1 (satu) lembar copy Surat Email PDPDE, Undangan Pembahasan TOP, tanggal 20 Agustus 2014;
- 524.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 333/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT PDPDE GAS;
- 525.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 334/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT PDPDE GAS;

Halaman 282 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 526.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE GAS dan LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
- 527.3 (tiga) lembar copy Surat Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor Pemebeli: 087/S/D2/III/2014, tanggal 4 Maret 2014;
- 528.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengaas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- 529.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi interim penyaluran gas ke Purwodadi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 530.1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Weekly Management Meeting, tanggal 13 Agustus 2014;
- 531.3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero);
- 532.1 (satu) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama, tanggal 6 Agustus 2014, No: 015/Pjc-TJB/VIII/2014, Perihal Permohonan Panggilan Gas untuk Tes Run 2 (dua) unit Engine;
- 533.2 (dua) lembar copy Surat Foto Progress Lapangan PLTMG Purwodadi PER 11 Agustus 2014;
- 534.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 203/S/D1/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 535.2 (dua) lembar copy Surat Pengecekan Berkas Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Sementara), No: 203/5/D1/VII/2014;
- 536.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS, No: 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tentang Ketentuan Perusahaan Mengenai Uang Duka, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
- 537.4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE GAS Kepada Warga Yang Lahan/Pemukimannya Dilintasi Pipa Gas Bumi PT PDPDE GAS, Di Desa Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi KM 03 – KM 08, tanggal 18 Juni 2014;
- 538.3 (tiga) lembar copy Surat Email, Dari Caca Isa Saleh, tanggal 4 Agustus 2014;
- 539.1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapapt Koordinasi SKK Migas dengan PT PLN (Persero), tanggal 10 April 2014;
- 540.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Minutes of Meeting,

Halaman 283 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;

- 541.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Juni 2014, No: 031/BPPD/IV/2014, Hal: Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas, PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas. Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
- 542.1 (satu) lembar copy surat Bupati Tanjung Jabung Barat, tanggal 9 Juni 2014, No: 500/1249/Aek/2014, Perihal Dukungan Alokasi Gas PDPDE Untuk PLTMG Tebing Tinggi, Kepada Kepala SKK Migas;
- 543.1 (satu) set Copy Surat PDPDE Progress Pekerjaan PDPDE Dan PLN Di PLTG Purwodadi – Provinsi Jambi, Juni 2014;
- 544.1 (satu) set Copy Surat Rukun Raharja, Annual Report Laporan Tahunan 2013, Accelerating Growth;
- 545.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, Perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT PDPDE GAS dengan PT LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
- 546.3 (tiga) lembar copy surat Alur Transaksi Pembayaran;
- 547.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 16 Juni 2014, Rapat Pembahasan Pemanfaatan Bersama Pipa Dedicated Hilir PT PDPDE Gas untuk penyaluran Gas Bumi milik Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir,;
- 548.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 12 Juni 2014, No: 1296/Und/15/DMO/2014, Hal Undangan Rapat;
- 549.2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 Juni 2014, No: RR/DU/RUPS.07.03/VI/2014, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan");
- 550.3 (tiga) lembar copy Surat Rencana Anggaran Belanja Panitia Pelaksana Pertandingan Asean University Games XVII/2014 Sumatera Selatan Cabang Olahraga Pentaque Tahun Anggaran 2014;
- 551.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 210/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kelapa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 552.1 (satu) lembar copy Surat PT Bumi Samudra Perkasa BUMD Tanjung Jabung Timur, tanggal 14 Mei 2014, No: 012/BSP-BUMD/V/2014, Perihal Penyampaian Data LDD (Legal Due Dilligence) Mitra Strategis BUMD Tanjung Jabung Timur, Kepada PetroChina International Jabung Ltd, SKK Migas;
- 553.1 (satu) lembar asli Surat PT PDPDE GAS, No: 131/D2/S/V/2014,

Halaman 284 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2014, Perihal Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS ("Perseroan"), Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsan Anugerah Adil;

554.1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris, tanggal 24 Maret 2014, No: 21, Notaris Syarifudin, SH., SK Menkeh & Ham RI, No.C-252.HT.03.01-Th.2002, tanggal 18 Maret 2002;

555.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No: AHU-04042.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS, Kepada Notaris Syarifudin, SH;

556.1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pertanggungjawaban Perseroan Tahun 2013,, tanggal 8 Mei 2014;

557.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 129/S/D/V/2014, tanggal 2 Mei 2014, Perihal Undangan Rapat PT PDPDE GAS ("Perseroan")Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan;

558.1 (satu) bundel copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Company Profile;

559.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 100/UND/D2/IV//2014, tanggal 2 April 2014, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

560.1 (satu) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 April 2014, No. RR/Dir/03.598/IV/2014, Kepada Direksi dan Komisaris PT Rukun Raharja, PT Energasindo Heksa Karya, PT Triguna Internusa Pratama, PT Timitra Cipta Mandiri, PT Suryandra Nusa Bhakti, PT Cahsa Saguna Niketama, PT PDPDE GAS, Perihal Undangan;

561.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0785/122/DIVGBM/2014, tanggal 1 April 2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;

562.1 (satu) lembar copy Surat PT Medco E&P Indonesia, tanggal 21 Maret 2014, No: 377/SS/MEDC/III/2014, Kepada Manajer Operasi PT Pertamina Gas, Manajer Operasi PT PLN KIT SBS Keramasan, Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja, Manajer Operasi PT Mitra Energi Buana, Manajer Operasi PDPDE, Perihal Witness Penggantian Orifice Plate Gas Metering Stasiun Rambutan;

563.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 21 Maret 2014, Agenda Pembahasan Harga Keeekonomian dari PDPDE untuk titik serah PLTMG Purwodadi Jambi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

564.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) facsimile, No: 1517.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 13 Maret 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat;

565. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 128/PDPDE/SS/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal Rapat Pembahasan Negosiasi Harga Dengan PDPDE untuk titik serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLN (Persero) Kantor Pusat;

566. 2 (dua) lembar copy Surat Indahklat Pulp and Paper Products, No: 071/JPR/IK/XI/2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill;
567. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 6 March 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take or Pay PDPDE;
568. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 49/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 04 Februari, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
569. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
570. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
571. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Desember 2013, Agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG;
572. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) FACSIMILE, No: 4789.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 6 Desember 2013, Kepada PDPDE;
573. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“JOB PTJM”), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013;
574. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
575. 2 (dua) copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;
576. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
577. 1 (satu) lembar copy Surat Email dari Caca Isa Saleh, tanggal 10 February 2014, beserta lampiran;
578. 1 (satu) lembar copy Surat Minute of Meeting Risalah Rapat,

Halaman 286 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2014, Agenda Pembahasan Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara PDPDE SS dan Daruma, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir ;

579. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 064/S/D/II/2014, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Pengembangan Usaha PT PDPDE GAS;
580. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE GAS, No: 062/RUPS/II/2014;
581. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 0787.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 14 Februari 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
582. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 15 Januari 2014, No: 022/S/D2/II/2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang;
583. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 555/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 Perihal Rapat Pembahasan Awal Keeekonomian Gas dari PDPDE untuk titik Serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
584. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Meidia Elyanti, tanggal 21 January 2014, Subject Surat ke SKK Migas Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN;
585. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 026/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 21 Januari 2014, Peihal Surat Gubernur Sumatera Selatan yang Ditujukan ke Kepala SKKMIGAS, Kepada Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
586. 1 (satu) bundel copy Surat Kajian dan Pendapat Hukum Terhadap Rencana Perubahan Tempat Penggunaan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, Oleh A Setiadi, SH& Hendi Gandasmiri, SH Advokat, tanggal 17
587. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
588. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
589. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 09/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Perubahan Perhitungan Keekonomian dan Cost Structure atas Harga Gas di Purwodadi Jambi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
590. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS), No:

Halaman 287 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0745//BPB2000/2011/S1, tanggal 7 Juni 2011, Perihal Survey Lapangan Bersama Perintisan Pipa PDPDE dan PCJL, Kepada PetroChina International Jabung Ltd., PERTambangan dan Energi (PDPDE);

591. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tanggal 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
592. 1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Facsimile, No: /BPB1100/2011/S6, tanggal April 2011, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia, PT PGN (Persero) Tbk, PetroChina Int. Jabung Ltd., ConocoPhillips (Grissik) Ltd., JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rapat Koordinasi Hot Trap ke-2 Pipa Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
593. 1 (satu) set copy Surat Addendum atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi, No: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011, tanggal 14 Maret 2011;
594. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan;
595. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda terima Surat, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Maret 2011, No: 076/PDPDE/SS/III/2011;
- 596.1 (satu) set copy Surat EPCC USM Metering Station at Simpang Abadi Jambi, Contractor Job No: C – 207 / 2010;
- 597.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 74/PDPDE/SS/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 598.1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Notulen Rapat, tanggal 11 Maret 2011, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Gas JOB PTJM untuk Pembangkit PLN di Sumatera, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir;
- 599.1 (satu) lembar copy Surat Fcsimile BPMIGAS, No: 0104/BPB3300/2011/S0, tanggal 9 Maret 2011, Perihal Undangan Rapat, Kepada ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd., PT PGN (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Transportasi Gas Indonesia;
- 600.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 46/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 22 Februari 2011, Perihal Biaya Jambi Emas Expo 2011, Kepada PT PDPDE GAS;
- 601.1 (satu) lembar copy Surat Perkiraan Pembiayaan, Jambi Emas Expo 2011 (21-27 Maret);
- 602.1 (satu) lembar copy Surat PT Adiprotek Envirodunia, No: 037/APED-Dir/II/2010, tanggal 17 February 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Surat Perintah Kerja KP. 0 – KP. 28.2/Realisasi;
- 603.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 06/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 17 Januari 2011,

Halaman 288 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Jadwal Penandatangan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

604.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 36/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

605.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 35/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, Subject Invitation, Kepada Mr Jonathan Cheng;

606.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0140, tanggal 17 Februari 2011, Perihal Condition Precedent Perjanjian Transportasi Gas pada PJBG pasal 2.1.2;

607.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 3 Maret 2011, No: 154/540/Dispertamben/2011, Perihal Izin Pengambilan Gambar, Kepada Direktur PT Piranti Nusa Energi Persada;

608.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 29/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, Perihal Permohonan Waktu dalam Rangka Laporan Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

609.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0326/BPB3000/2010/S2, tanggal 13 April 2010, Perihal Penunjukan Penjual Gas Bumi bagian Negara, Kepada General Manager;

610.4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;

611.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0866/BP00000/2010/S2, tanggal 31 Desember 2010, Perihal Persetujuan Harga Gas atas Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE Jambi Merang") Talisman (Jambi Merang) Ltd ("Talisman"), Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd ("Pacific Oil") dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan ("PDPDE"), Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

612.1 (satu) lembar copy Surat PDPDE Tanda Terima, Sudah terima dari Bapak Caca Isa Saleh Dirut PDPDE Sumsel, Barang Berupa 1 (satu) set Dokumen Asli Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara (BPMIGAS-JOB PTJM), berikut Asli SK Kepala BPMIGAS No.0034/BP00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010;

613.2 (dua) lembar copy Surat Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;

614.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32151/15/DMC/2010, tanggal 17 Desember 2010,

Halaman 289 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;

- 615.2 (dua) lembar opy Surat Indahkiat Pulp and Paper Products, No: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 1 November 2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill;
- 616.1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minute of Meeting, Subject Persiapan Pembuatan Prosedur Serah Terima Gas PTJM ke TGI, CPI, PDPDE SS, PKB, tanggal 25 Januari 2011;
- 617.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0063, tanggal 20 Januari 2011, Perihal Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas Kepada PT PDPDE tanggal 19 Januari 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 618.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011, Perihal Diskusi Rapat Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT PDPDE;
- 619.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 05/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Penngelolaan Gas Kepada PT PDPDE Gas;
- 620.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0024, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas Pasal 3.1.3;
- 621.1 (satu) set copy Surat Bank Saudara, tanggal 17 Desember 2010, No: 004/SPPK/SDRA-ENG/XII/10, Kepada PT PDPDE GAS, PERihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Bank Garansi;
- 622.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0852/1.824/10;
- 623.1 (satu) lembar copy Surat Kantor Notaris Syarifudin SH, Surat Keterangan, tanggal 6 Mei 2010;
- 624.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0802/1.824/10;
- 625.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar, No: 03176/1.824.271, tanggal 3 May 2010;
- 626.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, MPWP : 03.036.317.0-063.000, Nama: PT PDPDE GAS;
- 627.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No: PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010;
- 628.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 7 April 2010, No: 002/PDPDEGAS/SP/IV/2010, Kepada Pengelola Building Manajemen, Perihal Permohonan Surat Keterangan Domisili;
- 629.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, tanggal 9 April 2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-0034/BP00000/2010/S2, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 630.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 004/PDPDEGAS/SP/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Perihal Permohonan Surat Domisili, Kepada Kantor Kelurahan Kuningan Timur;
- 631.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 006/PDPDEGAS/SK/IV/2010, tanggal 23 April 2010;
- 632.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 008/PDPDEGAS/SK-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
- 633.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 009/PDPDEGAS/SP-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
- 634.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 012/PDPDEGAS/SPM-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010, Kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Perihal Permohonan memperoleh TDP;
- 635.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 013/PDPDEGAS/SK-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 636.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 014/PDPDEGAS/SP-TD/IV/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 637.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 015/PDPDEGAS/SP-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 638.1(satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPPI/V/2010, tanggal 24 Mei 2010m Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS Dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Indusrt, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Indusrt;
- 639.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32164/15/DMO/2010, tanggal 17 Desember 2010, Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- 640.1 (satu) lembar copy Surat Email GSA Signing Friendly golf 7 December 2010,
- 641.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/2010, tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010;
- 642.1 (satu) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
- 643.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penerbitan Performance Bond Bank Mandiri, No: 318/PDPDE/SS/XI/2010, tanggal 9 November 2010, Kepda Bapak Pimpinan Cabang Bank Mandiri Palembang Arief;
- 644.4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
- 645.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operang Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-1015, tanggal 11

Halaman 291 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Perihal Perjanjian Jual Beli Gas JOB Pertamina – Talisman dan PD Pertambangan dan Energi;

- 646.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Performance Bond, No: 337/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010;
- 647.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0602/BP00000/2010/S2, tanggal 26 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Konsep dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd. Dan Perusahaan Daerah PERTambangan dengan Energi (“PDPDE”);
- 648.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0978, tanggal 29 Oktober 2010, Kepada Terlampir, Perihal Penandatanganan Perjanjian-perjanjian;
- 649.1 (satu) lembar copy Surat PT Kinarya Gemilang Adhitama, tanggal 2 Agustus 2010, No: 134A/KGA-PDPDE/VIII/2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 650.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS;
- 651.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 073/PDPDEGAS/PC/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Crossing Pipa Gas, Kepada PT PetroChina International Jabung Ltd.;
- 652.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 072/PDPDEGAS/WKS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Memulai Kegiatan Pemasangan Pipa Gas, Kepada PT Wirakarya Sakti;
- 653.1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 27 Oktober 2010, No: 503/3012/IV/2010, Perihal Persetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Utama PDPDE;
- 654.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 084/PDPDEGAS-LPPPI/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, Perihal Undangan Rapat Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- 655.4 (empat) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010 (1 October 2010), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 656.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 266/PDPDE/SS/IX/2010, tanggal 8 September 2010, Perihal Undangan Finalisasi Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 657.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 292 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 24239/15/DMO/2010, tanggal 27 September 2010, Hal Penyesuaian Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;

658.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0846, tanggal 30 September 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;

659.1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PDPDE Provinsi Sumsel Selatan Bali, 28 September 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;

660.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 20989/15/DMO/2010, tanggal 19 Agustus 2010, Hal Kelengkapan Persyaratan;

661.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0724, tanggal 20 Agustus 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS;

662.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 3 Agustus 2010;

663.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 30 Juli 2010, No: 19058/15/DMO/2010, Hal Undangan Presentasi, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir;

664.1 (satu) bundel copy Surat Kiln LPPPI;

665.3 (tiga) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

666.4 (empat) lembar copy Surat Addendum atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nsa, No: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, No: 057/DKLN/VII/2010, tanggal 26 Agustus 2010;

667. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Yogyakarta 4 Agustus 2010;

668. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0674, tanggal 27 Juli 2010, Perihal Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS;

669. 4 (empat) lembar copy Surat Bank Saudara Perjanjian Bank Garansi, No. BG. 257/SDRA-ENG/VII/10, tanggal 13 Juli 2010;

670. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 202/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, Perihal Preliminary Engineering Drawing USM, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

Halaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. 1 (satu) lembar copy Surat Alternatif PDPDE Gas Langsung Membayar Ke JOB PTJM dan TGI;
672. 1 (satu) lembar asli Surat Bulletin Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang;
673. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 187/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010, Perihal Revisi Undangan Pembahasan Gas Transportation Agreement antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Transportasi Gas Indonesia, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
674. 1 (satu) bundel copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 6 July 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
675. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0254/BP00000/2010/S2, tanggal 20 Mei 2010, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian ("HoA") Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi;
676. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0575, tanggal 25 June 2010, Perihal Pokok Pokok Perjanjian yang telah ditandatangani untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi;
677. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement by and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010;
678. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS No: 214/PDPDEGAS/PP/XII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS;
679. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan;
680. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 910/1607/IV/2014, tanggal 23 Juni 2014, Hal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Tahun 2014, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
681. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No 890/KPTS/IV/2013, tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus dan Staf Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
682. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 900/1961/IV/2012, tanggal 4 Juli 2012, Perihal Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi;

Halaman 294 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No: 180/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 2 Juli 2012, Perihal Laporan Keuangan PDPDE Tahun 2011 Audited, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
684. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pemilik Modal PD Pertambangan Dan Energi Sumsel, tanggal 29 Juni 2012, beserta lampiran 2 (dua) halaman copy Surat Daftar Hadir;
685. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 657/KPTS/IV/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gubernur Sumatera Selatan;
686. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 970/3589/IV/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi;
687. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 November 2011, No: 539/020/BP/2011, Perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Swarna Dwipa, Dirut PD Pertambangan dan Energi, Dirut PD Prodexim, Dirut PD Industri Grafika Meru;
688. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 839/KPTS/IV/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 523/KPTS/IV/2012 tentang Gaji dan Tunjangan Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
689. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 890/KPTS/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
690. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 1433/0455/X/2013, tanggal 22 Februari 2013, Hal Himbauan Terkait Gratifikasi, Kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov. Sumsel, Direksi BUMD Prov. Sumsel;
691. 4 (empat) lembar asli Surat Berita Acara Hasil Rapat Pra RUPS Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 12 Juni 2012;
692. 1 (satu) set copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan Tahun Buku 2011 Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Pangabea & Rekan;
693. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 25 Juli 2013;
694. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 037/BP/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, Hal Instruksi, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
695. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 295 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 031/BPPD/V/2014, tanggal 26 Juni 2014, Hal Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas, PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;

696. 2 (dua) lembar copy Surat Honor Banwas;
697. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 10, tanggal 23 April 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Paisin Anugerah Adil;
698. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 4, tanggal 15 Desember 2010, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Paisin Anugerah Adil;
699. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 11, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mura Energi Buana;
700. 3 (tiga) lembar copy Surat Permohonan Perubahan Perseroan dengan Nama Perseroan Paisin Anugerah Adil, Nomor SK Terakhir AHU-04545.40.20.2014;
701. 1 (satu) rangkap copy Surat Akta Nomor 01, tanggal 04 September 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Energi Buana;
702. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Pra Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 4 x 4 MW PT Mura Energi Buana, Lokasi Proyek di : Desa Temelat, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan;
703. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/80/436.9.19.5/2008, PT Dika Karya Lintas Nusa dengan Nama Ahmad Aman Astra, tanggal 20 Agustus 2008;
704. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor 503.7424A/436.5.9/2006, atas nama perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 16 November 2006;
705. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 503/7AQAD/436.5.9/2006, Nomor TDP 13.01.1.52.12953, Agenda Pendaftaran Nomor 2582.BH.13.01/JUNI/2001, tanggal 27 November 2006;
706. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pajak NPWP 01.839.049.2-631.000 PT Dika Karya Lintas Nusa;
707. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, No : PEM-01083/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008;
708. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No : PEM-00643/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008;
709. 1 (satu) lembar copy Surat Rincian Klarifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa. PT, No. Seri 032758;
710. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nomor 277/GABPEKNAS/13/8/08, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa, PT, tanggal 20 Agustus 2008;

Halaman 296 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa Kamar Dagang Dan Industri Surabaya, Nomor Sertifikat : 20501.000037.01.08, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 23 Januari 2008;
712. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Klasifikasi & Kualifikasi Perusahaan Nama Perusahaan PT . Dika Karya Lintas Nusa, Nomor Anggota 20501-000165;
713. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Biasa, No. Anggota 20501 – 000165, Nama PERusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 12 Juli 2007;
714. 1 (satu) lembar copy Surat PT Dika Karya Lintas Nusa Surabaya Daftar Aktiva Tetap Per 31 Desember 2005;
715. 1 (satu) lembar copy Surat Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS), No. 04 3578 02588, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa;
716. 1 (satu) lembar copy Surat Kode Etik GABPEKNAS “Panca Styra”, Surabaya 23 Juli 2007;
717. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor 188.4/435/436.5.2/2007, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, Kode Perusahaan 1-018153-3578-2-2426, tanggal 16 Agustus 2007;
718. 1 (satu) lembar copy Surat Berdasarkan Penilaian Badan Sertifikasi Asosiasi : GABPEKNAS JAWA TIMUR, Nama Badan Usaha PT. Dika Karya Lintas Nusa, Nomor IUJK : 188.4/435/436.5.2/2007;
719. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 13, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dika Karya Lintas Nusa;
720. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 7 Desember 2007, Nomor 7, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Dan Perusahaan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa;
721. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 333/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Konisaris Mewakili PDPDE Prov. Sumsel, tanggal 30 Juni 2014, Kepada PT PDPDE GAS;
722. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 178/S/D1/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, Kepada Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi, Perihal Surat Permohonan Pindah Buku;
723. 5 (lima) lembar copy Surat Kuasa, Nomor 170/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 30 Juni 2014;
724. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor : 328/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Perguruan Izin Lingkungan, tanggal 27 Juni 2014, Kepada Direktur PT. PDPDE GAS;
725. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Konsultan, Nomor : 012/PDPDE_Kons/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, Kepada Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumsel;
726. 1 (satu) lembar copy Invoice, Nomor 001/IVC/VI/2013, tanggal 26 Juni 2014;
727. 1 (satu) lembar copy Surat Kwitansi PT PDPDE GAS, Diterima

Halaman 297 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari PD. Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 28 Juni 2014;
728. 1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900.13.88463638, tanggal 26 Juni 2014;
729. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Kota Palembang Badan Lingkungan Hidup, Nomor 660/362/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, Hal Informasi Izin Lingkungan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
730. 2 (dua) lembar copy Surat Pertagas Niaga, tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 122/PN1200/2014-S0, Perihal Undangan Presentasi Pemaparan Perusahaan;
731. 1 (satu) bundel copy Surat Kronologis Alokasi Gas Job Pertamina Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi dan Sisa Alokasi Gas yang Dimiliki PDPDE sebesar BBTUD untuk PLN, dimana Tentative Commercial Operation Date (COD) PLTMG Purwodadi (Pelabuhan dagang) tanggal 10 September 2014;
732. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Harian Jambi, Kantor PLN Tungkal Diamuk Massa, tanggal 15 Oktober 2014;
733. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Tribun News, Listrik Tak Kunjung Normal Warga Datangi PLN, tanggal 14 Oktober 2014;
734. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor 540/2679/DESDM/2014, tanggal 21 Oktober 2014, Perihal Percepatan Penyaluran Gas Untuk PLTMG Purwodadi, Kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
735. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2537/122/DIVGBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 24 September 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
736. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0803/122/DIV GBM/2013, Perihal Alokasi Gas PDPDE 5 BBTUD ex Lapangan Gas Jambi Merang untuk PLN, tanggal 17 Juni 2013, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
737. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0145/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
738. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0785/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 1 April 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
739. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi Interim penyaluran gas ke Purwodadi;
740. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2176/122/WS2JB/2014, Perihal Status PJBG Untuk PLTMG Pelabuhan Dagang / Purwodadi, tanggal 12 September 2014, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
741. 2 (dua) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama,

Halaman 298 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2014, Nomor 017/PJC-TJJB/IX/2014, Perihal Permohonan Pengaliran Gas, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Di Palembang;

742. 2 (dua) lembar copy Surat Kabar Koran Tribun Jambi, tanggal 14 Agustus 2014, "Sudah Ajukan Surat ke Pemkab";
743. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT Bumi Samudra Perkasa dengan PT PDPDE Gas untuk Pengelolaan atas Alokasi Gas Bumi Sebesar 5 BBTUD Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Untuk Kebutuhan PLTMG PT PLN (PERSERO), Nomor BSP : 001/-BUMD/VII/2014, Nomor PDPDE GAS : 196/K/D/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
744. 3 (tiga) lembar copy Surat Data Koordinat Fasilitas Metering Station Dan Pipeling PT PDPDE GAS;
745. 1 (satu) lembar copy Print Out Peta;
746. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 056/PDPDE/SS/II/2013, Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 8 Februari 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
747. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 341/PDPDE/SS/X/2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
748. 2 (dua) rangkap copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Ramp-up PDPDE;
749. 2 (dua) rangkap copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012;
750. 2 (dua) rangkap copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3-10-2012;
751. 2 (dua) rangkap copy Surat PGN, Nomor : 072199.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
752. 2 (dua) rangkap copy Surat Perjajian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli : 001500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013;
753. 2 (dua) rangkap copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;
754. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Hal Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan; tanggal 30 Juli 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;

Halaman 299 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755. 1 (satu) rangkap copy Surat Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Disetujui, Nomor Surat : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Nomor Register 015/55-/513/PPG/18.06/DMT/2013, beserta lampiran;
756. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 606/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Penjelasan Soal Pangangkatan Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
757. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 605/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Keberatan Penggantian Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
758. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 234/PDPDE/SS/V/2014, Perihal Mohon Petunjuk, tanggal 21 Mei 2014, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
759. 2 (dua) lembar copy Surat Suara Perbaruan, Pengumuman, Sening tanggal 17 September 2012;
760. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012;
761. 5 (lima) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 28 Maret 2012;
762. 1 (satu) bundel copy Surat Akta, Nomor 21, tanggal 24 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS;
763. 1 (satu) rangkap copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan Nomor : KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;
764. 3 (tiga) lembar copy Surat HOA Key Terms For Jambi Merang Gas Sales To PDPDE South Sumatera;
765. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 541/0198/IV/2020, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
766. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22 Maret 2010, Agenda Rapat Rencana Penggunaan Jalur Pipa Transmisi PT Transportasi Gas Indonesia;
767. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 24 Februari 2010, Agenda Rapat Rencana Penjualan Gas Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel;
768. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Nomor 0109/BPB0000/2010/S2, tanggal 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
769. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Day Pertamina

Halaman 300 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisman Jambi Merang, Nomor MAN-J/10-0177, tanggal 3 Maret 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas dari JOB PErtimana – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas;

770. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 154/PDPDE/SS/VI/2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, tanggal 5 Juni 2012, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE Gas;
771. 2 (dua) lembar copy Surat Indah Kiat, Nomor : 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 November 2010, Kepada PT PDPDE Gas, Bapak Ahmad Yaniarsyah Hasan, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Perawang Mill;
772. 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;
773. 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Dan PT PDPDE Gas Untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor Pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010;
774. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor : 0852/1.824/10, tanggal 17 Desember 2010;
775. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal PIPANISASI Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
776. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor : 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur PIPANISASI Gas, Tanggal 6 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE) Gas;
777. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
778. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 217/PDPDE/SS/IX/2012, Perihal Permohonan Pengajuan Pembelian Ipad untuk tim project Jambi, tanggal 25 September 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan;
779. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas Antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
780. 1 (satu) bundel copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia Transgasindo Head Office, Nomor : 068/EXT/TGI/PD/10.12, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, Perihal PDPDE (Simpang Abadi)

Halaman 301 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metering Facilities Completion Date notice, tanggal 1 Oktober 2012;

781. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS/K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy Of Germany, Jakarta;
782. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran dan Slip Penarikan dengan nama pemilik rekening PT PDPDE GAS;
783. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Pengeluaran dan Invoice atas nama PT Lintas Nusa Investama SSI;
784. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Permintaan Anggaran, Nama Pemohon PT PDPDE GAS, Peruntukan Biaya Pengurusan Izin Niaga Tetap PT PDPDE Gas, tanggal 14 Juni 2012;
785. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Penerimaan, Jumlah Uas USD 25.000, Keterangan Pengisian Kas;
786. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran, Dibayar Kepada Caca Isa Saleh, Sejumlah USD 25.000, Untuk Pembayaran Suplier Gas;
787. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama M. Ali Hasan, tanggal 29 Desember 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
788. 3 (tiga) lembar copy Surat Memo, tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan;
789. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Kesepakatan Pengeluaran Dana Untuk Supplier Gas;
790. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Dinas, Nomor : /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012;
791. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas, Nomor : 214/PDPDEGAS/PP/XIII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS, tanggal Desember 2011;
792. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 133/PDPDE GAS-MIGAS/VI/2011, Perihal Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2011, Kepada Bapak Ir. Bambang Sumarsono Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
793. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Perihal Permintaan Klarifikasi, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas Onshore Pipeling;
794. 1 (satu) lembar copy Surat Business Scheme & Share Holder Structure PT PDPDE Gas, beserta 1 (satu) lembar lampiran Attendance List;
795. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 052/PDPDEGAS/MIGAS/VIII/2010, Perihal Penyampaian Persyaratan atas Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 13 Agustus 2010, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, beserta Lampirannya;
796. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 174/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04 Juni 2014;
797. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 469/S/PDPDE/SS/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04

Halaman 302 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014;

798. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Minutes Of Meeting, Penyaluran Gas PDPDE Sumatera Selatan ke PLTMG Purwodadi PT PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Jambi, tanggal 5 September 2014, beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir;
799. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 237/S/D1/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 05 September 2014;
800. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa atas nama caca Isa Saleh, beserta lampiran;
801. 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Terima, tanggal 29 September 2014, Diterima dari PT PDPDE Gas, Terbilang Sepuluh Juta Rupiah;
802. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 494/PDPDE/SS/IX/2014, Perihal Permintaan Waktu Silaturahmi, tanggal 19 September 2014, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
803. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 248/D/S/IX/2014, Perihal Undangan Silaturahmi Dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 September 2014, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsin Anugerah Adil;
804. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 045 / BPPD/VIII/2014, Perihal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, tanggal 14 Agustus 2014, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
805. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17302/12/DMO/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Tanggapan Permohonan Izin Usaha, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
806. 1 (satu) lembar copy Surat Sriwijaya CUP V, Turnament TH. 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Biaya Penyelenggaraan;
807. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE Gas, Nomor PIHAK PERTAMA : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor PIHAK KEDUA : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, tanggal 23 April 2010;
808. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement By and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, and Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446 PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010;
809. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Heads of Agreement) Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan PT PDPDE Gas untuk

Halaman 303 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 05-NK/PDPDE.PDPDEGAS/VIII/2010, Nomor Pembeli : 054/PDPDE.PDPDEGAS/HOA/VIII/2010;

810. 1 (satu) bundel copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010, beserta lampirannya;
811. 1 (satu) bundel copy Surat PDPDE Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Faerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, beserta lampirannya;
812. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 503/3012/IV/2010, Perihal PERSetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 27 Oktober 2010, Kepada Direktur Utama PDPDE;
813. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
814. 1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, Kepada Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov. Sumsel, tanggal 5 Agustus 2010, Perihal Telaahan Terhadap Permohonan Direktur Utama PDPDE Mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas;
815. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel;
816. 2 (dua) lembar copy surat Pertimbangan Usulan Menjadi Direktur Utama PT PDPDE Gas;
817. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, Nomor 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik 1 I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
818. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Nomor : 022/S/D2/II/2014, tanggal 15 Januari 2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang;
819. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPD Gas, Nomor 272/PDPDEGAS-UND/X/2012, Tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo;
820. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 62/PDPDE/SS/II/2014, Perihal Permohonan Penerbitan SBLC, tanggal 10 Februari 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri Corporate Banking Division Wisma Mandiri;
821. 5 (lima) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 6 Januari 2014, Kepada Accounting & Finance Departement, Subjek Approval Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PDPDE SS Periode Desember 2013;
822. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor :

Halaman 304 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/S/D2/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Invoice Periode Desember 2013, Kepada PDPDE Sumsel;

823. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 210/PDPDE/SS/IV/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
824. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 11603/10/DJM.O/2014, tanggal 29 September 2014, Perihal Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Utama PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas;
825. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian antara PT PDPDE Gas dan PT Trimitra Cipta Mandiri tentang Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Fasilitas PT PDPDE Gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014, Nomor Pihak Kedua : 162/BOO/PG/2014, tanggal 24 Oktober 2014;
826. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 109/S/D1/IV/2014, tanggal 23 April 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri, Perihal Permohonan Kredit Investasi dan Fasilitas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran;
827. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE Gas, Berkedudukan di Jakarta;
828. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara pihak-pihak PT Dika Karya Lintas Nusa dengan PT PDPDE Gas, tanggal 20 Juni 2012;
829. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Daerah, Nomor 542/988/SDA/2014, Perihal Permintaan Ekspose dan Survey, tanggal 7 April 2014, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
830. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat;
831. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas;
832. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 043/BP/IV/2012, Perihal Penggantian Komisaris yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2012, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
833. 1 (satu) lembar print out email, Subject Klarifikasi Surat Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, dari Syehani Assegaf, kepada Pak Caca, tanggal 6 Desember 2012;
834. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 305 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas;
835. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
836. 1 (satu) bundel copy Surat Kontan Aksi Emiten, Rukun Raharja Akuisisi Perusahaan Gas, tanggal 20 Oktober 2012;
837. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (Salinan), tanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 01;
838. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas, Nomor : 5, tanggal 14 November 2012;
839. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
840. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa;
841. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 27 Juni 2012;
842. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomog : 219/PDPDEGAS-SK/Dir/X/2012, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 1 Oktober 2012;
843. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS-K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy of Germany, Jakarta;
844. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 196/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, Kepada Bapak Edi Purnomo, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga Untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Pipa Penyalur Gas milik PT PDPDE Gas;
845. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 197/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, tanggal 30 Agustus 2012, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Instansi Gas Metering Unit milik PT PDPDE Gas;
846. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : /PDPDEGAS-Migas/IX/2012, Perihal Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas PT PDPDE Gas di Jambi, tanggal 6 September 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
847. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas

Halaman 306 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;

848. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Synergi Dinamik Jaya tentang Pekerjaan Hot Tapping CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor 136/PDPDEGAS-SYNEGI/K/VI/2012, tanggal 25-06-2012;
849. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Verojasa Technical tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Pekerjaan Sipil CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor : .../PDPDEGAS-VERTICAL/K/VII/2012, tanggal 05-07-2012;
850. 2 (dua) lembar Surat PDPDE Gas Nomor: 218/D/S/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal Pemberitahuan pengganti Komisaris di PDPDE Gas;
851. 1 (satu) Bundel Fotokopi Company Profile PT. PDPDE Gas;
852. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor 465/PDPDE/SS/IX/2014, tanggal 3 September 2014 perihal Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban Terkait Asset Transfer Metering Station;
853. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor 173/D/S/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Laporan Tahunan PT. PDPDE Gas Tahun 2013;
854. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. PDPDE Gas;
855. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:177/S/D1/VII/2013, tanggal 1 Juli 2014 perihal Rencana Transfer Aset Ultra Sonic;
856. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI;
857. 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 211/S/D1/VIII/2014;
858. 1 (satu) rangkap fotokopi Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE Gas/2014, Nomor Pembeli: 087/S/D2/III/2014 tanggal 04 Maret 2014;
859. 1 (satu) rangka fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas Nomor Penjual: 12-PJBG/PDPDE-PDPDE Gas.JM/XII/2010, Nomor Pembeli:108/PDPDE Gas-PDPDE/K/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010;
860. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE Gas dan PT. LPPPI;
861. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:203/S/D2/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
862. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:----, tanggal -----, perihal Proedu;
863. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 05, tanggal 27 Maret 2012;
864. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:043/BP/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Sumsel;
865. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Selatan Nomor: 540/3076/IV/2014, tanggal 5 Ddseember 2014, perihal Komisaris mewakili PDPDE Sumsel di PDPDE Gas;
866. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Pegawai PDPDE Sumsel Nomor: 043.B/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris Yang Mewakili PDPDE Sumsel;
867. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Gas Nomor:-----tanggal 16 Desember 2013;
868. 1 (satu) rangkap fotokopi Memorandum Kerjasama Perusda;
869. 1 (satu) bundel Progressing Towards The Future PT. Rukun Rahardja, Tahun 2014;
870. 1 (satu) Asli Hitungan Untuk Performance Bond Project JOB Jambi Merang terhitung tanggal 1 Desember 2010 s/d 31 Juli 2012
871. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Meneteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22708/AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM, tanggal 03 Mei 2010;
872. 1 (satu) Bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 006/PDPDE.PDPDE Gas/2012 Nomor Pembeli: 056/PDPDE Gas-PDPDE/K/III/2012;
873. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 PDPDE Gas;
874. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Nomor: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010;
875. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan PDPDE Gas Nomor: 013/PDPDE GAS-BSM/SP/II/2011, tanggal 10 Januari 2011;
876. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 05/PDPDE /SS/II/2011, tanggal 12 Januari 2011 perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE Gas;
877. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Nomor: Ref.NO. MAN-J/11=0063, tanggal 20 Januari 2011 tentang Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE tanggal 19 Januari 2011;
878. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Minute of Meeting tanggal 19 Januari 2011 agenda Pembahasan Surat Permintaan PDPDE Nomor: 05/PDPDE/SS/2011 tertanggal 12 Januari 2011;
879. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Ref. No. MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011 perihal Diskusi Rapat Persetujuan Atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE;
880. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 8 tanggal 20 Mei 2010;
881. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 583/PDPDE/SS/XI/2014, tanggal 12 Nopember 2014, perihal Permohonan Penerbitan SBLC;

Halaman 308 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

882. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 203/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, perihal Permohonan Pemanfaatan Bersama Pipa gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas;
883. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 204/PS/D2VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, perihal Tanggapan atas Pemanfaatan Bersama Pipa Gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas;
884. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Sumsel Nomor: 515/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
885. 1 (satu) rangkap fotokopi Minute Of Meeting Agenda pembahasan Usulan Kenaikan Harga gas Wellhead dari PT. Medco E&P Indonesia Untuk Perjanjian Jual Beli Gas Kelistrikan di Wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan;
886. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 268/S/D1/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Tetap Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
887. Struktur organisai PT PDPDE Gas, 1 agustus 2013
888. Surat Sekretaris Daerah pemkab Tanjung jabung Barat kepada PT.PDPDE Gas nomor 005 /2983/ASDA, tanggal 5 November 2012, perihal; pelaksanaan penngendalian jenis BBM tertentu utnuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan;
889. Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas 14 November 2012;
890. Daftar Biaya Operasional PTPDE bulan Desember;
891. Surat kepada Dirjen Mlnyak dan Gas Bumi, nomor 051/D1/Migas?II/2013 tanggal 25 Februari 2013, perihal; Laporan KEgiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melali Pipa Dedicated Hilir.
892. 1 Lembar surat kepada KEpala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat wisma Mandiri, nomor : 049/S/D1/II/2013, tanggal 28 Februari 2013;
893. Surat Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Dirut PT PDPDE Gas, nomor 05/DGB/BPH/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal ; Penyampaian Surat Kepurusan Kepala BPH Migas nomor; 23 /KD/BPH MIGAS/KOM/2012;
894. Annual Report 2013 Accelerating Growth Rukun Raharja;
895. Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE Gas kepada warga yang lahan/pemukimannya dilintasi pipa Gas, tanggal 18 Juni 2014;
896. Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas nomor; 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014;
897. 1 lembar surat PT PDPDE Gas kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, nomor; 211/S/D2/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, perihal: Rencana PENyaluran Gas ke PT. PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, KEc. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi;
898. 1 lembar Surat PT PDPDE Gas kepada PT Pertagas Niaga, nomor ; 164/S/D1/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, perihal; Minat PEMbelian gas Sebesar ± 5000 mmbtu/hari;
899. Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas kemampuan Permodalan terhadap Perjanjian Kerjasama operasi antara PT.PDPDE denga PT bumi samudera Perkasa, tanggal 19 Juni 2014;

Halaman 309 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900. Surat PT. Energasindo Heksa Karya kepada Dirut PT PDPDE nomor 1235 /D00/Po/IX/2014 tanggal 15 September 2014, perihal Undangan launching logo baru PT energasindo hekxa Karya ke 16 tahun 2014;
901. Kwitansi no; 0201 dari Ikatan ahli Teknis PERminyakan Indonesia kepada PT PDPDE Gas tanggal 27 Agustus 2014
902. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 4 tanggal 15 Desember 2010
903. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 10 tanggal 23 April 2012
904. 1bendel PERjanjian kerjasama antara PDPDE dan PT PDPDE Gas tentang penyaluran gas PDPDE untuk kebutuhan kelistrikan di jakabaring, sumsel tanggal 8 february 2013
905. Surat Kuasa nomor; 034/D1/SK/II/2013 tanggal 5 Februari 2013
906. Surat Kuasa nomor; tanggal 4 April 2013
907. Surat Kuasa nomor ;- tanggal-, untuk an. Perseroan menandatangani Addendum perjanjian Antara perseroan dan PT Energi Jambi LEmstari tentang pemeliharaan Transmisi pipas gas sepanjang 51,6 KM di Kab. Tanjung Jabung Barat prov jambi.
908. Permohonan permintaan Anggaran perjalanalan dinas tanggal 03 April 2013
909. 1 lembar bilyet giro no R 363825 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 202.400.000,-
910. 1 lembar bilyet giro no R 365026 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 110.000.000,-
911. 1 lembar cek no D 993502bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 36.400.000,-
912. Aplikasi transfer PT PDPDE Gas kepada PT Energi Jambi Lestari sebesar. USD 22.192
913. 1 bendel surat PT PDPDE Gas kepada PT panji raya alamindo, PT. DKLN, PDPDE, nomor;- perihal; permohonan Perstujuan harga Gas tanggal 3 April 2013
914. perseroan Terbatas pendirian PT PDPDE Gas akta no 10 tanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani tanggal 23 DrseMBER 2011
915. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011
916. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 10 januari 2011
917. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011
918. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 10 Januari 2011
919. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011
920. Surat Kuasa no 022/PDPDEGAS-SK/Dir/II/2012, tanggal 9 Februari 2012
921. 1 bendel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas no- tanggal – Januari 2011
922. Surat Keterangan kantor notaris Syarifudin, SH tentang pendirian PT PDPDE Gas tanggal 6 Mei 2010
923. Surat keterangan Domisili Perusahaan PT PDPDE GAS nomor

Halaman 310 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0802/1.824/2010, tanggal 13 April 2010

924. Surat PT. PDPDE GAS kepada PDPDE Sumsel tanggal 14 Januari 2013
925. surat permohonan permintaan Anggaran perjalanan Dinas PT PDPDE GAS tanggal 14 Januari 2013
926. surat PT PDPDE Gas tentang MEMO kepada Dir. Keuangan, tanggal 7 Januari 2013, perihal; perjalanan dina Inspektur dari Ditjen Migas
927. internasl office memorandum kepada dirut PTPDE Gas tanggal 20 DEseMBER 2012, perihal; Progres Project CNG-PLTG jakabaring tentangn kebocoran pada sambungan instrument (level Switch) dan kandungan air dalam gas Dryer
928. 1 lembar laporan kegiatan Gas-in CNG jakabaring 2012-12-20 tanggal 20 desember 2012
929. 1 lembar surat kementrian ESDM dirjen minyak dan gas bumi, nomor; 27313/18.06/DMT/2012, tanggal 20 Desember 2012, hal; Pemeriksaan teknis dan pengajuan Peralatan
930. Berita Acara Pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi CNG Plant Jakabaring, tanggal 21 Desember 2012
931. 1 lembar email R. Bambang Priyono W tanggal 3 Januari 2013
932. 1 lembar fc. Email budi arti tanggal 8 januari 2013 perihal rapat Rutin Management
933. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE nomor 007/S/D2/II/2013 tanggal 08 januari 2013, perihal; kantor bersama
934. Surat PDPDE kepada PT PDPDE Gas, nomor; 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, perihal ; Klarifikasi surat Bdan PEngawas perusda Prov Sumsel.
935. 1 lembar surat PDPDE kepada gubernur Sumsel melalui badan pengawas BUMD nomor ; 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juli 2010, perihal ; ijin menjabat Dirut PT PDPDE Gas
936. Notulen Rapat pemanfaatan gas 4,5MMCFD untuk PTLG Jakabaring (PT Medco Ep Indonesia) tanggal 26 Juli 2010
937. Addendum atas perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE dengan PT DKLN
938. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada PDPDE sumsel nomor; 671.23/1712/IV/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal; ijin prinsip pembangunan PLTG kapasitas 28 MW berlokasi di jakabaring kota Palembang
939. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor; 503/3760/IV/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal; ijin prinsip joint Venture antara PDPDE dengan PT DKLN "PT PDPDE Gas"
940. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor; 556/2783/IV/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal; persetujuan ijin prisnip pembangunan hotel boutique / etnik khas sumsel
941. 1 lembar email dari yauche lizar tanggal 18 desember 2010, perihal terlampir draft presentasi mini LNG untuk pemanfaatan gas sumsel
942. 1 bendel tanda terima dokumen asli SOP untuk kelistrikan di jakabaring untuk PDPDE Sumsel;
943. 1 (satu) lembar surat PDPDE Daftar Gaji Badan Pengawas

Halaman 311 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Milik Pemerintah Prop Sumsel Periode 2014-2017 tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh Dirut Caca Isa Saleh;

944. 1 (satu) bundel surat PDPDE Sumsel tentang pokok-pokok anggaran pendapatan dan belanja ;
945. 1 (satu) bundel surat kegiatan dan program kerja Tanggal April 2014 tentang PDPDE Sumsel;
946. 1 (satu) lembar surat No. 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Alokasi sisa gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang ;
947. 1 (satu) lembar surat No. SRT-0327/SKKE 2000/2013/S2 tanggal 18 Desember 2013 perihal undangan monitoring jual beli gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang;
948. 1 (satu) lembar surat Nomor: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal pembuatan legal opinion terkait pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM;
949. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
950. 1 (satu) bundel risalah rapat topic monitoring jual beli gas dari JOB PTJM hari selasa tanggal 24 Desember beserta lampirannya;
951. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/SS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
952. 2 (dua) lembar surat Nomor: 435/PDPDE/SS/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
953. 2 (dua) lembar surat draft perihal sisa alokasi gas PDPDE sebentar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
954. 1 (satu) bundle surat keputusan No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan penjual Gas Bumi Kepala BP Migas tanggal 31 Maret 2010;
955. 2 (dua) lembar surat Nomor: 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD;
956. 1 (satu) lembar surat Nomor: 153/PDPDE/SS/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Pasokan gas untuk energi di Sumatera Selatan;
957. 1 (satu) lembar surat Nomor: 3751/180/WS2JB/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel;
958. 1 (satu) lembar surat Nomor: 335/PDPDE/SS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pasokan gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel ;
959. 1 (satu) lembar surat Nomor: 317/FAC/W92JB.KEN/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Penundaan Waktu Pembatasan Rencana pasokan Gas;
960. 1 (satu) lembar surat Nomor: 171/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik;
961. 1 (satu) lembar surat PT PLN Nomor: 871/180/WS2JB/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik;
962. 1 (satu) lembar Minute of Meeting subject Pembahasan Persiapan penerimaan Gas 15 BBTUD tanggal 31 Mei 2012 time

Halaman 312 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.30 am-finish,tempat sungai rotan meeting room;
963. 2 (dua) lembar surat Nomor: 101/PDPDE/SS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal Pasokan gas untuk Pembangkit Listrik;
964. 1 (satu) lembar attendance list subject pembahasan persiapan penerimaan Gas 15.00 BBTU tgl 31 Mei 2012;
965. 1 (satu) lembar No. MAN-J/12-0306 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan rapat persiapan penerimaan gas 15.00 BBTUD;
966. 1 (satu) fotokopi Notulen Rapat. PT. PLN (Persero) tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG antara PLN dengan PDPDE;
967. 1 (satu) fotokopi Daftar Hadir Rapat PT. PLN (Persero), tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Awal Keekonomian Gas dari PDPDE untuk titik serah Purwodadi;
968. 1 (satu) Property All Risk Policy Asuransi Jasindo No. Reg.140156418 Nomor Polis 308.297.200.14.00010/000/000;
969. 1 (satu) Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Asuransi Jasindo No. Reg.140156453 Nomor Polis 308.203.200.14.00015/000/000;
970. 6 (enam) lembar fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 0371/EP7000/2014-S1, tanggal 13 Mei 2014, perihal Pengecekan Fisik Sumur Tua Usulan KUD Mirsa Unggul D;
971. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantinus Energi Persada, Nomor: 93/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Penurunan Plafond Kredit PT. Pirantiunusa Energi Persada;
972. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantinus Energi Persada, Nomor: 94/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Permohonan Pinjaman PT. Pirantiunusa Energi Persada;
973. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 514/PDPDE/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Penjelasan Kondisi SPBU PT. PDPDE Hilir;
974. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Hilir Nomor: 348/PDPDE/H/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Kerjasama dengan BBM Retail Pertamina;
975. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Sumsel Nomor: 516/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Penawaran;
976. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Iwan Rosyidi;
977. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Romulu Hutapea;
978. 1 (Satu) fotokopi Surat Badan Pengawas PDPDE Sumsel Nomor: 056/BPPD/IX/2014, tanggal 30 September 2014, perihal Mohon Penjelasan Segera;
979. 1 (satu) fotokopi Invoice Pertamina PHE WMO Nomor: 009, tanggal 20 Pebruari 2013;
980. 1 (satu) fotokopi Fax Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 09 April 2013;
981. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Maret 2013;

Halaman 313 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2013;
983. 1 (satu) fotokopi Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Dinameka Mukti Pratama atas Perjanjian Finding Fee Gas tentang Pembelian Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
984. 1 (satu) fotokopi print out email dari ERWIN HIMAWAN kepada OCE SASMITA tentang Pengiriman Draft Perjanjian Pengakhiran Dinamika tanggal 29 Agustus 2013;
985. 1 (satu) fotokopi print out email dari GUNA DJUMENA kepada SYEHANI tentang Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor PT. PDPDE Gas tanggal 30 Agustus 2013;
986. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 441/PDPDE/SS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal PDPDE Sumsel ditunjuk menjadi Badan Usaha Pengelola KEK TAA;
987. 1 (satu) fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Nomor: 005/2030/IV.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal Undangan;
988. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 327/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, perihal Pengantar;
989. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
990. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 019/BM-BS/IX-2013, tanggal 16 September 2013, perihal Undangan Rapat;
991. 1 (satu) rangkap fotokopi Lease and Condition Benoa Square;
992. 1 (satu) rangkap fotokopi Price List Benoa Square;
993. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 013/BM-BS/VIII-2013, tanggal 22 Juli 2013, perihal Undangan Rapat;
994. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Bisnis Indonesia, tanggal 2 Juli 2013 tentang Sri Melamin Ajukan PK;
995. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 132/EP4300/2013-SO, tanggal 16 Mei 2013, perihal Permohonan Gas ex PT. Sri Melamin Rejeki;
996. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 115/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan gas ex PT. Sri Melamin Rejeki;
997. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat DPRD Sumsel Nomor: 005.160/02235/DPRD-SS/2013, tanggal 22 Nopember 2013, perihal Undangan Rapat Kerja Komisi III;
998. 1 (satu) rangkap fotokopi PPT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal September 2013;
999. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Benteng Demokrasi Nusantara Nomor: 080/B/BETARA/SS/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, perihal Pemberitahuan Aksi;
1000. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pendapatan Daerah Sumsel Nomor: 011/I/000744/Penda, tanggal 10 September 2013, perihal Pemindahan Kantor PDPDE Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 314 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1001. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jawaban kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel (MADANI) perihal jawaban Surat tanggal 21 Mei 2014;
1002. 1 (satu) rangkap fotokopi Jadwal Acara Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berbasis Inovasi Dalam Kerangka Sida;
1003. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Wirakarya Sakti Nomor: 895/WKS/XI/2013, tanggal 28 Nopember 2013, perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti;
1004. 1 (satu) bundel fotokopi Diagram Laba Rugi Tanpa Penyusutan Per SBU;
1005. 1 (satu) bundel fotokopi Harga Jual BBG Transportasi Kementerian ESDM;
1006. 1 (satu) fotokopi Print Out Email dari ERWIN DARWANSYAH kepada OCESASMITA tanggal 14 Agustus 2013 perihal RAB lantai 5 dan RAB SKK Migas;
1007. 1 (satu) fotokopi print oiut Speedy Password kepada Mess Hotel Sanjaya tanggal 10 Maret 2014;
1008. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 172/PDPDE/SS/IV/2014, tanggal 11 April 2014, perihal Pembahasan Potensi Bisnis CNG Untuk Angkutan Barang dan Batu Bara di Sumatera Selatan;
1009. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Pertamina Nomor: NR-021/L10210/2014-SO, tanggal 14 April 2014 perihal Penjajakan Kerjasama PDPDE dengan Pertamina;
1010. 1 (satu) Fotokopi Daftar hadir PT. Pertamina – Direktorat Gas, tanggal 13 Maret 2014;
1011. 1 (satu) lembar fotokopi fax Surat Pertamina Nomor: 157/L10210/2014-SO tanggal 10 April 2014 perihal Undangan Rapat Pembahasan Potensi Bisnis CNG untuk Angkutan Barang dan Batubara di Sumatera Sel tan;
1012. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 541/149/Dispertamben/2014, tanggal 19 Maret 2014 perihal Pengalokasian Gas Transportasi Untuk Angkutan Barang dan Batubara;
1013. 1 (satu) bundel PPT Studi Awal Potensi. Bisnis CNG Untuk Angkutan Batubara di Sumatera Selatan, tanggal 14 April 2014;
1014. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 700/3501/LtProv.V/2008, tanggal 5 Nopember 2008, perihal Teguran;
1015. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 109/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal Tanggapan Atas Laporan BPK-RI;
1016. 1 (satu) rangkap fotokopi memorandum Nomor: UK/PDPDE/2014, tanggal Maret 2014 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi PDPDE Tahun 2014;
1017. 1 (satu) bundel fotokopi materi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api oleh Tim PDPDE bulan Juli 2014;
1018. 1 (satu) bundel fottokopi Materi Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus SEI mangkai- Sumatera Utara.
1019. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: 402/402/PDPDE/SS/VIII/

Halaman 315 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Pengambilan berkas oleh Bpk. Muhar Lakoni ke kantor PDPDE;
1020. 1 (satu) bundel fotocopy surat PDPDE berita acara tanggal 23 Mei 2014;
1021. 1 (satu) lembar fotopy surat nomor 045/BPPD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang usulan penempatan anggota komisaris dari badan pengawas perusahaan daerah Sumatera Selatan;
1022. 1(satu) bundel fotocopy laporan kondisi PDPDE pasca perubahan badan Pengawas tanggal 7 Agustus 2014;
1023. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara dari PT. Pirantinusa Energi Persada tertanggal 5 Agustus 2014;
1024. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 40/VI/PEP/2014 dari PT Pirantinusa Energi Persada tanggal 30 Juni 2014;
1025. 1 (satu) lembar fotocopy surat berita acara PT. Pirantinusa Energi Persada tanggal 28 Juni 2014;
1026. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Pirantinusa Energi tanggal 27 Juni 2014 Nomor 38/PEP/VI/2014 perihal Honor Anggota Dewan Komisaris PT. Pirantinusa Energi Persada a.n Bapak Muhar Lakoni;
1027. 1 (satu) lembar fotocopy voucher pengeluaran uang kas/bank tanggal 28 Juni 2014;
1028. 2 (dua)lembar fotocopy nomor : 358/PDPDE/SS/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal jawaban atas tanggapan dari fraksi Demokrat
1029. 1 (satu) bundel fotocopi Nomor : 398/PDPDE/SS/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal jawaban atas pemandangan umum fraksi partai demokrat;
1030. 1 (satu) lembar fotocopi Nomor : 63/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013;
1031. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor : 64/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013;
1032. 1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ;
1033. 1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
1034. 1 (satu) lembar fotocopi surat PDPDE nomor : 215/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal mohon persetujuan penangkatan pegawai tetap;
1035. 1 (satu) bundle fotocopy internal memo dari staf ahli bidang hukum kepada bapak Direktur Utama PDPDE Sumsel tanggal 8 Mei 2013 beserta lampiran;
1036. 2 (dua) lembar fotocopy curriculum vitae an. Iramsyah;
1037. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment(surat keterangan bekerja) our Ref No: 120/SKPD/PERSO/SHC/IX/00 an Iramsyah;
1038. 1 (satu) lembar surat fotocopy keterangan No. 102/Ket-IV/CII/2005 tgl. 14 April 2005;
1039. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat

Halaman 316 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan bekerja) No. SKB/HRD & GA/219/!X/2007 an. Iramsyah tgl. 27 September 2007;
1040. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat keterangan kerja) No.007/TP –HRGA/X/2009 tgl. 28 Oktober 2009;
1041. 1(satu) lembar fotocopy keterangan pernah kerja No. 04/HRD-GA/MNP/XII/2010 tgl. 1 Desember 2010;
1042. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan Direksi PT PDPDE Gas No. 2013/PDPDE GAS-PEG/SK/XI/2011 tentang pengangkatan pegawai penuh;
1043. 1 (satu) bundle fotocopy participating interest PDPDE BUMD Provinsi Sumatera Selatan;
1044. 1 (satu) bundle fotocopy highlight PSC South Sumatra Extension PT Medco EP Indonesia;
1045. 1 (satu) bundle laporan keuangan triwulan III 2013 PDPDE Sumatera Selatan;
1046. 1 (satu) bundle fotocopy UU RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
1047. 1 (satu) bundle surat Nomor : 250/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal undangan paparan;
1048. 1 (satu) lembar notulen rapat PT PDPDE Hilir tgl. 11 September 2013 agenda rapat pembahasan usulan kemitraan Penyediaan BBM Bersubsidi dan lapiran daftar hadir;
1049. 1 (satu) bundle fotocopy usulan kemitraan penyediaan BBM Bersubsidi;
1050. 1 (satu) lembar persetujuan PT PDPDE Hilir;
1051. 1 (satu) lembar surat Nomor: 248/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perihal permohonan Persetujuan Dewan Komisaris;
1052. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perusahaan daerah pertambangan dan energy provinsi Sumatera Selatan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011;
1053. 1 (satu) bundle dokumen Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Laporan Kinerja PDPDE Periode 2009-2012 tgl 16 Juli 2013;
1054. 1 (satu) bundle fotocopy akta Notaris Syarifudin Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas;
1055. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 11 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas;
1056. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0965418 tanggal 17 September 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS;
1057. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas;
1058. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas;

Halaman 317 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1059.1 (satu) bundle fotocopy Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (salinan) Notaris Rini Yulianti, SH Nomor 5 tanggal 14 November 2012;
- 1060.1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor: 10 tanggal 21 Desember 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PDPDE Gas;
1061. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah terima tugas dan tanggungjawab Direksi PT PDPDE GAS;
1062. 1 (satu) bundle fotocopy surat PDPDE Nomor 369/PDPDE/SS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Tindak lanjut Pembahasan Indonesia Participation pada Blok SSE PT Medco EP Indonesia;
1063. 1(satu) lembar fotocopy notulen rapat pembahasan lanjutan Indonesia Participation untuk Blok S & CS tanggal 4 Desember 2012 dan lampiran daftar hadir;
1064. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen South Central Sumatra PDPDE Participation Interest MedcoEnergi oil& Gas;
1065. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Participating Interest Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) BUMD Provinsi Sumatera Selatan;
1066. 1 (satu) bundle print out company profil Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
1067. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 0518/122/DIV GBM/2013, Perihal : Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex Jambi Marang, Tanggal 21 Mei 2013 dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel.
1068. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat, Perihal : Pembahasan Draft PJBG Antara PLN dengan PDPDE, Tanggal 01 Agustus 2013.
1069. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 542/2202AEK/2013, Perihal : Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, Tanggal 23 Juli 2013 dari Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala SKK Migas Pusat.
1070. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera dengan Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli : 0140.PJ/040/DIR/2013, Tanggal 03 September 2013.
1071. 1 (satu) bundel fotokopi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api, Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Pelabuhan Tanjung Api Api, Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai-Sumatera Utara dan Usulan Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan Badan Pembangun Dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api oleh Tim PDPDE, Bulan Juli 2014.
1072. 1 (satu) bundel Print Out Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Bulan Juli 2013.
1073. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 267/PDPDE/SS/VI/2013, Perihal : Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 Tanggal

Halaman 318 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2013 dari Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1074. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 08/PDPDE/SS/II/2013, Perihal : Pelunasan PAD 2012 Tanggal 03 Januari 2013 dari Staf Umum/Keuangan PDPDE Sumatera Selatan kepada Bapak Pimpinan Cabang Bank Sumselbabel.
1075. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Debet Bank Sumselbabel Tanggal 03 Januari 2013 dengan Nominal Rp 2.500.000.000,-.
1076. 1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin Tanggal 24 Juni 2013.
1077. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 432/PDPDE/SS/VIII/2014 Perihal : Masalah Tanah PDPDE Tempat Didirikannya PT Pirantinus Energi Persada Tanggal 20 Agustus 2014 dari PDPDE Sumsel kepada Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov Sumatera Selatan.
1078. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo kepada Bapak Caca Isa Saleh (Dirut PDPDE Sumsel) dari Nono Suratno (Direktur PT Pirantinus EP) Tanggal 21 Agustus 2014, Perihal : Tanggapan Email Surat Deddy Nugraha Tanggal 14 Agustus 2014 (dikirim 19 Agustus 2014) selaku Pemegang Saham dan Komisaris di PT PEP.
1079. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lilin Andriyani ditandatangani Tanggal 02 Januari 2014.
1080. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Lilin Andriyani kepada Bapak Iskandar Bandarmata Perihal : Pengajuan Surat Pengunduran Diri Tanggal 15 Mei 2014.
1081. 1 (satu) bundel Print Out email dengan Subject Surat Himbauan dari Deddy Nugraha kepada Caca Isa Saleh.
1082. 1 (satu) bundel fotokopi Pendapatan dan Pengeluaran Gain 2012 dengan Saldo Akhir senilai RP 60.250.000,-
1083. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan dari Sylviana Yulianti Perihal : Surat Pernyataan Tanggal 19 Mei 2012.
1084. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh Sylviana Yulianti, Lilin Andriyani, Yana Umiza, H. Nono Suratno, dan Iskandar Bandamata Perihal : Rapat Administrasi Keuangan Tanggal 05 Juli 2014.
1085. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Deddy Nugraha kepada Bapak Nono Suratno Tanggal 18 Agustus 2014 Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Tanggal 21 Agustus 2014.
1086. 1 (satu) bundel Print Out pesan dari Pak Deddy Nugraha Tanggal 20 Mei 2014.
1087. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pendirian PT Pirantinus Energi Persada Tanggal 29 Mei 2009.
1088. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Filling Flant LGP 3 KG Kota Palembang Tanggal 24 April 2009.
1089. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 021/PEP/III/2010 Perihal : Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya Primadana Tanggal 29 Maret 2010.

Halaman 319 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 022/PEP/III/2010
Perihal : Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya
Primadana Tanggal 30 Maret 2010.
1091. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Tanggal 21 Juli 2010
Perihal : Rapat Direksi PT Pirantinusa Eneгри Persada dengan
Materi Rapat Laporan Per Juni 2010.
1092. 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rencana Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kapasitas 5 MW Di
Jakabaring Sumatera Selatan Tanggal 24 April 2014.
1093. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bersama antara
The Solar Guys International – Mitabu dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan.
1094. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 005/0933/IV/2013 Perihal
: Undangan Rapat kepada Direktur PDPDE dan Provinsi Sumsel
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 April
2013.
1095. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 093/PDPDE/SS/III/2014
Perihal : Mohon Audiensi kepada Bapak Asisten II Setda
Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 04 Maret 2014 beserta
lampirannya.
1096. 1 (satu) bundel fotokopi Peta Denah Lokasi Jakabaring Sport
City dan Lokasi Rencana PLTV 5 MW Jakabaring.
1097. 1 (satu) bundel Print Out Berita Gubernur Sumsel Jalin MOU
dengan Australia.
1098. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0985/IV/2014 Perihal :
Undangan Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja PDPDE Tahun 2014.
1099. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1100. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Nomor : 238/KPTS/IV/2014
Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2017.
1101. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kegiatan dan Program Kerja
PDPDE Bulan April 2014.
1102. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 003/Banwas/Prusda/2014
Hal : Penyampaian Laporan Tanggal 21 April 2014 dari Ketua
Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah
Pertambangan dan Energi.
1104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 062/PDPDE/SS/III/2012
Perihal : Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Permata Musi
Kreasi Tanggal 07 Maret 2012 dari Perusahaan Daerah
Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada PT
Permata Musi Kreasi.
1105. 1 (satu) lembar fotokopi Billyet Giro Nomor : BI 383094
sejumlah Rp 2.132.000.000,- Tanggal 10 Agustus 2011.
1106. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011
Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04
Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE
Sumatera Selatan
1107. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor :

Halaman 320 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208/PDPDE/SS/VIII/2011 Perihal : Pencarian & Transfer Tanggal 10 Agustus 2011 dari PDPDE Sumatera Selatan kepada Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cab. Arief.
1108. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 556.2/2783/IV/2010 Perihal : Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Hotel Boutique/Etnik Khas Sumatera Selatan Tanggal 11 Oktober 2010 dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi.
1109. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011 Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04 Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE Sumatera Selatan.
1110. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 503/3760/IV/2019 Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 16 Desember 2009 beserta dokumen pendukung lainnya.
1111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009 Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 11 Desember 2009 beserta dokumen pendukung lainnya.
1112. 1 (satu) dokumen Company Brochure Joint Operating Body Pertamina Talisman Jambi Merang.
1113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 032/2857/Dispertamban/2010 Perihal : Pembelian Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang Berada di Wilayah Kota Palembang Tanggal 15 Oktober 2010.
1114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Direktur yang ditandatangani oleh Andre M. Arbain Tanggal 08 April 2014.
1115. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan SPD Dirut
1116. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan SPD Dirut 2013
1117. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (IV) 2014
1118. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran Cek Jan-Apr 2012
1119. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran (1) 2013
1120. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran (2) 2013
1121. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (1) 2014
1122. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (2) 2014
1123. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran Cek (II) 2012.
- O.1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Desember 2019 ditandatangani oleh Alex Noerdin;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan

Halaman 321 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2012;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2013;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2014;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2015;
 6. 1 (satu) lembar Penerimaan Lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Bulan Desember 2016;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2016;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Target APBD Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2019;
 9. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rekonsialisasi Hibah dan Penerimaan Lain-lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Bulan Desember 2019.
- P. 1. Gas Transportation Agreement antara PT PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE tanggal 4 april 2011
2. Amendmet Agreement PDPDE Sumatera Selatan Gas Transportation Agreement antra PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE Sumsel tanggal 9 februari 2015
 3. Rekap Invoice toll fee periode Januari 2016- feb 2019
 4. Invoice TGI no 38/INV/0217 tanggal 6 feb 2017
 5. Invoice TGI no 195/INV/0718 tanggal 3 juli 2018
 6. Invoice TGI no 54/INV/0219 tanggal 4 Feb 20219
 7. Side letter Agreement mengenai pengalihan Hak dan kewajiban dalam Pelaksanaan Asset Transfer Site dan Metering Facilities di Simpang Abadi tanggal 23 Januari 2015; (1 (satu) bendel)
 8. Rekap Tagihan Reimbursement periode tahun 2011-2019
 9. Rekap Tagihan OMA & Electricity periode tahun 2011-2019
 10. Rekap Tagihan Penalty
 11. Rekap tagihan SOP periode tahun 2011-2019
 12. Rekap Tagihan Toll Fee periode tahun 2011-2019
 13. Rekap Tagihan PT PDPDE periode tahun 2011-2019
 14. Perjanjian Penyelesaian antara PT Transportasi Gas Indonesia dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumatera Selatan) tanggal 21 Mei 2019
 15. Perjanjian Asset Transfer Metering Facilities Di simpang Abadi antara PT. PDPDE GAS dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) tanggal 18 Mei 2015; (1 (satu) Bendel)
 16. Surat Nomor 335 /PDPDE/SS/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014, perihal ; penggunaan lahan metering station Simpang Abadi.
 17. Surat Nomor 465 / PDPDE/SS/IX/2014, tertanggal 3 September 2014, Perihal; Persetujuan pengalihan Hak dan Kewajiban terkait Asset Transfer Metering Station Simpang Abadi dari PDPDE Sumsel kepada PDPDE GAS
 18. Surat PT. TGI kepada PDPDE Sumsel nomor 057/EXT/TGI/PD/09.14, tertanggal 16 September 2014, Perihal; pengalihan Hak & Kewajiban Serta Penggunaan Lahan Asset Transfer Metering Station PDPDE Simpang Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Perjanjian Akses atas Site di Metering Facilities Simpang Abadi antara PT. TGI dengan PT PDPDE GAS, tanggal 18 Mei 2015
 20. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi nomor; 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia, tanggal 11 Agustus 2010
 21. Surat PDPDE nomor 255/PDPDE/SS/IX/2011 kepada Presiden Director PT. Transportasi Gas Indonesia, Perihal; Penagihan dan Pembayaran sesuai GTA antara PDPDE Sumsel dan TGI, tanggal 30 September 2011.
- Q.1.
- 1 (satu) lembar struktur perusahaan / holdings structure;
 - 2 (dua) lembar print out email draft surat untuk SKC halaman 1 dan 2;
 3. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. Buckingham Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016;
 4. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. AKR Corporindo, Tbk., PT. Buckingham Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016;
 5. 1 (satu) bundel Concession: Certificate (issue by Government) Palembang.
- R.1.
- 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta Pendirian PDPDE Gas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 yang dicap dan stemple basah;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 19 tanggal 28 Juni 2009 tentang Peningkatan Modal dan Konversi Hutang Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan saham yang dicap dan stemple basah;
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 05 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. PDPDE Gas yang dicap dan stemple basah;
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Perubahan Pengurus yang dicap dan stemple basah;
 6. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 14 tanggal 26 Agustus 2013 trntang Perubahan Tempat Kedudukan yang dicap dan stemple basah;
 7. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pengalihan Saham yang dicap dan stemple basah;
 8. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
 9. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
 10. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Perubahan Direksi yang

Halaman 323 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



dicap dan stemple basah;

11. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang Perubahan Direksi dan JKomisaris yang dicap dan stemple basah;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan Pemegang Saham dan Penambahan Pasal 14 yang dicap dan stemple basah;
13. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 12 Mei 2017 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 31 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 32 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah
16. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 03 April 2018 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
17. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 18 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 02 tanggal 03 Juli 2019 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
20. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 05 Pebruari 2020 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
21. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dicap dan stemple basah.
22. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 19 April 2021 tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.
23. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PT. Panji Raya Alamindo Nomor 18 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Jual Beli Saham antara Panji Raya Alamindo dan PT. DKLN yang dicap dan stemple basah.
- S.1. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
2. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001
3. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
4. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
5. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
 6. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
 7. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010
 8. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
 9. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
 10. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
 - T. 1. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH;
 2. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH;
 3. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 34 Tanggal 31 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Hj. TRINING ARISWATI, SH;
 4. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE GAS Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH;
 5. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH;
 6. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH;
 7. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.
 - U1. 1 (satu) lembar fotokopi rekapitulasi Target dan Realisasi PD. Tambang dan Energi / PT. Sumsel Energi Gemilang Periode Tahun 2012-2019.
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Halaman 325 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 beserta STS.
3. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 beserta STS.
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 beserta STS.
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kekurangan PAD Tahun Buku 2013 beserta STS.
 6. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 beserta STS.
 7. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 beserta STS.
 8. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Klarifikasi Target PAD 2018 dan 2019 PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
- V.1. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0675978-6 periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
2. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
 3. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
- W1. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009;
2. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010;
 3. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/2574/IV/2015 tanggal 14 September 2015 kepada Direktur PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2014;
 4. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0931/IV/2018 tanggal 24 April 2018 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2017, dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1310/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2018;
 5. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1961/IV/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal ; laporan keuangan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh akuntan Publik dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 1709/510/IV/2013 tanggal 19 -7-2013 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal ; laporan keuangan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh akuntan Publik;
 6. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0474/IV/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal : persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun buku per 31 Desember 2013;
 7. Beberapa Dokumen surat Gubernur Sumatera Selatan nomor: 900/2833/IV/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal; Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja PDPDE kepada Dirut

Halaman 326 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- PDPDE Sumsel 2010 sampai dengan 2018;
8. 1 bendel Rencana kerja dan anggaran perusahaan 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) tanggal 24 September 2019;
 9. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011;
 10. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
 11. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013;
 12. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
 13. 1 bendel dokumen PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019;
 14. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014;
 15. 1 bendel dokumen Laporan Auditor Independen PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
 16. 1 bendel dokumen Laporan keuangan PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
 17. 1 bendel rekapitulasi Target dan realisasi PDPDE/ PT Sumsel Energi Gemilang periode 2012 – 2019.
- X 1. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 410/KPTS/SIUP-PB/2008 Tentang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pertambangan Dan Energi Pd Perusahaan Daerah Tanggal 15 Agustus 2008;
2. Foto copy NPWP Nomor: 02.202.617.3-308.000 PD Pertambangan Dan Energi;
 3. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 239/KPTS/SIUP-PB/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepada “ Pertambangan Dan Energi “ PD Nama Pemilik/Penanggung Jawab: Ir.H.Djanoeir Moenier;
 4. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor 3999 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Kepada Pd Pertambangan Dan Energi Memberikan Izin Usaha Kepada Saudara Ir.H.Djanoer Moenier;
 5. Foto copy Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT Mitra Energi Buana Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Perjanjian Jual Beli Gas (Perjanjian) Nomor Penjual: 048/MEB/II/2010 dan Nomor Pembeli: 03-PJBG/PDPDE/MEB/II/2020 Tanggal 17 Pebruari 2010;
 6. Asli Pokok Pokok Perjanjian Pengalihan Saham Antara Pt Pertamina Gas Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Nomor Pertagas: 050/PG0000/2010-S0, Nomor PDPDE:-7-NK/PDPDE.PG/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;
 7. Asli Surat Dari Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Nomor: 120/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Untuk Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Teguran;
 8. Asli Surat Dari BP Migas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang Nomor: Man-J/10-1015 Tanggal 11 November 2010 yang ditujukan kepada Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE;
 9. Asli Nota Kesepahaman Tentang Pengelolaan Lapangan Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Gas Bumi Ramba-Sumatera Selatan Tanggal 6 Desember 2010 Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Dan PT. Duta Firza;

10. Asli Surat Dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor: 0254/Bp00000/2010/S2 Tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok Pokok Perjanjian (HOA) Penjualan Gas Dari Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Ke PDPDE, asli Surat dari Pertamina – Talisman Jambi Merang Ref. No: MAN-J/10-0575 Tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Dirut PDPDE Sumsel, dan asli Head Of Agreement Of Gas Sales Agreement By And Between PT. Pertamina Huku Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited, And PDPDE Prov. Sumsel JOB Ref. No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref. No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2020 Tanggal 20 Mei 2010;
 11. Foto copy Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT. PDPDE GAS Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua:007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010;
 12. Foto copy Surat Dari BP MIGAS Pertamina-Talisman Jambi Merang Ref. No:Man-J/10-0024 Tanggal 12 Januari 2011 yang ditujukan kepada Dirut Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi(PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas;
 13. Foto copy Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang (PT SEG);
 14. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi;
 15. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pembentukan Badan Hukum PDPDE Menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang;
 16. Foto copy Amandemen II Atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Antara PT Pertamina Gas Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi sumatera Selatan (Untuk Area Sumatera Bagian Selatan) Nomor Transporter : 070/PG0000/2013-SO, Nomor Shipper: 031/PDPDE.PERTAGAS/2013 Tanggal 25 Nopember 2013;
 17. Laporan Kinerja Per 31 Maret 2018 dari PD Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Y 1 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008.
2. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/P Tahun 2013 Tanggal 4 November 2013.
 3. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2008.

Halaman 328 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2013.
- Z 1. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi sumatera selatan nomor: 7 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000.
2. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi sumatera selatan nomor: 37 tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001.
3. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Konsultan (PT PDPDE Konsultan) nomor 06 tanggal 23 November 2005.
4. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT PDPDE Hilir) nomor 34 tanggal 19 Januari 2009.
5. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Pirantinusa Energi Persada nomor 218 tanggal 19 Mei 2009.
6. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang nomor. 14 tanggal 15 Juli 2019.
7. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT Sumsel Energi Gemilang nomor.21 Tanggal 25 Juni 2020.
8. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang tanggal 7 Agustus 2019.
- AA 1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor.439/KPTS/IV/2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 290/KPTS/IV/2013, Tanggal 31 Desember 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 238/KPTS/IV/2014 Tanggal 31 Desember 2013, tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2017.
5. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 312/KPTS/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020.
- BB 1.(satu) set Print Out Daftar Rekap Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan PDPDE Tahun 2010-2020;
2. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010

Halaman 329 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2010.
3. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2011.
 4. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2012.
 5. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2013.
 6. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2014.
 7. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2015.
 8. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2016.
 9. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2017.
 10. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2018.
 11. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2019.
 12. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2020.
1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMMEI BE 359031061327245/01
 2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan 087877705423
 3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan 087776162707
 4. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold
 5. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE1. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number : F4
GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI 3594590830
77783)

2. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

BE1. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass :
Syantik 212;

2. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2;

3. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836;

4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan
nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977
dengan nomor handphone 0811880258.

BE1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan
4 nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734
dengan nomor handphone 08119771709.

BE1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7
5 MTM ; 90B7004TID S/N : R300BQRV.

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F
nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI
slot 2 : 357944090472133.

3. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard;

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861;

5. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100
CE0980 ZTE Corporation;

6. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan
tali berwarna hitam;

7. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau;

8. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih

9. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.

Dengan rincian sebagai berikut:

ROMAWI I. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN

Huruf A Nomor 1 berupa : Laporan Keuangan Auditor Independen

Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan

Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember

2010. (legalisir sesuai dengan aslinya)

sampai dengan

Huruf BE.5 angka 6 berupa : 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128

MB RM

Halaman 331 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

ROMAWI II. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN
Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Nomor: 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, Customer: Endang Budiansih, Unit: Apartemen Lantai 11 No. 12, Notaris Dr. Erny Kencanawati, SH.,MH. Notaris Kota Bandung;

Sampai dengan

Huruf T angka 2 berupa : Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

ROMAWI III. DISITA DALAM PERKARA AN. AHMAD YANIARSYAH HASAN

Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota, type Voxy 2.0 A/T, tahun pembuatan: 2019, nomor rangka: JT7X2RB80K7015982, nomor mesin: 3ZR0D75369, warna: putih metalik, nomor polisi B-1750-WUN beserta kunci kontak

Sampai dengan

Huruf D Nomor 2 berupa : 1 (satu) unit Bangunan di Rusun Hunian dan Non Hunian Lippo Sudirman Condominium Jln. Garnisun Dalam Rt.10/01 No. 8 No. C6C (3), Lt. 6, Blok C, sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMRS) No. 603/IV/C luas bangunan 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta dengan pemegang hak a.n. PT PALSIN ANUGERAH ADIL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 56/2013, tanggal 13/12/2013, yang dibuat oleh Ny. Suryati Moerwibowo, S.H., selaku PPAT.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin;

Angka 1.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan X-Tra CIMB Niaga atas nama Dra. Majidah Bahar dengan nomor rekening : 302-01-00370-18-4 Cabang CIMB Jakarta Pamulang;

Sampai dengan

Angka 18.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Remy Merawati NIK: 32710469056800007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramadhan 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi dengan No. Pol. B 300 LPE 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19372872.C Tanggal 14 September 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawu No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 1569319, untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawu No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Innova dengan No. Pol B 1881 SFC 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19005683.C Tanggal 22 Juli 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin : 1TRA620685. 1 (satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C0575067 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin : 1TRA620685
II.	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Vellfire dengan No. Pol. B 818 SFC

Halaman 333 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

ROMAWI IV. DISITA DALAM PERKARA AN. TERDAKWA MUDDAI MADANG

Barang bukti dokumen pada :

Huruf a.1 berupa : 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174061004121006 An. Nama Kepala Keluarga : Muddai Madang
Sampai dengan

Huruf r.2 berupa : 1(satu) set print out Formulir Pembukaan Rekening Nasabah An. Muddai Madang beserta Mutasi Rekening Bank BNI dengan No. Rek. 7914081959 atas nama Muddai Madang Periode Tanggal 31/07/2013 s.d. 05/11/2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Muddai Madang.

1.	1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
2.	1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
3.	1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
4.	1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
5.	1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
2.	1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00180 seluas 1.999 M ² yang terletak di Kel. Triyoso Lama, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.



	2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03200 seluas 9.975 M ² yang terletak di Kel. Kota Baru Selatan, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
	3.1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M ² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. 2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M ² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita 3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M ² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita. 4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M ² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita. 5. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M ² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

ROMAWI IV. Disita dalam perkara an. Alex Noerdin barang bukti dokumen pada nomor 1 s/d 2 *digunakan dalam perkara an. Alex Noerdin* Nomor 1 angka 1 berupa : 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang DPR dengan Nomor Rekening : 122-00-1023355-2 atas nama Alex Noerdin Periode 02 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Sampai dengan

Nomor 2 angka 7 berupa : 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1130090919501 atas nama Alex Noerdin Periode 15 Desember 2020 sampai dengan 30 April 2021.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

B. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PEMBANGUNAN MESJID SRIWIJAYA

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017

Halaman 335 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
 6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
 7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
 8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
 11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);

Halaman 336 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM,

Halaman 337 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018.
Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
 30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
 32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
 33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
 34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
 35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
 36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
 37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
 38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Hutama Karya (Persero). (Copy 1-1).
 39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
 40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
 41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
 42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
 43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
 44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 338 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 339 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 340 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 341 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 342 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
 95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
 105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
 106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
 107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek :

Halaman 343 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)

Halaman 344 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)

Halaman 345 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

Halaman 346 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen

Halaman 347 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018.

Halaman 348 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015.
Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
191. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
194. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);

Halaman 349 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanani, SH (fotocopi);
202. 1 (satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25

Halaman 350 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBA/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 351 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi

Halaman 352 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan

Halaman 354 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja

Halaman 355 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor:

Halaman 356 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/II/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/II/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;

Halaman 357 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya sekala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan

Halaman 358 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/ BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan

Halaman 359 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015

Halaman 360 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 Desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm \pm$ 9 Hektar di kawasan Jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 Desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 361 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/II/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampain kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembangun masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid

Halaman 362 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II Palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT//2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No.

Halaman 363 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m² an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m² an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor :

Halaman 364 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/II/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah

Halaman 365 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ynag Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya

Halaman 366 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal

Halaman 367 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1//2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret

Halaman 368 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m2 An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M2 berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya

Halaman 369 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);

Halaman 370 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria.
Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN

Halaman 371 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ; Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu

Halaman 372 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 373 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

Halaman 374 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal

Halaman 375 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga

Halaman 376 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;

Halaman 377 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec.

Halaman 378 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;

Halaman 379 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;

Halaman 380 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp.

Halaman 381 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre

Halaman 382 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sri
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus

Halaman 383 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Halaman 384 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Royalti Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021

Halaman 385 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya

Halaman 386 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17

Halaman 387 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;

Halaman 388 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236.660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20

Halaman 389 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli

Halaman 390 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya

Halaman 391 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro

Halaman 392 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 393 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan

Halaman 394 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan

Halaman 395 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober

Halaman 396 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai 1-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 397 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR

Halaman 398 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah

Halaman 399 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Halaman 400 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwar, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwar, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September

Halaman 401 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti No. 1 berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli).

Sampai dengan

Barang bukti No. 591 berupa :1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara.

Barang bukti Kendaraan Bermotor :

Barang bukti Nomor :

592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;

Halaman 402 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF

Barang bukti Nomor :

595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;



598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;

599 Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;

600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;

601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;

754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;

755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;

756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.

Halaman 405 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

869 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;



870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti No. 871 berupa : 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015

Sampai dengan

Barang bukti No. 1009 berupa : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin.

11) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 15 Juni 2022 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permintaan Banding tanggal 20 Juni 2022, Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 15 Agustus 2022, Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 28 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing dengan Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Juli 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terkait Penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa dalam perkara Masjid Sriwijaya. dalam Amar Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUDDAI MADANG yakni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dan Membebaskan Terdakwa Muddai Madang dari Dakwaan KEDUA, menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa MUDDAI MADANG tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang berasal dari pembuktian keterangan saksi, ahli serta alat bukti surat yang telah dihadirkan oleh penuntut umum. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (Almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an. Menindaklanjuti

Halaman 408 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana-dana dari APBD. Bahwa terdakwa termasuk dalam susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku Bendahara.

- b. Bahwa Terdakwa menjadikan alamat kantornya di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan sebagai domisili kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan terdakwa membuat 2 (dua) rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk menerima uang salah satunya uang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan berada di luar domisili Provinsi Sumatera Selatan yaitu, *pertama*: nomor rekening 101-00-0595649-3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria, Kebayoran Baru beralamat Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang merupakan alamat kantor Terdakwa dan *Kedua*: nomor rekening 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta beralamat di Jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Padahal senyatanya terdakwa mengetahui mengenai tata syarat pemberian hibah daerah yang dananya berasal dari APBD. Mengingat terdakwa juga memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai yakni Ketua umum Koni Sumatera Selatan masa bakti dengan 2007-2011 dan diperpanjang sebagai ketua umum Koni Sumatera Selatan masa bakti 2012-2016, sehingga tidak mungiin terdakwa tidak mengetahui aturan terkait hibah yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman 409 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- c. Bahwa terhadap penggunaan dana hibah 2015, Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Swijaya Palembang sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 tidak pernah membuat laporan penggunaan uang hibah yang diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. selain itu walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku kepala BPKAD tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang di Verifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra dan tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- d. Bahwa mengacu pada Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menyebutkan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Dan dijelaskan juga bahwa Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. Selanjutnya diatur pula Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa terdakwa selaku bendahara berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor. 01 Tanggal 03 Oktober 2009 disebutkan memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 18 ayat 5 menjelaskan bahwa Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.



Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Penuntut Umum unsur melawan hukum telah terbukti sehingga pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA sangatlah keliru.

2. Terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Masjid Sriwijaya, adalah sebagai berikut :

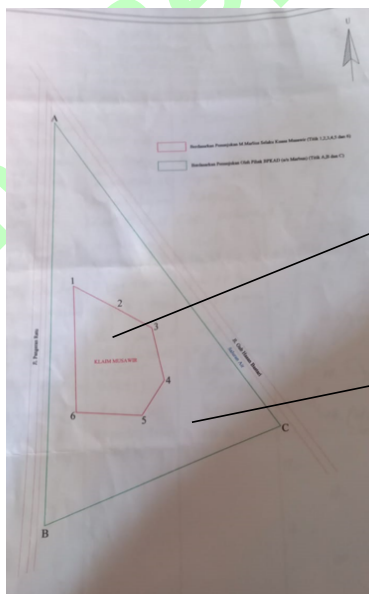
- a. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kerugian keuangan negara dengan metode total loss atau kerugian total senilai Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menerapkan hukum.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya telah dimintakan audit investigasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang kepada Muhammad Anshar, SE, MM, AKCA, CERS selaku akuntan publik yang juga berprofesi sebagai dosen akutansi pada Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah (Palu) yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari pemerintah provinsi sumatera selatan sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Pertimbangan audit investigasi tersebut dengan alasan pekerjaan yang dibangun sebagian di atas tanah milik orang lain, prosedur dari anggaran, lelang dan pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum, proyek tersebut tidak memberikan manfaat karena tidak diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar jika proyek tersebut dilanjutkan apabila permasalahan tanah belum diselesaikan.
- c. Bahwa menurut Bambang Wirawan.,S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CGCAE yang merupakan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan yaitu menurut Bab II Penyusunan Dokumen Pe



ngadaan huruf B Identifikasi dan Pemilihan Metode Pengadaan bahwa PA/KPA dalam menyusun rencana pengadaan, perlu melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) dan menetapkan metode pengadaan, serta wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

- 1). Jadwal kegiatan harus memperhatikan waktu pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan dan batas waktu penyelesaian pekerjaan sehingga dapat difungsikan sesuai rencana sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Memperhatikan kesiapan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi rancang dan bangun (*design and build*) seperti perencanaan/desain yang diperlukan, lahan, persetujuan kontrak tahun jamak (untuk kontrak tahun jamak), serta besarnya dana/biaya.

Bahwa dengan demikian bila hal hal tersebut tidak dipenuhi berarti sudah merencanakan sebuah kegagalan baik "Kegagalan Konstruksi" maupun "Kegagalan Bangunan". Dengan demikian pekerjaan konstruksi tersebut tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Atau dapat dikatakan sebagai bentuk kerugian negara secara keseluruhan (*total lost*) dengan penyesuaian, dan secara faktual saat ini bangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, tidak adanya kelanjutan pembangunan serta bahwa berdasarkan Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020 menyebutkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi atas gugatan MUSAWIR dan kawan-kawan selaku penggugat tanah seluas 27.735 M² dari ± 70.000 M² yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa dikarenakan tidak dilakukannya ganti rugi, saat ini telah banyak dibangun bangunan permanen Kawasan pembangunan Masjid Sriwijaya, serta terungkap fakta dipersidangan ada pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan kota Palembang dengan mengeluarkan Surat No.905/16.71-1P.02/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 berupa penyampaian hasil identifikasi lapangan yang ditandatangani oleh Norman Subowo selaku kepala kantor pertanahan kota Palembang yang di dalam lampiran surat tersebut terdapat gambar lokasi sebagai berikut:



Tanah milik
musawir dkk

Tanah 9 ha lokasi
pembangunan
masjid sriwijaya

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menerapkan hukum.

3. Terkait dalam perkara PDPDE SUMSEL, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa **MUDDAI MADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Primair Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai:

1. Penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa, dalam Amar Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUDDAI MADANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga Penuntut Umum berpendapat :
 - Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa MUDDAI MADANG tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa MUDDAI MADANG kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa khususnya keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga



putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat.

- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana Korupsi dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
- 2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan agar terdakwa **MUDDAI MADANG** membayar uang pengganti sebesar Rp.36.030.590.263,45 (tiga puluh enam milyar tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah empat puluh lima Sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Terhadap putusan uang pengganti tersebut, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa **MUDDAI MADANG** dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD17.912.334,41 (tujuh belas juta Sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu dollar amerika serikat), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 9 (sembilan) Tahun Penjara atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim dalam menentukan besar Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **MUDDAI MADANG** hanya berdasarkan Marketing fee yang diterima Terdakwa, sebagai berikut :

- melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.781.224.232,41 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah).

- melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Namun majelis Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apa yang sudah menjadi Fakta Persidangan yaitu uang atau keuntungan lainnya yang telah dinikmati oleh Terdakwa MUDDAI MADANG dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, dengan rincian sebagai berikut :

- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
- melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas, sebesar USD3.870.980,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dollar) dan Rp859.493.814,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang berasal dari pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00

Halaman 415 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



(empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dan USD1.050.030,00 (satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di tahun 2012.

- Melalui hasil penjualan Saham PT. DKLN sebesar 51% yang berada di PT. PDPDE Gas kepada PT. Panji Raya Alamindo yang merupakan anak usaha PT. Rukun Raharja, Tbk pada Tahun 2012 seharga USD8.000.000,00 (delapan juta dollar amerika serikat) dan Rp18.610.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Melalui hasil penjualan Saham PT. DKLN sebesar 25% yang berada di PT. PDPDE Gas kepada PT. Rukun Raharja, Tbk pada Tahun 2019 seharga USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dollar amerika serikat)

Tentunya dengan tidak dipertimbangkannya uang atau keuntungan lainnya yang telah dinikmati oleh Terdakwa MUDDAI MADANG dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* tersebut mempengaruhi besarnya jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan terkait dengan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Terkait dengan itu, kami Penuntut Umum berpendapat, seharusnya perhitungan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa MUDDAI MADANG sudah seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan mendasari pada ketentuan yang telah mengatur mengenai uang pengganti yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :



- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terdakwa.
 - (2) Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- Pasal 39 KUHP menentukan sebagai berikut :
- (1) Barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.



- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

➤ Pasal 46 KUHP mengatur sebagai berikut :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

➤ Selanjutnya Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menentukan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, menentukan sebagai berikut :
1. Pasal 4
 - Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng
 - Ayat (2) : Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya
 2. Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.
- Kemudian Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menentukan bahwa :
- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa agenda pembuktian dari Penuntut Umum diakhiri dengan pemeriksaan Terdakwa MUDDAI MADANG yang telah

Halaman 419 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022. Oleh karena itu Penuntut Umum menggunakan konversi kurs beli dan kurs jual USD dengan rupiah berdasarkan Website Resmi Bank Indonesia Tanggal 18 Mei 2022, untuk Kurs Jual USD setara Rp14.724,- dan untuk Kurs Beli USD setara Rp14.577,-.

- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan uang atau keuntungan yang telah dinikmati oleh Terdakwa MUDDAI MADANG dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sejumlah USD12.666.328,87 dan (Rp28.481.329.871,41 menjadi USD1.953.854,01 Konversi Setara USD : Kurs Beli USD (Rp14.577/ USD), yang diperoleh dari penerimaan fee marketing yang tidak sah, pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas, dan melalui hasil penjualan Saham PT. DKLN yang berada di PT. PDPDE Gas kepada PT. Panji Raya Alamindo yang merupakan anak usaha PT. Rukun Raharja, Tbk maupun kepada PT. Rukun Raharja, Tbk.
- Khusus Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN dari jumlah keseluruhan sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN dan kenyataannya uang sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN tersebut malah dinikmati oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga dengan demikian menjadi tanggung jawab pribadi MUDDAI MADANG. Oleh karena itu kerugian negara yang sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar



seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tersebut hanya dijatuhkan kepada MUDDAI MADANG sebagai
Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

- Selanjutnya terhadap kerugian keuangan Negara yang sebesar USD30.258.202,79 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat*), tersebut berdasarkan Fakta Persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa MUDDAI MADANG bersama-sama dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN, CACA ISA SALEH SADIKIN dan ALEX NOERDIN, dimana keempat Terdakwa tersebut masing-masing memiliki peranan yang sama proporsinya sebagaimana telah diuraikan dalam Analisa Yuridis, sehingga kerugian keuangan Negara yang mereka timbulkan secara bersama-sama tersebut adalah mutlak tanggung jawab mereka berempat yang akan dibagi secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa.
- Kemudian terhadap kerugian keuangan Negara yang sebesar USD30.258.202,79 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat*) tersebut harus dikurangkan terlebih dahulu dengan yang dinikmati oleh para terdakwa yaitu CACA ISA SALEH SADIKIN menikmati sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*). AHMAD YANIARSYAH HASAN menikmati total sebesar USD5.455.293,35 (*lima juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh lima dollar amerika serikat*). Terdakwa MUDDAI MADANG menikmati sebesar USD17.912.334,41 (*tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu dollar amerika serikat*). sehingga terdapat sisa kerugian keuangan Negara yang belum dibebankan kepada para Terdakwa sebesar USD13.168.606,11 (*tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam koma sebelas dollar amerika serikat*) yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2)



Perma Nomor 5 Tahun 2014 yaitu apabila dibagi secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa maka masing-masing Terdakwa harus dibebani membayar uang pengganti sebesar USD3.292.151,53 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga dollar amerika serikat*).

- Berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, karena terhadap harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang tidak dinikmati oleh Terdakwa dan atau telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan. Oleh karena itu sangat beralasan terhadap 4 (empat) Terdakwa juga harus dijatuhi tambahan hukuman membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar USD3.292.151,53 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga dollar amerika serikat*).
- Berdasar analisa yang telah uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan terhadap para Terdakwa harus dijatuhi hukuman membayar Uang Pengganti sebesar uang yang telah dinikmati ditambah dengan sisa kerugian keuangan Negara yang belum dibebankan kepada para terdakwa sebesar USD13.168.606,11 (*tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam koma sebelas dollar amerika serikat*) yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2014 yaitu apabila dibagi secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa maka masing-masing Terdakwa harus dibebani tambahan membayar uang pengganti sebesar USD3.292.151,53 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh satu koma lima puluh tiga dollar amerika serikat*).
- Dengan demikian terhadap Terdakwa MUDDAI MADANG harus dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD17.912.336,41 (*tujuh belas juta Sembilan ratus dua belas tiga ratus tiga puluh enam koma empat puluh satu dollar*).



amerika serikat), dengan memperhitungkan barang bukti berupa Uang tunai, deposito, tabungan, tanah dan bangunan serta barang bukti lain yang telah disita oleh Penyidik

3. Penetapan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita.

- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 m² yang terletak di Kel.Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang atas nama Muddai Madang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muddai Madang.

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita.

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Pemegang hak Mudday Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M²



yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muddai Madang.

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita.

Terhadap penetapan barang bukti tersebut Penuntut Umum berpendapat :

- Terkait dengan Barang bukti berupa asset tanah dan bangunan yang diputus Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita dan Terdakwa Muddai Madang sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan "Ratna Yulita merupakan istri Terdakwa, yang memiliki usaha sendiri dan tanah/bangunan tersebut diperoleh tahun 2003 dan tahun 2005 jauh sebelum tindak pidana dilakukan, maka dikembalikan kepada Ratana Yulita". Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebab berdasarkan Fakta Persidangan yaitu Ratna Yulita yang adalah Istri dari Terdakwa MUDDAI MADANG tidak dapat menjelaskan dengan pasti dan detail yang disertai dengan bukti bukti berapa sebenarnya pendapatan atau keuntungan dari usahanya tersebut. Dan juga berdasarkan Fakta Persidangan ditemukan, Ratna Yulita dalam rekeningnya pada Bank Panin KCP Kemang No. Rekening : 1282013578 menerima jumlah uang yang besar hanya dari suaminya yaitu Terdakwa MUDDAI MADANG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 02-08-2012, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 03-09-2015, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupia) pada tanggal 10-08-2016, dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 20-12-2016 serta dari PT. Palsin Anugerah Adil pada Bank



Mandiri nomor: **1282013578** menerima dana sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Dan terkait dengan uang yang diterima Ratna Yulita tersebut patut diduga digunakannya untuk membeli tanah dan bangunan tersebut.

- Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “dan tanah/bangunan tersebut diperoleh tahun 2003 dan tahun 2005 jauh sebelum tindak pidana dilakukan”. Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim tidak cermat dalam memberikan pertimbangan tersebut, sebab berdasar fakta persidangan diperoleh yaitu terhadap tanah dan bangunan yang dikembalikan kepada Ratna Yulita dan Terdakwa MUDDAI MADANG tersebut juga terdapat beberapa tanah dan bangunan yang diperoleh di dalam tempus delicti dari perkara *a quo*, berupa :

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita, Tahun perolehan 2014.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang, Tahun perolehan 2018.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita Tahun perolehan 2013.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita Tahun perolehan 2013.



Sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan tanah dan bangunan tersebut dibeli dari hasil tindak pidana korupsi perkara *a quo*.

Selanjutnya Terdakwa MUDDAI MADANG, juga tidak mampu membuktikan dengan berdasarkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, bahwa barang-barang yang telah disita secara sah tersebut tersebut tidak terkait dengan perkara *a quo* dan/atau tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- Adapun untuk tanah dan bangunan yang diperoleh di luar tempus delicti, berdasarkan fakta persidangan tanah dan bangunan tersebut pernah dilakukan renovasi yaitu :

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita, Perolehan tahun 2003, namun Terdakwa telah merenovasi Tanah dan Bangunan tersebut pada tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sehingga patut dipertimbangkan uang yang digunakan untuk merenovasi tanah dan bangunan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi perkara *a quo*.

- Kemudian juga tanah dan bangunan yang diperoleh di luar tempus delicti, yang statusnya diagunkan Bank, yang pembayaran cicilan dari pinjaman tersebut masih masuk didalam tempus delicti perkara *a quo*, yaitu:

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita, Tahun perolehan 2003, status diagunkan di bank Panin.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang, Tahun perolehan 2003, Diagunkan di Bank Panin.



Sehingga patut dipertimbangkan bahwa pembayaran cicilan pinjaman dari tanah dan bangunan yang diangunkan di Bank tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tanah dan bangunan tersebut dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, mengingat dalam perkara *a quo* Terdakwa MUDDAI MADANG dibebani membayar uang pengganti.

- Dan juga untuk tanah dan bangunan yang diperoleh di luar tempus delicti, yaitu:

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang, Dibeli sekitar tahun 1999/2001, status saat ini dikuasai oleh Yayasan Kostrad karena berada di Komplek Kostrad.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Patut dipertimbangkan Majelis Hakim tanah dan bangunan tersebut dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, mengingat dalam perkara *a quo* Terdakwa dibebani membayar uang pengganti.

- Sehingga berdasar pada uraian tersebut diatas, terhadap Tanah dan Bangunan sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 m² yang terletak di Kel.Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang atas nama Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Pemegang hak Mudday Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 428 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **MUDDAI MADANG** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair (dalam perkara PDPDE Sumsel) DAN Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair (dalam perkara pembangunan Masjid Sriwijaya) DAN Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUDDAI MADANG** berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan.
5. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti total sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD17.912.334,41 (tujuh belas juta Sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu dollar amerika serikat), dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramdhan.

Halaman 429 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah.
- 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5. AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimencyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.

Halaman 430 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00180 seluas 1.999 M² yang terletak di Kel. Triyoso Lama, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03200 seluas 9.975 M² yang terletak di Kel. Kota Baru Selatan, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan

Halaman 431 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum dari Terdakwa juga mengajukan Memori Banding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Agustus 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum An. Terdakwa MUDDAI MADANG pada dasarnya tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 15 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena Judec Factie Tingkat pertama hanya mengutip surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan Fakta dalam persidangan, sehingga sangat merugikan terhadap diri Terdakwa, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada kerugian negara dalam perkara a quo, menurut Penasehat Hukum Negara diuntungkan secara signifikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Sumsel diuntungkan, PDPDE Sumsel diuntungkan, PDPDE sumsel diuntungkan dengan telah menerima hasil deviden dan fee sebesar 47 milyar dan tahun 2018 PT.PDPDE Gas nilai sahamnya USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar amerika serikat) yang didalamnya PDPDE Sumsel memiliki 15% dari jumlah saham tersebut, serta PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas masih memiliki piutang atau tagihan kepada PT. PLN sebesar USD 27.021.871,04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat dollar amerika serikat) dengan rincian pokok sebesar USD 26.245.297,84 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat dollar amerika serikat) ditambah denda sebesar USD 776.573,20 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh dollar amerika serikat) berdasarkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor : 43037/VII/ARB-BANI/2020 tertanggal 03 Mei 2021.

Menimbang, bahwa karena Negara mendapatkan keuntungan dalam perkara dan tidak ada kerugian Negara dalam perkara *a quo*, sehingga sudah seleyaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo*, menerima permohonan Banding ini dan mengambil alih pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap putusan terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa yang dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA, Penasehat Hukum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Judex Factie Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penerapan hukum yang tepat, adil, sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga (Pasal 2 ayat (1) J.o. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 433 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010).

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Pemohon Banding dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechthvelvolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Mengembalikan seluruh harta benda Terdakwa yang saat ini dalam penyitaan dalam perkara *a quo*.
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Alat bukti baik bukti surat maupun Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Juni 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang Menyatakan bahwa Terdakwa Muddai Madang. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 434 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang didasari dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, oleh karenanya putusan tersebut sudah Tepat dan Benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali berkaitan dengan lamanya penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan dalam menentukan status barang bukti dalam amar putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhdap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk diubah karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan, walaupun di dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana tahadap Terdakwa. Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan terhadap Terdakw a dalam putusan tingkat pertama, masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, walaupun didalam pertimbangan hukum Judex Faktie telah mempertimbangkan ketentuan yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun

2020, ternyata masih ada fakta hukum lain yang dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa dalam penjatuhan Pidana Penjara sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagi hal yang meringan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 huruf b juncto pasal 9 huruf b PERMA Nomor 1 tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan Terdakwa sebagai



Direktur PT DKLN, Komut PT DKLN, Dirut Pt DKLN, Komut PT PDPDE GAS, mempunyai peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan Pengalihan hak dan pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara dari Bblok Jambi Merang kepada PDPDE Sumsel yang diperuntukan kepentingan Khusus Sumatera Selatan, namun perbuatan terdakwa tersebut ditinjau dari PERMA tersebut masih masuk dalam aspek berdampak sedang.

2. Bahwa kesalahan terdakwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukannya pada prinsipnya sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah, maka beralasan hukum dalam hal penjatuhan pidana penjara untuk menjaga tidak adanya disparitas dalam memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan hukum sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap penetapan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;

Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap barang bukti tersebut setelah mempelajari pertimbangan hukum dalam putusan Judex Faktie, dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sependapat dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, dimana Terdakwa maupun Saksi Ratna Yulita (isteri Terdakwa) berdasarkan Fakta Persidangan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dengan pasti dan detail yang disertai dengan bukti bukti berapa sebenarnya pendapatan atau keuntungan dari usahanya tersebut, yang menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam perolehan harta benda yang telah disita menurut hukum, perolehan tersebut dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, dalam arti waktu terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Korupsi; Oleh karenanya beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap Barang Bukti tersebut diatas yang telah dirampas dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair yang didalam Amar Putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan termasuk penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti yang akan diperhitungkan dengan barang bukti yang telah dirampas untuk Negara, maka terhadap barang bukti tersebut dikaitkan dengan Dakwaan Ketiga Primair, dimana kenyataannya barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari Kejahatan Tindak Pidana, maka barang bukti tersebut diatas apabila dilakukan pelelangan setelah dikurangkan dengan uang pengganti yang ditentukan dalam amar putusan, masih terdapat sisa dari hasil lelang tersebut, nilai sisa uang tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan lainnya dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding bahwa alasan-alasan keberatan tersebut bukan hal-hal yang baru dan telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, kecuali dalam hal permohonan Penuntut Umum tentang barang bukti yang dikembalikan kepada Sdri Ratna Yulita dan Terdakwa Muddai Madang seharusnya dinyatakan dirampas untuk Negara, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, dan untuk keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum dari Terdakwa An. Muddai Madang dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut bukan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, kecuali dalam hal

Halaman 437 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



permohonan Penasehat hukum agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi Pidana yang Lebih ringan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya sependapat dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, dan untuk keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Juni 2022 beralasan hukum untuk **diperbaiki**, kecuali lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang semula dikembalikan kepada Sdri Ratna Yulita dan Terdakwa Muddai Madang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding T erdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan an Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.**



II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 15 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Lamanya Pidana Penjara yang dijatuhi kepada Terdakwa dan status barang bukti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDDAI MADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan tindak pidana Pencucuan Uang sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa MUDDAI MADANG dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUDDAI MADANG dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUDDAI MADANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa MUDDAI MADANG tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahan Negara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 02768 seluas 527 M² yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
 - 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01601 seluas 234 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
 - 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01602 seluas 266 M² yang terletak di Kel. Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;

Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01868 seluas 1.423 M² yang terletak di Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita;
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00025 seluas 523 M² yang terletak di Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita;

- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No. 01139 seluas 325 m² yang terletak di Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan Pemegang atas nama Muddai Madang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mudday Madang;

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02649 seluas 2.150 M² yang terletak di Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Pemegang hak Mudday Madang;
- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00374 seluas 1.236 M² yang terletak di Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muddai Madang;

- 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 08182 seluas 149 M² yang terletak di Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.

Dikembalikan kepada saksi Ratna Yulita;

Barang Bukti berupa:

Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Muddai Madang dengan diktum sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PDPDE SUMSEL

A. A.

1. Laporan Keuangan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. (legalisir sesuai dengan aslinya);
2. Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rama Wendra PT. PDPDE GAS 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 dengan angka perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Tanggal 1 Januari 2011 per 31 Desember 2010 disajikan kembali dan Tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan kembali mata uang dolar Amerika Serikat. (legalisir sesuai dengan aslinya);
3. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 4. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 5. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 6. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 7. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 8. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 9. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7001433487-Giro BSM dari Tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 10. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7035932601-Rek. Escrow dari Tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 11. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek. 0090351103 dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 12. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek.7001433479-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 13. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek.0090351117-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya);
 14. Perjanjian Jual Beli Gas PDPDE Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 441 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954 dan Nomor PDPDE Ref:11/PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 Nopember 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
15. Perubahan Pertama Pada Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0033 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 16. Perjanjian Pemindahtanganan Dan Pengalihan Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0034 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 17. Surat Keputusan BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 18. 1 (satu) bundel tagihan penjualan gas bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dari Tahun 2011 sampai dengan 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 19. Surat dari Kementerian SDM RI yang ditujukan kepada Kepala BPMIGAS Nomor: 7654/12/MEM.M/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Perihal Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara PT. Pertamina Hulu Energi 05Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 20. Surat dari BPMIGAS yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Nomor: 1179/BPB3000/2011/S2 Tanggal 28 Desember 2011 Perihal Surat Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), PT. Pembangunan Kota Batam (PKB) dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 21. Surat Direktorat Jenderal Migas kepada Direktur Badan Usaha Niaga Gas Bumi Nomor: 2798/10/DJM.0/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Implementasi Permen ESDM No 06 Tahun 2016 oleh Badan Usaha Eksisting. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 22. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel Nomor: 045/S/D/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 23. Surat PDPDE Sumsel kepada PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Perihal Surat PT PDPDE Gas No. 045/S/D/III/2018 terkait Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

Halaman 442 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- (Salinan yang disahkan perusahaan);
24. Surat PDPDE Sumsel kepada Menteri ESDM nomor 169/PDPDE/SS/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Permen ESDM No 06 tahun 2016 tentang Ketentuan Tatacara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Salinan yang disahkan perusahaan);
 25. Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 antara PDPDE SS dan PT PDPDE Gas, diketahui oleh Direktorat Jendral Migas, SKK Migas, BPH Migas, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang tanggal 3 April 2018 (Salinan yang disahkan perusahaan);
 26. Surat Menteri ESDM kpd SKK Migas Nomor 2866/13/MEM.M/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);
 27. Surat SKK Migas kepada JOB PTJM Nomor SRT-0039/SKKMG5300/2018/S2 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penyampaian Surat Menteri ESDM Terkait Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan);
 28. Surat JOB PTJM kepada PT PDPDE Gas nomor MAN-J/18 – 1003 tanggal 19 Juli 2018 tentang Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Mengenai Realokasi Gas Bumi Dari Wilayah Kerja Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan);
 29. Notulen dan daftar hadir Rapat antara Direktorat Jenderal Migas, BPH Migas, JOB PTJM, PT PGN Tbk, PT Gagasan Energi Indonesia, PT PDPDE Gas, PT Inti Daya Latu Prima tanggal 13 September 2018 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Realokasi Gas Bumi Dari WK Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan);
 30. Surat Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel nomor 542/1978/IV/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Realokasi Gas dan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Wilayah Kerja Jambi Merang dari PDPDE ke PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);
 31. Surat JOB PTJM kpd SKK Migas nomor MAN-J/18 - 1498 tanggal 25 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Konsep Novasi Pada PJBG antara Penjual Jambi Merang dan PDPDE Sumsel kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan);

B.

- B.1. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
2. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan);
3. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan);
4. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2013. (Salinan yang disahkan perusahaan);
5. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2014. (Salinan yang disahkan perusahaan);
6. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2015. (Salinan yang disahkan perusahaan);



- yang disahkan perusahaan);
7. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 8. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2017. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 9. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 10. Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Dollar No.Rek. 7821822933 dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 11. Rekening Koran Bank Mandiri Dollar Tahun 2010 s/d 2019 No. Rek. 113-00-0401873-9. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 12. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2014, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-10.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015;
 5. Debet Note Nomor: 04/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 075/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657173 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2014 Tanggal 6 Februari 2015;
 13. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 143/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-11.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2015 Tanggal 06 Februari 2015;
 5. Debet Note Nomor: 05/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657174 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2015 Tanggal 6 Februari 2015;
14. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 142/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-12.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015;
 5. Debet Note Nomor: 06/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 077/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657175 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2015 Tanggal 1 Maret 2015;
15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 184/PDPDE/SS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-22.0415 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2015 Tanggal 1 April 2015;
 5. Debet Note Nomor: 09/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel dan Nomor: 11/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 092/S/D2/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;

Halaman 445 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998361 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2015 Tanggal 1 April 2015;
16. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 230/PDPDE/SS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-26.0515 Tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2015 Tanggal 1 Mei 2015;
 5. Debet Note Nomor: 12/DN-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 116/S/D2/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998364 Tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2015 Tanggal 4 Mei 2015;
17. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 289/PDPDE/SS/VI/2015 Tanggal 3 Juni 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-32.0615 Tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 5. Debet Note Nomor: 14/DN-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 149/S/D2/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 025/INV-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998369 Tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2015 Tanggal 1 Juni 2015;

Halaman 446 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



18. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 330/PDPDE/SS/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2015 Tanggal 1 Juli 2015;
 5. Debet Note Nomor: 15/DN-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 195/S/D2/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 029/INV-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998372 Tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2015 Tanggal 1 Juli 2015;
19. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 371/PDPDE/SS/VIII/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2015 Tanggal 1 Agustus 2015;
 5. Debet Note Nomor: 16/DN-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 208/S/D2/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998373 Tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2015 Tanggal 1 Agustus 2015;
20. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 422/PDPDE/SS/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 perihal Invoice penjualan gas;
3. Invoice Nomor: G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2015 Tanggal 1 September 2015;
 5. Debet Note Nomor: 17/DN-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 227/S/D2/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998376 Tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2015 Tanggal 1 September 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 484/PDPDE/SS/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
 5. Debet Note Nomor: 18/DN-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 257/S/D2/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998379 Tanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 534/PDPDE/SS/XI/2015 Tanggal 4 November 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-52.1115 Tanggal 04 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-

Halaman 448 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLN-10/2015 Tanggal 1 Nopember 2015;
5. Debet Note Nomor: 19/DN-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 281/S/D2/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 046/INV-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.92889588 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2015 Tanggal 1 Nopember 2015
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-13/PDPDE.PDPDEGAS/2015;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 585/PDPDE/SS/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2015 Tanggal 1 Desember 2015;
 5. Debet Note Nomor: 20/DN-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 311/S/D3/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 050/INV-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.004-15.44651671 Tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2015 Tanggal 1 Desember 2015
24. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 12 Januari 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 06/PDPDE/SS/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2015;
 3. Invoice Nomor: G-02.0116 Tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2015 Tanggal 1 Januari 2016;
 5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 020/S/D3/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal

Halaman 449 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224083 Tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2015 Tanggal 1 Januari 2016;
 25. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 11 Februari 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 46/PDPDE/SS/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/16 Tanggal 01 Februari 2016;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 050/S/D/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 008/INV-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224086 Tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2016 Tanggal 01 Februari 2016;
 26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 097/PDPDE/SS/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Februari 2016;
 3. Invoice Nomor: G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/16 Tanggal 01 Maret 2016;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 074/S/D/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224089 Tanggal 01 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2016 Tanggal 01 Maret 2016;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 April 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 153/PDPDE/SS/IV/2016 Tanggal 05 April 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2016;
 3. Invoice Nomor: G-15.0416 Tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/16;
 5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 108/S/D/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224096 Tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2016 Tanggal 01 April 2016;
28. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan);
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 13 Mei 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 205/PDPDE/SS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2016;
 3. Invoice Nomor: G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/16 Tanggal 01 Mei 2016;
 5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 131/S/D/IV/2016 Tanggal 03 Mei 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 017/INV-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224093 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2016 Tanggal 01 Mei 2016;
29. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT.

Halaman 451 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2016;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 258/PDPDE/SS/VI/2016 Tanggal 03 Juni 2016 perihal Invoice penjualan gas;
3. Invoice Nomor: G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/16;
5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 160/S/D/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224098 Tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Mei 2016 Tanggal 01 Juni 2016;
30. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 Juli 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 307/PDPDE/SS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2016;
 3. Invoice Nomor: G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/16 Tanggal 01 Juli 2016;
 5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 185/S/D/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 028/INV-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224101 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Juni 2016 Tanggal 01 Juli 2016;
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;



2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 340/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2016;
3. Invoice Nomor: G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/16 Tanggal 01 Agustus 2016;
5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 032/INV-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224105 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2016 Tanggal 01 Agustus 2016;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 September 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 398/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Agustus 2016;
 3. Invoice Nomor: G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/16 Tanggal 01 September 2016;
 5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 219/S/D/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224107 Tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2016 Tanggal 01 September 2016;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 18 Oktober 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 445/PDPDE/SS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan September 2016;
 3. Invoice Nomor: G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/16;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 231/S/D/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224110 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2016 Tanggal 01 Oktober 2016;
34. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 16 November 2016 ;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 497/PDPDE/SS/XI/2016 Tanggal 03 November 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2016;
 3. Invoice Nomor: G-46.1116 Tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/16 Tanggal 01 November 2016;
 5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 255/S/D/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224113 Tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Oktober 2016 Tanggal 01 November 2016;
35. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 552/PDPDE/SS/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 perihal Invoice penjualan gas;
 3. Invoice Nomor: G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode November 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/16 Tanggal 01 Desember 2016;

Halaman 454 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 279/S/D/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224116 Tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode November 2016 Tanggal 01 Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 19 Januari 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 05/PDPDE/SS/II/2017 Tanggal 04 Januari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Desember 2016;
 3. Invoice Nomor: G-01.0117 Tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/16 Tanggal 01 Januari 2017;
 5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 004/S/D/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653349 Tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2016 Tanggal 01 Januari 2017;
37. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: ;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 44/PDPDE/SS/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Januari 2017;
 3. Invoice Nomor: G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/17;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 6. Surat Dari PT. PDPDE GAS Nomor: 039/S/D/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017 Yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal

Halaman 455 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- invoice pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Februari 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653352 Tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2017 Tanggal 01 Februari 2017;
38. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 17 Maret 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 105/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 03 Maret 2017 perihal Tagihan penjualan gas bulan Februari 2017;
 3. Invoice Nomor: G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/17 Tanggal 01 Maret 2017;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 056/S/D/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653354 Tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2017 Tanggal 01 Maret 2017;
39. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 12 April 2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 148/PDPDE/SS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2017;
 3. Invoice Nomor: G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/17 Tanggal 01 April 2017;
 5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 069/S/D/VI/2017 Tanggal 03 April 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 014/INV-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653357 Tanggal 03 April

Halaman 456 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2017 Tanggal 01 April 2017;
40. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 16 Mei 2017
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 219/PDPDE/SS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2017
 3. Invoice Nomor: G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/17;
 5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 018/INV-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653360 Tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2017 Tanggal 01 Mei 2017;
41. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 276/PDPDE/SS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2017;
 3. Invoice Nomor: G-23.00517 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juni 2017;
 5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 090/S/D/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 022/INV-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653363 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2017 Tanggal 01 Juni 2017;
42. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2017, yang terdiri dari: (Salinan

Halaman 457 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 321/PDPDE/SS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2017;
3. Invoice Nomor: G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juli 2017;
5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 109/S/D/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 026/INV-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653366 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2017 Tanggal 01 Juli 2017;
43. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 368/PDPDE/SS/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2017;
 3. Invoice Nomor: G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
 5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 1136/S/D/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 030/INV-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653369 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2017 Tanggal 01 Agustus 2017;
44. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 443/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 05 September 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Invoice Nomor: G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2017 Tanggal 01 September 2017;
5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 156/S/D/IX//2017 Tanggal 04 September 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 034/INV-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653372 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2017 Tanggal 01 September 2017;
45. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 529/PDPDE/SS/X/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2017;
 3. Invoice Nomor: G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2017 Tanggal 01 Oktober 2017;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 178/S/D/X//2017 Tanggal 02 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 038/INV-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653375 Tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2017 Tanggal 01 Oktober 2017;
46. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 591/PDPDE/SS/XI/2017 Tanggal 03 Nopember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2017;
 3. Invoice Nomor: G-44.1117 Tanggal 03 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2017 Tanggal 01 Nopember 2017;

Halaman 459 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/XI//2017 Tanggal 02 Nopember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 042/INV-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653378 Tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2017 Tanggal 01 Nopember 2017;
47. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2017;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 676/PDPDE/SS/XII/2017 Tanggal 05 Desember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2017;
 3. Invoice Nomor: G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2017 Tanggal 01 Desember 2017;
 5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 217/S/D/XII//2017 Tanggal 04 Desember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653381 Tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2017 Tanggal 01 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 11/PDPDE/SS//2018 Tanggal 04 Januari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2017;
 3. Invoice Nomor: G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2017 Tanggal 01 Januari 2018;
 5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS//2018 Tanggal 02 Januari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 017/S/D//2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS//2018 Tanggal 02 Januari

Halaman 460 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930488 Tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2017 Tanggal 01 Januari 2018;
49. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 68/PDPDE/SS/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2018;
 3. Invoice Nomor: G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2018 Tanggal 01 Februari 2018;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 028/S/D/III/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930491 Tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2018 Tanggal 01 Februari 2018;
50. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 134/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 02 Maret 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2018;
 3. Invoice Nomor: G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2018 Tanggal 01 Maret 2018;
 5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 040/S/D/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930494 Tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2018 Tanggal 01 Maret 2018;
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT.

Halaman 461 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2018, yang terdiri dari:
(Salinan yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 205/PDPDE/SS/IV/2018 Tanggal 03 April 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Maret 2018;
 3. Invoice Nomor: G-15.0418 Tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2018 Tanggal 01 April 2018;
 5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 057/S/D/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 015/INV-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930497 Tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2018 Tanggal 01 April 2018;
52. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 264/PDPDE/SS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan April 2018;
 3. Invoice Nomor: G-19.0518 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2018 Tanggal 01 Mei 2018;
 5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 080/S/D/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 019/INV-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930500 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2018 Tanggal 01 Mei 2018;
53. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 332/PDPDE/SS/VI/2018 Tanggal 05 Juni 2018 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2018;
3. Invoice Nomor: G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2018 Tanggal 01 Juni 2018;
 5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 101/S/D/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930503 Tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2018 Tanggal 01 Juni 2018;
54. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 367/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2018;
 3. Invoice Nomor: G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2018 Tanggal 01 Juli 2018;
 5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 138/S/D/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 027/INV-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572400 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2018 Tanggal 01 Juli 2018;
55. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 432/PDPDE/SS/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2018;
 3. Invoice Nomor: G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2018 Tanggal 01 Agustus 2018;

Halaman 463 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 162/S/D/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572403 Tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2018 Tanggal 01 Agustus 2018;
56. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 480/PDPDE/SS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2018;
 3. Invoice Nomor: G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2018 Tanggal 01 September 2018;
 5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 193/S/D/IX/2018 Tanggal 01 September 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572406 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2018 Tanggal 01 September 2018;
57. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 547/PDPDE/SS/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2018;
 3. Invoice Nomor: G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
 5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 215/S/D/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01

Halaman 464 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2018;
8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572409 Tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
58. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2018;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 605/PDPDE/SS/XI/2018 Tanggal 06 Nopember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2018;
 3. Invoice Nomor: G-52.1118 Tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2018 Tanggal 01 Nopember 2018;
 5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 243/S/D/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 011.003-18.13572412 Tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
59. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 664/PDPDE/SS/XII/2018 Tanggal 05 Desember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2018;
 3. Invoice Nomor: G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2018 Tanggal 01 Desember 2018;
 5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 264/S/D/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572415 Tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2018 Tanggal 01 Desember 2018;
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

Halaman 465 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-1/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 10/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 08 Januari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2018;
3. Invoice Nomor: G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
4. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
5. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 005/S/D/II/2019 Tanggal 02 Januari 122019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
6. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 02 Januari 2019;
7. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.8084822 Tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
8. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2018 Tanggal 01 Januari 2019;
61. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-2/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 61/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2019;
 3. Invoice Nomor: G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2019 Tanggal 01 Februari 2019;
 5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 030/S/D/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848225 Tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2019 Tanggal 01 Februari 2019;
62. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
 1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-3/PDPDE.PDPDEGAS/2019;
 2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 82/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2019;
 3. Invoice Nomor: G-11.0219 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN;
 4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-

Halaman 466 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLN-02/2019 Tanggal 9 Februari 2019;
5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel;
 6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 38/S/D/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas;
 7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019;
 8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848228 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS;
 9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2019 Tanggal 10 Februari 2019;
 63. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013;
 64. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (Persero) tentang Penyaluran Gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Purwodadi, Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
 65. 1 (satu) bundel Notulen rapat hari Jumat tanggal 09 November 2012 waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD;
 66. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2015 beserta lampirannya;
 67. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2016 beserta lampirannya;
 68. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2017 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2018 beserta lampirannya;
 69. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2019 beserta lampirannya;
 70. 1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan PDPDE Purwodadi;
 71. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Desember 2014 s/d Desember 2015);
 72. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2016 s/d Desember 2016);
 73. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2017 s/d Desember 2017);
 74. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari

Halaman 467 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d Desember 2018);

75. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2019 s/d Februari 2019)
76. Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara PD PDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS Nomor : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 tanggal 23 April 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
77. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. MUSI PRIMA TRANSPORTASI atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 071/S/D/IV/2017, Nomor Pihak Kedua: 148/D/MPT/2017 Tanggal 6 Maret 2017;
78. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. NUTECH DINAMIKA SEMESTA Tentang Pembelian Gas Jambi Merang;
79. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. DINAMEKA MUKTI MITRATAMA Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Tanggal 10 November 2010;
80. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Tanggal 8 Agustus 2011;
81. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT.MULYA TARA MANDIRI Atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 144/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: MTM-001/V/2016 Tanggal 11 April 2016;
82. Amandemen Perjanjian Pemasaran Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. Nutech Dinamika Semesta Tentang Penurunan Jasa Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 042/K/D/I/2016, Nomor Pihak Kedua: 002/NDS-PDPDE/SP/I/2016 Tanggal 22 Januari 2016;
83. Amandemen Perjanjian Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Penurunan Komisi Pengembangan Usaha Nomor Pihak Pertama: 145/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: 031A/LNI-PDPDEG/IV/2016 Tanggal 11 April 2016;
84. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. DINAMIKA MUKTI MITRATAMA Atas Perjanjian Finding Fee Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013 Tanggal 6 September 2013;
85. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. PALSIN ANUGRAH ADIL Tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Jambi Tanggal 1 Agustus 2011;
86. Surat dari PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Nomor: 090/PDPDEGAS-IEB/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Permohonan Kredit Investasi, Modal Kerja dan Fasilitas SBLC;
87. Surat dari Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada PT. PDPDE Gas Nomor: 13/002-3/SP3/DKI Tanggal 5 Januari 2011 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3);
88. Pembagian Devidem PT PDPDE Gas yang berupa :
 - e) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 10 September 2015 . (Salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 468 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 20 Juli 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
- g) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 November 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
- h) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Desember 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan);
89. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-9 Februari 2019, No Invoice 009/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 623.933,40 (Salinan yang disahkan perusahaan);
90. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2019, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 2,015,947.31. (Salinan yang disahkan perusahaan);
91. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Desember 2018, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 1,734,452.52 (Salinan yang disahkan perusahaan);
92. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 November 2018, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2018 sebesar USD 2,040,991.66 (Salinan yang disahkan perusahaan);
93. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Oktober 2018, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2018 sebesar USD 1,998,550.21 (Salinan yang disahkan perusahaan);
94. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 September 2018, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2018 sebesar USD 2,045,413.72 (Salinan yang disahkan perusahaan);
95. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Agustus 2018, No. Invoice 033/INV.PDPDEGAS/IX/2018 sebesar USD 2,083,099.70 (Salinan yang disahkan perusahaan);
96. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2018, No. Invoice 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2018 sebesar USD 2,113,351 (Salinan yang disahkan perusahaan);
97. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2018, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2018 sebesar USD 2,036,711 (Salinan yang disahkan perusahaan);
98. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2018, No. Invoice 017/INV.PDPDEGAS/V/2018 sebesar USD 2,014,351.05 (Salinan yang disahkan perusahaan);
99. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2018, Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2018 sebesar USD 2,108,238.52 (Salinan yang disahkan perusahaan);
100. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2018, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2018 sebesar USD 1,885,282.54 (Salinan yang disahkan perusahaan);
101. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus

Halaman 469 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2018, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2018 sebesar USD 2,105,873.2 (Salinan yang disahkan perusahaan);
102. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2017, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/II/2018 sebesar USD 2,051,942.89 (Salinan yang disahkan perusahaan);
103. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2017, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2017 sebesar USD 1,942,800.96 (Salinan yang disahkan perusahaan);
104. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2017, No. Invoice 040/INV.PDPDEGAS/XI/2017 sebesar USD 2,036,881.69 (Salinan yang disahkan perusahaan);
105. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2017, No. Invoice 036/INV.PDPDEGAS/X/2017 sebesar USD 1,963,051.06 (Salinan yang disahkan perusahaan);
106. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2017, No. Invoice 032/INV.PDPDEGAS/IX/2017 sebesar USD 2,025,395.61 (Salinan yang disahkan perusahaan);
107. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2017, No. Invoice 028/INV.PDPDEGAS/VIII/2017 sebesar USD 2,038,904 (Salinan yang disahkan perusahaan);
108. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2017, No. Invoice 024/INV.PDPDEGAS/VII/2017 sebesar USD 1,959,593.42 (Salinan yang disahkan perusahaan);
109. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2017, No. Invoice 020/INV.PDPDEGAS/VI/2017 sebesar USD 2,029,285.38 (Salinan yang disahkan perusahaan);
110. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2017, No. Invoice 016/INV.PDPDEGAS/V/2017 sebesar USD 1,956,174.51 (Salinan yang disahkan perusahaan);
111. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2017, No. Invoice 012/INV.PDPDEGAS/IV/2017 sebesar USD 2,019,960 (Salinan yang disahkan perusahaan);
112. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2017, No. Invoice 008/INV.PDPDEGAS/III/2017 sebesar USD 1,824,480 (Salinan yang disahkan perusahaan); Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2017, No. Invoice 004/INV.PDPDEGAS/II/2017 sebesar USD 1,197,242.60 (Salinan yang disahkan perusahaan);
113. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2016, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/I/2017 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
114. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus

Halaman 470 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2016, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2016 sebesar USD 1,906,800.45 (Salinan yang disahkan perusahaan);
115. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2016, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
116. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2016, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2016 sebesar USD 1,905,143.23 (Salinan yang disahkan perusahaan);
117. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2016, No. Invoice 033/INV.PDPDEGAS/IX/2016 sebesar USD 1,969,655.71 (Salinan yang disahkan perusahaan);
118. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2016, No. Invoice 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan);
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2016, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2016 sebesar USD 1,907,285.68 (Salinan yang disahkan perusahaan);
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2016, No. Invoice 021/INV.PDPDEGAS/VI/2016 sebesar USD 1,940,964.48 (Salinan yang disahkan perusahaan);
120. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2016, No. Invoice 018/INV.PDPDEGAS/V/2016 sebesar USD 1,906,195.18 (Salinan yang disahkan perusahaan);
121. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2016, No. Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2016 sebesar USD 541/3055/Dispertamben/2009 tgl. 13 Oktober 2009 2,468,723.94 (Salinan yang disahkan perusahaan);
122. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2016, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2016 sebesar USD 2,331,064.23 (Salinan yang disahkan perusahaan);
123. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2016, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2016 sebesar USD 2,462,181.15 (Salinan yang disahkan perusahaan);
- C.C.**
1. Transfer pembayaran PT.PLN atas INVOICE No: G-10.0315 Tanggal 09 Maret 2015 (Pengiriman gas Tanggal 18 Desember - 31 Desember 2014). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 2. Surat dari PDPDE SUMSEL Kepada PT.PLN Nomor:144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Perihal Invoice Penjualan Gas. (Salinan yang disahkan perusahaan);
 3. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-22.0415 Tanggal 01 April 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret 2015 - 31 Maret 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 4. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-32.0615 Tanggal 03

Halaman 471 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2015).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
5. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 31 Juni 2015).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 6. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2015).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 7. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus -31 Agustus 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 8. Transfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 September -30 September 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 9. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1115 Tanggal 04 November 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 10. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 11. Tranfer Penjualan PT. PLN atas Invoice No:G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 12. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 13. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0416 Tanggal 04 April 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 14. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2016).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 15. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2016).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 16. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2016).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 17. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2016).
(Salinan yang disahkan perusahaan);
 18. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31Agustus 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 19. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 20. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-46.1116 Tanggal 03 Nopember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 30 Oktober 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 21. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 22. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-02.0116 Tanggal 05 Januari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31

Halaman 472 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
23. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-01.17 Tanggal 04 Januari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 24. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 25. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 26. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 27. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 28. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0617 Tanggal 02 Juni 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 29. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 30. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 31. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 32. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 33. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.1117 Tanggal 03 November 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 34. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 35. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 36. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 37. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 38. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0418 Tanggal 03 April 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 39. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
 40. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 473 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
42. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
43. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
44. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1118 Tanggal 06 November 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
45. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
46. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan);
47. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan);
48. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0219 Tanggal 05 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 09 Februari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan);
49. Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS-LPPPI/PJBG/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
50. Addendum Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan);
51. Addendum II Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 026/PDPDEGAS-LPPPI/K/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan);
52. Addendum III Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 095/PDPDEGAS-LPPPI/K/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan);
53. Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018; Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang Periode 2018 - 2022;
54. Foto copy Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018.
55. Foto copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE GAS antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN;
56. Foto copy dokumen Perjanjian Kerja sama Patungan antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN tentang Pemanfaatan Gas 15

Halaman 474 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-
PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 tanggal 17
Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di
Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang);
57. Foto copy Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint
Venture Aggrement) Antara PD PDE Sumsel Dengan PT. DKLN
Nomor: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, Nomor:
057/DKLN/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
58. Foto copy dokumen Surat dari PT. Musi Kreasi yang ditujukan
kepada PD PDE Sumsel Cq Caca Ica Saleh, Nomor :
001/PMK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Setoran Modal
PT. Permata Musi Kreasi;
59. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur
Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi
tanggal 29 Maret 2017 perihal Pemindahan saham PDPDE
kepada PT. DKLN;
60. Foto copy dokumen Surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur
Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 tanggal 27
September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN
(yang telah ada disposisi gubernur Sumsel Tanggal 19 Oktober
2017);
61. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur
Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi
tanggal 27 Desember 2017 perihal Pengalihan saham PDPDE
kepada PT. DKLN;
62. Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000 Tanggal 11 Mei 2000
tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas
Bumi;
63. Perda Sumsel Nomor 37 Tahun 2001 Tanggal 12 Desember 2001
Tentang Perubahan Atas Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000
Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas
Bumi;
64. Foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI
Nomor: 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi;
65. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah
Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan
Daerah Dengan Pihak Ketiga Tanggal 03 Nopember 2000;
66. Asli Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN
Tanggal 8 Oktober 2009;
67. Foto copy Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditujukan
kepada Kepala BP Migas Nomor : 541/3055/Dispertamben/2009
Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD. (Telah
di stempel perusahaan);
68. Foto copy surat dari Direktur Utama PDPDE Sumsel kepada
Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009
Tanggal 11 Desember 2009 perihal Ijin Prinsip Join Venture antara
PDPDE dengan PT. DKLN " PT. PDPDE GAS" (Salinan yang
disahkan perusahaan);
69. Asli surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama
PDPDE Sumsel Nomor : 503/3760/IV/2009 Tanggal 16 Desember
2009 perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT.
DKLN " PT. PDPDE GAS";

Halaman 475 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



70. Asli Perjanjian Kerja sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang);
71. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Pimpinan Cabang bank Mandiri Cab. Arief Jl. Kap. A. Rivai Palembang Nomor: 208/PDPDE/SS/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pencairan & Transfer dengan jumlah Rp. 2.132.000.000,00 ke rekening PT. Permata Musi Kreasi di Bank Mega KCP BEJ Jakarta No. 01.015.00.11.00196 an. PT. Permata Musi Kreasi, sebagai setoran modal PDPDE Sumsel untuk hotel Heritage/butik kepada PT. Permata Musi Kreasi (Salinan yang disahkan perusahaan) dan foto Bilyet Giro Nomor BI 383094 Bank Mandiri sebesar Rp. 2.132.000.000,00 (Telah di stempel perusahaan);
72. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN. (Salinan yang disahkan perusahaan);
73. Asli surat dari Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel Nomor: 573/3052/IV/2017 Tanggal 13 Desember 2017 Perihal Persetujuan Melepas Saham Saham PDPDE Di PT. PDPDE Gas Dan PT. Permata Musi Kreasi;
74. Asli Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Caca Ica Saleh sebagai Direksi PDPDE Sumsel Periode 2012 s/d 23 Januari 2015;
75. Asli Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE GAS untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor:12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor: 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dan foto copy Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE GAS untuk penjualan gas dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor : 087/S/D2/III/2014 Tanggal 4 Maret 2014 (Salinan yang disahkan perusahaan);
76. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 06 Tahun 2016 Tanggal 3 April 2018. (Telah di stempel perusahaan);
77. Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 761/KPTS/IV/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama PD PDE Sumsel dan diganti oleh Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM;
78. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 182/KPTS/IV/2018 Tanggal 14 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan diganti oleh Arief Kadarsyah. (Telah di stempel perusahaan);
79. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 perihal Surat PT. PDPDE Gas Nomor: 045/S/D/III/2018 Terkait Tindak Lanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan);
80. Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 535/KPTS/IV/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Sjamsul Rizal Usman Sebagai Direktur Operasi Pada PDPDE. (Telah di stempel perusahaan);
81. Foto copy Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Kuasa yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
82. Foto copy Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Perjanjian yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
83. Foto copy Surat dari SKK Migas kepada JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor : SRT-1173/SKKE2000/2014/S2 Tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat Keputusan Tentang Perubahan Atas Surat Penunjukkan Penjual Gas Bumi Bagian Negara untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
84. Foto copy Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0236/SKK00000/2014/S2 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Telah di stempel oleh perusahaan);
85. Foto copy Risalah Rapat Pembahasan Rencana Pengaliran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumsel (PDPDE) ke PT. PLN (Persero) Tanggal 26 November 2014. (Telah di stempel oleh perusahaan);
86. Foto copy Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Kuasa PDPDE kepada PT.PDPDE Gas Tentang Penyerahan Pengelolaan Gas yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
87. Foto copy Surat Gubernur Sumsel yang ditujukan kepada Kepala BP Migas Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari JOB Pertamina-Hess Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan);
88. Foto copy dokumen head of agreement of gas sales Agreement antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman Limited, Pacific Oil & Gas Limited dan PDPDE Sumatera Selatan, JOB Ref : MAN-J/10-0446, PDPDE Ref : 07-HOA/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 20 Mei 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan);
89. Asli Surat dari Gubernur Sumsel kepada Direktur PDPDE Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 perihal Persetujuan Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas;
90. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada Dirutur PT. PDPDE GAS Nomor: 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Dividen. (Salinan yang disahkan perusahaan);
91. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang berakhir Tahun 31 Desember 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang. (Salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 477 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



D.D.

57. 1 (satu) rangkap Kronologi Kerjasama PDPDE
58. 1 (satu) rangkap rekening Giro Bank Panin An. Ratna Yulita, Dra
59. 1 (satu) berkas Kronologis PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN)
60. 1 (satu) bundel Legal Opini Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pendirian PT. PDPDE Gas oleh Eddy Os Hiarief
61. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum tentang Kerjasama pendirian perusahaan Joint Venture anata Pemerintah daerah dan Perusahaan Swasta dalam pengelolaan dan pemamfaatan gas dalam perspektif hukum adminitrasi negara dan keuangan publik oleh Dr. Dian Puji N Simatupang S.H., M.H
62. Surat Pelepasan Hak Mobil Toyota Veltire 2.5 ZG Minibus yang ditanda tangani oleh Yasser Arafat Direktur Utama PT. PDPDE GAS
63. Perjanjian pengikatan Jual Beli Condominium tanggal 08 Juni 2020 antara Ratna Yulita dan Anto Wijaya
64. 1 (satu) Bundel MAP PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
65. 1 (satu) bundel copian Sertifikat Rumah Bukit Cinere Indah
66. 1 (satu) bundel copian Sertifikat tanda bukti hak AG 434094 Kantor Pertanahan Bogor
67. 1 (satu) bundel Map Hijau Ming Miryani, SH Notaris yang berisi copian sertifikat AI 808897
68. 1 (satu) bundel Map Axa Mandiri yang berisi copian Sertifikat AD 791214 dan AD 791215
69. Aplikasi transfer PANIN BANK tanggal 02 – 03 -2020
70. Surat perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 November 2019 an. Dra Ratna Yulita
71. 1 (satu) bundel Map Hijau yang berisi copian sertifikat, foto-foto
72. Surat persetujuan rapat umum saham PT. Musi Lintas Permata
73. Surat konfirmasi (jumlah saham) No. 004/Modal/MLP/XII/2012 tanggal 09 April 2013
74. 1 (satu) bundel perjanjian jasa pengakutan batu bara PT Gorby Putra Utama dan A. Yaniarsyah Hasan.
75. 1 (satu) bundel Map Asuransi MAG An. Ratna Yulita
76. Sertifikat Hak Tanggungan DF 175316 An. Ratna Yulita
77. Sertifikat Tanda Bukti Hak AD. 791214
78. Form Permintaan Dana PT DKLN 09 Oktober 2020
79. Form Permintaan Dana PT DKLN 15 September 2020
80. Perjanjian Kerjasama pengelolaan hotel tanggal 03 Oktober 2017
81. Satu Bundel Supply Agreement tanggal 18 Maret 2020 Toyo Adhi Wakachiku dan PT Octa Citra Rajawali
82. Nota Kesepahaman Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan PT DKLN tanggal 21 September 2020
83. Copian sertifikat AI 190921
84. Copian Sertifikat AJ 126316
85. Copian sertifikat Hak Tanggungan DH 434800
86. Surat persetujuan Fasilitas Kredit KPR Rp 2.258.000.000,- An. Ratna Yulita
87. Copian Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Musi Lintas Permata
88. 1 (satu) bundel Map Akte-Akte Pendirian PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
89. 1 (satu) bundel copian Akta kelahiran An. Mudda'i Madang
90. 1 (satu) bundel surat permasalahan hutang piutang anatara PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKLN dan PT (SEG) Ex PDPDE

91. 1(satu) rangkap penjelasan/keterangan penerimaan dari rekening bank An. Muddai Maddang Direktorat Pajak Kanwil DJB Jawa Timur I
 92. 1 (satu) bundel PDPDE Crude Trading
 93. 1 (satu) bundel Surat IMB Pemko Kota Bekasi An. Ratna Yulita
 94. 1 (satu) bundel IMB Pemko Surabaya An. Muddai Madang
 95. Copian Sertifikat AA. 353687
 96. 1 (satu) Map Dokumen Rumah Pakuwon berisierah terima dokumen jaminan An. Ratna Yulita
 97. 1 (satu) MAP Coklat Air Mail bertulisan Blue Print Asli Pinus Asri F7 Surabaya An. Ratna Yulita
 98. Map Coklat Merk Panin Bank berisi Akta Tukar Menukar, copian IMB, Surat Setoran (SSB)
 99. 1 Bundel yang terdiri dari :
 - ✓ AKTA Pendirian PT. GRAHA PERMATA SELARAS
 - ✓ AKTA Pendirian PT. OGAN LEMATANG PERMANA ENERGI.
 100. 1 Bundel Dokumen- Dokumen dalam Map Merah ISWAN BANGSAWAN
 101. 1 Bundel Dokumen Dalam Map Bening berisi Permintaan Dana
 102. 1 Bundel Foto copy Pajak dan Sertifikat Kantor Jalan Limau II Nomor 03 dan 01
 103. 1 Bundel Dokumen-dokumen dalam Map Biru Bank Mandiri berisi Akta Keputusan Rapat PT. Mitra Energi Buana
 104. 1 Bundel Dokumen Transfer KeRatna Sari Dan Notaris Zulkifli Sitompul dalam Map Biru
 105. 1 Bundel Dokumen Dokumen dalam Amplop Putih (ATLAS RESOURCES)
 106. 1 Bundel Dokumen Map Putih berisi Fotocopy rincian peningkatan jual beli.
 107. 1 (satu) Bundel Sertifikat Rumah yang terdiri dari:
 - ✓ Jalan Kemang Selatan XII Nomor 01 (YDPP) No.01 Jakarta Selatan
 - ✓ Jalan Limau II no. 03 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jaksel
 - ✓ Jalan Limau III No.01 Kramat Pela Kebayoran Baru
 108. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari:
 - ✓ Pembagian Deviden
 - ✓ Invoice PT. PDPDE GAS – PT. LPPPI 2019
 - ✓ Invoice Ship Or Pay PT. TGI
 - ✓ Invoice PT. TGI 2011-2019
 - ✓ Invoice PDPDE SS 2011-2019
 - ✓ Invoice JOB PT. JM 2011-2019.
- E. E.
192. 2 (dua) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Palsin Anugerah Adil tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pemasaran gas Bumi Kepada PT. Lontar Papyrus Pulp & paper Industry, Jambi;
 193. 3 (tiga) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lintas Nusa Investama tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi;
 194. 1 (satu) lembar Copy Surat Kepada Bapak Muddai Madang – Komisaris Utama PT. PDPDE tanggal 5 Oktober 2012 perihal: Komisi Penjualan gas 5 BBTU;

Halaman 479 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.6 (enam) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Gas dan Kelengkapannya dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri;
- 196.1 (satu) bundel Copy Addendum Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 5 April 2013 tentang Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas Sepanjang 51,6 KM di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- 197.4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 01 September 2014;
- 198.4 (empat) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan C V. Energi Lestari atas Jasa Komisi Pemasaran tanggal 02 September 2014;
- 199.4 (empat) lembar Copy Perjanjian Finding Fee Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Dinameka Mukti Mitratama tanggal 10 November 2010 tentang Pembelian Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang;
- 200.4 (empat) Lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE dengan PT. Dinameka Mukti Mitratama atas Perjanjian Finding Gas tentang Pembelian Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013;
- 201.4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pemasaran Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Nutech Dinamika Semesta tanggal 17 Oktober 2010 tentang Pemasaran Gas dari PT. PDPDE;
- 202.1 (satu) bundel Copy Deviden 2015 – 2019;
- 203.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Mulya Tara Mandiri 2016;
- 204.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017 – 2018;
- 205.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012 – 2013;
- 206.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019;
- 207.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012 – 2019;
- 208.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019;
- 209.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Palsin Anugerah Adil 2012 – 2019;
- 210.1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Nutech Dinamika Semesta 2012 – 2019;
- 211.1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351103 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 212.1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351117 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 213.1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-00-11-01050-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 214.1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-20-11-

Halaman 480 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00115-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;

215. 1 (satu) bundel Copy Laporan Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 143-01-00078-00-4 periode 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
216. 1 (satu) bundel Copy Laporan Bulanan Gabungan PT. PDPDE Gas pada Bank Danamon nomor Nasabah 00009183091 periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
217. 1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
 - p. 1 (satu) bundel Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PD PDE Gas No. 10 tanggal 21 Desember 2009;
 - q. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 5 tanggal 14 November 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PDPDE Gas (Salinan);
 - r. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 12 tanggal 11 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas;
 - s. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor: AHU-AH.01.10-19995 tanggal 05 Juni 2012 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Raya Alamindo kepada: Notaris Rini Yulianti, SH.;
 - t. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 9 tanggal 16 Oktober 2017;
 - u. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rukun Raharja, Tbk (salinan) Nomor 2 tanggal 02 Mei 2019;
 - v. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 10 tanggal 11 April 2012;
 - w. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 66/NOT/VI.2012 tanggal 12 April 2012;
 - x. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rukun Raharja, Tbk. (salinan) tanggal 17 Mei 2017 nomor: 14;
 - y. 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012;
 - z. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen;
 - aa. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen;
 - bb. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen;
 - cc. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor

Halaman 481 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen;

- dd. 1 (satu) bundel Copy Addendum atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 14 Maret 2011;
218. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PDPDE Gas tentang Penyaluran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring, Sumatera Selatan tanggal 8 Februari 2013;
219. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 22 Oktober 2010;
220. 1 (satu) bundel Copy Addendum II atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 10 Februari 2012;
221. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan Wilayah Sumatera tanggal 3 September 2014;
222. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. Multi Konsultindo Jaya tentang Pekerjaan Jasa Survei Topografi dan Pengukuran Kedalaman Sungai Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok;
223. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan CV. Nezio tentang Pekerjaan Soil Test Investigation (Sondir) Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok;
224. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. 3S Engineering tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Front End Engineering And Design (Feed) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok;
225. 1 (satu) bundle Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas tanggal 11 April 2016 nomor 11;
226. 1 (satu) bundle Copy Aset Inventaris dan Kendaraan terletak di DKI Jakarta dan Aset Jaringan Pipa Gas Terletak di Simpang Abadi, Tebing Tinggi, Purwodadi Daratan Kempas, Sungai Keruh dan Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
227. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen;
228. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen;
229. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 serta periode Enam Bulan terakhir 30 Juni 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor

Halaman 482 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Independen;

230. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen;
231. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen;
232. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 disertai Laporan Auditor Independen;
233. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen;
234. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Laporan Keuangan In House Per 31 Desember 2012;
235. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai laporan Auditor Independen;
236. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011;
237. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Interim beserta Laporan Keuangan Independen PT. PDPDE Gas Per 30 September 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011;
238. 1 (satu) bundle Copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011;
239. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010;
240. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011;
241. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
242. 1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 Achma, Rasyid, Hisbullah & Jerry;
243. 1 (satu) bundle Copy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Per 31 Desember 2009;
244. 1 (satu) bundle Copy Jejak Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Penjualan gas Bumi Jambi – Merang Sumatera Selatan;
245. 1 (satu) bundle Copy Dugaan Kejahatan Korporasi Penjualan Gas Bagian Negara pada Blok Gas PHE – Talisman Jambi – Merang dan Pemampatan Sumur Minyak Tua di Musi Banyuasin;
246. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 12 tanggal 24 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247.1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 11 tanggal 24 Januari 2011;
- 248.1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 10 tanggal 24 Januari 2011;
- 249.1 (satu) lembar Copy berita acara serah terima dokumen legal tanggal 13 Desember 2017;
- 250.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian dan Pernyataan Jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 37 tanggal 25 Oktober 2017;
- 251.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 36 tanggal 25 Oktober 2017;
- 252.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan IV (empat) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 35 tanggal 25 Oktober 2017;
- 253.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan II (dua) Pemberian Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) nomor 34 tanggal 25 Oktober 2017;
- 254.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia nomor 33 tanggal 25 Oktober 2017;
- 255.1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default nomor 32 tanggal 25 Oktober 2017;
- 256.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan V (lima) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 31 tanggal 25 Oktober 2017;
- 257.1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan VI (enam) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 30 tanggal 25 Oktober 2017;
- 258.1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Murabahah nomor 29 tanggal 25 Oktober 2017;
- 259.1 (satu) lembar Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo: AHU-22708.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 260.1 (satu) bundle Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas tanggal 21 Desember 2009 nomor 10;
- 261.1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
 - k.1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2019;
 - l.1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2018;
 - m.1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2017;
 - n.1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2016;
 - o.1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2019;
 - p.1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2018;
 - q.1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2016;
 - r. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Disertai Laporan Auditor Independen;
 - s.1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Disertai Laporan Auditor Independen;
 - t.1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor Independen;
- 262.1 (satu) Buah odner berwarna biru, yang berisi dokumen:
 - m. 1 (satu) bundel surat dari PDPDE kepada Direktur teknik dan

Halaman 484 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan minyak dan gas bumi Nomor : 475/PDPDE/SS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal undangan resertifikasi tahunan system meter gas orifis perusahaan daerah pertambangan dan energi prov. sumatera selatan di jakabaring, Palembang;

- n. 1 (satu) bundle surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 10311/18.06/DMT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas orifis milik PT. PDPDE Gas;
- o. 1 (satu) bundel Surat dari dirjen minyak dan gas kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 9863/18.06/DMT/2014 tanggal 03 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas ultrasonic;
- p. 1 (Satu) bundel Surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor: 4221/18.03/DMT/2016 tanggal 01 Juli 2016 hal sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP);
- q. 1 (satu) bundel Mechanical completion certificate attention EFFENDI NATALIE subject : mechanical completion certificate in respect of contract fir utility and water system, date : October 28, 2011 Ref: contract No : 10.09/IKL.ADI/207;
- r. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyaluran Gas kepada PDPDPE SS melalui jalur pipa TGI (28" GS LINE) dalam rangka kegiatan static commissioning PDPDE tanggal 23 Oktober 2011;
- s. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 004/PV/PDPDE/IND/2012 tanggal 19 Januari 2012;
- t. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengujian Hydrostatic dari PT. Mitrinto Dutaprakarsa tanggal 19 Agustus 2011;
- u. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Punch List dari PT SARI SURYA PERWIRA terkait pekerjaan pemasangan Pipa Gas Diameter 6 inch lokasi simpang abadi menuju PT. LPPPI Kp 29 sampai Kp 51 tanggal 20 Juli 2011;
- v. 1 (satu) bundel surat dari PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA Ref. No : /EXT/TGI/PD/09.11 tanggal 10 Oktober 2011 kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, subject : commissioning and meter running series perusahaan daerah pertambangan dan energi sumatera selatan ("PDPDE") metering facilities at simpang abadi;
- w. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka permohonan izin usaha niaga gas bumi melalui pipa dedicated hilir PT. PDPDE GAS tanggal 11 Mei 2012;
- x. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Gas Chromatograph di Orifice Metering Station LPPPI, Jambi tanggal 23 Juni 2012 antara Pihak Teknisi GC (Sdr. Doddy Nugroho) dengan pihak PT. PDPDE Gas (Sdr. Mustakim);
- 263. 1 (satu) Odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen CNG – Jakabaring Project Palembang PT. PDPDE Gas tahun 2012;
- 264. 1 (satu) odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen dari



PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 895/PL/DW/IV/2016, equipment : Pipeline, User : PT. PDPDE Sumsel, Location : Jakabaring, Palembang Sumsel, service : Gas, Line : from tapping km 10,5 pipeline simpang Y pusri to gas metering PT. PDPDE Sumse, year built : 2012 beserta 1 (satu) buah CD yang bertulis "PT. PDPDE Sum-Sel 1 unit PL 2016;

265. 1 (satu) odner warna putih terkait dokumen teknis meter gas orifis 4" ANSI 300 dari PT. ANSI MEGA INSTRUMENINDO;
266. 1 (satu) odner warna putih berisi dokumen PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 2479/PL/DW/XII/2012, equipment : pipeline, user : PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, location sumatera selatan, line : OD 6" reduce OD 4" from tapping km 10,5 pipeline simpang U Pusri to gas metering PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel, year build : 2012;
267. 1 (satu) odner warna putih berisikan dokumen manufacturing data record for system meter gas orifis 4" ansi 300 perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) Gas PLTG Jakabaring Sumatera selatan PO. NO : 107/PDPDE-HANDIYAN/K/VI/2012;
268. 1 (satu) amplop berisi dokumen persetujuan melepas saham PDPDE di PT. PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi (asli);
269. 1 (satu) lembar asli surat dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS Nomor : 01/EL/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 perihal penurunan jasa komisi pemasaran yang ditanda tangani oleh Sdr. FIRDAUS NUR selaku Direktur CV. ENERGI LESTARI;
270. 1 (satu) bundel fotocopy company profile PT. PDPDE Gas a subsidiary of PT. Rukun Raharja Tbk;
271. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dirut PT. PDPDE Gas kepada BRI Cabang Gatot Subroto Nomor : 183/S/D/X/2016 tanggal 17 Oktober 2017 perihal pembagian deviden;
272. 1 (satu) lembar asli surat Dirut PT. PDPDE kepada PT. Rukun Raharja, PT. Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT. Palsin Anugerah Adil, PT. Musi Prima Transportasi Nomor : 182/S/D/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal undangan rapat;
273. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2016 perihal pernyataan keputusan rapat PT. PDPDE Gas Notaris Syarifudin, SH
274. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 17 Mei 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham PT. PDPDE Gas (Salinan) Notaris Rini Yulianti, SH;
275. 1 (satu) bundel hasil scan akta notaris Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT. PDPDE Gas notaris Syarifudin, SH;
276. 1 (satu) buah buku harian tertulis Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun warna hitam;
277. 1 (satu) bundel berisi dokumen :
 - s. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 020/S/D3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal invoice pengangkutan gas.
 - t. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan



- Energi Jakabaring Palembang Nomor : 281/S/D2/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
- u. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 311/S/D3/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - v. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 149/S/D2/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - w. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 195/S/D2/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - x. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 208/S/D2/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - y. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 227/S/D2/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - z. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 257/S/D2/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
 - aa. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/15 tanggal 1 Agustus 2015.
 - bb. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/15 tanggal 1 Juni 2015.
 - cc. Berita Acara penyelesaian pemasangan Gas milik PT. PDPDE-GAS yang berlokasi di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan tanggal 30 Mei 2014.
 - dd. Keterangan hasil pengujian Nomor: 401/SPK.5.8.7/KHP/DL/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
 - ee. Dokumen invoice No. 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
 - ff. Dokumen Nomor : 2395/18.06/DMT/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas orifice.
 - gg. Dokumen Nomor : 26881/18.06/DMT/2013 tanggal 26 November 2013 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas.
 - hh. Dokumen Nomor : 23707/18.06/DMT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Izin penggunaan pelat orifis milik PDPDE Sumatera Selatan.
 - ii. Berita Acara pemeriksaan teknis dan kalibrasi sistem alat ukur meter gas ofiris milik PDPDE Sumsel tanggal 22 Oktober 2013.
 - jj. Dokumen nomor : 172/S/D2/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal rencana perubahan crossing pipa perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel.
- 278.1 (satu) bundel berisi dokumen perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas JOB Pertamina antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dengan PT. PDPDE GAS.
- 279.1 (satu) bundel berisi dokumen CV. Energi Lestari
- 280.1 (satu) bundel berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Amandemen perjanjian pengembangan proyek gas di Jambi antara PT PDPDE GAS dan PT. Lintas Nusa Investama.
- j. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Musi Prima Transportasi.
- k. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Mulya Tara Mandiri.
- l. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Palsin Anuggerah Adil.
- m. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Nutech Dinamika Semesta.
- n. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Dinamika Mukti Mitratama.
- o. Perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dan PT. Gas.
- p. Dokumen Kronologi alokasi gas PDPDE Sumsel.
- 281. 1 (satu) buah map berwarna biru, yang berisi :
 - l. dokumen perjanjian antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS tentang penyaluran gas PDPDE Sumsel untuk kebutuhan kelistrikan di Jakabaring Sumsel.
 - m. Dokumen risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. PDPDE GAS.
 - n. Dokumen penjelasan terkait draf invoice bulan januari 2018.
 - o. Dokumen pembayaran angsuran tahap-3 atas tagihan take or Pay.
 - p. Dokumen penyelesaian tagihan take or pay dan pengambilan gas PDPDE Sumsel.
 - q. Berita Acara pembahasan skema pengambilan gas PDPDE
 - r. Dokumen Berita Acara pembahasan amandemen pertama pada PJBG PDPDE dan penyelesaian permasalahan tagihan.
 - s. Dokumen tanggapan dari surat PDPDE perihal pembayaran angsuran tahap 3.
 - t. Dokumen pembayaran invoice bulan Januari 2018.
 - u. Dokumen angsuran TOP Juni 2017.
 - v. Permohonan penyelesaian jumlah kontrak harian.
- 282. 1 (satu) lembar Copy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tanggal 27 November 2014;
- 283. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 13 Februari 2017;
- 284. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 jan 17 sampai dengan 31 jan 17;
- 285. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 Juli 17 sampai dengan 30 Juli 17;
- 286. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Perubahan Pertama pada Perjanjian Jual beli Gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited;
- 287. 1 (satu) bundle Nota Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri tanggal 14 Juli 2017;
- 288. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor 2537/122/DIVGBM/2014

Halaman 488 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- tanggal 24 September 2014 perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi dari PJBG PLN & PDPDE kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
289. 2 (dua) lembar Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 541/2042/IV/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Penyerapan Gas PT. PLN (Persero) atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PLN (Persero) dan PD. Pertambangan dan Energi;
290. 2 (dua) lembar Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi nomor: 240/PDPDE/SS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada Kepala Satuan Gas dan BBM PT. PLN (Persero) perihal Penyerapan Gas PD Pertambangan dan Energi (PDPDE);
291. 2 (dua) lembar Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 2 Februari 2015 perihal pembahasan penurunan JKH dalam OJBG PDPDE;
292. 3 (tiga) lembar Copy Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang tanggal 8 Oktober 2015;
293. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 18 Oktober 2016 perihal Kelanjutan Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Take or Pay (ToP) perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE);
294. 1 (satu) bundle Copy Surat Ref. No. MAN-J/17-0303 tanggal 24 Februari 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal Surat JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM) kepada SKK Migas terkait hasil kesepakatan atas penurunan jumlah kontrak harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) dalam perjanjian jual beli (PJBG) dengan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
295. 2 (dua) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : rekonsiliasi invoice, pengambilan gas make up dan unde rtake dan take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pert ambangan dan energi (“PDPDE”) tanggal 27 Februari 2017 wakt u 10.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman jambi merang PHE Tower lantai 12;
296. 3 (tiga) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : kelanjutan pembahasan penyelesaian kewajiban take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pertambangan dan energi (“PDPDE”) tanggal 18 Oktober 2016 waktu 14.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman jambi merang PHE Tower lantai 12;
297. 1 (satu) lembar print out berwarna harga gas “harga jual gas” sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
298. 1 (satu) rangkap print out berwarna monthly business review meeting PT. PDPDE Gas Oct 2018;
299. 1 (satu) bundel asli perjanjian pengangkutan gas PDPDE Sumatera Selatan perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Transportasi Gas Indonesia;
300. 1 (satu) rangkap kronologi pengajuan claim PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero);
301. 1 (satu) rangkap print out perjanjian antara PT. PDPDE dan PT. Trimitra Cipta Mandiri tentang jasa pengoperasian & pemeliharaan fasilitas PDPDE gas di Kab. tanjung jabung barat, Prov. Jambi dengan Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pihak Kedua: 162/BOO/PG/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
302. Perjanjian jual beli gas antara perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatra selatan PDPDE dan PT. PLN Persero) untuk kelistrikan di Wilayah Sumatra;
303. Kronologis Alokasi Gas PT. PDPDE dan PT. PLN Persero;
304. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07 Tahun 2015 tentang tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dari Tie In Di KP 21 Simpang Abadi-Stasiun meter pembangkit listrik tenaga gas purwadadi;
305. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
306. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas dan gas bumi;
307. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI nomor 34 Tahun 2019 tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
308. 1 (satu) rangkap surat dukungan dari Gubernur Sumatra Selatan tentang dukungan atas permohonan PD. Pertambangan dan Energi kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merak;
309. Surat dari PT. PDPDE kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Permohonan Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi JOB Jambi marang;
310. 1 (satu) Bundel Pembayaran Take Or Pay Bulan Agustus 2015, Oktober 2015, Maret 2016;
311. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Penyerapan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
312. 1 (satu) lembar Copy Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) Besar Nomor: 456/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04 November 2016;
313. 1 (satu) lembar Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 107/27.1BU.1/ 31.71.07.1005/-071.562/e/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
314. 3 (tiga) lembar Copy Surat Ref. No. MAN-J/17 tanggal 19 Juli 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal: Amandemen ke Dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) untuk Penurunan Jumlah Kontrak Harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP);
315. 1 (satu) bundle Copy Berita Acara Hasil Rapat Tanggal 28 Januari 2019 perihal Rekonsiliasi Gas Pengaliran Gas, payment dan GMU balance tahun 2018;
316. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi PT. PDPDE Gas periode Oktober 2018;
317. 2 (dua) lembar Struktur Organisasi PR. PDPDE periode Maret 2016;
318. 1 (satu) lembar Copy NPWP PT. PDPDE;
319. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama Yasser Arafat;
320. 1 (satu) bundle Copy perjanjian Jual Beli Gas antara PT.

Halaman 490 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Job Ref: MAN-J/10-0954 tanggal 02 November 2010;

321. 1 (satu) buah Map Berwarna Biru, yang berisi:
- k. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Daftar Aktiva Tetap Per Tipe Aktiva Tetap pertanggal 31 Desember 2018;
 - l. 1 (satu) bundle Copy Surat Nomor 033/CPO-PTM/JKT/IX/09 tanggal 29 September 2009 kepada PT. Pertamina (Persero) perihal: SOP Inerting dan Penerimaan LPG Pertama Kali Terminal LPG Semarang;
 - m. 1 (satu) bundle Copy Standard Operating Procedure "Penerimaan LPG Pertama Kali"
 - n. 1 (satu) bundle Copy Laporan Penilaian Aset PT. Optima Sinergi Comvestama untuk kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri;
 - o. 1 (satu) bundle Copy KJPP Yanuar dan Rekan Penilaian Aset – PT. Optima Sinergi Comvestama (OPSICO);
 - p. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen;
 - q. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen;
 - r. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
 - s. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen;
 - t. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Audit or Independen.
322. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar Tahun 2017 berisikan dokumen-dokumen;
323. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 1/4 berisikan dokumen-dokumen;
324. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 3/4 berisikan dokumen-dokumen;
325. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 4/4 berisikan dokumen-dokumen;
326. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar berisikan dokumen-dokumen;
327. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian Tahun 2015 II berisikan dokumen-dokumen;
328. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Gas Surat Keluar

Halaman 491 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015-2016 berisikan dokumen-dokumen;
329. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jan - Juni berisikan dokumen-dokumen;
330. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jul - Des berisikan dokumen-dokumen;
331. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax II berisikan dokumen-dokumen;
332. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax Issue 1 berisikan dokumen-dokumen;
333. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPN Keluaran Masukan 2019 berisikan dokumen-dokumen;
334. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian berisikan dokumen-dokumen;
335. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Jan 2019 berisikan dokumen-dokumen;
336. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Feb 2019 berisikan dokumen-dokumen;
337. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Maret 2019 berisikan dokumen-dokumen;
338. 1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2018 Jan - Jun berisikan dokumen-dokumen;
339. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan Buku Bank BSM USD Januari - Desember 2011 berisikan dokumen-dokumen;
340. 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan R/K Bank BSM berisikan dokumen-dokumen;
341. 1 (satu) odner warna putih depan warna warni berisikan dokumen-dokumen;
342. 1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Keuangan berisikan dokumen-dokumen;
343. 1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Surat Masuk Tahun 2015 berisikan dokumen-dokumen;
344. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Akta PT. Mulya Tera Mandiri dan Akta PT. Palsin Anugerah Adil beserta lampiran.
345. 1 (satu) rangkap dokumen Operational Ekspenses PT. PDPDE GAS
346. 1 (satu) rangkap dokumen Penilaian Aset PT. PDPDE Gas untuk kepentingan Jaminan/Agunan PT. Bank Syariah Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan
347. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai laporan Auditor Independen
348. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan Interim PT. PDPDE Gas Periode 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak di Audit)
349. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai laporan Auditor Independen
350. 1 (satu) rangkap Invoice Job PTJM 2011-2019
351. 1 (satu) rangkap Side Letter atas Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN), PT. Palsin Anugerah Adil (Palsin) dan PT. Rukun Raharja TBK (RAJA)

Halaman 492 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352. 1 (satu) rangkap Invoice PDPDE SS (\$0, 10) 2011-2019
- 353. 1 (satu) rangkap Invoice PT TGI 2011-2019
- 354. 1 (satu) rangkap Invoice Gas PT PDPDE Gas – PT. LPPPI 2019
- 355. 1 (satu) rangkap Invoice Take Or Pay JOB PTJM
- 356. 1 (satu) rangkap Invoice Ship Or Pay PT. TGI
- 357. 1 (satu) rangkap Pembagian Deviden o0-
- 358. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
- 359. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Palsin Anugrah Adil 2012-2019
- 360. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Nutech Dinamika 2012-2019
- 361. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
- 362. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012-2016
- 363. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
- 364. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017-2018
- 365. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Mulya Tara mandiri 2016
- 366. 1 (satu) rangkap Deviden 2015 s/d 2019
- 367. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012-2013.

F. F.

- 24. 1 (satu) fotocopy Akta Pendirian Nomor : 73, 29 Agustus 20014 CV. ENERGI LESTARI dari Kantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : C-295. HT. 03 01- Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005.
- 25. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 05 Maret 2012.
- 26. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juni 2012.
- 27. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 04 April 2012.
- 28. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 14 November 2011.
- 29. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 11 November 2012.
- 30. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 31. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 September 2012.
- 32. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 07 Mei 2012.
- 33. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juli 2012.
- 34. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 39.600.000,- tanggal 07 Agustus 2012.
- 35. 1 (satu) buah fotocopy Kontrak Engineering Procurement Dan Contruction antara PT. PDPD GAS dengan PT. ADIPROTEK

Halaman 493 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



ENVIRODUNIA.

36. 1 (satu) Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI atas Jasa Komisi Pemasaran, Nomor 233/K/D/IX/2014 Nomor Pihak Kedua 01/EL/IX/2014 Tanggal 02 September 2014.
37. 1 (satu) buah fotocopy Amandemen Perjanjian Pemasaran Gas Bumi JAMBI MERANG antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 029/K/D/IX/2016 Nomor Pihak Kedua 01/EL/II/2016 Tanggal 06 Januari 2016.
38. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 176/K/D/VI/2016 Nomor Pihak Kedua : 01/EL/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016.
39. 1 (satu) buah fotocopy Addendum Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan PT. ENERGI JAMBI LESTARI tentang Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas Sepanjang 51,6 KM, Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor : 082/K/D/II/2013 Nomor Pihak Kedua : 02/EJL/M/MOU/IV/2013 Tanggal 05 April 2013
40. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Antara PT. PDPDPE GAS dengan PT. ENERGI JAMBI LESTARI Tentang Pengoprasian Dan Pemeliharaan Pipa Gas Dan Kelengkapannya Dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat Ke PT. Lontar Papyrus Pulp Dan Paper Industry, Nomor PT.PDPDE GAS : 158/PDPDEGAS/K/VIII/2011, Nomor Pihak Kedua : 01/ELJ/DM/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011.
41. 1 (satu) Persetujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas Nomor 542/1568/AEk, tanggal 20 Juli 2010 dari Bupati Tanjung Jabung Barat.
42. 1 (satu) Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pemasangan Jalur Pipa Gas Dan Fasilitas Produksi dari Simpang Abadi – PT. Lontar Papyrus and Paper Industri Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas + 6,64 Ha. A.n. PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tanggal 07 Maret 2011.
43. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 22 Desember 2015 dari PT. PDPDE GAS kepada CV. Energi Lestari tentang penurunan jasa komisi pemasaran.
44. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 16 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
45. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 26 Mei 2016 dari dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
46. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 02 Mei 2016 dari dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
- G.**
- G.81. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang PENGEMBANGAN PROYEK GAS DI JAMBI
82. Print out mutase rekening ASLI dari PT LINTAS NUSA INVESTAMA dari Oktober 2012 sampai dengan Maret 2019
83. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusa Investama tentang PEMASARAN GAS BUMI KEPADA PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, JAMBI
84. Dokumen AKTA tgl. 28 Juni 2019 No. 19 perihal Keputusan pemegang saham PT. PALSIN ANUGERAH ADIL
 85. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode laporan 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012
 86. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012
 87. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 03 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012
 88. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012
 89. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 May 2012 sampai dengan 31 May 2012
 90. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012
 91. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012
 92. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
 93. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012
 94. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
 95. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Desember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012
 96. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013
 97. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013
 98. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
 99. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/08/13 sampai dengan 2/09/13 pada tgl. 31 Agustus 2013

Halaman 495 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/09/13 sampai dengan 10/10/13 pada tgl. 30 September 2013
101. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013
102. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
103. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
104. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
105. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 30/04/14 pada tgl. 07 Juli 2014
106. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/14 sampai dengan 30/05/14 pada tgl. 07 Juli 2014
107. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/06/14 sampai dengan 30/06/2014 pada tgl. 07 Juli 2014
108. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/07/14 sampai dengan 31/07/14 pada tgl. 28 Agustus 2014
109. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/08/14 sampai dengan 31/08/14 pada tgl. 27 Oktober 2014
110. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/09/14 sampai dengan 30/09/14 pada tgl. 27 Oktober 2014
111. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/14 sampai dengan 31/10/14 pada tgl. 28 November 2014
112. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10200011010740 periode 01/12/14 sampai dengan 05/01/15 pada tgl. 5 Januari 2015
113. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/15 sampai dengan 31/01/15 pada tgl. 2 Maret 2015
114. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015
115. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015
116. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/04/2015 sampai dengan 30/04/15 pada tgl. 18 Mei 2015
117. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/15 sampai dengan 31/05/15 pada tgl. 1 Juni 2015
118. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan

Halaman 496 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- no. rek 10202011001294 periode 01/06/15 sampai dengan 30/06/15 pada tgl. 3 Juli 2015
119. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015
120. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015
121. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015
122. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/15 sampai dengan 31/10/15 pada tgl. 30 Desember 2015
123. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 November 2015 sampai dengan 30 November 2015
124. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
125. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 April 2016 sampai dengan 30 April 2016
126. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016
127. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016
128. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016
129. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016
130. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 31 September 2016
131. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2016
132. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2016
133. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2016
134. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2017
135. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2017
136. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai



dengan 28 Februari 2017

137. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2017
138. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2017
139. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2017
140. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2017
141. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017
142. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2017
143. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2017
144. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2017
145. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2017
146. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2018
147. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018
148. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2018
149. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2018
150. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018
151. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2018
152. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2018
153. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018
154. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2018



155. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018
156. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2018
157. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2018
158. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2019
159. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2019
160. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2019.
- H.H. 1 (satu) Rangkap rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dinameka Multi Mitratama Nomor Rekening 167-0000107-002 Priode Januari 2011 s/d Maret 2019.
- I.
- I. 14. 1 (satu) bundle dokumen Fotocopy dilegalisir Akta Pendirian PT. Mulya Citra Mandiri Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2020, yang dibuat Notaris /PPAT Rina Diani Moliza, S.H.
15. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Mulya Citra Mandiri Nomor: 8, tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat Notaris Rina Diani Moliza, S.H.
16. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 4 tanggal 05 Juni 2013 tentang pengalihan saham, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
17. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 11 tanggal 17 November 2020 tentang perubahan Anggaran dasar dengan menyesuaikan dengan KBLI yang ditetapkan pemerintah, serta mengangkat kembali jajaran pengurus perusahaan, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
18. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Pihak I. PT. DKLN dengan Pihak II. Tuan Mulja Djaja Said, Nomor 7 tanggal 24 September 2020, tentang pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang dipergunakan untuk modal kerja PT DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
19. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir turunan Akta Berita Acara RUPS dan perubahan seluruh AD PT Dika Karya Lintas Nusa, Nomor 13, tanggal 14 Oktober 2009, tentang penjamin pengembalian hutang, sehingga terjadi Jual-Beli Saham di dalam PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN);
20. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta perjanjian kesepakatan antar Pemegang Saham PT DKLN, Nomor 02, tanggal 10 April 2013, tentang kesepakatan terjadinya pertukaran saham milik Bapak Said August Putra menunjuk PT MTM sebagai pihak yang berhak atas pencatatan kepemilikan saham yang dilakukan pertukaran oleh PT. DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Mitra Energi Persada Tbk, Nomor: 22, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
 22. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 02 tanggal 10 April 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
 23. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 14 tanggal 8 Mei 2014, tentang PT MTM kembali melakukan pembelian saham PT DKLN yang ada pada PT MEP yang dibuat Notaris Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn;
 24. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 05 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
 25. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 06 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H;
 26. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 07 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.
- J.**
- J. 6. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 20 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
 7. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 21 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
 8. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limnomor 6it Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 25 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
 9. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 26 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
 10. Foto copy Salinan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 37 tanggal 18 Juli 2013 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
- K.**
- K.14. 1 (satu) rangka fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Perseo), tanggal 3 Juni 2010;
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 17. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 291.K/DIR/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pasokan Gas dari PDPDE Dengan Titik Serah Simpang Bayatr Sumatera Selatan Untuk Kelistrikan Di Sumatera dan atau Jawa.
 18. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat, Tanggal 09 Nopember 2012, jam 10.00 WIB dengan agenda pembahasan pemanfaatan gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD;
 19. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 356/PDPDE/SS/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, perihal Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan sebesar 5 MMSCFD;
 20. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat,

Halaman 500 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Pebruari 2013, jam 09.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE;

21. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 112/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Tindak lanjut Penawaran Harga Gas PDPDE;
22. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2013, jam 13.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 167/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 17 April 2013, perihal Harga Gas PDPDE ke PLN;
24. 2 Lembar fotokopi surat Petikan Keputusan rapat Direksi tanggal 27 Agustus 2013 tentang Revisi Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Mei 2013 tentang Harga Gas PDPDE (KDIVGBM)
25. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 00580/33/SHK/2012, tanggal 30 Agustus 2013 perihal Review Draft dan Inisialisasi PJBG PDPDE;
26. 1 (satu) Bundle fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PLN (Persero) Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013.

L.

- L. 368.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 13 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deka Karya Lintas Nusa, Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, SH.;
- 369.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Februari 2014 Nomor 22 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 370.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 27 September 2017 Nomor 07 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 371.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 09 April 2019 Nomor 02 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH.;
- 372.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 21 Desember 2009 Nomor 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 373.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 28 Juni 2012 Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 374.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Maret 2014 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 375.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 19 November 2014 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 376.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 10 Februari 2015 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 377.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 September 2015 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;

Halaman 501 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 11 April 2016 Nomor 12 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 379.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 Januari 2017 Nomor 04 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 380.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 12 Mei 2017 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 381.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 April 2018 Nomor 01 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH.;
- 382.1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 30 November 2020 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham.

M.

- M.109. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pendapatan dari PT. LPPI;
110. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Gas JOB Jambi Merang;
111. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Toll Fee ke PT. TGI;
112. 1 (satu) lembar Print Out Bisnis Model Jambi Operations.

N.

- N.1. 2 (dua) lembar copy Alokasi Gas 15 MMSCFD tanggal 3 Oktober 2009;
2. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 November 2009, Kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
4. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : "PT PDPDE GAS", No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
6. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
8. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No: 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 1 (satu) lembar chat WA;
9. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy;
10. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No:

Halaman 502 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 2 (dua) lembar chat WA dan 4 (empat) lembar copy buku catatan;
11. 2 (dua) lembar copy SPPBE – LPG Distribution and Filling Bulk Station Business, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy chat WA;
 12. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan Bermotor;
 13. 1 (satu) lembar copy Surat Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
 14. 4 (empat) lembar copy Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007;
 15. 3 (tiga) lembar copy Nota Kesepakatan No: 551.21/471/DISHUB/2009, 01 – NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC – PLG/III/2009;
 16. 1 (satu) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011, Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel;
 17. 1 (satu) lembar copy Surat Tentative Agenda Peresmian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Umum Di Palembang, Tanggal 21 Desember 2011;
 18. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 16 Desember 2009 Agenda Tindak Lanjut Proyek Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan;
 19. 1 (satu) lembar copy Surat Usaha Dari Pihak Tertentu yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014;
 20. 2 (dua) lembar copy Surat Tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, tanggal 2 Juli 2015, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 21. 1 (satu) lembar copy Surat Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, No: 005/5232/IV/2014, tanggal 31 Desember 2014, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
 22. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Indonesai No: C-10465 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2002.
 23. 2 (dua) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Perusahaan Pertambangan Energi Nasional ARPENA, Nomor Anggota: 011719 – 01729, tanggal 23 Juni 2006;
 24. 4 (empat) lembar copy Surat Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan, No: 10;
 25. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE GAS 14 November 2012;

Halaman 503 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Kantor Bersama, No: 007/S/D2/II/2013, tanggal 08 Januari 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
27. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Kantor Bersama, No: 2/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 7 Januari 2013, Kepada PT PDPDE GAS;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memorandum, Perihal Pencairan Dana Hasil Restitusi, tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran 8 (delapan) lembar copy;
29. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Palsin Anugerah Adil tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Jambi, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
30. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
31. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
32. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Penurunan Jasa Komisi Pemasaran, No: 334/S/D3/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil;
33. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 2 Februari 2015;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015;
36. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Permintaan Legalitas PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 11 Februari 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil;
37. 2 (dua) bundel copy Akta, tanggal 15 Oktober 2009, No: 8;
38. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS;
39. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDe) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010;
40. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, tanggal 30 Desember 2011, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi;
41. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2012, tanggal 6 Desember 2011, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
42. 1 (satu) bundel copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Usulan Rencana Anggaran

Halaman 504 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Pendapatan Belanja Tahun 2012, beserta lampiran (10) lembar copy;
43. 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan;
 44. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT PDPDE GAS, Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010;
 45. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2011, tanggal 20 Desember 2010, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
 46. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel Tahun 2012, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
 47. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Tanggal Mulai Gas, No: 177/PDPDEGAS-LPPPI/IX/2011, tanggal 12 September 2011, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
 48. 1 (satu) bundel copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 06 March 2014, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE;
 49. 1 (satu) bundel copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, No: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 50. 1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013;
 51. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS, No: KEP-0034/BP00000/2010/S2;
 52. 2 (dua) lembar copy Surat Pememrintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ramp up gas PDPDE sebesar 15 BBTUD, No: 174/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 26 April 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 53. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD, No: 221/PDPDE/SS/V//2013, tanggal 27 Mei 2013, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
 54. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
 55. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera



Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;

56. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/ 2010, tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
57. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 171/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
58. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
59. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
60. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, tanggal 31 May 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy;
61. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Persiapan Penerimaan Gas 15.00 BBTUD, No: MAN-J/12-0306, tanggal 21 Mei 2012, Kepada Bapak Caca Ica Saleh;
62. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, No: 0518/122/DIV/GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel;
63. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Draft PJBG antara PLN dengan PDPDE, tanggal 1 Agustus 2013;
64. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Perihal Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, No: 542/2202/Aek/2013, tanggal 27 Juli 2013, Kepada Kepala SKK MIGAS Pusat;
65. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan Di Wilayah Sumatera, Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013, Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013;
66. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Aloasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, No: 391/PDPDE/SS/IX/2013, tanggal 10 September 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
67. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, No: 3184/041/WS2JB/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Kepada Konsorsium PT Bugak Brawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang, PT Indonesia Power Suksestama, PT Siantar Tara Sejati;

68. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
69. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
70. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, 540/3076/IV/2014/, Komisaris Mewakili Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan di PDPDE GAS, tanggal 5 Desember 2014, Direksi PT PDPDE GAS;
71. 4 (empat) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, 9 Maret 2015, Berserta Lampiran;
72. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, No. 160/KOM/BSM/VII/2013, Jakarta Juli 2013;
73. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012;
74. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan;
75. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
76. 4 (empat) lembar copy Surat Pengangkatan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah;
77. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah Provinsi, No.539/391/IV/2009, Palembang 11 Maret 2009, Perihal Pemberitahuan, Beserta Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 206/KPTS/IV/2009, Palembang 6 Maret 2009;
78. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No.439/KPTS/IV/2010 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 18 Juni 2010;
79. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 890/KPTS/IV/2013, Tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 Tentang Susunan Pengurusan Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 31 Desember 2013;
80. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, No. 7 Tahun 2000, Palembang 19 Mei 2000;
81. 4 (empat) set copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Halaman 507 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000;

82. 1 (satu) set lembar copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi 2 (dua) lembar copy
83. 4 (empat) set copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 761/KPTS/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Palembang 16 Desember 2014;
84. 2 (dua) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 629/KPRS/IV/2008, Palembang 26 September 2008;
85. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 238/KPTS/IV/2014 Tentang Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 - 2017, Palembang 14 Maret 2014;
86. 2 (dua) lembar copy Usaha Pihak Tertentu Yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014;
87. 2 (dua) lembar copy Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah, No. 005/3232/iv/2014, Palembang 31 Desember 2014, Perihal Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, beserta 3 lembar lampiran;
88. 2 (dua) lembar copy Perihal Tuduhan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, Palembang 2 Juli 2015, kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
89. 1 (satu) lembar Copy Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, No. SP2HP/1990/IV/2015/Dit Reskrimum, Palembang 20 April 2015, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Kepada Sdr. ROY LIFRIANDI, S.H.;
90. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik daerah, Jakarta 8 Juni 1999;
91. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3077/XI/2014/Dit Reskrimum, Palembang 20 November 2014;
92. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3286/XII/2014/Dit Reskrimum, Palembang 9 Desember 2014;
93. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Syarifudin, S.H., SK Menkeh dan HAM RI No. 8, C-252.ht.03.01-Th.2002, 18 Maret 2002;
94. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No

Halaman 508 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No. Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/ PPHP/IV/2010;

95. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli antara PT GRESIK MIGAS dan PT ALAS ENERGY INDONESIA
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), No. 247/Dir.SDK/Eks/PPI/ XII/2015, Kepada Penghuni Rumah/ Gedung/Tanah, Perihal Surat Pemberitahuan
97. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
98. 1 (satu) bundel copy Surat (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemnafaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009;
99. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA; 007/ PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010;
100. 4 (empat) lembar copy Surat PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa Nota kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas, Jakarta 8 Oktober 2009;
101. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
102. 1 (satu) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (Rev.1 tgl 19 Mei 2010);
103. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;
104. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
105. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010;
106. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, tanggal 16 Desember 2009,

Halaman 509 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Direktur Utama Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel

107. 4 (empat) lembar copy Surat Alokasi GAS MMSCFD;
108. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/ 2009, Palembang 13 Oktober 2009, Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD, kepada kepala BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy peta;
109. 2 (dua) set copy Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 360/PDPDE/SS/XII/2009, Palembang 11 Desember 2009, Perihal Ijin prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa: "PT.PDPDE GAS", Kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Badan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
110. 1 (satu) bundel copy (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemnafaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009;
111. 1 (satu) bundel copy Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;
112. 2 (dua) bundel copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
113. 2 (dua) set copy Memorandum Kerjasama Perusda;
114. 2 (dua) lembar copy Peraturan Kerjasama Perusda;
115. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000;
116. 2 (dua) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, 19 Mei 2000;
117. 1 (satu) set copy Memorandum Kerjasama Perusda;
118. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. Dika Karya Lintas Nusa, Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas;
119. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan daerah Pertambangan dan Energi, No. 332/PDPDE/SS/XI/2009, Palembang 3 November 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan Untuk pengelolaan dan pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan, kepada Bapak Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawasan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
120. 1 (satu) lembar copy Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi, 23 Januari 2015;

Halaman 510 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Sebagai Direksi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Periode 2012 s/d 23 Januari 2015, Palembang Januari 2015;
122. 1 (satu) bundel copy Masalah Saham PDPDE 15% Dengan Nilai Rp. 8.025.000.000,- di PT. PDPDE GAS;
123. 3 (tiga) bundel copy Surat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
124. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Menteri Dalam Negeri;
125. 3 (tiga) lembar copy Surat Untuk Mendapatkan Data-Data Pendukung;
126. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan Bermotor;
127. 1 (satu) lembar copy Surat PT Bayu Buana Gemilang, Perihal Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
128. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Persahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007;
129. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Kesepakatan Nomor: 555-21/471/DISHUB/2009, 01-NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC-PLG/III/2009 tentang Kerjasama Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Kendaraan Bermotor Antara Pemerintahan Kota Palembang dengan PD. Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan DPC Organda Kota Palembang, tanggal 17 – 03 – 2009;
130. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Tindak Lanjut proyek kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan, tanggal 16 Desember 2009, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir;
131. 2 (dua) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011, Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel;
132. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan dengan Bapak Arif Kadarsyah Tahun 2018, beserta lampiran 4 (empat) copy chat WA;
133. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Gubernur Sumatera Selatan;
134. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penyampaian Bahan LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2014, No: 038/PDPDE/SS/II/2015, tanggal 23 Januari 2015, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
135. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, Kepada Kepala

Halaman 511 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;

136. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
137. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 PD Pertambangan dan Energi;
138. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/ PDPDE/SS/II/2013, tanggal Januari 2013, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
139. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2012 PD Pertambangan dan Energi;
140. 2 (dua) lembar copy Pertanyaan dan Jawaban Soal PT PDPDE GAS;
141. 2 (dua) lembar copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS;
142. 1 (satu) lembar FaceSimile (BPMIGAS), No. 0221/BPB3300/2009/S2, Jakarta 17 November, Kepada JOB P-HESS Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up.Direktur Utama, Dari kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar, Perihal Revisi Undangan Presntasi;
143. 2 lembar Notulen Rapat, Kamis 19 November 2009;
144. 1 (satu) bundel lembar copy Proposal Joint Venture Company Analisa Keekonomian;
145. 1 (satu) bundel lembar copy Laporan Keuangan PT. DKLN (Audit);
146. 1 (satu) bundel Akte Pendirian PT. DKLN;
147. 1 (satu) bundel copy Domisili TDP NPWP Dan PKP SIUP Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
148. 1 (satu) Bundel Sertifikasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstuksi (LPJKN GAPENSI) Pengadaan Barang dan Jasa (kadin)
149. 1 (satu) buntel copy berita, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy chat WA;
150. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Penerimaan;
151. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Pembayaran Pajak Revisi;
152. 4 (empat) lembar copy Surat Krono Caca isa Saleh ("CIS") Case;
153. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Invoice Periode September 2013, No: 225/S/D2/IX/2013, tanggal 04 Oktober 2013, Kepada PDPDE Sumsel, beserta lampiran 5 (lima) lembar;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Keuangan In House untuk tahun tahun yang berakhir 30 September 2013 dan 30 September 2012 (Dalam Mata Uang United State Dollar);
155. 1 (satu) lembar copy Surat Cek PT PDPDE GAS, Sejumlah Rp. 1.576.987.983,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan

Halaman 512 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- puluh tiga rupiah);
156. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri Syariah, PT PDPDE GAS, Jakarta 2016, Kepada Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Perihal Permohonan Pembayaran Final Payment;
 157. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7006426, tanggal 24 Juni 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 2.500 (dua ribu lima ratus dollar amerika);
 158. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 9421147, atas nama Indarinawan Eko Yulianto;
 159. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002629, tanggal 29 – 03 – 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 12.256,63 (dua belas ribu dua ratus lima puluh enam koma enam puluh tiga dollar amerika) ;
 160. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002627, atas nama Adrian Utama Gani, Sejumlah USD 29.287 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh dollar amerika).
 161. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 288/PDPDE/SS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD;
 162. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 152/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD;
 163. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
 164. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
 165. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : "PT PDPDE GAS", No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 166. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 138/PDPDE/SS/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB), beserta 5 (lima) lembar copy;
 167. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
 168. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi;
170. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Bisnis Indonesia, Rabu 19 Mei 2020, 8 Kesepakatan bisnis penjualan gas pipa dalam komvensi IPA ke-34;
171. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPPI/V/2010, Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
172. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-003/BP00000/2010/S2, tanggal 09 April 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
173. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 001/PDPDEGAS/LPPPI/III/2010, Perihal Indikatif Kev Terms HoA, tanggal 23 Maret 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI);
174. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 134/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Permohonan tindak lanjut GTA untuk Penyaluran gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT LPPPI), tanggal 21 Mei 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
175. 7 (tujuh) lembar copy Surat Kartu Nama PT Gresik Migas, PT Pembangunan Kota Batam, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Talisman Energy, Pertamina Hulu Energi, PT Intertek Utama Services;
176. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi;
177. 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Kesepakatan Bisnis Penjualan Gas Pipa Yang Akan di tanda tangani pada Forum IPA tanggal 18 Mei 2010;
178. 2 (dua) lembar copy Surat Participant atas nama Caca Isa Saleh Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
179. 3 (tiga) set copy surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 129/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Penandatanganan HoA Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE), tanggal 12 Mei 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
180. 1 (satu) lembar copy Surat 34th IPA Convention and Exhibition Jakarta Convention Center, 18-20 May 2010;
181. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0418, tanggal 11 Mei 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Pokok-Pokok Perjanjian

Halaman 514 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan Gas dari JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang;
182. 2 (dua) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
183. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 115/PDPDE/SS/IV/2010, Perihal Penyampaian Laporan Tahunan PDPDE Sumatera Selatan, tanggal 30 April 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
184. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes Of Meeting (MOM) Pembahasan HOA PJBG antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pasific Oil % gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 2 (dua) lembar attendance list;
185. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi;
186. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera;
187. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA;
188. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
189. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian Untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang;
190. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 20 Mei 2010, No: 8, Notaris Syarifudin, SH. SK Menkeh & HAM RI No. C-252-HT.03.01-th.2002, tanggal 18 Maret 2002;
191. 2 (dua) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan

Halaman 515 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA; 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010;
192. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 4 (empat) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA;
193. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA, beserta lampiran 5 (lima) lembar copy, dan 1 (satu) bundel Heads of Agreement For The Sale Of Gas From The Jambi Merang PSC ;
194. 5 (lima) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar Masukan Dari PDPDE, dan Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Balajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrastruktur Transportasi dan Energi Repat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Balajasumba tanggal 20 April 2009 di Bandar Lampung;
195. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu;
196. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
197. 2 (dua) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
198. 2 (dua) lembar copy Surat Head of Agreement (HoA) antara PT Alamigas Mega Energi (AME) dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI) tentang Jual Beli Gas, No. AME: 2270/HoA/AME-LPPI/V/08, No LPPPI: 269/LPPPI/IND/VI/2008;
199. 1 (satu) set copy Surat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu, beserta lampiran 1 (satu) copy Surat Tanda Terima;
201. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merang Gas Sales to PD Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 9 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang - PDPDE;

202. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang – PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera;
203. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 072/PDPDE/SS/III/2010, Perihal Undangan Rapat, tanggal 17 Maret 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
205. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima PT Transportasi Gas Indonesia, Sudah Diterima dari Bapak Irwan Tascha Kepada Bapak Caca Isa Saleh, tanggal 10 Maret 2010;
206. 2 (dua) lembar asli Surat No: 032/EXT/TGI/PD/03.10, Subject: Respond to Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Letter regarding Service Request for Gas Transportation, tanggal 9 March 2010;
207. 2 (dua) lembar copy Surat GTA Key Terms for PDPDE for Gas Supply to LPPP, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
208. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0177, tanggal 3 March 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE);
209. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Cover Fax Sheet, Subject Copy Surat Permohonan Penjual Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) ke BPMIGAS tanggal 05 March 2010;
210. 8 (delapan) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
211. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Penjualan Gas dan Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel, tanggal 24 Februari 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir;
212. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0082/BPB3300/2010/S2, tanggal 22 Feb 2010, Kepada JOB P-Talisman Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;

Halaman 517 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010;
214. 3 (tiga) lembar copy Surat Karta Tanda Pengenal Robby Ansyah PT Transportasi Gas Indonesia;
215. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Products, tanggal 9 Februari 2010, No: 122/LPPPI/II/2010, Perihal Kebutuhan Bahan Bakar Gas, Kepada PDPDE Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
216. 2 (dua) lembar copy Surat Material Stream: Sales Gas, tanggal 10 Nov 2009, Case Name Jambi Merang Composisitons – SK Production.hsc;
217. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0074, tanggal 28 January 2010, Perihal Due Diligence terhadap Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, beserta lampiran 1 (satu) set;
218. Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0051, tanggal 20 January 2010, Subject Change of Company Name and Key Personel, Kepada Distribution List (attached) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
219. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 15/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas, tanggal 22 Januari 2010, Kepada BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar;
220. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 08/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Profil Perusahaan, tanggal 13 Januari 2010, Kepada JOB Pertamina-Hess Jambi Merang;
221. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
222. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Januari 2009, agenda Due Diligence atas kbutuhan Gas PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;
223. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 001/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 002/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi

Halaman 518 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merang Up. Bapak Indra Sukandar;

225. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;
226. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0814/BPB3000/2009/S2, tanggal 28 Dec 2009, Kepada Petrochina Internasional Jabung Ltd., UP President, JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PT Jambi Indoguna International (BUMD Prop. Jambi) Up. Direktur Utama, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama, Lontar Papyrus Pulp & Paper Up. Direktur Utama;
227. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
228. 1 (satu) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel;
229. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : “PT PDPDE GAS”, No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS;
230. 3 (tiga) lembar copy Surat Laporan Kegiatan Progress Rencana Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari Job Pertamina-Hess Jambi Merang;
231. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Patungan Antara PT Dika Karya Lintas Nusa Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 16 November 2009;
232. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa tentang Pemanfaatan Gas 15 MM SCFD di Sumatera Selatan (Job Pertamina – Hess Jambi Merang);
233. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Rencana Pemanfaatan Gas Lapangan Pulau Gading dan Sungai Kenawang JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 19 November 2009, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0221/BPB3000/2009/S2, tanggal 17 Nov 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama;
234. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan

Halaman 519 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan;

235. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD;
236. 1 (satu) bundel copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, S.H. tanggal 14 Oktober 2009, No: 13, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, S.H. Surat Keterangan, No: 115/XI/TA.Not.Soy/2009;
237. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita;
238. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 5 Januari 2010, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama ;
239. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama PT Mitra Energi Buana, A Yaniarsyah hasan;
240. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas, PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 8 Oktober 2009, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar hadir;
241. 2 (dua) lembar copy Surat, Perihal Epmohonan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Sumatera Selatan, Kepala BPMIGAS;
242. 1 (satu) bundel copy Surat Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Balajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrastruktur Transportasi dan Energi, Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Balajasumba, tanggal 20 april 2009 di Bandar Lampung.
243. 1 (satu) lembar copy Surat Memo, Perihal Sharing Season, tanggal 6 februari 2012, Kepada Bapak Muddai Madang Dirut PT MEP, Bapak Bambang Hermiyanto KOMUT PT MEP;
244. 4 (empat) lembar copy Surat PT Mitra Energi Buana, Perihal Undangan Rapat, tanggal 1 Februari 2012, Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur utama PT PDPDE GAS;
245. 1 (satu) set asli Surat PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 002/DKLN/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
246. 1 (satu) lembar asli Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 575/0712IV/2012, tanggal 13 Maret 2012, Perihal Penawaran Pembelian Saham, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, berserta copy 7 lembar;
247. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Gas Delivery Procedure, Standar Operation Procedure & Joint Meter, No: MAN-J/12-0018, tanggal 12 Januari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Up. Direktur Utama, PT Pembangunan Kota Batam Up. Direktur Utama, PT Transportasi Gas Indonesia Up. Direktur Operasional;

Halaman 520 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal PIPANISASI Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung;
249. 2 (dua) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur PIPANISASI Gas, tanggal 06 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas;
250. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung;
251. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 2 Januari 2012, Subject Gas Sales Agreement Among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for December 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar;
252. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 351/PDPDE/SS/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012, Kepada Direktur PT PDPDE GAS;
253. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 12 October 2011, No: Man-J/11-0782, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012;
254. 1 (satu) bundel copy Surat Perseroan Terbatas Berkedudukan Di Jakarta, Resipis No: 001 sampai dengan 6.375, tanggal 23 Desember 2011;
255. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 27 Desember 2011;
256. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;
257. 1 (satu) set copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulpl & Paper Industry Statement of Gas Delivery to PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-11/11;
258. 2 (dua) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, Invoice no G-13.1211, tanggal 13 Desember 2011;
259. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 23/PTJM/10-PDPDE/2011, tanggal 5 Desember 2011, Perihal Gas Sales Agreement among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for October 2011 and November 2011, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 5 (lima) lembar;
260. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama Tately N.V, Heri Suryanto, PT Bayu Buana Gemilang Zaqi Ismail, Novotel Lombok

Halaman 521 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zainuddin Rosidy, Brian Townsend, PT Kemitraan Energi Industri Yusuf Estantio, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung Apik Chakib Rasjidi Wakil Ketua Umum 1;
261. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBGPDPDE LPPPI, tanggal 17 November 2011;
 262. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi, beserta lampiran C Volume Penyerahan Gas di Titik Penyerahan dan Lampiran E Eskalasi Harga Pas;
 263. 1 (satu) set copy Surat Scanned Job Letter – PDPDE re: Gas Start Date – Dated 11 Nov 2011, tanggal 17 November 2011;
 264. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0850, tanggal 10 November 2011, Perihal Tanggal Mulai Gas;
 265. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 31 Oktober 2011;
 266. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 005/573/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 8 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE);
 267. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi;
 268. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 257/PDPDE/SS/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, Perihal Pertemuan PDPDE Sumsel dengan Dispaertamben Prov. Jambi, Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
 269. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 0057/541/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 12 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE);
 270. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0782, tanggal 12 Oktober 2011, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012;
 271. 2 (dua) lembar copy Surat Yahoo Mail, Draft Addendum II PJBGPDPDE LPPPI, tanggal 23 September 2011;
 272. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0730, tanggal 21 September 2011, Perihal Perkiraan Tanggal Mulai Gas dan Komisioning;
 273. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0731, tanggal 21 September 2011, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian pada Condition Precedent;
 274. 2 (dua) lembar copy Surat Draft Addendum II PJBGPDPDE LPPPI tanggal 19 September 2011, beserta 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;
 275. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 242/PDPDE/SS/IX/2011, tanggal 16 September

Halaman 522 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Perihal Alokasi Gas 5 MMSCFD, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
276. 4 (empat) lembar copy Surat Temuan Sementara TIMK2PGP;
277. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 225/PDPDE/SS/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011. Perihal Tanggala Mulai Gas; Komisioning, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang) Up General Manager;
278. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE, No: 010/EXT/TGI/OD/08.11, tanggal 25 August 2011;
279. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri FOPI;
280. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, acara Kesepakatan Atas Penggunaan Meter Bersama, di Simpang Bayat, antara JOB PTJM, PDPDE, PKB/IDL, tanggal 16 Agustus 2011;
281. 3 (tiga) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0611, tanggal 12 Agustus 2011, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Peninjauan Lapangan dan Verifikasi Sistem Meter Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang di Simpang Bayat, Sumatera Selatan;
282. 1 (satu) bundel copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Juli 2011;
283. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Berita Acara Pembahasan Draf Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat-Sumatera Selatan, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
284. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0515, tanggal 8 Juli 2011, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam;
285. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat, Sumatera Selatan;
286. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Sistem Meter atas PJBG antara PT Medco E&P Indonesia (“Medco”) dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (“SP2J”) untuk Pasokan Gas Rumah Tangga di Kota Palembang, tanggal 21 Oktober 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat;
287. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Perlindungan Pipa antara PT PDPDE GAS dengan Petrochina International Jabung Limited, No: 153/PDPDEGAS-PCJL/CP/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011;
288. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Halaman 523 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, No: 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Hal Permintaan Klarifikasi;

289. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS Melintasi Instalasi Pipa Existing Petrochina International Jabung Limited Tebing Tinggi – Tanjung Jabung Barat, Jambi, No: 152/PDPDEGAS-PCJL/SOP/VII/2011;
290. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 180A/PDPDE/SS/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011, Perihal Pipeline Crossing PDPDE dengan PCJL, Kepada BPMIGAS;
291. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, Agenda Rapat Pembahasan Prosedur Pemasangan Pipa Gas untuk Perlintasan Pipa PT PDPDE GAS di Area PetroChina, tanggal 22 Juli 2011;
292. 2 (dua) lembar copy Surat Garansi Bank Mandiri Syariah, No.063/PERFORMANCE BOND/VII/2011;
293. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
294. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Jambi, No: 522/2100/Dishut/2010, tanggal 12 Agustus 2010, Perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan pemasangan jalur pipa gas melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT PDPDE GAS, Kepada Menteri Kehutanan RI;
295. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juli 2011;
296. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Juli 2011, Agenda Rapat Presentasi Standar Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
297. 2 (dua) lembar copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDESS) Kepada Konsumen;
298. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tanggal 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
299. 2 (dua) lembar asli Surat BPMIGAS Minutes of Meeting Rencana Pemasangan Crossing Pipa Gas PDPDE di Area PetroChina Jabung Ltd., tanggal 1 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar FACSIMILE Kantor Pusat, No: 0101/BPB2300/2011, tanggal 27 Mei 2011, Kepada PetroChina International Jabung Ltd. Up. General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi (PDPDE) Up. General Manager, Perihal Pemasangan Pipa PDPDE di Area PetroChina Internasional Jabung;
300. 3 (tiga) lembar copy Surat Yahoo Mail, tanggal 30 May 2011;
301. 1 (satu) lembar copy Surat OPSI 1 (Ajuan PDPDE Gas)
302. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 071/PDPDEGAS-WKS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal Rencana Crossing pipeline dengan jalur pipa Petrochina, Kepada PT Wirakarya Sakti, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy;
303. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No:

Halaman 524 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/1271/ADP, Perihal Dukungan Terhadap Crossing Pipa Gas, tanggal 25 Mei 2011, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Peta;

304. 1 (satu) lembar copy Surat MOM Rapat tanggal 6 Mei 2011;
305. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, tanggal 6 Mei 2011, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0083/BPB1100/2011/S6, tanggal 3 Mei 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur;
306. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) Jual Beli Gas Bumi Antara PT PDPDE Gas dengan PT Adiprotek Envirodunia, Nomor Penjual: 120/PDPDEGAS-APED/HOA/VI/2011, Nomor Pembeli: 159/APED-Dir/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011;
307. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat Pembahasan Pasokan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Jambi Tanggal 7 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar asli Surat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 13039/05/SDM/2011, tanggal 9 Mei 2011, Hal Undangan Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Undangan;
308. 1 (satu) lembar copy Surat CNG Storage-PLTG Peaking Jakabaring, PT Daruma Mitra Alam, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
309. 1 (satu) lembar copy Surat PT Sumber Energy Utama, No: 024/QUO/SEU/III/2011, tanggal 29 Maret 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Penawaran Standard Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyaluran Kondensat Dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke Pertamina UBEP Jambi Di Gas Plant Facility Sungai Kenawang Dan Tank Farm Tempino Jambi;
310. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 19 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting;
311. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 20 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting;
312. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0378, tanggal 04 Mei 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan – BPMIGAS, Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, Kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar – BPMIGAS, Kepala Dinas

Halaman 525 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengangkutan dan Penyimpanan – BPMIGAS, Kepala Dinas Akuntansi Penerimaan – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengembangan Lapangan – BPMIGAS, ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. Up VP Business Development, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PT Transportasi Gas Indonesia Up President Direktur, PetroChina Internasional Jabung Ltd. Up. Vice President and General Manager, Pt Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Pertamina EP Up Vice President Commercial, PT Chevron Pacific Indonesia Up General Manager, PT PLN (Persero) Up Direktur Energi Primer, PT Energiasindo Heksa Karya Up Direktur, PT Pembangunan Kota Batam Up Direktur, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel Up Direktur;

313. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0364, tanggal 29 April 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assitance Requisition Sheet (ARS) untuk mengundang Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Konsep Prosedur Serah Terima Gas dari Job Pertamina – talisman Jambi Merang ke PT Chevron Pacific Indonesia di Titik Penyerahan Duri, riau dan ke PD, Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan di Titik Penyerahan Simpang Bayat;
314. 2 (dua) lembar copy Surat email dari Anggono Mahendrawan, tanggal 28 April 2011;
315. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, tanggal 28 April 2011, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0078/BPB1100/2011/S6, tanggal 25 April 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur;
316. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 27 April 2011, Perihal Wakil dari PDPDE Sumsel, Kepada BPMIGAS;
317. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 092/PDPDEGAS-PIJ/IV/2011, tanggal 19 April 2011, Perihal Pipe Crossing, Kepada PetrcoChina International Jabung Ltd;
318. 1 (satu) lembar asli Surat PT PLN (Persero), No: 0518/122/DIV GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel;
319. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Penggantian Komisaris yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS;

Halaman 526 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 18 Pebruari 2012, No 04, Notaris Syarifudin S.H SK Menkeh & Ham RI No.C-252.HT.03.01-Th-2002, tanggal 18 Maret 2002;
321. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/S/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
322. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“Job PTJM”), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PJTM, tanggal 24 Desember 2013, Kepada SKK Migas, JOB PJTM, PDPDE, PLN, PT Petro Muba;
323. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 02/PDPDE/SS/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, Perihal Permohonan Perubahan applicant dan Nilai SBLC reg No. 139990003, Kepada PT PDPDE GAS;
324. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 500/3742/Aek/2013, Perihal Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, tanggal 24 Desember 2013, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS;
325. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekretariat Daerah, No: 500/22/Aek/2014, tanggal 6 Januari 2014, Perihal Undangan, Kepada PT PDPDE;
326. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, No: 503.6/339/KPPT/2013 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan Tempat Usaha PT PDPDE Gas;
327. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, No: 503.4/16/KPPT/2013, Perihal Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, tanggal 18 Desember 2013, Kepada Adrian Utama Gani;
328. 1 (satu) lembar copy Surat email dari Syehani Assegaf, tanggal 27 December 2013, beserta lampiran;
329. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita Media Indonesia Sabtu 23 November 2013, 21 November 2013;
330. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 583/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, Perihal Rapat Monitoring Jual Beli Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Dinas Analisis & Evaluasi Komersialisasi Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
331. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
332. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi

Halaman 527 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan;

333. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Perihal Pembuatan Legal Opinion Terkait Pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM, Kepada Ajie Setiadi & Partner;
334. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
335. 2 (dua) lembar copy Surat Susunan Acara RKAP 2014 PT PDPDE Gas "CHANGE" We Can Believe In Padma Hotel, Bandung 16 – 18 Desember 2013;
336. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-1097, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Pengingat Penggantian Stand By Letter of Credit (SBLC);
337. 2 (dua) lembar asli Surat Mandiri Syariah, Kepada PT PDPDE GAS, No: 15/293-3/PM14, tanggal 2 Desember 2013, Perihal Undangan Menghadiri Acara BSM Business Gathering;
338. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 1739/WM/UND/04/2013, tanggal 5 Desember 2013, Perihal undangan Rapat;
339. 2 (dua) lembar copy Surat Undangan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat "Membangun Bersama Benahi Negeri" Tahun 2013;
340. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, No: 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokaso Distrik 1 dan RDD Sei Tapah PT Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS;
341. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0930, tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah ke – 15;
342. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 435/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), Kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
343. 2 (dua) lembar copy Surat Draft, tanggal Oktober 2013, Perihal Sisa Alokasi gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
344. 1 (satu) bundel copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan, NO: KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;
345. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile PT PLN (Persero) No:

Halaman 528 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317/FAC/WS2JB/REN/2010, tanggal 28 Juni 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penundaan Waktu Pembahasan Rencana Pasokan Gas;
346. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 3471.FACS/052/DIV GBM/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Up Direktur Utama, PT PGI Up President Director, PT PLN (Persero) KIT SBS Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Up General Manager, PT PJB Up Muara Tawar Up General Manager;
347. 1 (satu) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, tanggal 13 September 2013, No: 144.Ext/Op-Ro1/09.13, Perihal Penyelesaian HSE Inspection, beserta lampiran 2 (dua) lembar;
348. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 14 Agustus 2013, No: 869/Und/Ka BPH/2013, Hal Acara Silaturahmi dan Halal bi Halal di Lingkungan BPH Migas;
349. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjng Jabung Barat, tanggal 13 Juli 2013, No: 500/2183/Aek/2013, Perihal Pe,amfaatan Listrik, Kepada Dirut PLN (Persero);
350. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2282.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK;
351. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2213.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 25 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK;
352. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 170/D2/S/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, Perihal Undangan rapat, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
353. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 167/D1/S/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
354. 3 (tiga) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 4 Juli 2013, No. 15/87-3/SP3/CRD, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Addendum Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan;
355. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, 3 Juli 2013, No: PRA/DU/3.004/VII/2013, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa;
356. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-0617, tanggal 8 Juli 2013, Perihal Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE;
357. 1 (satu) lembar copy Surat PGM, No: 034600.S/PP.00.01/PG/2013, Perihal Konfirmasi penyaluran gas dari PDPDE Gas, tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Risalah Rapat;
358. 1 (satu) lembar copy Surat email, dari Adrian Utama Gani, tanggal 12 Juni 2013;

Halaman 529 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 2 (dua) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 10 Juni 2013, Kepada Managing Director, Subjek Kronologis Stock Gas PDPDE Gas;
360. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 112/S/D2/V/2013, Perihal Perubahan Jadwal Pemeliharaan JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
361. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0508, tanggal 21 May 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update;
362. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0348, tanggal 4 April 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update;
363. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13/0194, tanggal 6 March 2013, Perihal Indikasi jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update, beserta lampiran 2 (dua) halaman;
364. 1 (satu) lembar copy Surat Foto Report PT PDPDE GAS, KP. 12 Section 2, tanggal 29 Mei 2013;
365. 2 (dua) lembar copy Surat Email, Subject report Inspeksi Jalur Pipa, dari Adrian Utama Gani, tanggal 30 May 2013;
366. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 205/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan;
367. 1 (satu) set copy Surat Aplikasi Permohonan Kredit Maybank, Nama Nasabah PT PDPDE GAS;
368. 1 (satu) bundel copy Surat Bank International Indonesia Maybank, tanggal 11 June 2013, Offer Letter, Kepada PT PDPDE GAS;
369. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 20 Juni 2013, Agenda Rapat Pembahasan pemanfaatan Gas oleh PDPDE dan Take or Pay (“TOP”) atas PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“JOB PTJM”) dengan PDPDE, dengan lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
370. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Indra Sukandar, tanggal 7 Juni 2013, beserta lampiran 3 (tiga) halaman;
371. 1 (satu) lembar copy Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Faksimile Kantor Pusat, No: 0169/SKKE2200/2013/S2, Perihal Undangan Rapat, tanggal 19 Jun 2013, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Up Direktur Utama;
372. 2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 28 Mei 2013, No: RR/DU/28.460/V/2013, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. (“Perseroan”), Kepada Anak Perusahaan Perseroan, PT Panji Raya Alamindo, PT Triguna Internusa Pratama, PT Cahya Saguna Niketama, PT PDPDE Gas, PT Energasindo Heksa Karya, PT Suryaandra Nusa Bhakti;
373. 1 (satu) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 10

Halaman 530 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2013, Kepada PT PDPDE Gas ("PDPDE Gas"), Perihal Rencana Kepindahan Kantor PT PDPDE Gas Jakarta;
374. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 121/S/D2/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, Kepada Direktur PT Panji Raya Alamindo, Perihal Rencana Kepindahan kantor PT PDPDE GAS Jakarta;
375. 1 (satu) lembar asli PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 011/DKLN/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, Komisaris PT PDPDE GAS, PT Panji Raya Alamindo, PDPDE Sumsel, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa;
376. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0650/122/DIV GBM/2013, tanggal 31 Mei 2013, Perihal Pemberlakuan Harga Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
377. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 223/PDPDE/SS/B/2013, tanggal 28 Mei 2013,, Perihal Take or Pay PDPDE, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
378. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, 31 Mei 2012;
379. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 10676/18.06/DMT/2013, tanggal 28 Mei 2013, Hal Pembahasan Prosedur Penyerahan Gas Bumi;
380. 3 (tiga) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, No: 766/Und/Ka BPh/2013, tanggal 22 Mei 2013, Hal Undangan Rapat Dengar Pendapat;
381. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Notulen Rapat, tanggal 20 Mei 2013, Agenda Pembahasan draft PJBG antara PDPDE dan PLN, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
382. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 199/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
383. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Rencana Penyaluran Gas PGN dari PDPDE Gas Melalui Pipa TGI, tanggal 17 Mei 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
384. 1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 028100.S/OT.02.02/PG/2013, Perihal Undangan Rapat, tanggal 14 Mei 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, Director of Business Development PT Transportasi Gas Indonesia;
385. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 197/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
386. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 205/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal

Halaman 531 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
387. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 206/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi; Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
388. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 158/Und/07.09/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 10 April 2013, Hal Undangan Rapat, Kepada Direktur Utama PT Indogas Kriya Wiguna, Direktur Utama PT PDPDE;
389. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0449, tanggal 3 May 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah;
390. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Facsimile, tanggal 17 April 2013, No: 0307.Facs/052/DIV GBM/2013, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Up general Manager, KDIV KIT –SUM, Dirut PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
391. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 23 April 2013, Agenda Pembahasan gas PDPDE 5 mmscd, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Daftar Pelanggan Besar;
392. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 10 April 2013;
393. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 19 April 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Minutes of Meeting, tanggal 18 April 2013;
394. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 086/S/D2/IV/2013, tanggal 3 April 2013, Perihal Permohonan Persetujuan Harga Gas, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
- 395.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0006/122/DIV GBM/20136 tanggal 2 April 2013, Perihal Konfirmasi Mengenai Harga Gas yang dapata diterima PLN, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
- 396.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 25 Maret 2013, Agenda Pembahasan Tindak Lanjut Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
397. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), tanggal 20 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada PDPDE;
398. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 15 Maret 2013, Agenda Pembahasan Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 399.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 104/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 13 Maret 2013, Hal Undangan Rapat;
- 400.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas

Halaman 532 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, No: 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Hal Undangan Rapat;

- 401.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 088/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, Perihal Penyampaian Keekonomian Harga Gas PDPDE, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM, beserta lampiran;
402. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 26 Februari 2013, Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 403.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 031/S/D1/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas;
- 404.1 (satu) set copy Surat Financial Performance 2012;
- 405.1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/325/Aek, tanggal 7 Februari 2013, Perihal Realisasi penyediaan gas, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS;
- 406.1 (satu) lembar copy Surat Caterpillar, tanggal 6 February 2013, Embassy of the United States of America, Subject Issuance of Visit Visa;
- 407.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 056/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 8 Februari 2013, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE Sumatra Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 408.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 341/PDPDE/SS/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada KOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
- 409.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan rencana ramp-up PDPDE;
- 410.1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0161/BP02200/2012/SO, tanggal 18 Oct 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, PDPDE Direktur Utama, Perihal Undangan Rapat;
- 411.1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 412.1 (set) lembar copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;
- 413.4 (empat) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual: 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli: 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
- 414.1 (satu) lembar copy Surat No: 072100.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012;
- 415.1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT

Halaman 533 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLN (Persero) untuk Pusat Listrik Talang Duku, Sumatera Selatan, Nomor PGN: 003400.PK/HK.02/UT/2009, Nomor PLN: 515.PJ/122DIRUT/2009;
- 416.3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK, Nomor Penjual: 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli: 01500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013;
- 417.3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 042/S/D2/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, Perihal Cash Flow Minus PDPDE Gas, Dewan Komisaris PT PDPDE Gas;
- 418.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 003/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
- 419.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS;
- 420.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No: 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
- 421.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 033/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan;
- 422.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 238/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE 5 MMBTU, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);
- 423.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 233/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE, Kepada BPMIGAS;
- 424.1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 26 Juli 2012, Agenda Pembahasan Lokasi dan Skema Pemanfaatan Gas dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
425. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
- 426.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS;
- 427.1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 077900.ND/OT.03.03/PG/2012, Hal Rapat Koordinasi Penyaluran Gas, tanggal 7 Desember 2012, Kepada Direktur PT PDPDE, Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia;
428. 1 (satu) lembar copy Surat PT Trakindo Utama, tanggal

Halaman 534 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2012, No: 056/PET/XI/2012, Subject Factory Visit USA;

- 429.1 (satu) lembar copy Surat No: 290/PDPDEGAS-TGI/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012, Kepada Direktur Teknik Gas Indonesia, Perihal: Undangan Factory Visit Gas Engine ke USA;
- 430.2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 9 November 2012, Agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 431.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 853.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 7 November 2012, Kepada PDPDE Sumsel;
- 432.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Perihal Pembahasan Rencana Penyerapan Gas oleh PT PLN Persero (“PLN”) dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM), tanggal 31 Oktober 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 433.1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 434.1 (satu) lembar copy Surat PT Palsin Anugerah Adil, Invoice No: 0026/PALSIN/INV/XI/2012, tanggal 7 November 2012,
- 435.1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Lampiran 1 B Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor: PER-13/PJ./2010, tanggal 24 Maret 2010;
- 436. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Statement of Gas Delivery To PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-1/13, tanggal Januari 2013;
- 437.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 438.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa;
- 439. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 272/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo;
- 440.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 273/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Dewan Komisari PT PDPDE GAS;
- 441.2 (dua) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 25 Oktober 2012, No: PRA/DIR/25.001/X/2012, Perihal Surat Permintaan Selaku Pemegang Saham, Kepada PT PDPDE Gas;
- 442. 4 (empat) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 9 Oktober 2012, No: 14/084-3/SP/CRD, Kepada PT PDPDE Gas, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Perubahan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan;
- 443.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-

Halaman 535 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0596, tanggal 2 Oktober 2012, Perihal Jadwal Pemeliharaan Tahun 2013;

- 444.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Berita Acara Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 445.2 (dua) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Site Acceptance Test (SAT) dan Commissioning Modifikasi Report HMI Sistem Meter Bersama Line Grissik – Singapore JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 04 Agustus 2012;
- 446.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0528, tanggal 13 September 2012, Perihal Pembahasan Gas Delivery Procedure (Sistem Meter Bersama);
- 447.1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, Struktur Biaya Pokok “Penyaluran Gas Ke Pembangkit Talang Duku Melalui PGN”, Jakarta, Oktober 2012;
448. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Ramp-Up Gas PDPDE, tanggal 4 Oktober 2012;
- 449.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 291/PDPDE/SS/IX/2012, tanggal 21 September 2012; Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);
- 450.2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE;
- 451.2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan PJBG PDPDE Gas – PGN, tanggal 11 September 2012;
- 452.1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi Mekanisme SWAP Internal Penyaluran Gas PDPDE Ke PLN Talang Duku, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;
- 453.1 (satu) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, No: 059/EXT/TGI/PD/08.12, tanggal 14 Agustus 2012, Subject Commissioning and Meter Running Series (“MRS”) PDPDE Completion Notice;
- 454.3 (tiga) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 13 Agustus 2012, Agenda Rapat Koordinasi Pemenuhan Side Letter Agreement dan GTA PDPDE;
- 455.1 (satu) lembar copy Surat Aplikasi Transfer Mandiri Syariah, No: 4582534, cabang Thamrin, PT PDPDE GAS, Sebesar Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Enam Dollar Amerika;
- 456.1 (satu) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, No: G-31.0912, tanggal 3 September 2012;
- 457.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 248/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal Rakorgas Sumbagteng dan sumbagsel, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
- 458.2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Klarifikasi Rencana

Halaman 536 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 10 Agustus 2012;
- 459.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 1712/Und/12/DMO/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Hal Undangan Rapat;
- 460.2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Klarifikasi Rencana Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam, tanggal 27 Juni 2012;
- 461.2 (dua) lembar copy Surat PT Daruma Mitra Alam, No: 038/DMA-Migas/VII/2012, Perihal Konfirmasi Permohonan Izin Usaha Niaga CNG, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM RI;
- 462.2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012;
- 463.5 (lima) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 50/PJTM-g-PDPDE-7/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Subject Gas Sales Agreement among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for July 2012;
- 464.1 (satu) lembar asli Surat PT Adiprotek Envirodunia, tanggal 2 Agustus 2012, No: 124/ADIP-Dir/SM/VIII/2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas sebesar 2.5 MMSCFD;
- 465.1 (satu) lembar asli Surat PT Enviromate Technology International, No: 001/ETI-ADIP/SM/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas Sebesar 5 MMSCFD;
- 466.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 189/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, Perihal Pemanfaatan Gas dari PDPDE untuk Energi, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang);
- 467.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 10 Juli 2012, Agenda Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE Prov. Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 468.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 224.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 6 Juni 2012, Kepada PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Panitia GAS, KDIV SIS, Perihal Undangan Rapat;
- 469.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 203/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
- 470.3 (tiga) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE GAS kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;
- 471.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 163/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal Penawaran Gas Bumi di Sumatera Selatan, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM;

Halaman 537 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 472.1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, No. /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012;
- 473.2 (dua) lembar copy Surat Memo tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan;
- 474.1 (satu) lembar copy Surat Proyek Peaker CNG Jakabaring Jadwal Pengeluaran Dana;
- 475.2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, tanggal 27 June 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir;
- 476.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0376, tanggal 22 Juni 2012, Perihal Undangan Rapat Persiapan Gas 15.00 BBTUD;
- 477.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juni 2012, Agenda Rapat Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) halaman Daftar Isi;
- 478.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 162/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, Perihal Rapat Monitoring PJBG antara JOB PJTM dengan PDPDE;
- 479.1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0033/BPO2200/2012/S0, tanggal 13 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
- 480.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Dec 2010, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- 481.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
- 482.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 154/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE GAS;
- 483.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 484.3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, No: 041/EXT/TGI/PD/05.12, tanggal 25 May 2012, Re: Overrum Charges – Invoice Natural Gas Transportation Service on March 2012;
- 485.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22-23 Mei 2012, Agenda Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS (“PDPDE GAS”) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”) (“PJBG”) beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 486.2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 April 2012, Agenda Pembahasan Lanjutan Harga Gas antara PGN – PT

Halaman 538 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDPDE;

- 487.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 16 Maret 2012, Perihal Pembahasan Pokok-Pokok Perjanjian tentang Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) TBK ("HoA");
- 488.1 (satu) lembar copy Surat Minutes og Meeting, tanggal 8 Maret 2012, Subject Kick of Meeting Jual Beli Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 489.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 7254/12/DMO/2012, tanggal 7 Mei 2012, Hal: Kunjungan Lapangan;
- 490.1 (satu) lembar copy Surat Tindak Lanjut surat – Masuk PDPDE, tanggal 8 Maret 2012, No Surat 100/07.04/Ka BPH/2012, tanggal 05 Maret 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE, Perihal Surat Teguran 1;
- 491.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 05 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1;
- 492.1 (satu) bundel copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, No: 19/P/BPH Migas/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
493. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, NO: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir;
- 494.1 (satu) lembar copy Surat Amandemen perjanjian jual beli gas, Rabu 9 Mei 2012, Tahun XXVII No 9072;
- 495.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 April 2012, No: 103/PDPDE/SS/IV/2012, Perihal Overrun Changes – Invoice Natural Gas Transportation Services Periode Maret 2012, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 496.2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Kerja PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012;
- 497.3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE GAS, tanggal 28 Maret 2012;
- 498.3 (tiga) lembar copy Surat PT Istana Karang Laut, tanggal 21 Februari 2012, No: 0029-2012, Kepada Bapak Judha Sumariato, General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ("PTJM"), Perihal Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services ("Letter Agreement");
- 499.3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, tanggal 13 Desember 2011, Ref: 241/LOG-TGI/JKT/12.11, Subject Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services ("Letter Agreement");
- 500.1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 21 May 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk,

Halaman 539 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera – 9th Gas Coordination Meeting;

501.1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 29 March 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera – 8th Gas Coordination Meeting;

502.2 (dua) lembar copy Surat Bahan Presentasi Perkembangan Kegiatan PDPDE SS;

503.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 069/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE Gas, Kepada Direktur Utama PT Dika Karya Lintas Nusa;

504.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 067/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Izin menetap sementara, Kepada Bapak Ketua RT 001;

505.4 (empat) lembar copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi;

506.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Maret 2012, No: 068/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Klarifikasi Surat dari Tim 11, Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;

507.1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/1668/AEk, tanggal 10 Juli 2010, Perihal Persestujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah;

508.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan, Para Pihak M.Helius MST, S.Fi, dan Zulhadi tanggal 26 Juni 2011;

509.1 (satu) lembar copy Surat LSM Komunitas Bukit 30 Pro Desa, Akta Notaris : No/02/BH/LSMKOM.B.30.PD/X/2002, Kepada Bapak Alex Noerdin;

510.1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 29 April 2011;

511.1 (satu) lembar copy Surat Advokat / Pengacara "Ismail Makruf., S.H. & Partner", Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2011;

512.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 5 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1;

513.3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, No: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir;

Halaman 540 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 514.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dewan Komisari PT PDPDE GAS, tanggal 13 Pebruari 2012;
- 515.2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS;
- 516.1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Subdit Pengangkutan Migas, tanggal 18 Agustus 2014, Perihal Presentasi Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa a.n. PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 517.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 12 Agustus 2014, No: 1645/Und/12/DMO/2014, Hal Undangan Presentasi;
- 518.1 (set) lembar copy Surat Kronologis Alokasi Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi;
- 519.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 520.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 4482.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Kepada PDPDE, PT PLN WS2JB, KDIV KITSUM;
- 521.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 11 April 2014, No: 4399/15/DMO/2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
- 522.3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 330/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 523.1 (satu) lembar copy Surat Email PDPDE, Undangan Pembahasan TOP, tanggal 20 Agustus 2014;
- 524.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 333/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT PDPDE GAS;
- 525.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 334/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT PDPDE GAS;
- 526.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE GAS dan LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
- 527.3 (tiga) lembar copy Surat Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS untuk Penjualan Gas Dari

Halaman 541 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor Pemebeli: 087/S/D2/III/2014, tanggal 4 Maret 2014;

528.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;

529.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi interim penyaluran gas ke Purwodadi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

530.1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Weekly Management Meeting, tanggal 13 Agustus 2014;

531.3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero);

532.1 (satu) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama, tanggal 6 Agustus 2014, No: 015/Pjc-TJB/VIII/2014, Perihal Permohonan Panggilan Gas untuk Tes Run 2 (dua) unit Engine;

533.2 (dua) lembar copy Surat Foto Progress Lapangan PLTMG Purwodadi PER 11 Agustus 2014;

534.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 203/S/D1/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

535.2 (dua) lembar copy Surat Pengecekan Berkas Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Sementara), No: 203/5/D1/VII/2014;

536.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS, No: 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tentang Ketentuan Perusahaan Mengenai Uang Duka, beserta lampiran 2 (dua) lembar;

537.4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE GAS Kepada Warga Yang Lahan/Pemukimannya Dilintasi Pipa Gas Bumi PT PDPDE GAS, Di Desa Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi KM 03 – KM 08, tanggal 18 Juni 2014;

538.3 (tiga) lembar copy Surat Email, Dari Caca Isa Saleh, tanggal 4 Agustus 2014;

539.1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapapt Koordinasi SKK Migas dengan PT PLN (Persero), tanggal 10 April 2014;

540.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Minutes of Meeting, tanggal 3 Juli 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;

541.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Juni 2014, No: 031/BPPD/IV/2014, Hal: Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas, PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas. Kepada Direktur

Halaman 542 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;

- 542.1 (satu) lembar copy surat Bupati Tanjung Jabung Barat, tanggal 9 Juni 2014, No: 500/1249/Aek/2014, Perihal Dukungan Alokasi Gas PDPDE Untuk PLTMG Tebing Tinggi, Kepada Kepala SKK Migas;
- 543.1 (satu) set Copy Surat PDPDE Progress Pekerjaan PDPDE Dan PLN Di PLTG Purwodadi – Provinsi Jambi, Juni 2014;
- 544.1 (satu) set Copy Surat Rukun Raharja, Annual Report Laporan Tahunan 2013, Accelerating Growth;
- 545.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, Perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT PDPDE GAS dengan PT LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
- 546.3 (tiga) lembar copy surat Alur Transaksi Pembayaran;
- 547.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 16 Juni 2014, Rapat Pembahasan Pemanfaatan Bersama Pipa Dedicated Hilir PT PDPDE Gas untuk penyaluran Gas Bumi milik Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;;
- 548.2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 12 Juni 2014, No: 1296/Und/15/DMO/2014, Hal Undangan Rapat;
- 549.2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 Juni 2014, No: RR/DU/RUPS.07.03/VI/2014, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan");
- 550.3 (tiga) lembar copy Surat Rencana Anggaran Belanja Panitia Pelaksana Pertandingan Asean University Games XVII/2014 Sumatera Selatan Cabang Olahraga Pentaque Tahun Anggaran 2014;
- 551.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 210/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kelapa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 552.1 (satu) lembar copy Surat PT Bumi Samudra Perkasa BUMD Tanjung Jabung Timur, tanggal 14 Mei 2014, No: 012/BSP-BUMD/V/2014, Perihal Penyampaian Data LDD (Legal Due Dilligence) Mitra Strategis BUMD Tanjung Jabung Timur, Kepada PetroChina International Jabung Ltd, SKK Migas;
- 553.1 (satu) lembar asli Surat PT PDPDE GAS, No: 131/D2/S/V/2014, tanggal 9 Mei 2014, Perihal Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS ("Perseroan"), Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsan Anugerah Adil;
- 554.1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris, tanggal 24 Maret 2014, No: 21, Notaris Syarifudin, SH., SK Menkeh & Ham RI, No.C-

Halaman 543 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.HT.03.01-Th.2002, tanggal 18 Maret 2002;

- 555.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No: AHU-04042.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS, Kepada Notaris Syarifudin, SH;
- 556.1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pertanggungjawaban Perseroan Tahun 2013,, tanggal 8 Mei 2014;
- 557.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 129/S/D/V/2014, tanggal 2 Mei 2014, Perihal Undangan Rapat PT PDPDE GAS ("Perseroan")Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan;
- 558.1 (satu) bundel copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Company Profile;
- 559.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 100/UND/D2/IV//2014, tanggal 2 April 2014, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 560.1 (satu) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 April 2014, No. RR/Dir/03.598/IV/2014, Kepada Direksi dan Komisaris PT Rukun Raharja, PT Energasindo Heksa Karya, PT Triguna Internusa Pratama, PT Timitra Cipta Mandiri, PT Suryandra Nusa Bhakti, PT Cahsa Saguna Niketama, PT PDPDE GAS, Perihal Undangan;
- 561.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0785/122/DIVGBM/2014, tanggal 1 April 2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
- 562.1 (satu) lembar copy Surat PT Medco E&P Indonesia, tanggal 21 Maret 2014, No: 377/SS/MEDC/III/2014, Kepada Manajer Operasi PT Pertamina Gas, Manajer Operasi PT PLN KIT SBS Keramasan, Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja, Manajer Operasi PT Mitra Energi Buana, Manajer Operasi PDPDE, Perihal Witness Penggantian Orifice Plate Gas Metering Stasiun Rambutan;
- 563.2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 21 Maret 2014, Agenda Pembahasan Harga Keeekonomian dari PDPDE untuk titik serah PLTMG Purwodadi Jambi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 564.1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) facsimile, No: 1517.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 13 Maret 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
565. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 128/PDPDE/SS/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal Rapat Pembahasan Negosiasi Harga Dengan PDPDE untuk titik serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
566. 2 (dua) lembar copy Surat Indahklat Pulp and Paper Products, No: 071/JPR/IK/XI/2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill;
567. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 6 March

Halaman 544 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take or Pay PDPDE;
568. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 49/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 04 Februari, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
569. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
570. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
571. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Desember 2013, Agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG;
572. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) FACSIMILE, No: 4789.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 6 Desember 2013, Kepada PDPDE;
573. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ("JOB PTJM"), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013;
574. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
575. 2 (dua) copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;
576. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
577. 1 (satu) lembar copy Surat Email dari Caca Isa Saleh, tanggal 10 February 2014, beserta lampiran;
578. 1 (satu) lembar copy Surat Minute of Meeting Risalah Rapat, tanggal 16 Januari 2014, Agenda Pembahasan Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara PDPDE SS dan Daruma, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir ;
579. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 064/S/D/II/2014, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Pengembangan Usaha PT PDPDE GAS;
580. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE GAS, No: 062/RUPS/II/2014;
581. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 0787.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 14 Februari 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat;
582. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 15 Januari 2014, No: 022/S/D2/II/2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang;
583. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 555/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 Perihal Rapat Pembahasan Awal Keeekonomian Gas dari PDPDE untuk titik Serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
584. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Meidia Elyanti, tanggal 21 January 2014, Subject Surat ke SKK Migas Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN;
585. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 026/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 21 Januari 2014, Peihal Surat Gubernur Sumatera Selatan yang Diturunkan ke Kepala SKKMIGAS, Kepada Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
586. 1 (satu) bundel copy Surat Kajian dan Pendapat Hukum Terhadap Rencana Perubahan Tempat Penggunaan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, Oleh A Setiadi, SH& Hendi Gandasmiri, SH Advokat, tanggal 17
587. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
588. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
589. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 09/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Perubahan Perhitungan Keekonomian dan Cost Structure atas Harga Gas di Purwodadi Jambi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
590. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0745//BPB2000/2011/S1, tanggal 7 Juni 2011, Perihal Survey Lapangan Bersama Perintisan Pipa PDPDE dan PCJL, Kepada PetroChina International Jabung Ltd., PERTambangan dan Energi (PDPDE);
591. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 546 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tanggal; 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
592. 1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Facsimile, No: /BPB1100/2011/S6, tanggal April 2011, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia, PT PGN (Persero) Tbk, PetroChina Int. Jabung Ltd., ConocoPhillips (Grissik) Ltd., JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rapat Koordinasi Hot Trap ke-2 Pipa Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
593. 1 (satu) set copy Surat Addendum atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi, No: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011, tanggal 14 Maret 2011;
594. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan;
595. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda terima Surat, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Maret 2011, No: 076/PDPDE/SS/III/2011;
- 596.1 (satu) set copy Surat EPCC USM Metering Station at Simpang Abadi Jambi, Contractor Job No: C – 207 / 2010;
- 597.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 74/PDPDE/SS/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 598.1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Notulen Rapat, tanggal 11 Maret 2011, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Gas JOB PTJM untuk Pembangkit PLN di Sumatera, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir;
- 599.1 (satu) lembar copy Surat Fcsimile BPMIGAS, No: 0104/BPB3300/2011/SO, tanggal 9 Maret 2011, Perihal Undangan Rapat, Kepada ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd., PT PGN (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Transportasi Gas Indonesia;
- 600.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 46/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 22 Februari 2011, Perihal Biaya Jambi Emas Expo 2011, Kepada PT PDPDE GAS;
- 601.1 (satu) lembar copy Surat Perkiraan Pembiayaan, Jambi Emas Expo 2011 (21-27 Maret);
- 602.1 (satu) lembar copy Surat PT Adiprotek Envirodunia, No: 037/APED-Dir/II/2010, tanggal 17 February 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Surat Perintah Kerja KP. 0 – KP. 28.2/Realisasi;
- 603.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 06/PDPDE/SS/I/2011, tanggal 17 Januari 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatangan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
- 604.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 36/PDPDE/SS/I/2011, tanggal 16 Februari 2011,

Halaman 547 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

- 605.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 35/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, Subject Invitation, Kepada Mr Jonathan Cheng;
- 606.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0140, tanggal 17 Februari 2011, Perihal Condition Precedent Perjanjian Transportasi Gas pada PJBG pasal 2.1.2;
- 607.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 3 Maret 2011, No: 154/540/Dispertamben/2011, Perihal Izin Pengambilan Gambar, Kepada Direktur PT Piranti Nusa Energi Persada;
- 608.2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 29/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, Perihal Permohonan Waktu dalam Rangka Laporan Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 609.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0326/BPB3000/2010/S2, tanggal 13 April 2010, Perihal Penunjukan Penjual Gas Bumi bagian Negara, Kepada General Manager;
- 610.4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;
- 611.2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0866/BP00000/2010/S2, tanggal 31 Desember 2010, Perihal Persetujuan Harga Gas atas Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE Jambi Merang") Talisman (Jambi Merang) Ltd ("Talisman"), Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd ("Pacific Oil") dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan ("PDPDE"), Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 612.1 (satu) lembar copy Surat PDPDE Tanda Terima, Sudah terima dari Bapak Caca Isa Saleh Dirut PDPDE Sumsel, Barang Berupa 1 (satu) set Dokumen Asli Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara (BPMIGAS-JOB PTJM), berikut Asli SK Kepala BPMIGAS No.0034/BP00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010;
- 613.2 (dua) lembar copy Surat Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- 614.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32151/15/DMC/2010, tanggal 17 Desember 2010, Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- 615.2 (dua) lembar opy Surat Indahkiat Pulp and Paper Products, No: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 1 November 2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill;

Halaman 548 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 616.1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minute of Meeting, Subject Persiapan Pembuatan Prosedur Serah Terima Gas PTJM ke TGI, CPI, PDPDE SS, PKB, tanggal 25 Januari 2011;
- 617.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0063, tanggal 20 Januari 2011, Perihal Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas Kepada PT PDPDE tanggal 19 Januari 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 618.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011, Perihal Diskusi Rapat Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT PDPDE;
- 619.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 05/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Penngelolaan Gas Kepada PT PDPDE Gas;
- 620.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0024, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas Pasal 3.1.3;
- 621.1 (satu) set copy Surat Bank Saudara, tanggal 17 Desember 2010, No: 004/SPPK/SDRA-ENG/XII/10, Kepada PT PDPDE GAS, PERihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Bank Garansi;
- 622.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0852/1.824/10;
- 623.1 (satu) lembar copy Surat Kantor Notaris Syarifudin SH, Surat Keterangan, tanggal 6 Mei 2010;
- 624.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0802/1.824/10;
- 625.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar, No: 03176/1.824.271, tanggal 3 May 2010;
- 626.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, MPWP : 03.036.317.0-063.000, Nama: PT PDPDE GAS;
- 627.1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No: PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010;
- 628.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 7 April 2010, No: 002/PDPDEGAS/SP/IV/2010, Kepada Pengelola Building Manajemen, Perihal Permohonan Surat Keterangan Domisili;
- 629.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, tanggal 9 April 2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-0034/BP00000/2010/S2, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI);
- 630.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 004/PDPDEGAS/SP/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Perihal Permohonan Surat Domisili, Kepada Kantor Kelurahan Kuningan Timur;
- 631.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No:

Halaman 549 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 006/PDPDEGAS/SK/IV/2010, tanggal 23 April 2010;
- 632.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 008/PDPDEGAS/SK-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
- 633.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 009/PDPDEGAS/SP-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
- 634.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 012/PDPDEGAS/SPM-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010, Kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Perihal Permohonan memperoleh TDP;
- 635.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 013/PDPDEGAS/SK-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 636.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 014/PDPDEGAS/SP-TD/IV/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 637.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 015/PDPDEGAS/SP-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010;
- 638.1(satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPPI/V/2010, tanggal 24 Mei 2010m Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS Dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Indusrt, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Indusrt;
- 639.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32164/15/DMO/2010, tanggal 17 Desember 2010, Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- 640.1 (satu) lembar copy Surat Email GSA Signing Friendly golf 7 December 2010,
- 641.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/2010, tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010;
- 642.1 (satu) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
- 643.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penerbitan Performance Bond Bank Mandiri, No: 318/PDPDE/SS/XI/2010, tanggal 9 November 2010, Kepda Bapak Pimpinan Cabang Bank Mandiri Palembang Arief;
- 644.4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
- 645.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operang Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-1015, tanggal 11 November 2010, Perihal Perjanjian Jual Beli Gas JOB Pertamina – Talisman dan PD Pertambangan dan Energi;
- 646.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Performance Bond, No: 337/PDPDE/SS/XII/2010,

Halaman 550 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2010, JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010;

- 647.1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0602/BP00000/2010/S2, tanggal 26 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Konsep dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd. Dan Perusahaan Daerah PERTambangan dengan Energi (“PDPDE”);
- 648.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0978, tanggal 29 Oktober 2010, Kepada Terlampir, Perihal Penandatanganan Perjanjian-perjanjian;
- 649.1 (satu) lembar copy Surat PT Kinarya Gemilang Adhitama, tanggal 2 Agustus 2010, No: 134A/KGA-PDPDE/VIII/2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
- 650.1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS;
- 651.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 073/PDPDEGAS/PC/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Crossing Pipa Gas, Kepada PT PetroChina International Jabung Ltd.;
- 652.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 072/PDPDEGAS/WKS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Memulai Kegiatan Pemasangan Pipa Gas, Kepada PT Wirakarya Sakti;
- 653.1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 27 Oktober 2010, No: 503/3012/IV/2010, Perihal Persetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Utama PDPDE;
- 654.1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 084/PDPDEGAS-LPPPI/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, Perihal Undangan Rapat Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- 655.4 (empat) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010 (1 October 2010), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
- 656.1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 266/PDPDE/SS/IX/2010, tanggal 8 September 2010, Perihal Undangan Finalisasi Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
- 657.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 24239/15/DMO/2010, tanggal 27 September 2010, Hal Penyesuaian Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
- 658.2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina –

Halaman 551 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0846, tanggal 30 September 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;

659.1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PDPDE Provinsi Sumatera Selatan Bali, 28 September 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir;

660.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 20989/15/DMO/2010, tanggal 19 Agustus 2010, Hal Kelengkapan Persyaratan;

661.1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0724, tanggal 20 Agustus 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS;

662.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 3 Agustus 2010;

663.1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 30 Juli 2010, No: 19058/15/DMO/2010, Hal Undangan Presentasi, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir;

664.1 (satu) bundel copy Surat Kiln LPPPI;

665.3 (tiga) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;

666.4 (empat) lembar copy Surat Addendum atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nsa, No: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, No: 057/DKLN/VII/2010, tanggal 26 Agustus 2010;

667. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Yogyakarta 4 Agustus 2010;

668. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0674, tanggal 27 Juli 2010, Perihal Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS;

669. 4 (empat) lembar copy Surat Bank Saudara Perjanjian Bank Garansi, No. BG. 257/SDRA-ENG/VII/10, tanggal 13 Juli 2010;

670. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 202/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, Perihal Preliminary Engineering Drawing USM, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;

671. 1 (satu) lembar copy Surat Alternatif PDPDE Gas Langsung Membayar Ke JOB PTJM dan TGI;

672. 1 (satu) lembar asli Surat Bulletin Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang;

Halaman 552 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 187/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010, Perihal Revisi Undangan Pembahasan Gas Transportation Agreement antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Transportasi Gas Indonesia, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia;
674. 1 (satu) bundel copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 6 July 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir;
675. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0254/BP00000/2010/S2, tanggal 20 Mei 2010, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian ("HoA") Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi;
676. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0575, tanggal 25 June 2010, Perihal Pokok Pokok Perjanjian yang telah ditandatangani untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi;
677. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement by and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010;
678. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS No: 214/PDPDEGAS/PP/XII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS;
679. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan;
680. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 910/1607/IV/2014, tanggal 23 Juni 2014, Hal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Tahun 2014, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
681. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No 890/KPTS/IV/2013, tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus dan Staf Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
682. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 900/1961/IV/2012, tanggal 4 Juli 2012, Perihal Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi;
683. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No: 180/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 2 Juli 2012, Perihal Laporan

Halaman 553 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PDPDE Tahun 2011 Audited, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

684. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pemilik Modal PD Pertambangan Dan Energi Sumsel, tanggal 29 Juni 2012, beserta lampiran 2 (dua) halaman copy Surat Daftar Hadir;
685. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 657/KPTS/IV/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gubernur Sumatera Selatan;
686. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 970/3589/IV/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi;
687. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 November 2011, No: 539/020/BP/2011, Perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Swarna Dwipa, Dirut PD Pertambangan dan Energi, Dirut PD Prodexim, Dirut PD Industri Grafika Meru;
688. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 839/KPTS/IV/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 523/KPTS/IV/2012 tentang Gaji dan Tunjangan Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
689. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 890/KPTS/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
690. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 1433/0455/X/2013, tanggal 22 Februari 2013, Hal Himbauan Terkait Gratifikasi, Kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov. Sumsel, Direksi BUMD Prov. Sumsel;
691. 4 (empat) lembar asli Surat Berita Acara Hasil Rapat Pra RUPS Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 12 Juni 2012;
692. 1 (satu) set copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan Tahun Buku 2011 Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Pangabean & Rekan;
693. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 25 Juli 2013;
694. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 037/BP/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, Hal Instruksi, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
695. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 031/BPPD/V/2014, tanggal 26

Halaman 554 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, Hal Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas, PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;

696. 2 (dua) lembar copy Surat Honor Banwas;
697. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 10, tanggal 23 April 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Paisin Anugerah Adil;
698. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 4, tanggal 15 Desember 2010, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Palsin Anugerah Adil;
699. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 11, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mura Energi Buana;
700. 3 (tiga) lembar copy Surat Permohonan Perubahan Perseroan dengan Nama Perseroan Palsin Anegerah Adil, Nomor SK Terakhir AHU-04545.40.20.2014;
701. 1 (satu) rangkap copy Surat Akta Nomor 01, tanggal 04 September 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Energi Buana;
702. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Pra Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 4 x 4 MW PT Mura Energi Buana, Lokasi Proyek di : Desa Temelat, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan;
703. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/80/436.9.19.5/2008, PT Dika Karya Lintas Nusa dengan Nama Ahmad Aman Astra, tanggal 20 Agustus 2008;
704. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor 503.7424A/436.5.9/2006, atas nama perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 16 November 2006;
705. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 503/7AQAD/436.5.9/2006, Nomor TDP 13.01.1.52.12953, Agenda Pendaftaran Nomor 2582.BH.13.01/JUNI/2001, tanggal 27 November 2006;
706. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pajak NPWP 01.839.049.2-631.000 PT Dika Karya Lintas Nusa;
707. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak, No : PEM-01083/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008;
708. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No : PEM-00643/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008;
709. 1 (satu) lembar copy Surat Rincian Klarifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa. PT, No. Seri 032758;
710. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nomor 277/GABPEKNAS/13/8/08, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa, PT, tanggal 20 Agustus

Halaman 555 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

711. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa Kamar Dagang Dan Industri Surabaya, Nomor Sertifikat : 20501.000037.01.08, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 23 Januari 2008;
712. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Klasifikasi & Kualifikasi Perusahaan Nama Perusahaan PT . Dika Karya Lintas Nusa, Nomor Anggota 20501-000165;
713. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Biasa, No. Anggota 20501 – 000165, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 12 Juli 2007;
714. 1 (satu) lembar copy Surat PT Dika Karya Lintas Nusa Surabaya Daftar Aktiva Tetap Per 31 Desember 2005;
715. 1 (satu) lembar copy Surat Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS), No. 04 3578 02588, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa;
716. 1 (satu) lembar copy Surat Kode Etik GABPEKNAS “Panca Styra” , Surabaya 23 Juli 2007;
717. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor 188.4/435/436.5.2/2007, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, Kode Perusahaan 1-018153-3578-2-2426, tanggal 16 Agustus 2007;
718. 1 (satu) lembar copy Surat Berdasarkan Penilaian Badan Sertifikasi Asosiasi : GABPEKNAS JAWA TIMUR, Nama Badan Usaha PT. Dika Karya Lintas Nusa, Nomor IUJK : 188.4/435/436.5.2/2007;
719. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 13, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dika Karya Lintas Nusa;
720. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 7 Desember 2007, Nomor 7, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Dan Perusahaan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa;
721. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 333/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Konisaris Mewakili PDPDE Prov. Sumsel, tanggal 30 Juni 2014, Kepada PT PDPDE GAS;
722. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 178/S/D1/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, Kepada Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi, Perihal Surat Permohonan Pindah Buku;
723. 5 (lima) lembar copy Surat Kuasa, Nomor 170/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 30 Juni 2014;
724. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor : 328/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Perguruan Izin Lingkungan, tanggal 27 Juni 2014, Kepada Direktur PT. PDPDE GAS;
725. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Konsultan, Nomor : 012/PDPDE_Kons/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, Kepada Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumsel;
726. 1 (satu) lembar copy Invoice, Nomor 001/IVC/VI/2013, tanggal

Halaman 556 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



26 Juni 2014;

727. 1 (satu) lembar copy Surat Kwitansi PT PDPDE GAS, Diterima Dari PD. Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 28 Juni 2014;
728. 1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900.13.88463638, tanggal 26 Juni 2014;
729. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Kota Palembang Badan Lingkungan Hidup, Nomor 660/362/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, Hal Informasi Izin Lingkungan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
730. 2 (dua) lembar copy Surat Pertagas Niaga, tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 122/PN1200/2014-SO, Perihal Undangan Presentasi Pemaparan Perusahaan;
731. 1 (satu) bundel copy Surat Kronologis Alokasi Gas Job Pertamina Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi dan Sisa Alokasi Gas yang Dimiliki PDPDE sebesar BBTUD untuk PLN, dimana Tentative Commercial Operation Date (COD) PLTMG Purwodadi (Pelabuhan dagang) tanggal 10 September 2014;
732. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Harian Jambi, Kantor PLN Tungkal Diamuk Massa, tanggal 15 Oktober 2014;
733. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Tribun News, Listrik Tak Kunjung Normal Warga Datangi PLN, tanggal 14 Oktober 2014;
734. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor 540/2679/DESDM/2014, tanggal 21 Oktober 2014, Perihal Percepatan Penyaluran Gas Untuk PLTMG Purwodadi, Kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
735. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2537/122/DIVGBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 24 September 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
736. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0803/122/DIV GBM/2013, Perihal Alokasi Gas PDPDE 5 BBTUD ex Lapangan Gas Jambi Merang untuk PLN, tanggal 17 Juni 2013, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
737. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0145/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
738. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0785/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 1 April 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas;
739. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi Interim penyaluran gas ke Purwodadi;
740. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2176/122/WS2JB/2014, Perihal Status PJBG Untuk PLTMG Pelabuhan Dagang / Purwodadi, tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
741. 2 (dua) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama, tanggal 4 September 2014, Nomor 017/PJC-TJJB/IX/2014, Perihal Permohonan Pengaliran Gas, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Di Palembang;
742. 2 (dua) lembar copy Surat Kabar Koran Tribun Jambi, tanggal 14 Agustus 2014, "Sudah Ajukan Surat ke Pemkab";
743. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT Bumi Samudra Perkasa dengan PT PDPDE Gas untuk Pengelolaan atas Alokasi Gas Bumi Sebesar 5 BBTUD Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Untuk Kebutuhan PLTMG PT PLN (PERSERO), Nomor BSP : 001/-BUMD/VII/2014, Nomor PDPDE GAS : 196/K/D/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
744. 3 (tiga) lembar copy Surat Data Koordinat Fasilitas Metering Station Dan Pipeling PT PDPDE GAS;
745. 1 (satu) lembar copy Print Out Peta;
746. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 056/PDPDE/SS/II/2013, Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 8 Februari 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
747. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 341/PDPDE/SS/X/2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang;
748. 2 (dua) rangkap copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Ramp-up PDPDE;
749. 2 (dua) rangkap copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012;
750. 2 (dua) rangkap copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3-10-2012;
751. 2 (dua) rangkap copy Surat PGN, Nomor : 072199.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
752. 2 (dua) rangkap copy Surat Perjajian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli : 001500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013;
753. 2 (dua) rangkap copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012;
754. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Hal Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan

Halaman 558 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan; tanggal 30 Juli 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;

755. 1 (satu) rangkap copy Surat Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Disetujui, Nomor Surat : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Nomor Register 015/55-/513/PPG/18.06/DMT/2013, beserta lampiran;
756. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 606/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Penjelasan Soal Pangangkatan Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
757. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 605/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Keberatan Penggantian Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas;
758. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 234/PDPDE/SS/V/2014, Perihal Mohon Petunjuk, tanggal 21 Mei 2014, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
759. 2 (dua) lembar copy Surat Suara Perbaruan, Pengumuman, Sening tanggal 17 September 2012;
760. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012;
761. 5 (lima) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 28 Maret 2012;
762. 1 (satu) bundel copy Surat Akta, Nomor 21, tanggal 24 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS;
763. 1 (satu) rangkap copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan Nomor : KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS;
764. 3 (tiga) lembar copy Surat HOA Key Terms For Jambi Merang Gas Sales To PDPDE South Sumatera;
765. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 541/0198/IV/2020, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS;
766. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22 Maret 2010, Agenda Rapat Rencana Penggunaan Jalur Pipa Transmisi PT Transportasi Gas Indonesia;
767. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 24 Februari 2010, Agenda Rapat Rencana Penjualan Gas Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel;
768. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Nomor

Halaman 559 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0109/BPB0000/2010/S2, tanggal 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan;
769. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Day Pertamina Talisman Jambi Merang, Nomor MAN-J/10-0177, tanggal 3 Maret 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas dari JOB PErtimana – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas;
770. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 154/PDPDE/SS/VI/2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, tanggal 5 Juni 2012, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE Gas;
771. 2 (dua) lembar copy Surat Indah Kiat, Nomor : 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 November 2010, Kepada PT PDPDE Gas, Bapak Ahmad Yaniarsyah Hasan, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Perawang Mill;
772. 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;
773. 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Dan PT PDPDE Gas Untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor Pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010;
774. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor : 0852/1.824/10, tanggal 17 Desember 2010;
775. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal PIPANISASI Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
776. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor : 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur PIPANISASI Gas, Tanggal 6 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE) Gas;
777. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati KABUPATEN Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
778. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 217/PDPDE/SS/IX/2012, Perihal Permohonan Pengajuan Pembelian Ipad untuk tim project Jambi, tanggal 25 September 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan;
779. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas Antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober

Halaman 560 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

780. 1 (satu) bundel copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia Transgasindo Head Office, Nomor : 068/EXT/TGI/PD/10.12, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, Perihal PDPDE (Simpang Abadi) Metering Facilities Completion Date notice, tanggal 1 Oktober 2012;
781. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS/K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy Of Germany, Jakarta;
782. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran dan Slip Penarikan dengan nama pemilik rekening PT PDPDE GAS;
783. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Pengeluaran dan Invoice atas nama PT Lintas Nusa Investama SSI;
784. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Permintaan Anggaran, Nama Pemohon PT PDPDE GAS, Peruntukan Biaya Pengurusan Izin Niaga Tetap PT PDPDE Gas, tanggal 14 Juni 2012;
785. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Penerimaan, Jumlah Uas USD 25.000, Keterangan Pengisian Kas;
786. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran, Dibayar Kepada Caca Isa Saleh, Sejumlah USD 25.000, Untuk Pembayaran Suplier Gas;
787. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama M. Ali Hasan, tanggal 29 Desember 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
788. 3 (tiga) lembar copy Surat Memo, tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan;
789. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Kesepakatan Pengeluaran Dana Untuk Supplier Gas;
790. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Dinas, Nomor : /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012;
791. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas, Nomor : 214/PDPDEGAS/PP/XIII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS, tanggal Desember 2011;
792. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 133/PDPDE GAS-MIGAS/VI/2011, Perihal Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2011, Kepada Bapak Ir. Bambang Sumarsono Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
793. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Perihal Permintaan Klarifikasi, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas Onshore Pipeling;
794. 1 (satu) lembar copy Surat Business Scheme & Share Holder Structure PT PDPDE Gas, beserta 1 (satu) lembar lampiran Attendance List;
795. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 052/PDPDEGAS/MIGAS/VIII/2010, Perihal Penyampaian Persyaratan atas Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 13 Agustus 2010, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, beserta Lampirannya;

Halaman 561 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 561



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 174/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04 Juni 2014;
797. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 469/S/PDPDE/SS/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04 September 2014;
798. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Minutes Of Meeting, Penyaluran Gas PDPDE Sumatera Selatan ke PLTMG Purwodadi PT PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Jambi, tanggal 5 September 2014, beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir;
799. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 237/S/D1/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 05 September 2014;
800. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa atas nama caca Isa Saleh, beserta lampiran;
801. 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Terima, tanggal 29 September 2014, Diterima dari PT PDPDE Gas, Terbilang Sepuluh Juta Rupiah;
802. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 494/PDPDE/SS/IX/2014, Perihal Permintaan Waktu Silaturahmi, tanggal 19 September 2014, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
803. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 248/D/S/IX/2014, Perihal Undangan Silaturahmi Dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 September 2014, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsin Anugerah Adil;
804. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 045 / BPPD/VIII/2014, Perihal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, tanggal 14 Agustus 2014, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
805. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17302/12/DMO/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Tanggapan Permohonan Izin Usaha, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
806. 1 (satu) lembar copy Surat Sriwijaya CUP V, Turnament TH. 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Biaya Penyelenggaraan;
807. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE Gas, Nomor PIHAK PERTAMA : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor PIHAK KEDUA : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, tanggal 23 April 2010;
808. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement By and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, and Perusahaan

Halaman 562 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446 PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010;

809. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Heads of Agreement) Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan PT PDPDE Gas untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 05-NK/PDPDE.PDPDEGAS/VIII/2010, Nomor Pembeli : 054/PDPDE.PDPDEGAS/HOA/VIII/2010;
810. 1 (satu) bundel copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010, beserta lampirannya;
811. 1 (satu) bundel copy Surat PDPDE Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, beserta lampirannya;
812. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 503/3012/IV/2010, Perihal PERSetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 27 Oktober 2010, Kepada Direktur Utama PDPDE;
813. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
814. 1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, Kepada Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov. Sumsel, tanggal 5 Agustus 2010, Perihal Telaahan Terhadap Permohonan Direktur Utama PDPDE Mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas;
815. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel;
816. 2 (dua) lembar copy surat Pertimbangan Usulan Menjadi Direktur Utama PT PDPDE Gas;
817. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, Nomor 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik 1 I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
818. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Nomor : 022/S/D2/II/2014, tanggal 15 Januari 2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang;
819. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPD Gas, Nomor 272/PDPDEGAS-UND/X/2012, Tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo;
820. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 62/PDPDE/SS/II/2014, Perihal Permohonan Penerbitan SBLC,

Halaman 563 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Februari 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri Corporate Banking Division Wisma Mandiri;
821. 5 (lima) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 6 Januari 2014, Kepada Accounting & Finance Departement, Subjek Approval Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PDPDE SS Periode Desember 2013;
822. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 007/S/D2/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Invoice Periode Desember 2013, Kepada PDPDE Sumsel;
823. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 210/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
824. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 11603/10/DJM.O/2014, tanggal 29 September 2014, Perihal Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Utama PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas;
825. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian antara PT PDPDE Gas dan PT Trimitra Cipta Mandiri tentang Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Fasilitas PT PDPDE Gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014, Nomor Pihak Kedua : 162/BOO/PG/2014, tanggal 24 Oktober 2014;
826. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 109/S/D1/IV/2014, tanggal 23 April 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri, Perihal Permohonan Kredit Investasi dan Fasilitas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran;
827. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE Gas, Berkedudukan di Jakarta;
828. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara pihak-pihak PT Dika Karya Lintas Nusa dengan PT PDPDE Gas, tanggal 20 Juni 2012;
829. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Daerah, Nomor 542/988/SDA/2014, Perihal Permintaan Ekspose dan Survey, tanggal 7 April 2014, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
830. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat;
831. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas;
832. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 043/BP/IV/2012, Perihal Penggantian Komisaris

Halaman 564 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2012, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas;
833. 1 (satu) lembar print out email, Subject Klarifikasi Surat Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, dari Syehani Assegaf, kepada Pak Caca, tanggal 6 Desember 2012;
834. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintaha Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas;
835. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
836. 1 (satu) bundel copy Surat Kontan Aksi Emiten, Rukun Raharja Akuisisi Perusahaan Gas, tanggal 20 Oktober 2012;
837. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (Salinan), tanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 01;
838. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas, Nomor : 5, tanggal 14 November 2012;
839. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan;
840. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa;
841. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 27 Juni 2012;
842. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomog : 219/PDPDEGAS-SK/Dir/X/2012, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 1 Oktober 2012;
843. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS-K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy of Germany, Jakarta;
844. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 196/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, Kepada Bapak Edi Purnomo, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga Untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Pipa Penyalur Gas milik PT PDPDE Gas;
845. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 197/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, tanggal 30 Agustus 2012, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Instansi Gas Metering Unit milik PT PDPDE Gas;
846. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor :

Halaman 565 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PDPDEGAS-Migas/IX/2012, Perihal Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas PT PDPDE Gas di Jambi, tanggal 6 September 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

847. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi;
848. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Synergi Dinamik Jaya tentang Pekerjaan Hot Tapping CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor 136/PDPDEGAS-SYNEGI/K/VI/2012, tanggal 25-06-2012;
849. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Verojasa Technical tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Pekerjaan Sipil CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor : .../PDPDEGAS-VERTICAL/K/VII/2012, tanggal 05-07-2012;
850. 2 (dua) lembar Surat PDPDE Gas Nomor: 218/D/S/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal Pemberitahuan pengganti Komisaris di PDPDE Gas;
851. 1 (satu) Bundel Fotokopi Company Profile PT. PDPDE Gas;
852. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor 465/PDPDE/SS/IX/2014, tanggal 3 September 2014 perihal Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban Terkait Asset Transfer Metering Station;
853. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor 173/D/S/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Laporan Tahunan PT. PDPDE Gas Tahun 2013;
854. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. PDPDE Gas;
855. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:177/S/D1/VII/2013, tanggal 1 Juli 2014 perihal Rencana Transfer Aset Ultra Sonic;
856. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI;
857. 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 211/S/D1/VIII/2014;
858. 1 (satu) rangkap fotokopi Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE Gas/2014, Nomor Pembeli: 087/S/D2/III/2014 tanggal 04 Maret 2014;
859. 1 (satu) rangka fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas Nomor Penjual: 12-PJBG/PDPDE-PDPDE Gas.JM/XII/2010, Nomor Pembeli:108/PDPDE Gas-PDPDE/K/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010;
860. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE Gas dan PT. LPPPI;
861. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas

Halaman 566 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:203/S/D2/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
862. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:----, tanggal -----, perihal Proedu;
863. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 05, tanggal 27 Maret 2012;
864. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:043/BP/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Sumsel;
865. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Selatan Nomor: 540/3076/IV/2014, tanggal 5 Ddseember 2014, perihal Komisaris mewakili PDPDE Sumsel di PDPDE Gas;
866. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Pegawai PDPDE Sumsel Nomor: 043.B/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris Yang Mewakili PDPDE Sumsel;
867. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Gas Nomor:-----tanggal 16 Desember 2013;
868. 1 (satu) rangkap fotokopi Memorandum Kerjasama Perusda;
869. 1 (satu) bundel Progressing Towards The Future PT. Rukun Rahardja, Tahun 2014;
870. 1 (satu) Asli Hitungan Untuk Performance Bond Project JOB Jambi Merang terhitung tanggal 1 Desember 2010 s/d 31 Juli 2012
871. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Meneteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22708/AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM, tanggal 03 Mei 2010;
872. 1 (satu) Bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 006/PDPDE.PDPDE Gas/2012 Nomor Pembeli: 056/PDPDE Gas-PDPDE/K/III/2012;
873. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 PDPDE Gas;
874. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Nomor: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010;
875. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan PDPDE Gas Nomor: 013/PDPDE GAS-BSM/SP/I/2011, tanggal 10 Januari 2011;
876. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 05/PDPDE /SS/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE Gas;
877. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Nomor: Ref.NO. MAN-J/11=0063, tanggal 20 Januari 2011 tentang Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE tanggal 19 Januari 2011;
878. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Minute of Meeting tanggal 19 Januari 2011 agenda Pembahasan Surat Permintaan PDPDE Nomor: 05/PDPDE/SS/2011 tertanggal 12 Januari 2011;
879. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Ref. No. MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011 perihal Diskusi

Halaman 567 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Persetujuan Atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE;

880. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 8 tanggal 20 Mei 2010;
881. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 583/PDPDE/SS/XI/2014, tanggal 12 Nopember 2014, perihal Permohonan Penerbitan SBLC;
882. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 203/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 06 Mei 2014, perihal Permohonan Pemanfaatan Bersama Pipa gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas;
883. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 204/PS/D2VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, perihal Tanggapan atas Pemanfaatan Bersama Pipa Gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas;
884. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Sumsel Nomor: 515/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
885. 1 (satu) rangkap fotokopi Minute Of Meeting Agenda pembahasan Usulan Kenaikan Harga gas Wellhead dari PT. Medco E&P Indonesia Untuk Perjanjian Jual Beli Gas Kelistrikan di Wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan;
886. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 268/S/D1/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Tetap Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
887. Struktur organisai PT PDPDE Gas, 1 agustus 2013
888. Surat Sekretaris Daerah pemkab Tanjung jabung Barat kepada PT.PDPDE Gas nomor 005 /2983/ASDA, tanggal 5 November 2012, perihal; pelaksanaan penngendalian jenis BBM tertentu utnuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan;
889. Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas 14 November 2012;
890. Daftar Biaya Operasional PTPDE bulan Desember;
891. Surat kepada Dirjen Mlnyak dan Gas Bumi, nomor 051/D1/Migas?II/2013 tanggal 25 Februari 2013, perihal; Laporan KEgiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melali Pipa Dedicated Hilir.
892. 1 Lembar surat kepada KEpala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat wisma Mandiri, nomor : 049/S/D1/II/2013, tanggal 28 Februari 2013;
893. Surat Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Dirut PT PDPDE Gas, nomor 05/DGB/BPH/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal ; Penyampaian Surat Kepurusan Kepala BPH Migas nomor; 23 /KD/BPH MIGAS/KOM/2012;
894. Annual Report 2013 Accelerating Growth Rukun Raharja;
895. Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE Gas kepada warga yang lahan/pemukimannya dilintasi pipa Gas, tanggal 18 Juni 2014;
896. Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas nomor; 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014;
897. 1 lembar surat PT PDPDE Gas kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, nomor; 211/S/D2/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, perihal: Rencana Penyaluran Gas ke PT. PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, KEc. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi;

Halaman 568 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 1 lembar Surat PT PDPDE Gas kepada PT Pertamina Niaga, nomor ; 164/S/D1/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, perihal; Minat PEmbelian gas Sebesar \pm 5000 mmbtu/hari;
899. Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas kemampuan Permodalan terhadap Perjanjian Kerjasama operasi antara PT.PDPDE denga PT bumi samudera Perkasa, tanggal 19 Juni 2014;
900. Surat PT. Energasindo Heksa Karya kepada Dirut PT PDPDE nomor 1235 /D00/Po/IX/2014 tanggal 15 September 2014, perihal Undangan launching logo baru PT energasindo hekxa Karya ke 16 tahun 2014;
901. Kwitansi no; 0201 dari Ikatan ahli Teknis PERminyakan Indonesia kepada PT PDPDE Gas tanggal 27 Agustus 2014
902. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 4 tanggal 15 Desember 2010
903. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 10 tanggal 23 April 2012
904. 1bendel PERjanjian kerjasama antara PDPDE dan PT PDPDE Gas tentang penyaluran gas PDPDE untuk kebutuhan kelistrikan di jakabaring, sumsel tanggal 8 february 2013
905. Surat Kuasa nomor; 034/D1/SK/II/2013 tanggal 5 Februari 2013
906. Surat Kuasa nomor; tanggal 4 April 2013
907. Surat Kuasa nomor ; - tanggal-, untuk an. Perseroan menandatangani Addendum perjanjian Antara perseroan dan PT Energi Jambi LEmstari tentang pemeliharaan Transmisi pipas gas sepanjang 51,6 KM di Kab. Tanjung Jabung Barat prov jambi.
908. Permohonan permintaan Anggaran perjalanalan dinas tanggal 03 April 2013
909. 1 lembar bilyet giro no R 363825 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 202.400.000,-
910. 1 lembar bilyet giro no R 365026 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 110.000.000,-
911. 1 lembar cek no D 993502bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 36.400.000,-
912. Aplikasi transfer PT PDPDE Gas kepada PT Energi Jambi Lestari sebesar. USD 22.192
913. 1 bendel surat PT PDPDE Gas kepada PT panji raya alamindo, PT. DKLN, PDPDE, nomor;- perihal; permohonan Perstujuan harga Gas tanggal 3 April 2013
914. perseroan Terbatas pendirian PT PDPDE Gas akta no 10 tanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani tanggal 23 DrseMBER 2011
915. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011
916. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 10 januari 2011
917. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011
918. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 10 Januari 2011
919. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011

Halaman 569 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920. Surat Kuasa no 022/PDPDEGAS-SK/Dir/II/2012, tanggal 9 Februari 2012
921. 1 bendel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas no- tanggal – Januari 2011
922. Surat Keterangan kantor notaris Syarifudin, SH tentang pendirian PT PDPDE Gas tanggal 6 Mei 2010
923. Surat keterangan Domisili Perusahaan PT PDPDE GAS nomor 0802/1.824/2010, tanggal 13 April 2010
924. Surat PT. PDPDE GAS keepada PDPDE Sumsel tanggal 14 Januari 2013
925. surat permohonan permintaan Anggaran perjalanan Dinas PT PDPDE GAS tanggal 14 Januari 2013
926. surat PT PDPDE Gas tentang MEMO kepada Dir. Keuangan, tanggal 7 Januari 2013, perihal; perjalanan dina Inspektur dari Ditjen Migas
927. internasl office memorandum kepada dirut PTPDE Gas tanggal 20 DEsemer 2012, perihal; Progres Project CNG-PLTG jakabaring tentangn kebocoran pada sambungan instrument (level Switch) dan kandungan air dalam gas Dryer
928. 1 lembar laporan kegiatan Gas-in CNG jakabaring 2012-12-20 tanggal 20 desember 2012
929. 1 lembar surat kementerian ESDM dirjen minyak dan gas bumi, nomor; 27313/18.06/DMT/2012, tanggal 20 Desember 2012, hal; Pemeriksaan teknis dan pengajuan Peralatan
930. Berita Acara Pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi CNG Plant Jakabaring, tanggal 21 Desember 2012
931. 1 lembar email R. Bambang Priyono W tanggal 3 Januari 2013
932. 1 lembar fc. Email budi arti tanggal 8 januari 2013 perihal rapat Rutin Management
933. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE nomor 007/S/D2/II/2013 tanggal 08 januari 2013, perihal; kantor bersama
934. Surat PDPDE kepada PT PDPDE Gas, nomor; 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, perihal ; Klarifikasi surat Bdan PENGawas perusda Prov Sumsel.
935. 1 lembar surat PDPDE kepada gubernur Sumsel melalui badan pengawas BUMD nomor ; 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juli 2010, perihal ; ijin menjabat Dirut PT PDPDE Gas
936. Notulen Rapat pemanfaatan gas 4,5MMCFD untuk PTLG Jakabaring (PT Medco Ep Indonesia) tanggal 26 Juli 2010
937. Addendum atas perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE dengan PT DKLN
938. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada PDPDE sumsel nomor; 671.23/1712/IV/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal; ijin prinsip pembangunan PLTG kapasitas 28 MW berlokasi di jakabaring kota Palembang
939. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor; 503/3760/IV/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal; ijin prinsip joint Venture antara PDPDE dengan PT DKLN "PT PDPDE Gas"
940. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor; 556/2783/IV/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal;

Halaman 570 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



persetujuan ijin prinsip pembangunan hotel boutique / etnik khas sumsel

941. 1 lembar email dari yauche lizar tanggal 18 desember 2010, perihal terlampir draft presentasi mini LNG untuk pemanfaatan gas sumsel
942. 1 bendel tanda terima dokumen asli SOP untuk kelistrikan di jakabaring untuk PDPDE Sumsel;
943. 1 (satu) lembar surat PDPDE Daftar Gaji Badan Pengawas Daerah Milik Pemerintah Prop Sumsel Periode 2014-2017 tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh Dirut Caca Isa Saleh;
944. 1 (satu) bundel surat PDPDE Sumsel tentang pokok-pokok anggaran pendapatan dan belanja ;
945. 1 (satu) bundel surat kegiatan dan program kerja Tanggal April 2014 tentang PDPDE Sumsel;
946. 1 (satu) lembar surat No. 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Alokasi sisa gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang ;
947. 1 (satu) lembar surat No. SRT-0327/SKKE 2000/2013/S2 tanggal 18 Desember 2013 perihal undangan monitoring jual beli gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang;
948. 1 (satu) lembar surat Nomor: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal pembuatan legal opinion terkait pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM;
949. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
950. 1 (satu) bundel risalah rapat topic monitoring jual beli gas dari JOB PTJM hari selasa tanggal 24 Desember beserta lampirannya;
951. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/SS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
952. 2 (dua) lembar surat Nomor: 435/PDPDE/SS/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM);
953. 2 (dua) lembar surat draft perihal sisa alokasi gas PDPDE sebentar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
954. 1 (satu) bundle surat keputusan No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan penjual Gas Bumi Kepala BP Migas tanggal 31 Maret 2010;
955. 2 (dua) lembar surat Nomor: 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD;
956. 1 (satu) lembar surat Nomor: 153/PDPDE/SS/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Pasokan gas untuk energi di Sumatera Selatan;
957. 1 (satu) lembar surat Nomor: 3751/180/WS2JB/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel;
958. 1 (satu) lembar surat Nomor: 335/PDPDE/SS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pasokan gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel ;
959. 1 (satu) lembar surat Nomor: 317/FAC/W92JB.KEN/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Penundaan Waktu Pembatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana pasokan Gas;

960. 1 (satu) lembar surat Nomor: 171/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik;
961. 1 (satu) lembar surat PT PLN Nomor: 871/180/WS2JB/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik;
962. 1 (satu) lembar Minute of Meeting subject Pembahasan Persiapan penerimaan Gas 15 BBTUD tanggal 31 Mei 2012 time 13.30 am-finish,tempat sungai rotan meeting room;
963. 2 (dua) lembar surat Nomor: 101/PDPDE/SS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal Pasokan gas untuk Pembangkit Listrik;
964. 1 (satu) lembar attendance list subject pembahasan persiapan penerimaan Gas 15.00 BBTU tgl 31 Mei 2012;
965. 1 (satu) lembar No. MAN-J/12-0306 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan rapat persiapan penerimaan gas 15.00 BBTUD;
966. 1 (satu) fotokopi Notulen Rapat. PT. PLN (Persero) tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG antara PLN dengan PDPDE;
967. 1 (satu) fotokopi Daftar Hadir Rapat PT. PLN (Persero), tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Awal Keekonomian Gas dari PDPDE untuk titik serah Purwodadi;
968. 1 (satu) Property All Risk Policy Asuransi Jasindo No. Reg.140156418 Nomor Polis 308.297.200.14.00010/000/000;
969. 1 (satu) Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Asuransi Jasindo No. Reg.140156453 Nomor Polis 308.203.200.14.00015/000/000;
970. 6 (enam) lembar fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 0371/EP7000/2014-S1, tanggal 13 Mei 2014, perihal Pengecekan Fisik Sumur Tua Usulan KUD Mirsa Unggul D;
971. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantinusa Energi Persada, Nomor: 93/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Penurunan Plafond Kredit PT. Pirantiunusa Energi Persada;
972. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantinusa Energi Persada, Nomor: 94/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Permohonan Pinjaman PT. Pirantiunusa Energi Persada;
973. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 514/PDPDE/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Penjelasan Kondisi SPBU PT. PDPDE Hilir;
974. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Hilir Nomor: 348/PDPDE/H/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Kerjasama dengan BBM Retail Pertamina;
975. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Sumsel Nomor: 516/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Penawaran;
976. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Iwan Rosyidi;
977. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Romulu Hutapea;

Halaman 572 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978. 1 (satu) fotokopi Surat Badan Pengawas PDPDE Sumsel Nomor: 056/BPPD/IX/2014, tanggal 30 September 2014, perihal Mohon Penjelasan Segera;
979. 1 (satu) fotokopi Invoice Pertamina PHE WMO Nomor: 009, tanggal 20 Pebruari 2013;
980. 1 (satu) fotokopi Fax Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 09 April 2013;
981. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Maret 2013;
982. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2013;
983. 1 (satu) fotokopi Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Dinameka Mukti Pratama atas Perjanjian Finding Fee Gas tentang Pembelian Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang;
984. 1 (satu) totokopi print out email dari ERWIN HIMAWAN kepada OCE SASMITA tentang Pengiriman Draft Perjanjian Pengakhiran Dinamika tanggal 29 Agustus 2013;
985. 1 (satu) fotokopi print out email dari GUNA DJUMENA kepada SYEHANI tentang Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor PT. PDPDE Gas tanggal 30 Agustus 2013;
986. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 441/PDPDE/SS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal PDPDE Sumsel ditunjuk menjadi Badan Usaha Pengelola KEK TAA;
987. 1 (satu) fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Nomor: 005/2030/IV.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal Undangan;
988. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 327/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, perihal Pengantar;
989. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
990. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 019/BM-BS/IX-2013, tanggal 16 September 2013, perihal Undangan Rapat;
991. 1 (satu) rangkap fotokopi Lease and Condition Benoa Square;
992. 1 (satu) rangkap fotokopi Price List Benoa Square;
993. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 013/BM-BS/VIII-2013, tanggal 22 Juli 2013, perihal Undangan Rapat;
994. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Bisnis Indonesia, tanggal 2 Juli 2013 tentang Sri Melamin Ajukan PK;
995. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 132/EP4300/2013-SO, tanggal 16 Mei 2013, perihal Permohonan Gas ex PT. Sri Melamin Rejeki;
996. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 115/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan gas ex PT. Sri Melamin Rejeki;
997. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat DPRD Sumsel Nomor: 005.160/02235/DPRD-SS/2013, tanggal 22 Nopember 2013, perihal Undangan Rapat Kerja Komisi III;

Halaman 573 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998. 1 (satu) rangkap fotokopi PPT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal September 2013;
999. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Benteng Demokrasi Nusantara Nomor: 080/B/BETARA/SS/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, perihal Pemberitahuan Aksi;
1000. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pendapatan Daerah Sumsel Nomor: 011/I/000744/Penda, tanggal 10 September 2013, perihal Pemindahan Kantor PDPDE Provinsi Sumatera Selatan;
1001. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jawaban kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel (MADANI) perihal jawaban Surat tanggal 21 Mei 2014;
1002. 1 (satu) rangkap fotokopi Jadwal Acara Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berbasis Inovasi Dalam Kerangka Sida;
1003. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Wirakarya Sakti Nomor: 895/WKS/XI/2013, tanggal 28 Nopember 2013, perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti;
1004. 1 (satu) bundel fotokopi Diagram Laba Rugi Tanpa Penyusutan Per SBU;
1005. 1 (satu) bundel fotokopi Harga Jual BBG Transportasi Kementerian ESDM;
1006. 1 (satu) fotokopi Print Out Email dari ERWIN DARWANSYAH kepada OCESASMITA tanggal 14 Agustus 2013 perihal RAB lantai 5 dan RAB SKK Migas;
1007. 1 (satu) fotokopi print out Speedy Password kepada Mess Hotel Sanjaya tanggal 10 Maret 2014;
1008. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 172/PDPDE/SS/IV/.2014, tanggal 11 April 2014, perihal Pembahasan Potensi Bisnis CNG Untuk Angkutan Barang dan Batu Bara di Sumatera Selatan;
1009. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Pertamina Nomor: NR-021/L10210/2014-SO, tanggal 14 April 2014 perihal Penjajakan Kerjasama PDPDE dengan Pertamina;
1010. 1 (satu) Fotokopi Daftar hadir PT. Pertamina – Direktorat Gas, tanggal 13 Maret 2014;
1011. 1 (satu) lembar fotokopi fax Surat Pertamina Nomor: 157/L10210/2014-SO tanggal 10 April 2014 perihal Undangan Rapat Pembahasan Potensi Bisnis CNG untuk Angkutan Barang dan Batubara di Sumatera Selatan;
1012. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 541/149/Dispertamben/2014, tanggal 19 Maret 2014 perihal Pengalokasian Gas Transportasi Untuk Angkutan Barang dan Batubara;
1013. 1 (satu) bundel PPT Studi Awal Potensi. Bisnis CNG Untuk Angkutan Batubara di Sumatera Selatan, tanggal 14 April 2014;
1014. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 700/3501/LtProv.V/2008, tanggal 5 Nopember 2008, perihal Teguran;

Halaman 574 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1015.1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 109/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal Tanggapan Atas Laporan BPK-RI;
- 1016.1 (satu) rangkap fotokopi memorandum Nomor: UK/PDPDE/2014, tanggal Maret 2014 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi PDPDE Tahun 2014;
- 1017.1 (satu) bundel fotokopi materi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api oleh Tim PDPDE bulan Juli 2014;
- 1018.1 (satu) bundel fotokopi Materi Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus SEI mangkai- Sumatera Utara.
- 1019.1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: 402/402/PDPDE/SS/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Pengambilan berkas oleh Bpk. Muhar Lakoni ke kantor PDPDE;
- 1020.1 (satu) bundel fotocopy surat PDPDE berita acara tanggal 23 Mei 2014;
- 1021.1 (satu) lembar fotopy surat nomor 045/BPPD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang usulan penempatan anggota komisaris dari badan pengawas perusahaan daerah Sumatera Selatan;
- 1022.1(satu) bundel fotocopy laporan kondisi PDPDE pasca perubahan badan Pengawas tanggal 7 Agustus 2014;
- 1023.1 (satu) lembar fotocopy berita acara dari PT. Pirantinusa Energi Persada tertanggal 5 Agustus 2014;
- 1024.1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 40/VI/PEP/2014 dari PT Pirantinusa Energi Persada tanggal 30 Juni 2014;
- 1025.1 (satu) lembar fotocopy surat berita acara PT. Pirantinusa Energi Persada tanggal 28 Juni 2014;
- 1026.1 (satu) lembar fotocopy surat PT Pirantinusa Energi tanggal 27 Juni 2014 Nomor 38/PEP/VI/2014 perihal Honor Anggota Dewan Komisaris PT. Pirantinusa Energi Persada a.n Bapak Muhar Lakoni;
- 1027.1 (satu) lembar fotocopy voucher pengeluaran uang kas/bank tanggal 28 Juni 2014;
- 1028.2 (dua)lembar fotocopy nomor : 358/PDPDE/SS/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal jawaban atas tanggapan dari fraksi Demokrat
- 1029.1 (satu) bundel fotocopi Nomor : 398/PDPDE/SS/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal jawaban atas pemandangan umum fraksi partai demokrat;
- 1030.1 (satu) lembar fotocopi Nomor : 63/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013;
- 1031.1 (satu) lembar fotocopy Nomor : 64/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013;
- 1032.1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ;
- 1033.1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;

Halaman 575 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1034. 1 (satu) lembar fotocopy surat PDPDE nomor : 215/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal mohon persetujuan penangkatan pegawai tetap;
1035. 1 (satu) bundle fotocopy internal memo dari staf ahli bidang hukum kepada bapak Direktur Utama PDPDE Sumsel tanggal 8 Mei 2013 beserta lampiran;
1036. 2 (dua) lembar fotocopy curriculum vitae an. Iramsyah;
1037. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment(surat keterangan bekerja) our Ref No: 120/SKPD/PERSO/SHC/IX/00 an Iramsyah;
1038. 1 (satu) lembar surat fotocopy keterangan No. 102/Ket-IV/CII/2005 tgl. 14 April 2005;
1039. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat keterangan bekerja) No. SKB/HRD & GA/219/!X/2007 an. Iramsyah tgl. 27 September 2007;
1040. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat keterangan kerja) No.007/TP –HRGA/X/2009 tgl. 28 Oktober 2009;
1041. 1(satu) lembar fotocopy keterangan pernah kerja No. 04/HRD-GA/MNP/XII/2010 tgl. 1 Desember 2010;
1042. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan Direksi PT PDPDE Gas No. 2013/PDPDE GAS-PEG/SK/XI/2011 tentang pengangkatan pegawai penuh;
1043. 1 (satu) bundle fotocopy participating interest PDPDE BUMD Provinsi Sumatera Selatan;
1044. 1 (satu) bundle fotocopy highlight PSC South Sumatra Extention PT Medco EP Indonesia;
1045. 1 (satu) bundle laporan keuangan triwulan III 2013 PDPDE Sumatera Selatan;
1046. 1 (satu) bundle fotocopy UU RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
1047. 1 (satu) bundle surat Nomor : 250/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal undangan paparan;
1048. 1 (satu) lembar notulen rapat PT PDPDE Hilir tgl. 11 September 2013 agenda rapat pembahasan usulan kemitraan Penyediaan BBM Bersubsidi dan lapiran daftar hadir;
1049. 1 (satu) bundle fotocopy usulan kemitraan penyediaan BBM Bersubsidi;
1050. 1 (satu) lembar persetujuan PT PDPDE Hilir;
1051. 1 (satu) lembar surat Nomor: 248/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perihal permohonan Persetujuan Dewan Komisaris;
1052. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perusahaan daerah pertambangan dan energy provinsi Sumatera Selatan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011;
1053. 1 (satu) bundle dokumen Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Laporan Kinerja PDPDE Periode 2009-2012 tgl 16 Juli 2013;
1054. 1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Syarifudin Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas;

Halaman 576 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 11 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas;
1056. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0965418 tanggal 17 September 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS;
1057. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas;
1058. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas;
- 1059.1 (satu) bundle fotocopy Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (salinan) Notaris Rini Yulianti, SH Nomor 5 tanggal 14 November 2012;
- 1060.1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor: 10 tanggal 21 Desember 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PDPDE Gas;
1061. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah terima tugas dan tanggungjawab Direksi PT PDPDE GAS;
1062. 1 (satu) bundle fotocopy surat PDPDE Nomor 369/PDPDE/SS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Tindak lanjut Pembahasan Indonesia Participation pada Blok SSE PT Medco EP Indonesia;
1063. 1(satu) lembar fotocopy notulen rapat pembahasan lanjutan Indonesia Participation untuk Blok S & CS tanggal 4 Desember 2012 dan lampiran daftar hadir;
1064. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen South Central Sumatra PDPDE Participation Interest MedcoEnergi oil& Gas;
1065. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Participating Interest Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) BUMD Provinsi Sumatera Selatan;
1066. 1 (satu) bundle print out company profil Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan;
1067. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 0518/122/DIV GBM/2013, Perihal : Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex Jambi Marang, Tanggal 21 Mei 2013 dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel.
1068. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat, Perihal : Pembahasan Draft PJBG Antara PLN dengan PDPDE, Tanggal 01 Agustus 2013.
1069. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 542/2202AEK/2013, Perihal : Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, Tanggal 23 Juli 2013 dari Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala SKK Migas Pusat.
1070. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera dengan Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli : 0140.PJ/040/DIR/2013, Tanggal 03 September 2013.
1071. 1 (satu) bundel fotokopi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api, Tinjauan

Halaman 577 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah RTRW Kawasan Pelabuhan Tanjung Api Api, Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai-Sumatera Utara dan Usulan Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan Badan Pembangun Dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api oleh Tim PDPDE, Bulan Juli 2014.

1072. 1 (satu) bundel Print Out Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Bulan Juli 2013.

1073. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 267/PDPDE/SS/VI/2013, Perihal : Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2013 dari Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1074. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 08/PDPDE/SS/II/2013, Perihal : Pelunasan PAD 2012 Tanggal 03 Januari 2013 dari Staf Umum/Keuangan PDPDE Sumatera Selatan kepada Bapak Pimpinan Cabang Bank Sumselbabel.

1075. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Debet Bank Sumselbabel Tanggal 03 Januari 2013 dengan Nominal Rp 2.500.000.000,-.

1076. 1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin Tanggal 24 Juni 2013.

1077. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 432/PDPDE/SS/VIII/2014 Perihal : Masalah Tanah PDPDE Tempat Didirikannya PT Pirantinus Energi Persada Tanggal 20 Agustus 2014 dari PDPDE Sumsel kepada Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov Sumatera Selatan.

1078. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo kepada Bapak Caca Isa Saleh (Dirut PDPDE Sumsel) dari Nono Suratno (Direktur PT Pirantinus EP) Tanggal 21 Agustus 2014, Perihal : Tanggapan Email Surat Deddy Nugraha Tanggal 14 Agustus 2014 (dikirim 19 Agustus 2014) selaku Pemegang Saham dan Komisaris di PT PEP.

1079. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lilin Andriyani ditandatangani Tanggal 02 Januari 2014.

1080. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Lilin Andriyani kepada Bapak Iskandar Bandarmata Perihal : Pengajuan Surat Pengunduran Diri Tanggal 15 Mei 2014.

1081. 1 (satu) bundel Print Out email dengan Subject Surat Himbauan dari Deddy Nugraha kepada Caca Isa Saleh.

1082. 1 (satu) bundel fotokopi Pendapatan dan Pengeluaran Gain 2012 dengan Saldo Akhir senilai RP 60.250.000,-

1083. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan dari Sylviana Yulianti Perihal : Surat Pernyataan Tanggal 19 Mei 2012.

1084. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh Sylviana Yulianti, Lilin Andriyani, Yana Umiza, H. Nono Suratno, dan Iskandar Bandamata Perihal : Rapat Administrasi Keuangan Tanggal 05 Juli 2014.

Halaman 578 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1085. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Deddy Nugraha kepada Bapak Nono Suratno Tanggal 18 Agustus 2014 Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Tanggal 21 Agustus 2014.
1086. 1 (satu) bundel Print Out pesan dari Pak Deddy Nugraha Tanggal 20 Mei 2014.
1087. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pendirian PT Pirantinus Energi Persada Tanggal 29 Mei 2009.
1088. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Filling Flant LGP 3 KG Kota Palembang Tanggal 24 April 2009.
1089. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 021/PEP/III/2010 Perihal : Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya Primadana Tanggal 29 Maret 2010.
1090. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 022/PEP/III/2010 Perihal : Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya Primadana Tanggal 30 Maret 2010.
1091. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Tanggal 21 Juli 2010 Perihal : Rapat Direksi PT Pirantinus Eneгри Persada dengan Materi Rapat Laporan Per Juni 2010.
1092. 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kapasitas 5 MW Di Jakabaring Sumatera Selatan Tanggal 24 April 2014.
1093. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bersama antara The Solar Guys International – Mitabu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1094. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 005/0933/IV/2013 Perihal : Undangan Rapat kepada Direktur PDPDE dan Provinsi Sumsel dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 April 2013.
1095. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 093/PDPDE/SS/III/2014 Perihal : Mohon Audiensi kepada Bapak Asisten II Setda Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya.
1096. 1 (satu) bundel fotokopi Peta Denah Lokasi Jakabaring Sport City dan Lokasi Rencana PLTV 5 MW Jakabaring.
1097. 1 (satu) bundel Print Out Berita Gubernur Sumsel Jalin MOU dengan Australia.
1098. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0985/IV/2014 Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2014.
1099. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1100. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Nomor : 238/KPTS/IV/2014 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2017.
1101. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kegiatan dan Program Kerja PDPDE Bulan April 2014.
1102. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 003/Banwas/Prusda/2014 Hal : Penyampaian Laporan Tanggal 21 April 2014 dari Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera

Halaman 579 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah
Pertambangan dan Energi.

1104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 062/PDPDE/SS/III/2012
Perihal : Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Permata Musi
Kreasi Tanggal 07 Maret 2012 dari Perusahaan Daerah
Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada PT
Permata Musi Kreasi.
1105. 1 (satu) lembar fotokopi Billyet Giro Nomor : BI 383094
sejumlah Rp 2.132.000.000,- Tanggal 10 Agustus 2011.
1106. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011
Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04
Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE
Sumatera Selatan
1107. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor :
208/PDPDE/SS/VIII/2011 Perihal : Pencarian & Transfer Tanggal
10 Agustus 2011 dari PDPDE Sumatera Selatan kepada
Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cab. Arief.
1108. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 556.2/2783/IV/2010
Perihal : Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Hotel
Boutique/Etnik Khas Sumatera Selatan Tanggal 11 Oktober 2010
dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama PD
Pertambangan dan Energi.
1109. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011
Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04
Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE
Sumatera Selatan.
1110. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 503/3760/IV/2019
Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika
Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 16 Desember 2009
beserta dokumen pendukung lainnya.
1111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009
Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika
Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 11 Desember 2009
beserta dokumen pendukung lainnya.
1112. 1 (satu) dokumen Company Brochure Joint Operating Body
Pertamina Talisman Jambi Merang.
1113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor :
032/2857/Dispertamben/2010 Perihal : Pembelian Aset PT
Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang Berada di
Wilayah Kota Palembang Tanggal 15 Oktober 2010.
1114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Direktur
yang ditandatangani oleh Andre M. Arbain Tanggal 08 April 2014.
1115. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang
bertuliskan SPD Dirut
1116. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang
bertuliskan SPD Dirut 2013
1117. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang
bertuliskan Bukti Pengeluaran (IV) 2014
1118. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang
bertuliskan Bukti Pengeluaran Cek Jan-Apr 2012
1119. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang
bertuliskan Pengeluaran (1) 2013
1120. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang

Halaman 580 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan Pengeluaran (2) 2013

- 1121. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (1) 2014
- 1122. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (2) 2014
- 1123. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran Cek (II) 2012.

O.

- O.10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Desember 2019 ditandatangani oleh Alex Noerdin;
- 11. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2012;
- 12. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2013;
- 13. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2014;
- 14. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2015;
- 15. 1 (satu) lembar Penerimaan Lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Bulan Desember 2016;
- 16. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2016;
- 17. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Target APBD Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2019;
- 18. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rekonsialisasi Hibah dan Penerimaan Lain-lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Bulan Desember 2019.

P.

- P. 22. Gas Transportation Agreement antara PT PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE tanggal 4 april 2011
- 23. Amendmet Agreement PDPDE Sumatera Selatan Gas Transportation Agreement antra PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE Sumsel tanggal 9 februari 2015
- 24. Rekap Invoice toll fee periode Januari 2016- feb 2019
- 25. Invoice TGI no 38/INV/0217 tanggal 6 feb 2017
- 26. Invoice TGI no 195/INV/0718 tanggal 3 juli 2018
- 27. Invoice TGI no 54/INV/0219 tanggal 4 Feb 20219
- 28. Side letter Agreement mengenai pengalihan Hak dan kewajiban dalam Pelaksanaan Asset Transfer Site dan Metering Facilities di Simpang Abadi tanggal 23 Januari 2015; (1 (satu) bendel)
- 29. Rekap Tagihan Reimbursement periode tahun 2011-2019
- 30. Rekap Tagihan OMA & Electricty periode tahun 2011-2019
- 31. Rekap Tagihan Penalty
- 32. Rekap tagihan SOP periode tahun 2011-2019
- 33. Rekap Tagihan Toll Fee periode tahun 2011-2019
- 34. Rekap Tagihan PT PDPDE periode tahun 2011-2019
- 35. Perjanjian Penyelesaian antara PT Transportasi Gas Indonesia



dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumatera Selatan) tanggal 21 Mei 2019

36. Perjanjian Asset Transfer Metering Facilities Di simpang Abadi antara PT. PDPDE GAS dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) tanggal 18 Mei 2015; (1 (satu) Bendel)
37. Surat Nomor 335 /PDPDE/SS/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014, perihal ; penggunaan lahan metering station Simpang Abadi.
38. Surat Nomor 465 / PDPDE/SS/IX/2014, tertanggal 3 September 2014, Perihal; Persetujuan pengalihan Hak dan Kewajiban terkait Asset Transfer Metering Station Simpang Abadi dari PDPDE Sumsel kepada PDPDE GAS
39. Surat PT. TGI kepada PDPDE Sumsel nomor 057/EXT/TGI/PD/09.14, tertanggal 16 September 2014, Perihal; pengalihan Hak & Kewajiban Serta Penggunaan Lahan Asset Transfer Metering Station PDPDE Simpang Abadi
40. Perjanjian Akses atas Site di Metering Facilities Simpang Abadi antara PT. TGI dengan PT PDPDE GAS, tanggal 18 Mei 2015
41. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi nomor; 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia, tanggal 11 Agustus 2010
42. Surat PDPDE nomor 255/PDPDE/SS/IX/2011 kepada Presiden Director PT. Transportasi Gas Indonesia, Perihal; Penagihan dan Pembayaran sesuai GTA antara PDPDE Sumsel dan TGI, tanggal 30 September 2011.

Q.

- Q.6. 1 (satu) lembar struktur perusahaan / holdings structure;
7. 2 (dua) lembar print out email draft surat untuk SKC halaman 1 dan 2;
8. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. Buckingham Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016;
9. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. AKR Corporindo, Tbk., PT. Buckingham Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016;
10. 1 (satu) bundel Concession: Certificate (issue by Government) Palembang.

R.

- R.24. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta Pendirian PDPDE Gas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 yang dicap dan stemple basah;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 19 tanggal 28 Juni 2009 tentang Peningkatan Modal dan Konversi Hutang Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan saham yang dicap dan stemple basah;
27. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 05 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Perubahan Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PT. PDPDE Gas yang dicap dan stemple basah;

28. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Perubahan Pengurus yang dicap dan stemple basah;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 14 tanggal 26 Agustus 2013 trntang Perubahan Tempat Kedudukan yang dicap dan stemple basah;
30. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pengalihan Saham yang dicap dan stemple basah;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
33. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Perubahan Direksi yang dicap dan stemple basah;
34. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang Perubahan Direksi dan JKomisaris yang dicap dan stemple basah;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan Pemegang Saham dan Penambahan Pasal 14 yang dicap dan stemple basah;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 12 Mei 2017 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 31 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 32 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah
39. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 03 April 2018 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
40. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 18 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah;
41. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 02 tanggal 03 Juli 2019 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 05 Pebruari 2020 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah;
44. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Perubahan Pasal 3 Anggaran

Halaman 583 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar yang dicap dan stemple basah.

45. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 19 April 2021 tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.
46. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PT. Panji Raya Alamindo Nomor 18 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Jual Beli Saham antara Panji Raya Alamindo dan PT. DKLN yang dicap dan stemple basah.

S.S.

11. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
12. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001
13. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
14. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
15. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
16. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
17. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010
18. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
19. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
20. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

T.

- T. 1. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH;
2. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan

Halaman 584 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH;

3. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 34 Tanggal 31 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Hj. TRINING ARISWATI, SH;
4. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE GAS Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH;
5. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH;
6. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 15 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH;
7. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.

U.

- U9. 1 (satu) lembar fotokopi rekapitulasi Target dan Realisasi PD. Tambang dan Energi / PT. Sumsel Energi Gemilang Periode Tahun 2012-2019.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 beserta STS.
11. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 beserta STS.
12. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 beserta STS.
13. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kekurangan PAD Tahun Buku 2013 beserta STS.
14. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 beserta STS.
15. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 beserta STS.
16. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Klarifikasi Target PAD 2018 dan 2019 PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.

V.

- V.4. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0675978-6 periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
5. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
6. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- W18. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009;
19. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010;
20. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/2574/IV/2015 tanggal 14 September 2015 kepada Direktur PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2014;
21. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0931/IV/2018 tanggal 24 April 2018 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2017, dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1310/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2018;
22. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1961/IV/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal ; laporan keuangan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh akuntan Publik dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 1709/510/IV/2013 tanggal 19 -7-2013 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal ; laporan keuangan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh akuntan Publik;
23. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0474/IV/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal : persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun buku per 31 Desember 2013;
24. Beberapa Dokumen surat Gubernur Sumatera Selatan nomor: 900/2833/IV/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal; Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja PDPDE kepada Dirut PDPDE Sumsel 2010 sampai dengan 2018;
25. 1 bendel Rencana kerja dan anggaran perusahaan 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) tanggal 24 September 2019;
26. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011;
27. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
28. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013;
29. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
30. 1 bendel dokumen PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019;
31. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014;
32. 1 bendel dokumen Laporan Auditor Independen PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
33. 1 bendel dokumen Laporan keuangan PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
34. 1 bendel rekapitulasi Target dan realisasi PDPDE/ PT Sumsel Energi Gemilang periode 2012 – 2019.
- X.**
- X 12. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 410/KPTS/SIUP-PB/2008 Tentang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pertambangan Dan Energi Pd Perusahaan Daerah Tanggal 15 Agustus 2008;

Halaman 586 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy NPWP Nomor: 02.202.617.3-308.000 PD Pertambangan Dan Energi;
14. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 239/KPTS/SIUP-PB/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepada “ Pertambangan Dan Energi “ PD Nama Pemilik/Penanggung Jawab: Ir.H.Djanoeir Moenier;
15. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor 3999 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Kepada Pd Pertambangan Dan Energi Memberikan Izin Usaha Kepada Saudara Ir.H.Djanoer Moenir;
16. Foto copy Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT Mitra Energi Buana Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Perjanjian Jual Beli Gas (Perjanjian) Nomor Penjual: 048/MEB/II/2010 dan Nomor Pembeli: 03-PJBG/PDPDE/MEB/II/2020 Tanggal 17 Pebruari 2010;
17. Asli Pokok Pokok Perjanjian Pengalihan Saham Antara Pt Pertamina Gas Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Nomor Pertagas: 050/PG0000/2010-S0, Nomor PDPDE:-7-NK/PDPDE.PG/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;
18. Asli Surat Dari Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Nomor: 120/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Untuk Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Teguran;
19. Asli Surat Dari BP Migas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang Nomor: Man-J/10-1015 Tanggal 11 November 2010 yang ditujukan kepada Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE;
20. Asli Nota Kesepahaman Tentang Pengelolaan Lapangan Minyak Dan Gas Bumi Ramba-Sumatera Selatan Tanggal 6 Desember 2010 Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Dan PT. Duta Firza;
21. Asli Surat Dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor: 0254/Bp00000/2010/S2 Tangal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok Pokok Perjanjian (HOA) Penjualan Gas Dari Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Ke PDPDE, asli Surat dari Pertamina – Talisman Jambi Merang Ref. No: MAN-J/10-0575 Tangal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Dirut PDPDE Sumsel, dan asli Head Of Agreement Of Gas Sales Agreement By And Between PT. Pertamina Huku Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited, And PDPDE Prov. Sumsel JOB Ref. No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref. No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2020 Tanggal 20 Mei 2010;
22. Foto copy Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT. PDPDE GAS Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua:007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010;
12. Foto copy Surat Dari BP MIGAS Pertamina-Talisman Jambi Merang Ref. No:Man-J/10-0024 Tanggal 12 Januari 2011 yang

Halaman 587 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dirut Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi(PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas;

13. Foto copy Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang (PT SEG);
 14. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi;
 15. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pembentukan Badan Hukum PDPDE Menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang;
 16. Foto copy Amandemen II Atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Antara PT Pertamina Gas Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (Untuk Area Sumatera Bagian Selatan) Nomor Transporter : 070/PG0000/2013-SO, Nomor Shipper: 031/PDPDE.PERTAGAS/2013 Tanggal 25 Nopember 2013;
 17. Laporan Kinerja Per 31 Maret 2018 dari PD Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Y.**
- Y 1**
- 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008.
 2. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/P Tahun 2013 Tanggal 4 November 2013.
 3. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2008.
 4. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2013.
- Z.**
- Z 1.**
- 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi Sumatera selatan nomor: 7 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000.
 2. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi Sumatera selatan nomor: 37 tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001.
 3. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Konsultan (PT PDPDE Konsultan) nomor 06 tanggal 23 November 2005.
 4. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT PDPDE Hilir) nomor 34 tanggal 19 Januari 2009.
 5. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Pirantinus Energi Persada nomor 218 tanggal 19 Mei 2009.
 6. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang nomor. 14 tanggal 15 Juli 2019.
 7. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan risalah rapat umum

Halaman 588 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham luar biasa PT Sumsel Energi Gemilang nomor.21 Tanggal 25 Juni 2020.

8. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang tanggal 7 Agustus 2019.

AA.

- AA. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor.439/KPTS/IV/2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 290/KPTS/IV/2013, Tanggal 31 Desember 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 238/KPTS/IV/2014 Tanggal 31 Desember 2013, tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2017.
5. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 312/KPTS/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020.

BB.

- BB. 1(satu) set Print Out Daftar Rekap Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan PDPDE Tahun 2010-2020;
2. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2010.
3. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2011.
4. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2012.
5. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2013.
6. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2014.
7. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel

Halaman 589 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2015.

8. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2016.

9. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2017.

10.1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2018.

11.1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2019.

11.1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2020.

BE.1

6. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMMEI 359031061327245/01

BE

7. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan 087877705423

8. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan 087776162707

9. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold

10. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.

BE.2

BE. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number : F4 GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI 3594590830 77783)

4. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

BE. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass : Syantik 212;

BE.3

6. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2;

7. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836;

8. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977

Halaman 590 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor handphone 0811880258.

BE4.

BE1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan nomor handphone 08119771709.

BE.5

BE10. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B75 MTM ; 90B7004TID S/N : R300BQRV.

11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI slot 2 : 357944090472133.

12. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard;

13. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861;

14. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100 CE0980 ZTE Corporation;

15. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan tali berwarna hitam;

16. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau;

17. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih

18. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.

Dengan rincian sebagai berikut:

ROMAWI I. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN Huruf A Nomor 1 berupa : Laporan Keuangan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. (legalisir sesuai dengan aslinya) sampai dengan

Huruf BE.5 angka 6 berupa : 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

ROMAWI II. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ICA SALEH SADIKIN Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Nomor: 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, Customer: Endang Budiansih, Unit: Apartemen Lantai 11 No. 12, Notaris Dr. Erny Kencanawati, SH.,MH. Notaris Kota Bandung; Sampai dengan

Halaman 591 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf T angka 2 berupa : Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

ROMAWI III. DISITA DALAM PERKARA AN. AHMAD YANIARSYAH HASAN

Huruf A Nomor 1 berupa : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota, type Voxy 2.0 A/T, tahun pembuatan: 2019, nomor rangka: JT7X2RB80K7015982, nomor mesin: 3ZR0D75369, warna: putih metalik, nomor polisi B-1750-WUN beserta kunci kontak

Sampai dengan

Huruf D Nomor 2 berupa : 1 (satu) unit Bangunan di Rusun Hunian dan Non Hunian Lippo Sudirman Condominium Jln. Garnisun Dalam Rt.10/01 No. 8 No. C6C (3), Lt. 6, Blok C, sesuai Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMRS) No. 603/IV/C luas bangunan 92 m2 (Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta dengan pemegang hak a.n. PT PALSIN ANUGERAH ADIL berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 56/2013, tanggal 13/12/2013, yang dibuat oleh Ny. Suryati Moerwibowo, S.H., selaku PPAT.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin;

Angka 1.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan X-Tra CIMB Niaga atas nama Dra. Majidah Bahar dengan nomor rekening : 302-01-00370-18-4 Cabang CIMB Jakarta Pamulang;

Sampai dengan

Angka 18.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reny Merawati NIK: 32710469056800007

I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A dengan No. Pol. B 300 LPE warna Putih Mutiara dengan nama pemilik : Radzkani Ramadhan
2. 2(dua) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi dengan No. Pol. B 300 LPE
3. 1(satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19372872.C Tanggal 14 September 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawi No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641.
4. 1(satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 1569319, untuk kendaraan bermotor dengan No. B 300 LPE, atas nama : Radzkani Ramadhan, alamat : Jl. H. Nawi No.36, RT.7/2, Cilandak, Jakarta Selatan, Merk : Mitsubishi Type PJSP24LDAKAR-H4X48A, Model : Jeep L.C. HDTP, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MK2KSWPNUKJ001085, dan No. Mesin : 4NI5UGC9641
5. 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT dengan No. Pol. B 1881 SFC warna Hitam Metalik dengan nama pemilik : Muhammad Darmansyah
6. 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Toyota Innova dengan No. Pol B 1881 SFC
7. 1(satu) lembar ASLI Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19005683.C Tanggal 22 Juli 2020 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin : 1TRA620685.
8. 1(satu) lembar ASLI Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C0575067 untuk kendaraan bermotor dengan No. B 1881 SFC, atas nama : Muhammad Darmansyah, alamat : Jl. Kemang Selatan XII No.1, RT.5/1, Jakarta Selatan, Merk Toyota Innova Venturer 2.0 AT, Tahun Pembuatan : 2019, dengan No. Rangka : MHFAW8EM1K0213060 dan No. Mesin : 1TRA620685

II.

- II. 1. 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Type Vellfire ZG 2.5 AT dengan No. Pol. B 818 SFC warna Putih dengan nama pemilik Muddai Madang.
- 2 1(satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Vellfire dengan No



Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

ROMAWI IV. DISITA DALAM PERKARA AN. TERDAKWA MUDDAI MADANG

Barang bukti dokumen pada :

Huruf a.1 berupa : 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174061004121006 An. Nama Kepala Keluarga : Muddai Madang
Sampai dengan

Huruf r.2 berupa : 1(satu) set print out Formulir Pembukaan Rekening Nasabah An. Muddai Madang beserta Mutasi Rekening Bank BNI dengan No. Rek. 7914081959 atas nama Muddai Madang Periode Tanggal 31/07/2013 s.d. 05/11/2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Muddai Madang.

1.

1.	1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00610 seluas 14.705 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
	2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00607 seluas 18.215 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
	3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00614 seluas 8.881 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
	4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00611 seluas 13.446 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
	5. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00606 seluas 19.043 M ² yang terletak di Kel. Sungai Dua, Kec. Rambutan, Kota Banyuasin dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.
2.	
2.	1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak



	<p>Milik No. 00180 seluas 1.999 M² yang terletak di Kel. Triyoso Lama, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03200 seluas 9.975 M² yang terletak di Kel. Kota Baru Selatan, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemegang Hak An. Muddai Madang.</p> <p>3.</p>
3.1.	<p>1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03010 seluas 895 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.</p> <p>2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00465 seluas 7.521 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita</p> <p>3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00153 seluas 921 M² yang terletak di Kel. Dua Ilir, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Ratna Yulita.</p> <p>4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00466 seluas 7.364 M² yang terletak di Kel. Sukamulya, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.</p> <p>5. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03009 seluas 729 M² yang terletak di Kel. Lima Belas Ulu, Kota Palembang dengan Pemegang Hak An. Dra. Ratna Yulita.</p>

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

ROMAWI IV. Disita dalam perkara an. Alex Noerdin barang bukti dokumen pada nomor 1 s/d 2 *digunakan dalam perkara an. Alex Noerdin* Nomor 1 angka 1 berupa : 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang DPR dengan Nomor Rekening : 122-00-1023355-2 atas nama Alex Noerdin Periode 02 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Sampai dengan

Nomor 2 angka 7 berupa : 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1130090919501 atas nama Alex Noerdin Periode 15 Desember 2020 sampai dengan 30 April 2021.



Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin

B. BARANG BUKTI DALAM PERKARA PEMBANGUNAN MESJID SRIWIJAYA

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHA/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai

Halaman 596 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
 14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
 15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
 16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
 17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
 18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
 19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
 20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
 21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
 22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
 23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
 24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
 26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 597 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build

Halaman 598 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 599 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 600 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA,

Halaman 601 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
 92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK

Halaman 602 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7

Halaman 603 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
- Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 604 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2013

Halaman 605 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic



- Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari

Halaman 608 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 609 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya

Halaman 610 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah Yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik

Halaman 611 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015

Halaman 612 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan

Halaman 613 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 614 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/II/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Pertama Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan

Halaman 615 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
 252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
 253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
 254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
 255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
 256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
 257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
 258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
 259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
 260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
 261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
 262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
 263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
 264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
 265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
 266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
 267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
 268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
 269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;

Halaman 616 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47

Halaman 617 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid

Halaman 618 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 618



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;

Halaman 619 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/ BPKAD-

Halaman 620 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;

Halaman 621 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor: 900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 Desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm \pm$ 9 Hektar di kawasan Jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/II/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 Desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018

Halaman 622 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susunan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-

Halaman 623 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD-V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;

Halaman 624 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lia puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No.

Halaman 625 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017
Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang
untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor :
121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21
Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017
tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota
Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah)
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor :
158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan
Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera
Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur
Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16
April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel
kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian
Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai
susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari
biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember
2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah,
S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus
2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal
27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov.
Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon
Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015
tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya
Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya
hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM :
00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera
Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan
Wakaf Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor
78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan
Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17
Januari 2017;

Halaman 626 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinaan Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;

Halaman 627 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan

Halaman 628 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakarta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero).

Halaman 629 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 630 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/II/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);

Halaman 631 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya : Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019 Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020

Halaman 632 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013.
Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 633 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;

Halaman 634 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016

Halaman 635 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Halaman 636 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;

Halaman 637 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;

Halaman 638 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;

Halaman 639 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas

Halaman 640 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan

Halaman 641 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 642 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15

Halaman 643 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.

Halaman 644 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HUTAMA KARYA;

713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sri
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasaana Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid

Halaman 645 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April

Halaman 646 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC

Halaman 647 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian

Halaman 648 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei

Halaman 649 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;

Halaman 650 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni

Halaman 651 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari

Halaman 652 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 653 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 654 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah

Halaman 655 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 656 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 657 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid

Halaman 658 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni

Halaman 659 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR

Halaman 660 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera

Halaman 661 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)

Halaman 662 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti No. 1 berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang

Halaman 663 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli).

Sampai dengan

Barang bukti No. 591 berupa :1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara.

Barang bukti Kendaraan Bermotor :

Barang bukti Nomor :

592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF

Barang bukti Nomor :

595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
- 599 Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994

Halaman 665 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

Halaman 666 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;

762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik



yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti Nomor :

869 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputus dalam perkara an. Terdakwa Eddy Hermanto dan Terdakwa Syarifuddin MF;

Barang bukti No. 871 berupa : 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015

Sampai dengan

Barang bukti No. 1009 berupa : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Alex Noerdin.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUDDAI MADANG dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H., M.H., Kemal Tampubolon, S.H., M.H., Hakim Tinggi Palembang, Bambang Guritno, Bc-HK, S.H., Abdulah Subur, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim, Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syamsul Ali, S.H., M.H.

H. Ade Komarudin, SH., MHum,

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Bambang Guritno, Bc-HK, S.H.

Halaman 669 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah Subur.S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa,S.H.

Halaman 670 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 670